



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2022 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Deputy Bidang Perekonomian sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet berkewajiban untuk menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja yang telah dilakukan.



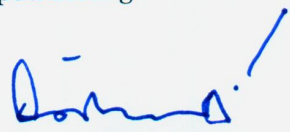
Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian tersebut pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian dari perwujudan visi, misi, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian, dijabarkan dalam bentuk rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut serta realisasi anggaran serta menguraikan keberhasilan maupun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja, Deputy Bidang Perekonomian berharap saran dan masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Deputy Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2023

Deputy Bidang Perekonomian

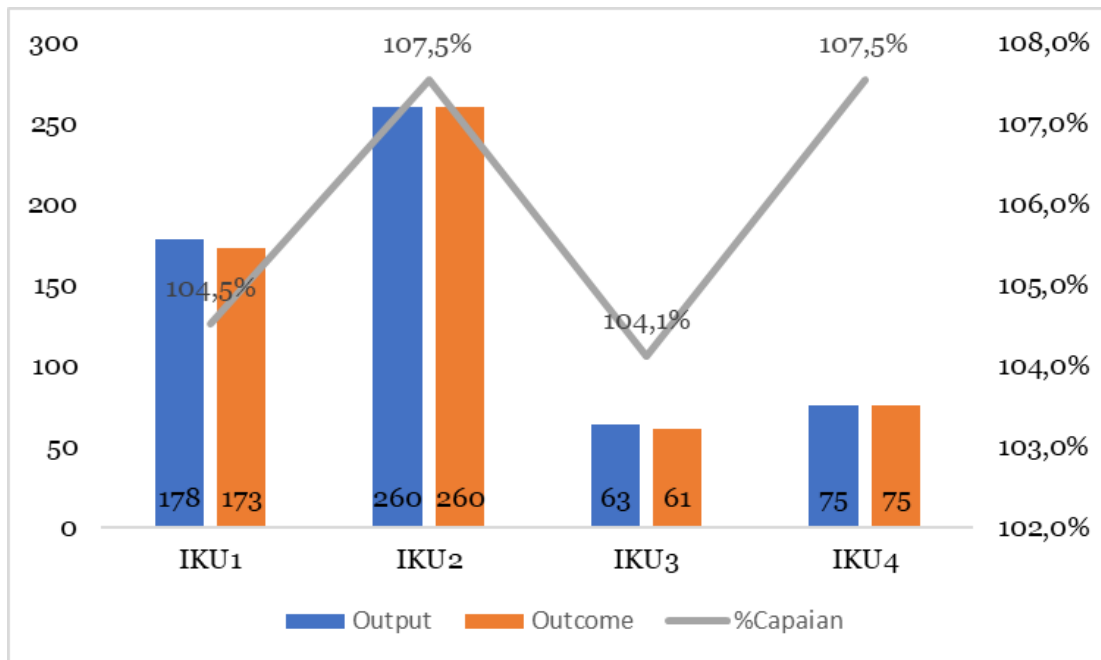

Satya Bhakti Parikesit

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan capaian Deputy Bidang Perekonomian yang disusun dalam rangka evaluasi dan pelaporan atas realisasi dan capaian kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian.

Dalam rangka memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian, pada tahun 2022 **Deputy Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan menghasilkan 576 rekomendasi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2022 dengan target 93 % adalah 106.2%.**

Capaian kinerja tersebut didukung anggaran sebesar **Rp. 3.621.323.000,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.609.641.242,-** atau sebesar **99,677%.**



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian per indikator Deputy Bidang Perekonomian lebih dari target 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet, dan rekomendasi tersebut juga telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* Sekretariat Kabinet.

Deputy Bidang Perekonomian juga **mencapai Hasil Penilaian SAKIP 87,40 dari target 80,47** serta mencapai **Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB yaitu 36,17 dari target 35,13.**

Dalam pelaksanaannya, pencapaian *outcome* Deputy Bidang Perekonomian menghadapi beberapa kendala yaitu terbatasnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan peta risiko serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* dan meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan melalui pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan, melakukan rapat internal bagi seluruh pejabat/pegawai Kedeputian Bidang Perekonomian secara rutin setiap bulan, serta pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA) yang telah dikembangkan secara internal sejak akhir tahun 2019 dan telah diimplementasikan sejak tahun 2020.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Perekonomian	1
C. Gambaran Aspek Strategis.....	9
D. Tantangan dan Peluang	10
E. <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja pada SIKT	12
Bab II Perencanaan Kinerja	14
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	14
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	15
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama.....	23
D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Kinerja	27
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 s.d Tahun 2022	29
C. Gambaran Kegiatan	30
D. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian.....	146
E. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reuiu Inspektorat.....	149
F. Persentase Penyerapan Anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian	152
G. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	153
H. Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA)	160
I. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022	162
Bab IV Penutup	186
A. Dinamika Capaian Kinerja.....	186
B. Langkah-langkah Strategis	187
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Capaian Kinerja.....	13
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	18
Tabel 2.2 Rincian Anggaran Berdasarkan Pagu Alokasi Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022.....	21
Tabel 2.3 Data <i>Refocussing</i> Anggaran dan Optimalisasi Anggaran Tahun 2022	22
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	24
Tabel 2.5 Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	26
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2 Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	146
Tabel 3.3 Rincian Penilaian Manajemen Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	146
Tabel 3.4 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai PMPRB Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	148
Tabel 3.5 Perubahan Nilai pada LKE PMPRB Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022 .	149
Tabel 3.6 Nilai PMPRB Unit Kerja Tahun 2022 Setelah Reviu Inspektorat	150
Tabel 3.7 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai Komponen Pengungkit PMPRB Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	152
Tabel 3.8 Pencadangan Anggaran (<i>Automatic Adjustment</i>) Deputy Bidang Perekonomian TA 2022.....	154
Tabel 3.9 Usulan Pembukaan Cadangan Anggaran	155
Tabel 3.10 Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	156
Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	157
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2019-2022.....	158
Tabel 3.13 Pelaksanaan Anggaran dan Ketercapaian Output & Outcome Tahun 2022.....	159
Tabel 3.14 Capaian Outcome Program Tahun 2022	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambaran Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian.....	2
Gambar 1.2	Gambaran Tugas Deputy Bidang Perekonomian	2
Gambar 1.3	Gambaran Fungsi Deputy Bidang Perekonomian	3
Gambar 1.4	Gambaran Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020	3
Gambar 1.5	Gambaran Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022.....	4
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian	7
Gambar 1.7	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.8	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	8
Gambar 1.9	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Gambar 1.10	Analisis SWOT Deputy Bidang Perekonomian	10
Gambar 1.11	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022.....	13
Gambar 2.1	Gambaran Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian	14
Gambar 2.2	Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Perekonomian	15
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	28
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Triwulan IV Tahun 2020 s.d Tahun 2022	29
Gambar 3.3	Perbandingan Nilai LHE SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2020-Tahun 2021	148
Gambar 3.4	Perbandingan Nilai PMPRB Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020 s.d Tahun 2022.....	151
Gambar 3.5	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022	153
Gambar 3.6	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022.....	158
Gambar 3.7	Tindak Lanjut SISUKA Per Asdep Tahun 2022.....	161
Gambar 3.8	Perbandingan Kementerian/Lembaga yang mengisi Kuesioner	162
Gambar 3.9	Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir	163
Gambar 3.10	Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan	

	oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian	164
Gambar 3.11	Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.....	165
Gambar 3.12	Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian	166
Gambar 3.13	Tingkat Kepuasan terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian	167
Gambar 3.14	Tingkat Kepuasan terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian	168
Gambar 3.15	Kementerian/Lembaga pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir.....	169
Gambar 3.16	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.....	170
Gambar 3.17	Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.....	171
Gambar 3.18	Tingkat Kepuasan kesesuaian substansi rencana kebijakanKementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga	172
Gambar 3.19	Tingkat Kepuasan terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang	

Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.....	173
Gambar 3.20 Tingkat Kepuasan terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet	174
Gambar 3.21 Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.....	175
Gambar 3.22 Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian	176
Gambar 3.23 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian	177
Gambar 3.24 Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian	178
Gambar 3.25 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian	179
Gambar 3.26 Tingkat Kepuasan terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.....	180
Gambar 3.27 Kementerian/Lembaga yang pernah pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian	181
Gambar 3.28 Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.....	182

Gambar 3.29 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.....	183
Gambar 3.30 Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.....	184
Gambar 3.31 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian	185

Bab I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang**
- B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Perekonomian**
- C. Gambaran Aspek Strategis**
- D. Tantangan dan Peluang**
- E. *Dashboard* Capaian Kinerja pada SIKT**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet juga diatur melalui Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja ini juga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang berkelanjutan.

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi sesuai dengan Perseskab tersebut, efektif berjalan sejak 4 Februari 2022.

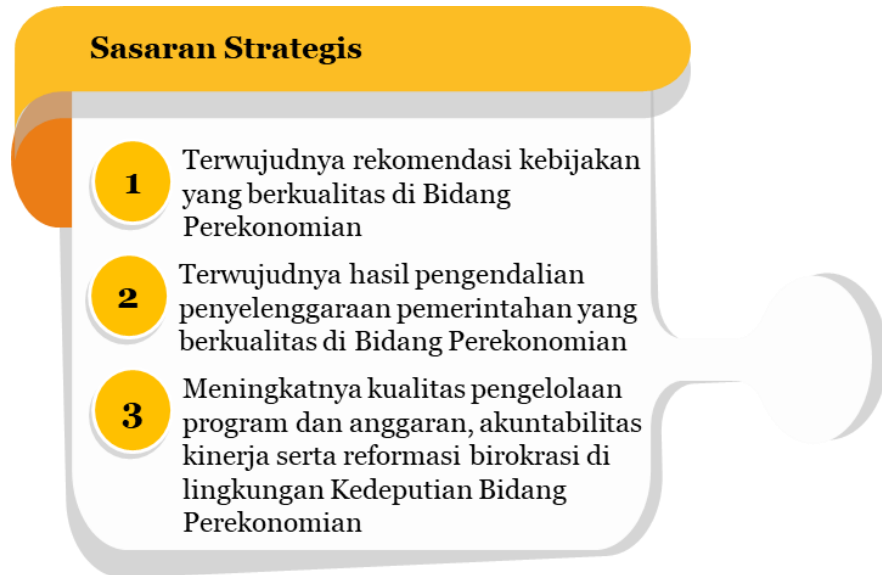
B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Perekonomian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, serta Rencana Strategis Sekretariat Kabinet

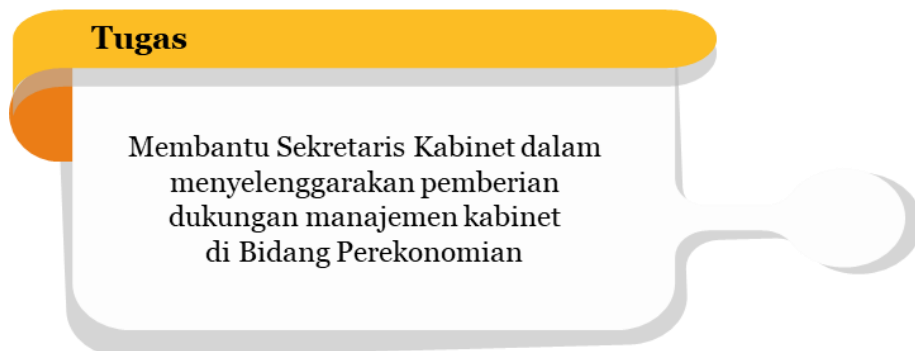
Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Adapun gambaran sasaran strategis, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Deputy Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Gambaran Sasaran Strategis
Deputi Bidang Perekonomian



Gambar 1.2
Gambaran Tugas
Deputi Bidang Perekonomian



Gambar 1.3 Gambaran Fungsi Deputi Bidang Perekonomian

- 1 Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- 2 Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
- 3 Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- 4 Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5 Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
- 6 Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian;
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Gambar 1.4 Gambaran Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020

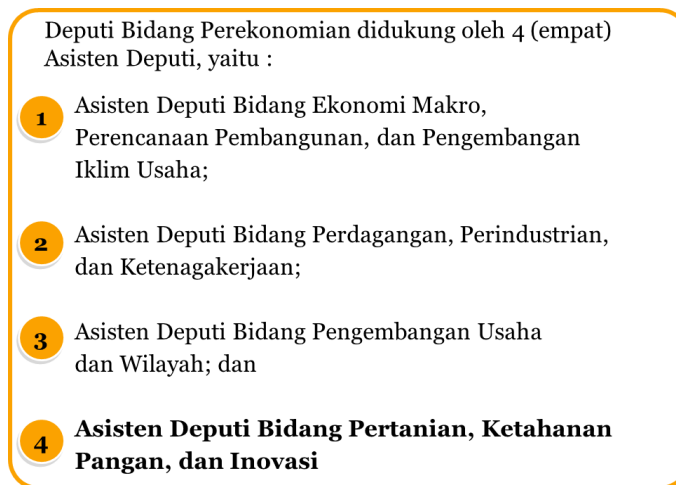
Deputi Bidang Perekonomian didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu :

- 1 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha;
- 2 Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- 3 Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
- 4 **Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur kelembagaan riset dan teknologi yang semula Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek), dan selanjutnya BRIN menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden, maka nomenklatur riset dan teknologi dilakukan peralihan ke Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan nomenklatur inovasi tetap berada di Deputi Bidang Perekonomian di bawah unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur pada unit kerja dimaksud menjadi Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi, melalui Perseskab Nomor 2 Tahun 2022.

Gambar 1.5
Gambaran Struktur Organisasi
Deputi Bidang Perekonomian
Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022



Gambaran umum nomenklatur dan tugas 4 (empat) Asisten Deputi pada Deputi Bidang Perekonomian tersebut, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

2. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

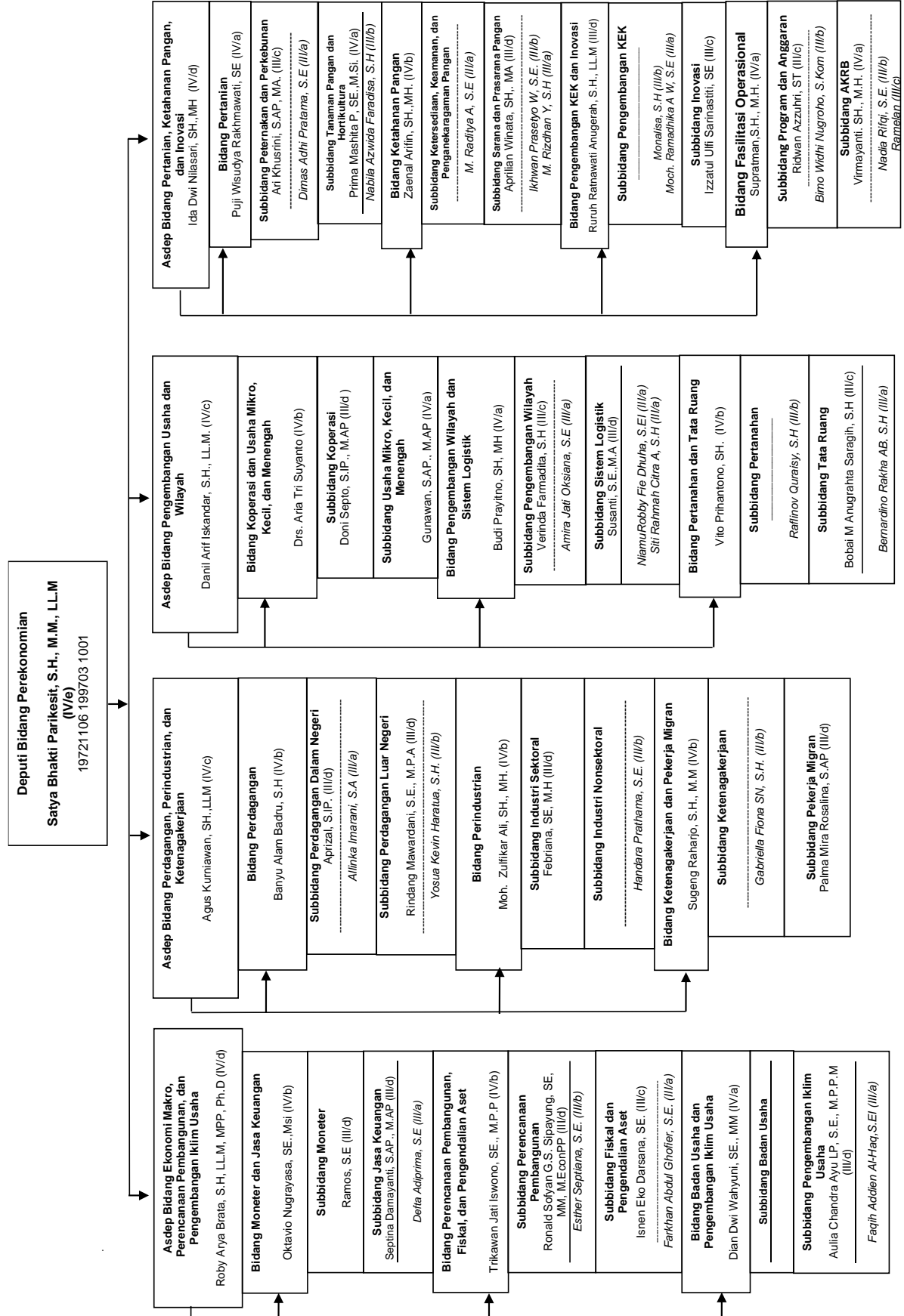
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

4. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.

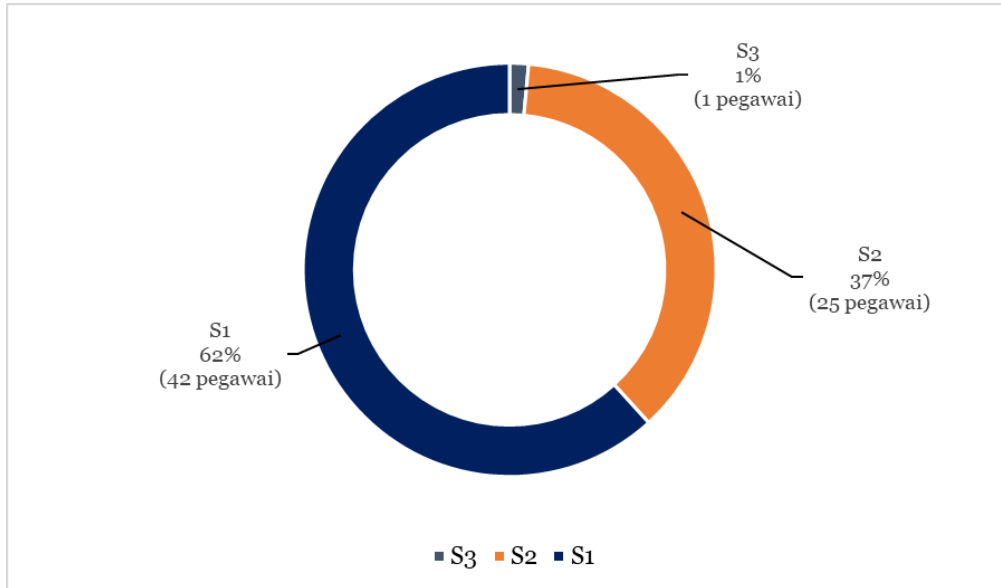
Gambaran struktur organisasi Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

Gambar 1.6
Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian Sesuai
Perseskab Nomor 2 Tahun 2022

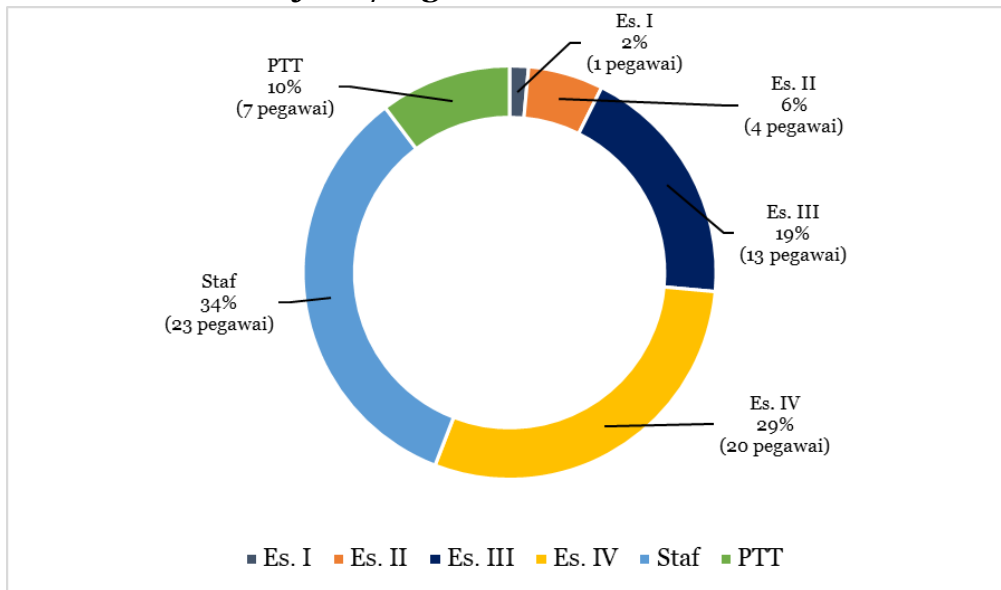


Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian yaitu 68 (enam puluh delapan) orang terdiri dari 61 (enam puluh satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil dan 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun formasi pejabat/pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut yaitu:

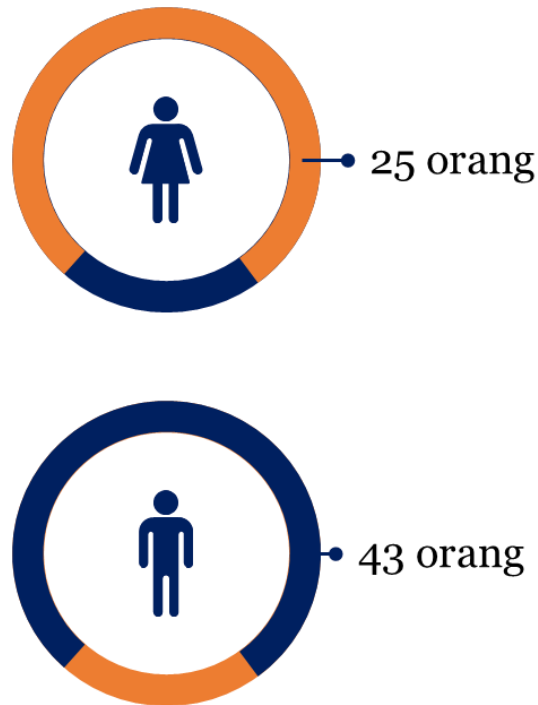
Gambar 1.7
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.8
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.9
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja (nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam

keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian, penyampaian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Perekonomian, penyampaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian serta penyampaian rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian.

D. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya menghadapi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputy Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.10
Analisis SWOT Deputy Bidang Perekonomian



Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam

memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait izin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya *debotlenecking* dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/ Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi (dan *Road Map*) Sektor, antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.
3. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan/atau lintas sektoral wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui Sekretariat Kabinet. Hal ini semakin memperkuat peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam rangka membantu Presiden dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.
4. Membangun *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga terkait.

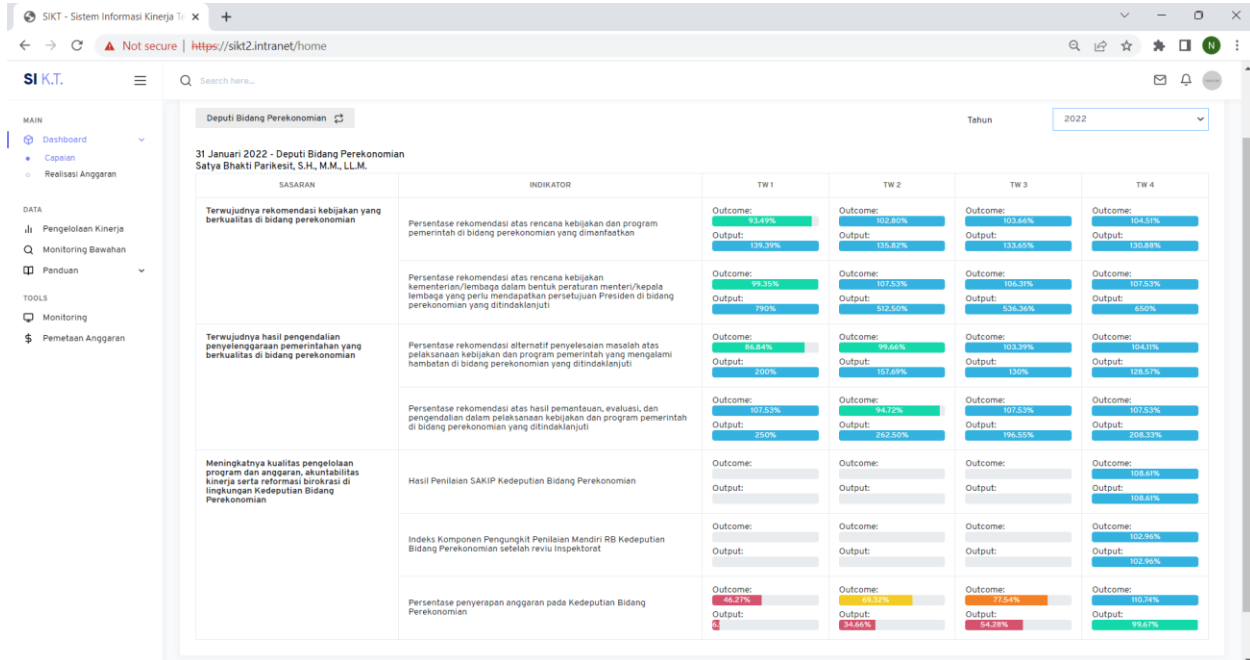
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop*/*Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.
6. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dengan membangun pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas baik substansi maupun administrasi; dan sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, PK dan SKP).
7. Meningkatkan kemanfaatan sistem internal yang telah dibangun melalui pelaksanaan survei guna mengetahui kebutuhan *user* terhadap sistem FO Econn.

E. Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT

Sekretariat Kabinet memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang dapat diakses oleh seluruh pejabat/pegawai guna dilakukan penginputan realisasi kinerja beserta data dukung setiap triwulan. SIKT juga dimanfaatkan sebagai *tools* dalam pengendalian dan evaluasi realisasi kinerja oleh pimpinan.

Tampilan *dashboard* SIKT Deputi Bidang Perekonomian tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.11
Dashboards Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian
Tahun 2022



Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian guna mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Interval	Interpretasi
1	≥100%	Memuaskan
2	85%-<100%	Sangat baik
3	70%-<85%	Baik
4	55%-<70%	Cukup
5	≤55%	Kurang

Informasi pada gambar 1.9 menunjukkan bahwa **capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian mendapat hasil memuaskan pada seluruh IKK.**

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2022**
- B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja**
- C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama**
- D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama**

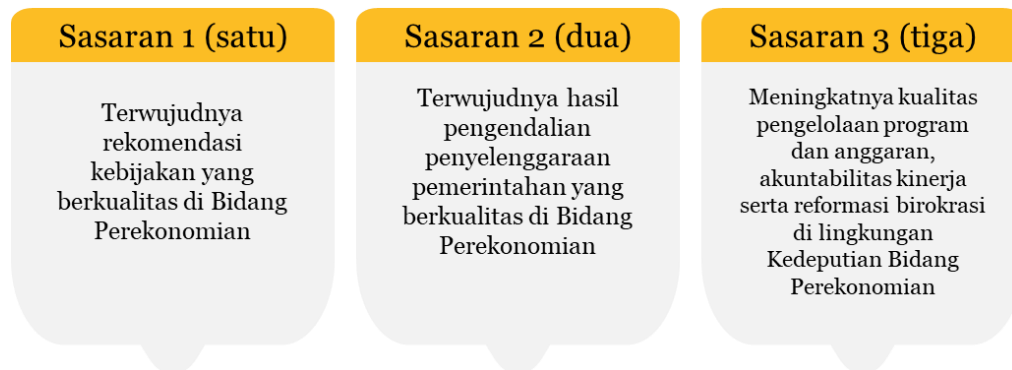
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun perencanaan tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, serta Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

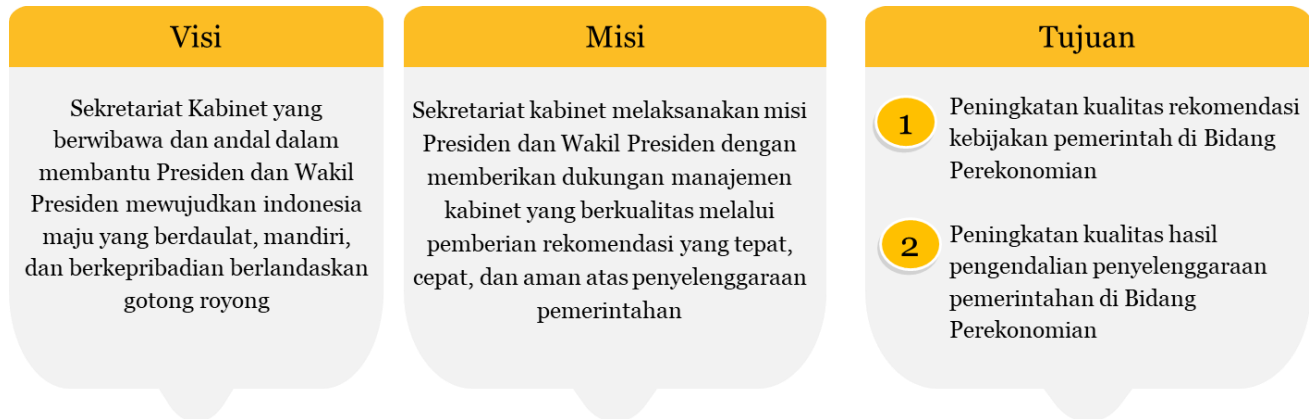
Dalam rangka memberikan gambaran lebih jelas tentang kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022, berikut penjelasan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. Pada tahun 2022, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis guna mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Gambaran Sasaran Strategis
Deputi Bidang Perekonomian



Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Perekonomian mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 2.2
Visi, Misi dan Tujuan
Deputi Bidang Perekonomian



B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, penyusunan perjanjian kinerja di Sekretariat Kabinet memanfaatkan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu).

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Perekonomian menambahkan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja, yang sebelumnya hanya 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sebagai wujud komitmen dan peran aktif dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya pada program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian. Dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Strategis tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;
5. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian;
6. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah revidi Inspektorat;
7. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian, dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang existing/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet.

Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas.

Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum.

Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Hasil penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat guna mengetahui kualitas pelaksanaan SAKIP Deputi Bidang Perekonomian serta mendorong implementasi SAKIP dan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet.

Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reviu Inspektorat merupakan hasil penilaian atas komponen pengungkit yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet (PMPRB). Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan internal Kedeputian Bidang Perekonomian, memonitor pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri periode sebelumnya, serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian.

Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Deputi Bidang Perekonomian guna memastikan pelaksanaan program dan anggaran Deputi Bidang Perekonomian sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

Berdasarkan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang telah diubah dan disesuaikan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian
Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	93 Persen
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	5. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Perekonomian	A (80,47)
	6. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Perekonomian setelah reuiu Inspektorat	35,13
	7. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Perekonomian	90 Persen

Berikut pengkategorian untuk masing-masing indikator kinerja:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori dimanfaatkan, apabila:
 - a) Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet.
 - b) Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
 - c) Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
 - d) Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti, mencakup hal:
 - a) Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.
 - b) Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti apabila rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.
5. Hasil evaluasi Inspektorat atas implementasi SAKIP yang dikeluarkan di tahun berjalan pada Deputi Bidang Perekonomian dengan menggunakan instrumen LKE yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat. Kategori nilai SAKIP yang ditargetkan yaitu A (80,47).
6. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah revidi Inspektorat yaitu 35,13.
7. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian dalam 1 (satu) tahun sebesar 90 Persen, sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022, yang mengukur kualitas realisasi belanja berdasarkan rata-rata capaian target realisasi anggaran triwulanan.

Pada Tahun 2022 Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Pagu tersebut digunakan untuk menjalankan Tugas Fungsi Deputi Bidang Perekonomian yang terbagi menjadi 2 (dua) Program yaitu:

- **Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden** (Rp. 3.800.000.000,-), yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perekonomian; dan
 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian.Dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon II yang berada di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian
- **Program Dukungan Manajemen** (Rp. 200.000.000,-), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu “Penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah”, yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (Asdep yang membawahi Bidang Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian).

Adapun detail rincian anggaran berdasarkan Pagu Alokasi Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Anggaran Berdasarkan Pagu Alokasi
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

Unit Kerja	Pagu Awal
Asdep Ekon-1	900.000.000,00
6403	397.284.000,00
6404	502.716.000,00
Asdep Ekon-2	900.000.000,00
6403	492.760.000,00
6404	407.240.000,00
Asdep Ekon-3	900.000.000,00
6403	520.262.000,00
6404	379.738.000,00
Asdep Ekon-4	1.300.000.000,00
6403	403.981.000,00
6404	696.019.000,00
6400	200.000.000,00
TOTAL	4.000.000.000,00

Kebijakan *Automatic Adjustment*

Dalam tahun berjalan, terjadi perubahan dinamika kebijakan pemerintahan dimana pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S. 458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA

2022. Namun demikian, mengingat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian dalam mengawal beberapa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Arahkan Presiden, dimana pada saat implementasinya membutuhkan anggaran, Deputi Bidang Perekonomian mengajukan Usulan Pembukaan Pencadangan Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2022 di Lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian kepada Kementerian Keuangan. Oleh karena itu anggaran yang dapat digunakan oleh Kedepuitan Bidang Perekonomian dalam menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebesar 3.621.323.000, dengan rincian pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Data *refocusing* Anggaran dan Optimalisasi Anggaran
Tahun 2022

Unit Kerja	Pagu Awal	<i>Automatic Adjustment</i>	Pembukaan <i>Automatic Adjustment</i>	Pagu setelah Pembukaan <i>Automatic Adjustment</i>
Ekon-1	900.000.000,00	326.371.000,00	60.100.000,00	633.729.000,00
6403	397.284.000,00	129.392.000,00	55.000.000,00	322.892.000,00
6404	502.716.000,00	196.979.000,00	5.100.000,00	310.837.000,00
Ekon-2	900.000.000,00	287.382.000,00	287.382.000,00	900.000.000,00
6403	492.760.000,00	152.140.000,00	152.140.000,00	492.760.000,00
6404	407.240.000,00	135.242.000,00	135.242.000,00	407.240.000,00
Ekon-3	900.000.000,00	281.680.000,00	281.680.000,00	900.000.000,00
6403	520.262.000,00	156.424.000,00	156.424.000,00	520.262.000,00
6404	379.738.000,00	125.256.000,00	125.256.000,00	379.738.000,00
Ekon-4	1.300.000.000,00	449.298.000,00	336.892.000,00	1.187.594.000,00
6403	403.981.000,00	126.432.000,00	104.334.000,00	381.883.000,00
6404	696.019.000,00	250.141.000,00	232.558.000,00	678.436.000,00
6400	200.000.000,00	72.725.000,00	-	127.275.000,00
TOTAL	4.000.000.000,00	1.344.731.000,00	966.054.000,00	3.621.323.000,00

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 5 Tahun 2021), Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 dan selaras dengan Perjanjian Kinerja serta Manual Indikator Tahun 2022 yang telah disusun, IKU Deputy Bidang Perekonomian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan
	b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	d. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	e. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian
	f. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reuiu Inspektorat
	g. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian

D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur persentase pencapaian target tahun 2022 sesuai Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam Manual Indikator Kinerja, digunakan rumus perhitungan tiap Indikator sebagai berikut:

Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

a. IKU 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

b. IKU 2

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

1. Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian

a. IKU 1

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

b. IKU 2 : Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

2. Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian

a. IKU 1

Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian

Tabel 2.5
Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai	Interval	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

b. IKU 2

Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reuiu Inspektorat

Hasil penilaian atas komponen pengungkit yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet (PMPRB) yaitu 35,13

c. IKU 3

Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total anggaran}} \times 100\%$$

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja**
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 s.d Tahun 2022**
- C. Gambaran Kegiatan**
- D. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian**
- E. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reviu Inspektorat**
- F. Persentase Penyerapan Anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian**
- G. Realisasi Anggaran Tahun 2022**
- H. Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA)**
- I. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing perspektif dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022 dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan analisis menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

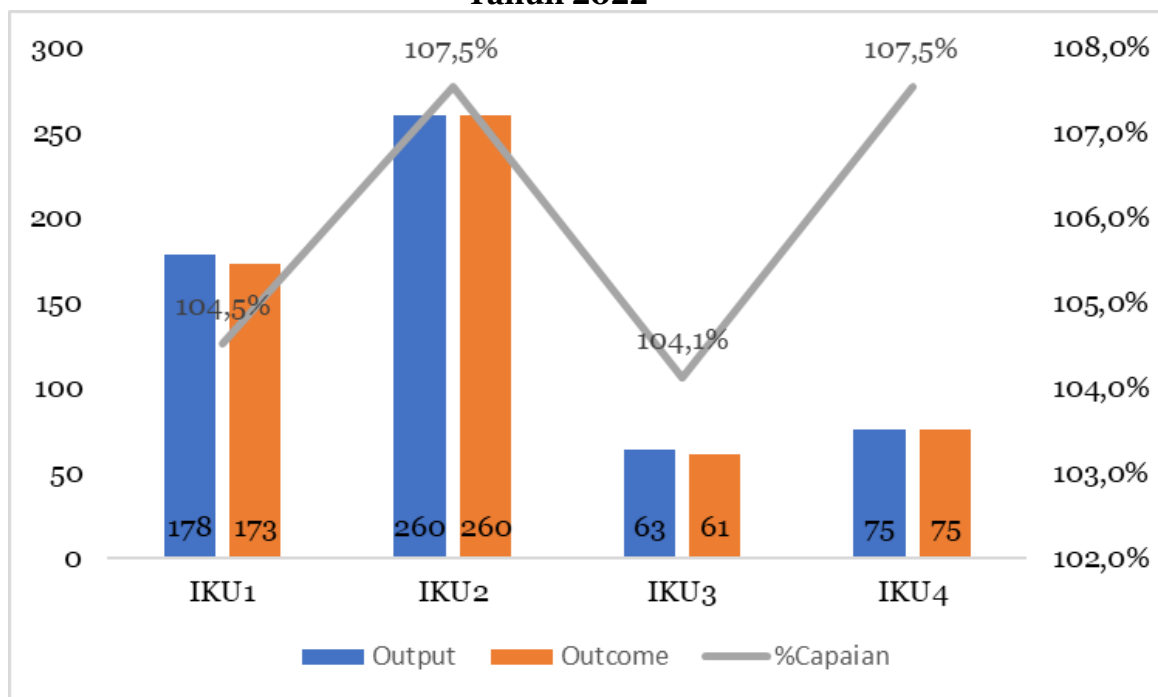
No	Interval	Interpretasi
1.	$\geq 100\%$	Memuaskan
2.	$85\% < 100\%$	Sangat baik
3.	$70\% < 85\%$	Baik
4.	$55\% < 70\%$	Cukup
5.	$\leq 55\%$	Kurang

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Perekonomian terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

A. Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Strategis yakni “terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perekonomian” dan “terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian” digunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Gambaran realisasi *output* dan *outcome* Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

Gambar 3.1
Realisasi Kinerja Deputi Bidang Perekonomian
Tahun 2022



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terdapat sebanyak 178 *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian, sedangkan *outcome* berjumlah 173 rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholders*, dengan demikian **persentase capaian kinerja IKU 1 dengan target 93 % adalah 104,5%**.

Sementara untuk *output* rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian ada sebanyak 260 rekomendasi yang seluruhnya ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, **dengan realisasi sebesar 100% dibandingkan target 93% maka IKU 2 juga mencapai target sebesar 107,5%**.

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terdapat 63 *output* rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian, sedangkan *outcome* berjumlah 61 rekomendasi yang ditindaklanjuti, **sehingga persentase capaian kinerja IKU 3 dengan target 93 % adalah 104,1%**.

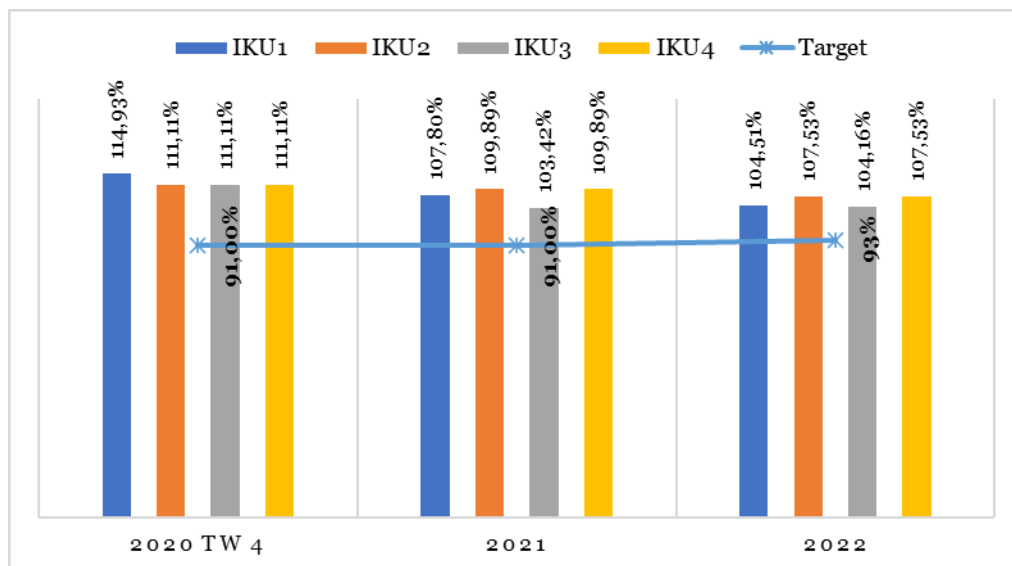
Sementara untuk *output* rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian ada sebanyak 75 rekomendasi yang sepenuhnya ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, **dengan realisasi sebesar 100% dibandingkan target 93% maka IKU 4 juga mencapai target sebesar 107,5%**.

Secara keseluruhan, maka **pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022 masuk dalam kategori memuaskan.**

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Dengan adanya restrukturisasi dalam rangka penyempurnaan tugas dan fungsi pada bulan Oktober Tahun 2020, sehingga IKK yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) disesuaikan menjadi 4 (empat) IKK, maka perbandingan capaian kinerja dimulai dari TW IV Tahun 2020 s. d Tahun 2022.

Gambar 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian
Triwulan IV Tahun 2020 s.d Tahun 2022



Berdasarkan gambar 3.2 di atas, **capaian Deputi Bidang Perekonomian dengan target 93% seluruhnya tercapai** dengan persentase capaian IKK 1 yaitu 104,51%, IKK 2 yaitu 107,53%, IKK 3 yaitu 104,16% dan IKK 4 yaitu 107, 53%. Capaian terlihat menurun dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya kenaikan target yaitu 91% menjadi 93% pada tahun 2022 selaras dengan target capaian di dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024. Deputi Bidang Perekonomian terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian. Dalam mencapai kategori memuaskan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Meningkatkan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/ instansi;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. Mengusulkan *capacity building* dan meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan melalui pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan;
5. Pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Melaksanakan rapat internal rutin setiap bulannya bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian demi menjaga keselarasan capaian kinerja.

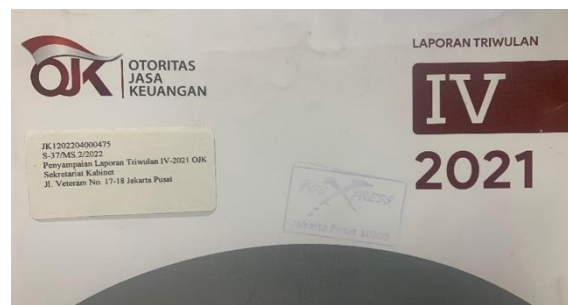
C. Gambaran Kegiatan

Sedangkan, gambaran kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

IKK 1 (rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan)

1. Laporan Triwulan IV Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

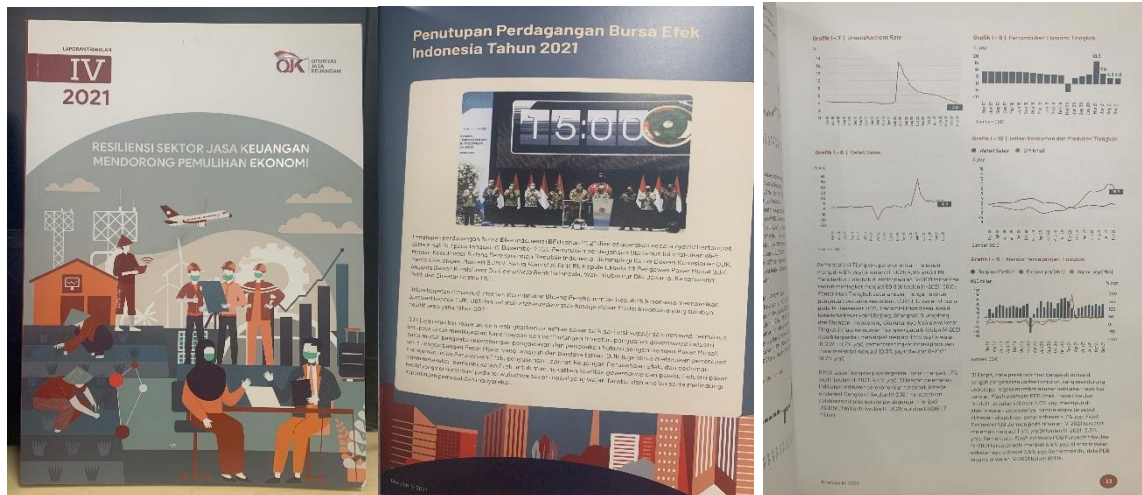
Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 38 ayat (2) mengatur bahwa OJK selaku lembaga independen diwajibkan untuk menyusun laporan, yang salah satunya ialah laporan triwulanan. Hal ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik sesuai dengan amanat dari UU yang sama. Laporan ini disampaikan oleh Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis OJK kepada segenap Menteri Kabinet Indonesia Maju/Pimpinan Lembaga Negara lainnya menyampaikan Laporan Triwulan IV Tahun 2021 melalui surat S-37/MS.2/2022 tertanggal 25 Maret 2022.



Penyampaian Dokumen *Hardcopy* Laporan Triwulan IV 2021 OJK

Sekretariat Kabinet dalam hal ini secara rutin mengkaji laporan triwulanan OJK tersebut. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait penyiapan rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan

bagi Presiden secara substansial, khususnya di bidang Jasa Keuangan. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha (Asdep Ekon-1) dalam hal ini akan menuangkan rekomendasi atas penyerapan materi dari laporan triwulanan tersebut dengan bentuk Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.



Beberapa Halaman dari Dokumen *Hardcopy* Laporan Triwulanan IV 2021 OJK

Mengingat laporan triwulanan dari OJK ini bersifat rutin setiap tahunnya, maka untuk menjaga kualitas dan akurasi dalam proses pembentukan setiap memorandum terkait laporan triwulanan, Asdep Ekon-1 menggunakan narasi, kriteria-kriteria, serta acuan substansi khusus yang cukup konsisten dalam setiap pelaporan. Narasi, kriteria, maupun acuan substansi khusus yang dimaksud pada dasarnya dapat mewakili ‘intisari’ dari laporan triwulanan yang kiranya berguna secara praktis bagi Presiden dalam menggali *insight* laporan serta membantu proses pengambilan kebijakan secara baik.

Secara konkret Asdep Ekon-1 selalu melaporkan indikator-indikator perkembangan sektor keuangan yang krusial baik dari perspektif global maupun domestik. Dari segi sektor jasa keuangan global, angka-angka yang dilaporkan dalam laporan antara lain meliputi pergerakan saham global dan indeks volatilitas pasar keuangan. Adapun untuk angka sektor jasa keuangan domestik, angka-angka yang dimasukkan meliputi perkembangan sektor perbankan seperti pertumbuhan kredit, *non-performing loan*, dan rasio keuangan lainnya. Kemudian dari segi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) domestik angka yang dilaporkan antara lain meliputi pertumbuhan aset, kapitalisasi pasar, dan *yield* surat utang negara.

Untuk *outcome* yang terhitung pada penjelasan ini, Asdep Ekon-1 menyampaikan laporan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0178/Ekon-1/04/2022 pada tanggal 19 April 2022. Memorandum tersebut-pun telah disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian dan telah diproses lebih lanjut untuk diajukan kepada Sekretaris Kabinet serta Presiden secara langsung.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor: M.0178/Ekon-1/04/2022
Tanggal: 19 April 2022

Kepada Yth. : Deputi Bidang Perekonomian
Dari : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Perihal : Laporan Triwulan IV Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dengan hormat kami sampaikan hal pada pokok memorandum, sebagai berikut:

1. Deputi Komisiner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada segenap Menteri Kabinet Indonesia Maju/Pimpinan Lembaga Negara lainnya menyampaikan **Laporan Triwulan IV (TW-IV) Tahun 2021** melalui surat S-37/MS.2/2022 tertanggal 25 Maret 2022. Laporan TW-IV 2021 OJK ini memiliki dua fokus utama, **perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan** serta **tinjauan operasional OJK** di sektor jasa keuangan.

2. Inti laporan sebagai berikut:

a. Perkembangan Kondisi Ekonomi-Kuangan Global dan Domestik di TW-IV Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka **5,02%** secara *year on year (y.o.y)*, **lebih tinggi** jika dibandingkan dengan periode **TW III** yang hanya **3,51%** (*y.o.y*). **Pasar keuangan global** bergerak secara **berbeda-beda**, bergantung kepada sentimen yang terbangun dalam skala regional berkai. **Volatility Index** (barometer resiko dan ketidakpastian investor global) berada di rentang **16-31** sepanjang **TW-IV**, yang menjadi pertanda bahwa pasar keuangan global masih **bergerak mixed**. Kemudian **MSCI World Index** selaku indikator kapitalisasi pasar modal global secara bertimbang, menguat di rentang **3.200** pada **paruh akhir TW-IV 2021**.

b. Perkembangan Industri Perbankan Indonesia

Pada periode ini, **kondisi ketahanan perbankan** secara umum pada **TW III masih terjaga**. Kondisi tersebut tergambar pada tabel berikut:

Indikator	Bank Umum Konvensional			Bank Perkreditan Rakyat			Bank Umum Syariah		
	TW-III 2021 (Rp Tln)	TW-IV 2021 (Rp Tln)	Δ qtr (%)	TW-III 2021 (Rp Mln)	TW-IV 2021 (Rp Mln)	Δ qtr (%)	TW-III 2021 (Rp Tln)	TW-IV 2021 (Rp Tln)	Δ qtr (%)
Aset (Rp)	9.316	9.975	3,85%	152.374	158.443	3,74%	416.77	441.70	5,50%
Liabilitas (Rp)	5.395	5.512	2,10%	114.889	119.589	1,65%	259,87	269,22	3,25%
Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp)	6.820	7.114	4,30%	112.880	117.000	3,65%	241,34	259,42	7,05%
Capital Adequacy Ratio (CAR) (%)	28,19	29,99	48 bps	32,01	32,19	14 bps	24,67	25,71	14 bps
Return on Asset (ROA) (%)	1,01	1,05	40 bps	1,70	1,78	2 bps	1,87	1,85	-12 bps
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)	79,11	77,48	-162 bps	74,80	73,87	-123 bps	79,20	79,12	-14 bps
Non Performing Loan (NPL) Gross (%)	3,22	3,02	-20 bps	7,53	6,72	-81 bps	3,19	2,99	-190 bps
NPL Gross (%)									

Penyampaian Dokumen Laporan Triwulan IV 2021 OJK melalui SIPT Sekretariat Kabinet

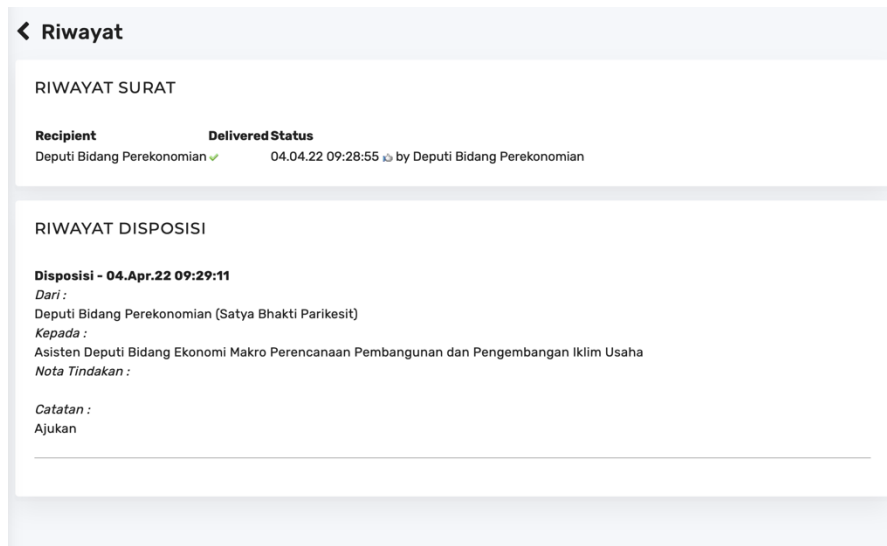
2. Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Permasalahan PT. Garuda Indonesia (Persero)

Pada 4 April 2022 telah diselenggarakan **Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Permasalahan PT. Garuda Indonesia (Persero)**. Terhadap rapat tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan diskusi dalam Rapat Internal melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0335/Seskab/04/2022, antara lain:

1. Menteri Keuangan bersama Menteri BUMN agar mempertimbangkan secara cermat **cost and benefit skema pemberian dukungan pendanaan sebesar USD 527 Juta (Rp 7,5 Triliun) melalui Dana PEN**. Kembali saya tekankan bahwa pemberian PMN kepada BUMN harus dilakukan secara **selektif, jangan jadikan PMN sebagai jalan keluar atas permasalahan kondisi keuangan BUMN yang buruk**. Perhatikan juga **kontribusi yang diberikan BUMN kepada Pemerintah bagi BUMN yang menerima PMN**.
2. Untuk kepemilikan investor baru atas proporsi kepemilikan saham Garuda dapat **dilakukan sepanjang Pemerintah tetap sebagai pemegang saham terbesar (minimal kepemilikan >51%)**. Investor baru, dapat memberikan dana segar kepada Garuda, dan meningkatkan kepercayaan publik atas perbaikan manajemen Garuda. Namun perlu diperhatikan, **kelayakan harga saham yang akan ditawarkan ke investor. Hindari penawaran saham dengan harga yang sangat rendah/minimal** hanya karena saat ini kondisi kinerja yang sedang memburuk. Selain itu, pertimbangkan juga **cost yang harus dikeluarkan** untuk mengundang investor baru dengan manfaat yang diterima dari aksi korporasi tersebut.

Adapun masukan dari Sekretariat Kabinet tersebut ditindaklanjuti oleh Garuda dengan mekanisme penyelesaian Daftar Piutang Tetap Garuda akan diselesaikan dengan melibatkan RUPS dan OJK dan ditargetkan selesai pada Oktober 2022, sebagai berikut:

- a. Piutang di bawah Rp 225 juta akan dibayarkan menggunakan arus kas; dan
- b. Piutang di atas Rp 225 juta akan dibayarkan dengan kupon debt baru sebesar Rp 225 juta atau senilai US\$ 825 juta dan saham sebesar Rp 1,2 M atau senilai US\$ 330 juta.



Disposisi Deputi Bidang Perekonomian

3. Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia

Sehubungan dengan agenda pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 5 April 2022 yang membahas Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia, sebagaimana tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, telah disiapkan bahan untuk SKP tersebut dalam bentuk *briefing sheet* dan infografis. Bahan SKP tersebut disampaikan melalui Memorandum Sekretariat Kabinet Nomor M.0336/Seskab/04/2022 tanggal 4 April 2022. Adapun beberapa catatan Sekretariat Kabinet yang dirumuskan sebagai saran arahan Presiden antara lain:

- a. Terhadap dampak kenaikan harga komoditas yang terus berlanjut pasca-invasi Rusia ke Ukraina, para menteri terkait (Menko Marves, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial) agar segera memfinalkan desain kebijakan reformasi energi (BBM dan Listrik) dalam satu paket kebijakan yang utuh dengan mempertimbangkan dampak sosialnya bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (miskin, rentan miskin dan sebagian masyarakat menengah-bawah), keberlanjutan pemulihan ekonomi, dan kesehatan fiskal.
- b. Terhadap kenaikan harga minyak mentah dan komoditas global lainnya, seperti CPO, gandum, kedelai dan jagung, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial agar mempercepat penyaluran program perlindungan sosial yang sudah ada (PKH,

Sembako, BLT Dana Desa, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan/BTPKLWN, dan Kartu Pra Kerja).

Selain itu, Menteri Perekonomian bersama Menteri terkait dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) agar sedari dini melakukan deteksi danantisipasi sejak awal kenaikan harga komoditas global yang berdampak pada komoditas pokok dan strategis dalam negeri. Kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok agar dipastikan lancar.

- c. Terhadap realisasi belanja APBN s.d. 3 April 2022, Menteri Keuangan dan Menteri dengan pagu tertinggi yang penyerapannya masih rendah (Kemhan, Kemenkes, Kemenhub, Kem. PUPR, Kementan, Kemenkominfo) agar mencermati dan menggerakkan jajarannya untuk segera melakukan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

The image shows a screenshot of a government document and its digital tracking record. The document is from the Secretary of the Cabinet of the Republic of Indonesia, dated Jakarta, 03 April 2022. It is a summons for a cabinet meeting on Tuesday, April 5, 2022, at 10:00 WIB. The topic is 'Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia'. The document is signed by Prubono Anung. To the right, there is a digital tracking record titled 'Riwayat' (History) showing the document was delivered to the Deputy Director of the Economic Field on April 5, 2022, at 08:22:42.

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Und. 43/Seskab/DKK/04/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Undangan Sidang Kabinet Paripurna

Jakarta, 03 April 2022

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Jakarta

Bersama ini dimohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, pada Sidang Kabinet Paripurna yang akan dipimpin Presiden, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 April 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Istana Negara
Topik : Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia

Demikian, untuk dijadikan maklum.

Prubono Anung

RIWAYAT

RIWAYAT SURAT

Recipient	Delivered Status
Deputi Bidang Perekonomian ✓	05.04.22 08:22:42 by Deputi Bidang Perekonomian

RIWAYAT DISPOSISI

Disposisi - 05.Apr.22 08:23:16

Dari :
Deputi Bidang Perekonomian (Satya Bhakti Parikesit)

Kepada :
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Nota Tindakan :

Catatan :
Ajukan.

Undangan Sidang Kabinet Paripurna

Pengajuan Bahan SKP kepada Deputi Bidang Perekonomian

4. Tindak Lanjut Rekomendasi tentang Kebijakan Strategi Perlindungan Konsumen 2022-2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha, khususnya terkait dengan *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai IKK Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 30,86 (level paham, artinya konsumen Indonesia sudah mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen, namun belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya dan belum berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen). Nilai tersebut masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai perhitungan IKK di 29 negara Uni Eropa yang sudah mencapai 51,31.

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi konsumen dan untuk mengakomodir UU PK yang saat ini sudah tidak sejalan, Pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang memuat mengenai arah kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen tahun 2017-2019.

Sekretariat Kabinet telah menginisiasi rapat terkait Evaluasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2020-2024 pada tanggal 24 Desember 2021. Pada rapat tersebut, diperoleh informasi hasil evaluasi Stranas PK 2017-2019 bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia baru mencapai 50.39 (level Mampu), dimana nilai tersebut paling rendah di antara negara-negara ASEAN dan tercermin dengan tingkat pengaduan konsumen masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disepakati bahwa Stranas PK 2022-2024 perlu disusun kembali guna mengakomodir revisi UU PK, yang didalamnya mengatur kewajiban pemerintah untuk menetapkan strategi nasional Perlindungan Konsumen, namun belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2022. Dalam hal ini, disepakati bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan menginisiasi penyusunan Stranas PK 2022-2024.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan rapat dimaksud, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan beberapa kali rapat antar Kementerian/Lembaga untuk menyusun Stranas PK 2022-2024, termasuk penyusunan instrumen hukum yang diperlukan dalam bentuk RPerpres Stranas PK 2022-2024. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet terlibat secara aktif dalam pembahasan penyusunan RPerpres Stranas PK 2022-2024 termasuk pembahasan *One-on-One Meeting* yang mencakup Sembilan sektor prioritas antara lain: sektor obat dan makanan; sektor perumahan; sektor jasa layanan kesehatan; sektor jasa transportasi; sektor listrik dan gas rumah tangga; sektor transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*); sektor jasa telekomunikasi; sektor jasa keuangan; dan sektor barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor.

Selain keterlibatan aktif dalam rapat antar Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet memberikan masukan secara tertulis melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Nomor B.0075/Ekon/02/2022, tanggal 21 Februari 2022, kepada Deputy Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (selaku inisiator RPerpres) dengan pokok inti antara lain agar diatur pembentukan Tim Nasional Stranas PK guna mengoordinasikan penyusunan Aksi Nasional PK; menetapkan langkah-langkah strategis; serta mengevaluasi pelaksanaan Aksi Nasional PK. Progres penyusunan RPerpres Stranas PK 2022-2024 saat ini dalam proses izin prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara.

Gambar Surat Deputi Bidang Perekonomian mengenai Masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Nasional Tahun 2022-2024



5. Penyusunan Rekomendasi tentang Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan

Presiden mengagendakan Rapat Internal dengan topik Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan di Istana Merdeka Jakarta membahas antara lain terdapat beberapa kebijakan terkait ketenagakerjaan baik yang telah ataupun direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2022, yang perlu diselaraskan untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan saat ini sesuai dengan arah dan tujuan pemerintah secara keseluruhan dan khususnya Presiden. Secara garis besar, kebijakan yang menjadi pembahasan dalam rapat internal tersebut adalah: Jaminan Hari Tua (JHT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Jamsos PMI), dan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Terkait hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan *briefing sheet* dan infografis sebagai bahan Rapat Internal terkait. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan *update* terkait penyusunan kebijakan terkait yang menjadi pembahasan dalam rapat dan memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas, antara lain:

- Secara umum, agar Menteri Ketenagakerjaan memastikan substansi pengaturan kebijakan JHT, BSU, dan Jamsos PMI telah mengakomodasi keperluan dan hal-hal yang menjadi perhatian (*concern*) pemangku kepentingan terkait.
- Agar manfaat JHT dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan tidak melupakan: edukasi kepada masyarakat mengenai filosofi sebenarnya dari pemberian manfaat JHT sebagaimana diatur dalam UU SJSN dan mengenai keberadaan program JKP.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan agar memastikan akurasi data penerima BSU 2022 dan pimpinan K/L terkait lainnya dapat membantu percepatan penyaluran bantuan tersebut.
- Mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kerjasama dengan penyelenggara jaminan sosial negara lain dan memaksimalkan peran Atase Ketenagakerjaan dalam memberikan bantuan dan pendampingan dalam

pembayaran manfaat jamsos bagi PMI, khususnya saat terjadi kecelakaan kerja, tindak kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan, dan kematian.

- e. Sehubungan dengan permasalahan pemberian THR Keagamaan berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan Posko THR 2022, agar Menteri Ketenagakerjaan dapat menyelesaikan permasalahan yang disampaikan buruh guna memastikan pemenuhan hak pekerja/buruh, memberikan tindakan tegas terhadap pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan THR, dan mendorong pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam memantau dan menindak pelanggaran terkait pemberian THR.

Menindaklanjuti hasil Rapat Internal dimaksud, Sekretariat Kabinet telah berperan aktif memberikan rekomendasi dan saran atas rencana kebijakan JHT dan BSU melalui forum rapat dan harmonisasi.

6. Permohonan Kunjungan Presiden Ke Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menteri Koperasi dan UKM kepada Presiden menyampaikan permohonan kiranya Presiden dapat melakukan kunjungan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air, di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan salah satu koperasi primer nasional yang telah berhasil merintis produksi dan mengolah minyak kelapa mentah menjadi minyak goreng kelapa.

Adapun pertimbangannya adalah KSP Kopdit Pintu Air yang didirikan pada 1 April 1995 telah mengembangkan usahanya di sektor riil diantaranya dengan membangun Rumah Produksi Minyak Kelapa Pintu Air sebagai sentra pengolahan kelapa terpadu bersama masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan anggota Kopdit Pintu air dan juga masyarakat petani kelapa. Transaksi beli perdana minyak kelapa mentah dari masyarakat petani kelapa oleh Kopdit Pintu Air dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019. Selain itu, pengembangan usaha koperasi meliputi 8 kabupaten di wilayah Provinsi NTT, dengan potensi luas lahan kelapa 47.770 hektar yang telah memproduksi sekitar 32.502 ton/tahun minyak goreng berbahan baku kelapa serta melibatkan penduduk sebanyak 118.241 KK. Komoditas kelapa memiliki potensi untuk dikembangkan di NTT sebagai salah satu provinsi yang memiliki sentra perkebunan kelapa dengan luas 140.100 Ha.

Atas permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi bahwa dapat dipertimbangkan secara positif disesuaikan dengan agenda rangkaian kunjungan kerja Presiden ke daerah, sebagai bentuk dukungan pemerintah dan apresiasi Presiden terhadap perkembangan koperasi di Indonesia khususnya koperasi yang telah berkontribusi secara nasional melalui pengembangan usaha sektor riil. Selain itu, kerjasama memberdayakan ekonomi petani kelapa yang dilakukan oleh KSP Kopdit Pintu air tersebut telah sejalan dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Pinjaman KUR Pertanian, tanggal 26 Juli 2021, bahwa perlu dilakukan pengembangan koperasi untuk menjadi *off taker* produk hasil pertanian

7. Penyiapan Rekomendasi Terkait Ketersediaan Dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Ramadhan Dan Idul Fitri 1443 H

Sejak awal tahun 2022, Indonesia dihadapi oleh meningkatnya harga pangan yang juga dirasakan secara global. Kondisi geopolitik, perubahan iklim, serta momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 turut memberikan

tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022 menjadi batu uji kesiapan Pemerintah dalam memberikan kepastian stabilisasi harga pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan bagi Presiden untuk memutuskan langkah-langkah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, antara lain melalui:

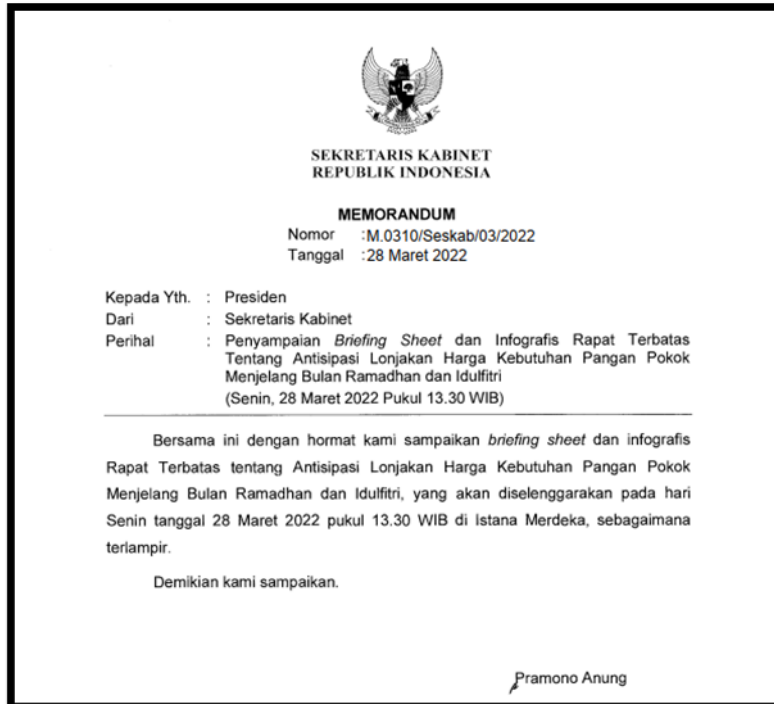
a) Laporan Pengamatan dan Perkembangan Umum terkait Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri

Menimbang gejolak harga pangan serta momentum bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022, Sekretariat Kabinet telah menyiapkan analisis ketersediaan dan stabilitas harga pangan berdasarkan pengamatan dan perkembangan umum yang terjadi. Dalam laporan tersebut, disampaikan gambaran kenaikan/penurunan harga pangan per komoditas (seperti, beras, daging sapi, gula pasir, cabai, bawang, dan telur) serta rekomendasi Sekretariat Kabinet atas situasi yang berkembang saat ini. Rekomendasi yang disampaikan pada pokoknya agar kementerian dan lembaga terkait merumuskan dan segera menetapkan langkah-langkah mitigasi kenaikan harga pangan dan memastikan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Selain itu, peran Perum BULOG serta Badan Pangan Nasional perlu dioptimalkan agar penanganan gejolak harga dapat dilakukan secara masif dan strategis serta tepat sasaran.

Setelah laporan tersebut dikirimkan kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet No. M.0291/Seskab/03/2022 tanggal 22 Maret 2022, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas dan Rapat Internal yang membahas khusus antisipasi lonjakan harga pangan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022.

b) Rapat Terbatas Tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri

Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pangan pokok menjelang bulan Ramadhan yang dimulai pada awal April 2022 serta Idul Fitri 1443H, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada 28 Maret 2022. Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah, Asisten deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi memberikan rekomendasi kebijakan melalui briefing sheet yang disampaikan kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet No. M.0310/Seskab/03/2022 tanggal 28 Maret 2022.



Gambar Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah.

Dalam Rapat Terbatas tersebut Presiden menyampaikan arahan kepada Menteri dan Kepala Lembaga yang hadir, senada dengan rekomendasi kebijakan oleh Sekretariat Kabinet, Presiden menyampaikan pada pokoknya agar kementerian/lembaga:

1. Memastikan pasokan dan ketersediaan kebutuhan pangan pokok;
2. Mengutamakan stabilitas harga kebutuhan pangan pokok;
3. Menyusun peta jalan untuk transformasi ekosistem pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden di atas, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan mengundang Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan arahan-arahan Presiden yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing asisten deputi sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

c) Penyampaian Bahan Rapat Internal Tentang Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H

Memasuki Bulan Ramadhan 2022, Presiden kembali memberikan arahan kepada Menteri dan Kepala Lembaga melalui Rapat Internal pada tanggal 6 April 2022. Rapat membahas terkait persiapan menghadapi Idul Fitri 1443H. Rapat tersebut penting mengingat harga-harga bahan pangan pokok masih mengalami kenaikan, dan masyarakat sudah mulai memberikan aspirasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok. Pada awal April 2022, kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis bahan pangan pokok, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam, bawang putih, telur ayam, daging sapi, dan gula.

Mempertimbangkan hal di atas, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden yang pada pokoknya agar para Menteri dan Kepala Lembaga:

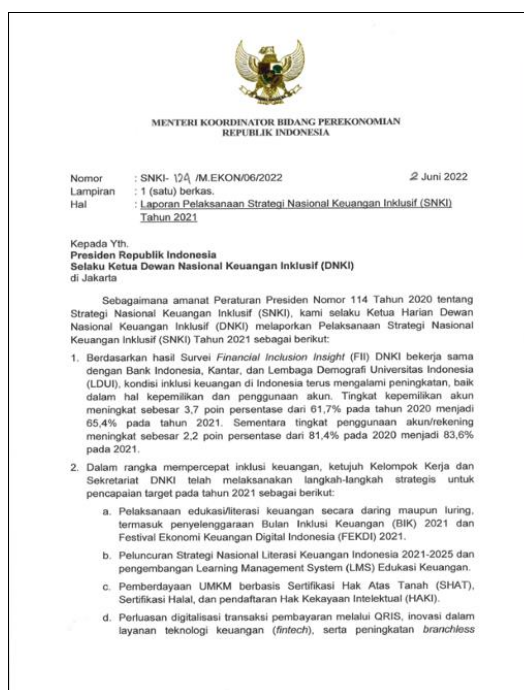
1. Berkoordinasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Perbaiki sistem distribusi pangan khususnya dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan stok defisit untuk mengurangi ketimpangan harga antar daerah.
3. Segera rumuskan konsep transformasi pangan nasional, termasuk perbaikan agribisnis dari hulu hingga hilir, perbaikan distribusi antar daerah, serta pemanfaatan data pertanian.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Deputy Bidang Perekonomian kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui memorandum **Nomor: M.0165/Ekon/04/2022 tanggal 6 April 2022**, untuk kemudian dikompilasi guna disampaikan kepada Presiden sebagai bahan rapat dimaksud. Bahan rapat tersebut disampaikan melalui memorandum **Sekretaris Kabinet Nomor: M.0346/Seskab/04/2022**.

8. Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada Pasal 9 mengamanatkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI telah melaksanakan amanat Perpres dimaksud dengan mengirimkan ‘Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2021’ kepada Presiden (selaku ketua DNKI) melalui surat nomor SNKI-124/M.EKON/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden terkait Laporan Pelaksanaan SNKI Tahun 2021



Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha (Asdep Ekon-1) telah mengkaji laporan tersebut dan memberikan beberapa rekomendasi untuk perencanaan SNKI kedepannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan salah satu tugas dari Sekretariat Kabinet yang khususnya terkait dalam pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. Selain itu, pada tahun 2022 sendiri, Asdep Ekon-1 memang sedang melaksanakan salah satu kegiatan tematik yang berjudul ‘Percepatan Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional dengan Dukungan Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan’, yang mana hal tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari SNKI secara umum.

Pada kesempatan ini, Asdep Ekon-1 berhasil memberikan *outcome* berupa Memorandum laporan Sekretaris Kabinet kepada Presiden. Substansi pelaporan yang dibahas diantaranya meliputi data-data capaian terkait angka inklusi keuangan Indonesia di tahun 2021, data kepemilikan akun atau rekening, dan data penggunaan akun atau rekening, yang secara keseluruhan terus bergerak positif jika dibandingkan dengan tahun

2020. Indikator lain seperti penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan penggunaan uang elektronik dalam skala nasional juga turut dilaporkan dalam dokumen ini. Selain itu, terdapat juga *update* terkait capaian dari masing-masing kelompok kerja DNKI yang dijabarkan secara mendetail untuk setiap kelompoknya.

Adapun beberapa pendapat dan rekomendasi atas laporan SNKI tahun 2021 yang Asdep Ekon-1 sampaikan diantaranya adalah: 1) Capaian inklusi keuangan di tahun 2021 sudah sejalan dengan target yang ditetapkan dalam rakor, khususnya dalam rangka memenuhi arahan Presiden berupa target inklusi keuangan sebesar 90% untuk tahun 2024 mendatang; 2) Perluasan akses keuangan dapat meningkatkan efisiensi fungsi intermediasi keuangan dimulai dari peningkatan tabungan, penguatan investasi domestik, dan menciptakan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi; 3) Literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat harus dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara baik, efektif, tepat guna, dan aman, bukan sekadar memiliki ‘akses’ dan ‘kesempatan’ saja; 4) Sinergi dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam level pemerintahan daerah harus lebih digencarkan. Penguatan akses keuangan harus dibantu dengan dukungan digitalisasi yang berpondasi kuat di level kedaerahan, karena teknologi keuangan terbukti dapat diandalkan; dan 5) Fokus program inklusi keuangan diarahkan bagi penduduk usia muda dan pelajar. Hal ini akan memberikan tambahan capaian inklusi keuangan yang cukup signifikan, mengingat proporsi penduduk usia muda di Indonesia memang cukup besar.

Dokumen Laporan Pelaksanaan SNKI Tahun 2021



2.2 INDIKATOR PENGGUNAAN

Penggunaan yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Indikator penggunaan produk keuangan terdiri atas jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk, Jumlah rekening kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa, Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registrasi) pada pemerintah uang elektronik, Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa, Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat, Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai, Jumlah penerima bantuan pemerintah yang disalurkan secara nontunai, Jumlah rekening pelajar dan santri, Jumlah penerbitan sertifikat HKI, Jumlah penerbitan sertifikat halal, Jumlah polis asuransi mikro, Jumlah peserta BPJS Kesehatan, Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, Jumlah nasabah KUR/KUR Syariah dan Umi, Jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro, Jumlah nasabah Baitul Maal wa Tamwil. Capaian indikator penggunaan pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Indikator Penggunaan

	Indikator Penggunaan			
	Des 2020	Des 2021	Akses per 1000 penduduk dewasa (Des 2021)	Perubahan (%)
Jumlah rekening tabungan di bank	350.324.950	384.950.257*	142.783,9	10%
Jumlah rekening kredit/pembiayaan di bank	48.910.299	73.485.471*	37.185,24	50%
Jumlah uang elektronik terdaftar	14.793.964	26.390.752	n/a	78%
Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan	19,67%	20,48%	n/a	4%
Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM	15.974.839	24.089.273*	12.189,69	51%
Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat	57,21%	62,97%	n/a	10%
Jumlah penerima PKH nontunai	10.000.000	9.900.000	n/a	-1%
Jumlah penerima Program Simasida	19.087.175	16.400.000	n/a	-14%
Jumlah penerima Kartu Prakerja	5.500.000	5.900.000	n/a	7%
Jumlah rekening pelajar dan santri	30.156.526	46.020.000	n/a	53%

9. Pertimbangan Menteri Pertanian Terhadap Rencana Pengintegrasian Kelembagaan Karantina

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rapat tersebut menyepakati untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian regulasi yang diperlukan untuk pengintegrasian kelembagaan karantina.

Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Pertanian kepada Presiden melalui Surat Nomor: 166/HK.110/M/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 menyampaikan usulan yang intinya agar Badan Karantina Pertanian tetap berada di Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan:

- a. Badan Karantina Pertanian memiliki tugas percepatan ekspor 3 (tiga) kali lipat yang harus mengoordinasikan komoditas ekspor pertanian dengan pelaku ekspor secara intensif.
- b. Balai-balai sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian akan memperkuat pengawalan produksi pangan dalam menghadapi krisis pangan global.
- c. Dalam waktu yang tinggal 20 (dua puluh) bulan pemerintahan Presiden, sangat tidak efektif jika perubahan menjadi Badan Karantina Nasional diwujudkan, karena penyesuaian-penyesuaian baru yang harus dilakukan.

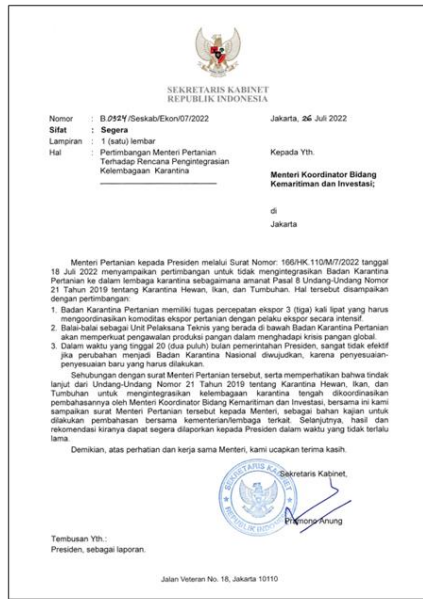
Terkait usulan Menteri Pertanian tersebut Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa:

- a. Pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang intinya mengatur bahwa penyelenggaraan karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 diatur pula bahwa peraturan pelaksana UU Nomor 21 Tahun 2019 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan (seharusnya selesai pada Oktober 2021).
- c. Pengintegrasian kelembagaan karantina juga merupakan salah satu output dalam aksi pemangkasan birokrasi dan layanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Tim Nasional Stranas Pencegahan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi karantina yang saat ini sulit dilakukan karena kewenangan terkait kekarantinaan tersebar di 3 kementerian yang berbeda (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- d. Rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan terakhir telah diselenggarakan rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 5 Juli 2022.

Berkaitan dengan rencana pengintegrasian kelembagaan karantina Sekretaris Kabinet berpendapat:

- a. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, dan seharusnya prosesnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021, maka pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut justru perlu dipercepat penyelesaiannya.
- b. Selain melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, mengoptimalkan fungsi karantina, dan menyederhanakan proses bisnis terkait penyelenggaraan kekarantinaan di kawasan pelabuhan, percepatan pengintegrasian kelembagaan karantina juga diperlukan agar proses pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah berikutnya.
- c. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut terkait dengan kewenangan yang saat ini tersebar di 3 (tiga) kementerian yang berbeda, maka pengintegrasian kelembagaan karantina perlu didukung dengan konsepsi kelembagaan yang jelas, termasuk peta proses bisnis karantina dalam kelembagaan yang akan dibentuk, perbedaan dengan proses bisnis yang saat ini berjalan, dan efisiensi/efektifitas yang dihasilkan dari pengintegrasian fungsi karantina tersebut.
- d. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kiranya usulan Menteri Pertanian terkait rencana pengintegrasian kelembagaan karantina dapat disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait.

Hal sebagaimana dimaksud telah disampaikan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0324/Seskab/Ekon/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagai bahan kajian untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Kebijakan Karantina Terpusat dan Presiden memberikan arahan agar kementerian/lembaga terkait segera menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan untuk pembentukan badan karantina dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

10. Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengembangan Pangan Lokal

Indonesia memiliki ratusan jenis pangan, antara lain 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber protein, 110 jenis rempah, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan 26 jenis kacang-kacangan. Berbagai jenis pangan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan keistimewaan jenis di masing-masing daerah. Namun, berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional, pola konsumsi masyarakat Indonesia belum beragam. Padi-padian (beras) masih menguasai 60,10% dari total konsumsi, jauh lebih besar dari pangan hewani (11,60%), sayur dan buah (5%), maupun umbi-umbian (2,80%).

Selain itu, isu ancaman krisis pangan terus bergulir bersamaan dengan isu geopolitik, serta ancaman krisis ekonomi dan krisis energi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tepat pemerintah untuk memitigasi dampaknya bagi Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan pangan lokal secara maksimal seraya mentransformasi pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam dan seimbang guna membangun sistem pangan yang tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi sepanjang tahun 2022 melaksanakan berbagai kegiatan guna menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, yaitu:

1) Focus Group Discussion (21 Juni 2022 dan 7 Juli 2022)

FGD dimaksudkan untuk menyerap saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mendapatkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mengembangkan pangan lokal. Kegiatan dilakukan dalam dua seri, yang pertama diselenggarakan dengan mengundang narasumber dari lingkungan pemerintahan, dan seri kedua mengundang narasumber dari peneliti kebijakan, organisasi internasional, dan swasta.



Pelaksanaan FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri I (21 Juni 2022)

FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri I (Selasa, 21 Juni 2022) menghadirkan narasumber Artati Widiarti (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan/PDSPKP, KKP), Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura, Kementan), dan Apriyanto Nugroho (Plt Kepala Pusat Penganekaragaman Pangan, Badan Pangan Nasional). Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 100 orang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.



Pelaksanaan FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri II (7 Juli 2022)

FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri II (Kamis, 7 Juli 2022) menghadirkan narasumber Rajendra Aryal (Country Director, Food and Agriculture Organization Indonesia/FAO), Felippa Ann Amanta (Kepala Peneliti, Center for Indonesian

Policy Studies/CIPS), dan Dimas Sandya (Senior Manager, eFishery Indonesia). Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 90 orang perwakilan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua FGD, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang menghambat pengembangan pangan lokal adalah belum adanya kerangka regulasi yang memuat strategi nasional jangka pendek dan jangka panjang dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran pangan lokal dalam rangka ketahanan pangan. Selain itu, poin-poin utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. *Supply and Demand* – Diperlukan peningkatan secara bersamaan atas pasokan dan permintaan (supply and demand) pangan lokal.
2. Pendanaan – Diperlukan dukungan pemerintah untuk memberikan kemudahan akses terhadap pendanaan, baik melalui KUR maupun LPDB-KUMKM.
3. Impresi dan pengarusutamaan produk– Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal perlu memperbaiki impresi terhadap product (*product image*) dan pengarusutamaan sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas.
4. Pemanfaatan teknologi – Untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan diperlukan pemanfaatan teknologi yang tepat, seperti teknologi otomisasi dan aplikasi manajemen oleh eFishery Indonesia pada sektor perikanan budidaya.
5. Regionalisasi – Diperlukan pendekatan regional/kewilayahan untuk memastikan tiap daerah memanfaatkan pangan lokal sesuai kearifan lokalnya.
6. Kolaborasi – Dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mencapai tujuan kolektif berupa ketahanan pangan nasional, pengembangan usaha pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal.

2) Pemantauan dan Kunjungan Lapangan

Untuk menghasilkan hasil kajian yang komprehensif, dilakukan pemantauan dan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat pengembang pangan lokal.

Pemilihan lokasi pemantauan merujuk pada Peta Kerentanan Pangan Indonesia/Indonesia Food Security and Vulnerability Atlas 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, lokasi dipilih berdasarkan keterwakilan regional di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur serta komoditas di masing-masing wilayah termasuk progres pengembangan pangan lokal di wilayahnya. Untuk itu, dipilih lokasi pemantauan dan kunjungan lapangan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	20 sd. 22 Juli 2022
2.	Ternate, Provinsi Maluku Utara	7 sd. 9 Agustus 2022
3.	Tanjung Pinang	7 sd. 10 September 2022

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
	Provinsi Kepulauan Riau	

a. Provinsi Kalimantan Utara (20 sd. 22 Juli 2022)

Pada kegiatan ini, dilaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Pembangunan, dan Biro Perekonomian, serta Pemda Kabupaten Bulungan.



Gambar 1. Pemantauan Lapangan ke Lokasi Pelaku UMKM Pangan Lokal (Desa Cipta Agung, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan)

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke pelaku UMKM di Desa Panca Agung, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tersebut adalah keripik pisang sale dari pisang kapok, keripik tempe, keripik singkong, kue kering kuping gajah yang terbuat dari singkong dan ubi, keripik amplang dari ikan bulan-bulan, dan cenil.

b. Provinsi Maluku Utara (7 sd. 9 Agustus 2022)

Di Prov. Maluku Utara, dilakukakan kegiatan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara (Kadis KP) dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Biro Perekonomian, serta Pemda Kota Ternate.



Gambar 2. Pertemuan dengan Pemprov. Maluku Utara
(Kota Ternate, Prov. Maluku Utara)

Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan ke pelaku UMKM pangan lokal yang ada di Kota Ternate. Produk yang dihasilkan antara lain hasil olahan kenari, seperti keripik dan kue kering. Selain itu, terdapat hasil olahan buah Pala, seperti minuman siap saji dan sirup. Dari hasil laut, masyarakat mengolah ikan roa menjadi sambal roa dan ikan roa asap. Selain itu, dilakukan kunjungan lapangan ke anggota Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kelompok Tani Belmas, Kelurahan Bula, Kec. Ternate Barat. Komoditas yang dikelola oleh kelompok tani ini adalah mentimun, kangkung, dan sayur mayur lainnya.

c. Provinsi Kepulauan Riau (7 sd. 10 September 2022)

Pada kegiatan ini, dilakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri beserta jajaran untuk mendapatkan gambaran umum komoditas pangan lokal di Prov. Kepri serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan pangan lokal di masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan ke lokasi pengembangan pangan lokal, yaitu Sorgum. Lokasi pengembangan sorgum terletak di wilayah Bukit Indah, Kabupaten Bintan, dimana warga telah berhasil membuat produk turunan sorgum, seperti gula, tepung sorgum, teh sorgum, kopi sorgum, dan beras sorgum.



Gambar 3. Kunjungan ke Pelaku Pengembangan Sorgum
(Kabupaten Bintan, Prov. Kepulauan Riau)

3) Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Pangan Lokal

Pengembangan pangan lokal sebagaimana budaya dan kearifan lokal masyarakat sangat penting mengingat potensinya untuk memperbaiki pola konsumsi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan industri pangan serta merupakan kunci penting dalam kerangka ketahanan pangan nasional.

Pangan lokal konvensional seperti sagu, umbi-umbian, dan perikanan, hingga pangan lokal baru seperti sorgum dan rumput laut memang sudah dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu. Namun, perlu fokus lebih dari Pemerintah untuk memastikan pangan lokal tersebut dapat terus dikembangkan dan mendapatkan daya tarik serta skala ekonomi yang cukup agar dapat membantu ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, berdasarkan hasil FGD Seri I, FGD Seri II, dan pemantauan ke 3 (tiga) provinsi, telah teridentifikasi kendala regulasi dan implementasi, lesson learned dan faktor keberhasilan, serta langkah strategis untuk mendorong pengembangan pangan lokal. Atas hal tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:

- a. Penguatan Kerangka Regulasi - Pemerintah perlu segera menetapkan kerangka regulasi penganekaragaman yang baru untuk memastikan pengembangan pangan lokal memiliki dasar hukum yang memadai sebagai langkah bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menyiapkan strategi, program dan kegiatan, serta pendanaan yang diperlukan dalam mengembangkan pangan lokal di daerahnya masing-masing.
- b. Regionalisasi - Pada hakikatnya, pangan lokal merupakan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat, berdasarkan sumber daya alam setempat, dan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Oleh karena itu, pendekatan

pengembangan pangan lokal tidak bisa secara terpusat, terutama dalam menentukan komoditas pangan lokal unggulan serta penggunaan anggaran.

- c. Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan - Pengembangan pangan lokal harus terorkrestasi dengan baik serta menyadari bahwa kebijakannya saling berkaitan (interconnected) dan saling bergantung (interdependent) satu sama lainnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Peneliti/Akademisi, organisasi nirlaba, dan swasta.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kajian ini oleh Sekretariat Kabinet, berbagai pihak sudah mulai mendiskusikan pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal. Badan Pangan Nasional saat ini sedang merumuskan rancangan Peraturan Presiden terkait penganekaragaman pangan sebagai pembaharuan dari Perpres 22/2009. Kementerian Desa PDTT juga telah menerbitkan Keputusan Menteri No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Kepmen 82/2022) pada tanggal 11 Juli 2022 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan konsumsi pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemenko Bidang Perekonomian juga sudah menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pengembangan sorgum dan singkong dimana Presiden telah memberikan arahannya agar sorgum dapat dikembangkan dan disiapkan kebijakan dari hulu hingga hilir serta dibuatkan road map pengembangannya.

Hal di atas menegaskan semangat berbagai pihak lintas sektor untuk meningkatkan pengembangan pangan lokal. Dengan demikian, isu pangan lokal ini perlu disampaikan kepada Presiden untuk diusulkan pembahasan grand design pengembangan pangan lokal melalui rapat terbatas agar dapat diputuskan langkah strategisnya oleh Presiden.

Rekomendasi tersebut sudah dilaporkan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum **Nomor: M.0516/Ekon/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022** yang kemudian telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai rekomendasi kebijakan melalui memorandum **Sekretaris Kabinet Nomor: M.1064/Seskab/10/2022**.

11. Tindak Lanjut Hasil Kunjungan ke United Arab Emirates

Dalam pertemuan virtual dengan *Minister of State for Foreign Trade of United Arab Emirates* (UAE) pada tanggal 30 Maret dan 8 April 2021, Menteri Perdagangan UAE mengusulkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia agar kedua negara secara bilateral dapat menjajaki perjanjian dagang *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-UAE CEPA).

Selanjutnya, Menteri Perdagangan kepada Presiden menyampaikan rencana perundingan I-UAE CEPA dengan target penyelesaian selama 1 (satu) tahun. Pada tanggal 1 Juli 2022, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Ekonomi UEA melakukan penandatanganan I-UAE CEPA di Abu Dhabi, dengan disaksikan oleh kedua kepala negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Juli 2022, Presiden mengagendakan rapat internal guna membahas tindak lanjut hasil kunjungan ke United Arab Emirates. Terkait hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan *briefing sheet* sebagai bahan rapat internal dimaksud. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi guna tindak lanjut penandatanganan I-UAE CEPA yang digunakan

sebagai bahan Presiden dalam menyampaikan arahan kepada para Menteri terkait, antara lain:

1. Mengoptimalkan perjanjian I-UAE CEPA dan perjanjian perdagangan internasional lainnya untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional, dengan menjaga dan memperhatikan kepentingan nasional.
2. Memetakan peluang komoditas ekspor Indonesia yang dapat diterima di pasar UAE dengan lebih jeli, dan menghitung dengan lebih cermat *cost and benefit* yang diperoleh dari perjanjian I-UAE CEPA, termasuk potensi peningkatan ekspor produk-produk halal yang berasal dari UMKM.
3. Menyiapkan komoditas-komoditas unggulan dalam negeri, baik dari sisi produk, kualitas maupun kuantitas yang dapat mengisi pasar UAE.
4. Melakukan penguatan sektor jasa yang diperlukan di pasar UAE, mengingat I-UAE CEPA tidak hanya meningkatkan akses perdagangan barang, namun dapat membuka peluang kerja sama sektor industri jasa, halal, dan jasa keuangan syariah.
5. Menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan bagi Indonesia dalam mengisi pasar UAE, sehingga Indonesia memperoleh manfaat yang optimal.
6. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses ratifikasi I-UAE CEPA dan melakukan percepatan-percepatan dalam prosesnya.
7. Menyusun peraturan pelaksanaan domestik yang selaras dengan isi perjanjian I-UAE CEPA agar segera setelah proses ratifikasi selesai, perjanjian dimaksud dapat segera diimplementasikan.

12. Pemberian Insentif Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS untuk menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden.

Menteri Keuangan kepada Presiden menyampaikan Laporan Pengelolaan Program (LPP) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan 2020. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan usulan permohonan persetujuan pemberian insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan pengesahan atas LPP dan LKT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan 2020 yakni pemberian insentif kepada Direktur Utama sebesar paling banyak 1 (satu) kali gaji atau upah Direktur Utama sebulan untuk masing-masing periode pelaporan, serta kepada anggota Direksi, ketua Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan komposisi yang mengikuti faktor jabatan.

Pengusulan pemberian insentif terhadap Dewan Pengawasa dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada agregat nilai capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 sebesar 100,87%, dengan hasil audit akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Sedangkan agregat nilai capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 sebesar 104,49%, dengan hasil audit akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi besaran insentif yang diusulkan Menteri Keuangan perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Menindaklanjuti laporan dan usulan pemberian insentif tersebut, Sekretaris Kabinet telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum nomor M.62/Seskab/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dan Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.461/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan atas laporan dan usulan pemberian insentif kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang pada intinya Presiden dapat menerima LPP dan LKT dimaksud dan selanjutnya rekomendasi besaran insentif yang diusulkan Menteri Keuangan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Sekretaris Kabinet tentang LPP dan LKT serta Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan Tahun 2020



IKK 2 (rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti)

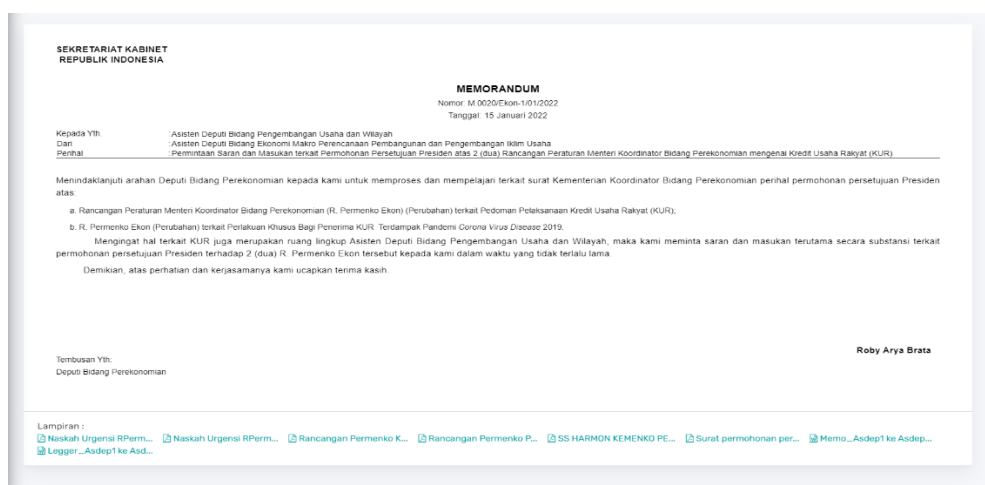
Pada tahun 2022, terdapat **259 rancangan** peraturan menteri/kepala lembaga yang disetujui oleh Presiden, berikut beberapa contoh keberhasilan Deputy Bidang Perekonomian dalam menindaklanjuti rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga tersebut.

1. Pemberian Saran dan Masukan terkait Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengirimkan Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor PH.2.1-05/M.EKON/01/2022 tertanggal 12 Januari 2022. Adapun perihal permohonan persetujuan Presiden tersebut meliputi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (R. Permenko Ekon) (Perubahan) terkait Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan R. Permenko Ekon (Perubahan) terkait Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal ini sendiri merupakan pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet yang melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang memerlukan persetujuan Presiden.

Dalam pelaksanaannya, Asdep 1 terlibat secara aktif dalam rapat pembahasan 2 Permenko dimaksud, namun sesuai dengan arahan Deputy Bidang Perekonomian pemrosesan atas RPermen dilakukan oleh Asdep Ekon 3 mengingat subjek KUR berkaitan langsung dengan bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di bawah unit kerja Asdep Ekon-3.

Adapun keterlibatan aktif Asdep Ekon I berkaitan dengan substansi kedua Permenko tersebut, disampaikan dalam bentuk kontribusi atas pengkajian permohonan persetujuan Presiden tersebut melalui: (1) keikutsertaan dalam rapat harmonisasi atas R. Permenko Ekon terkait (tercatat dalam memorandum Asdep Ekon-1 nomor M.0003/Ekon-1/01/2022 tanggal 4 Januari 2022) ; serta (2) penyiapan bahan masukan berupa *Briefing Sheet* Sekretaris Kabinet dalam rangka menghadiri Rapat Terbatas terkait Plafon KUR yang diatur dalam R. Permenko Ekon terkait pelaksanaan KUR (tercatat dalam memorandum Asdep Ekon-1 Nomor M.0546/Ekon-1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021).



Penyampaian Memorandum Asdep Ekon-1 kepada Asdep Ekon-3

terkait Permohonan Persetujuan R. Permenko Ekon.



Penyampaian *Briefing Sheet* Sekretaris Kabinet terkait Rapat Terbatas untuk Plafon KUR

2. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah

Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Presiden, mengajukan **permohonan persetujuan substansi** Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM (RPermenves) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. RPermenves dimaksud secara umum mengatur panduan bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga, dan daerah mengenai bidang usaha yang diwajibkan kemitraan yaitu bidang usaha prioritas dan bidang usaha yang dipersyaratkan. Selain itu, RPermenves dimaksud juga mengatur pola kemitraan antara Usaha Besar dan UMK, mekanisme pelaksanaan kemitraan, dan penghargaan bagi Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban. Dalam hal pemberian penghargaan, Kementerian Investasi/BKPM dapat **memberikan penghargaan** berupa piagam/trofi atau penghargaan lain bagi Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban kemitraan, dan **memberikan sanksi** bagi Usaha Besar yang tidak melaksanakan komitmen kemitraan sesuai ketentuan sanksi administratif yang mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Dalam proses penyusunan RPermenves tersebut, Sekretariat Kabinet ikut mengawal dan mengikuti proses harmonisasi untuk selanjutnya dilakukan proses persetujuan Presiden. Hasil Persetujuan Presiden atas RPermenves dimaksud disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0068/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 4 Februari 2022, hal Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana terlampir.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0066/Scab/Ekon/02/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Daerah

Jakarta, 4 Februari 2022

Kepada Yth.
Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi
Penanaman Modal

di
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat nomor: 316/A/1/2022, tanggal 27 Januari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Presiden atas Penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, dapat kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM dimaksud sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang telah disetujui Presiden untuk penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan sosialisasi guna efektivitas pelaksanaan kemitraan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Insentif Perpajakan terdampak COVID-19

Menteri Keuangan kepada Presiden, mengajukan **permohonan persetujuan substansi** RPMK mengenai Perubahan atas PMK Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (RPMK Insentif WP Terdampak Covid-19)* dan RPMK mengenai Perubahan atas PMK Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (RPMK Insentif Pajak Barang)*.

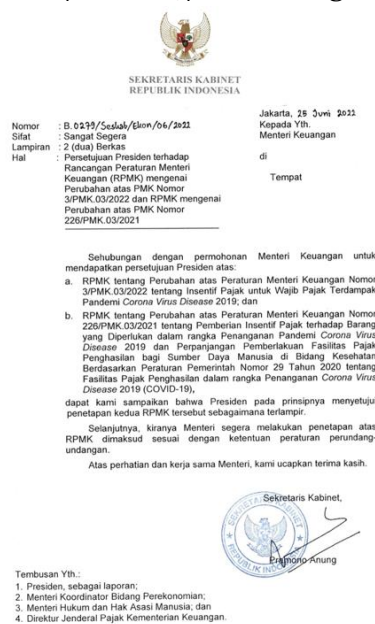
RPMK Insentif WP Terdampak COVID-19 memuat pengaturan mengenai **perpanjangan** jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan (**PPH**) **Pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25, dan PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak penerima **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. Kebijakan** perpanjangan waktu pemberian insentif ini didasarkan pada: (1) **hasil survei Kementerian Keuangan** yang menunjukkan bahwa lebih dari 95% WP menyatakan insentif pajak **sangat bermanfaat** dan **berminat** untuk memanfaatkan kembali di masa yang akan datang; dan (2) Rakor tingkat eselon I antara Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dan Kementerian Keuangan pada tanggal 14 Juni 2022 juga menyepakati perpanjangan jangka waktu insentif berdasarkan analisis data makro.

RPMK Insentif WP Terdampak Covid-19 juga memuat **perpanjangan waktu** penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final Jasa Konstruksi tahun 2021 menjadi **paling lambat 31 Desember 2022**, dan **perubahan pihak yang menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan** dari sebelumnya dilakukan **pengguna jasa**(petani/kelompok tani) berubah menjadi **Penanggung Jawab** (Unit eselon II di Kementerian PUPR yang mempunyai P3 TGAI). Hal ini untuk **menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK** yang menemukan kesalahan dalam menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan sehingga pemanfaatannya belum dapat diakui dari sisi administrasi keuangan.

Sedangkan, **RPMK Insentif Pajak Barang** memuat pengaturan mengenai **perpanjangan jangka waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 22** atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang diperlukan untuk penanganan Covid-19, dan **Fasilitas PPh berupa tarif PPh 0% dan bersifat final** bagi **tenaga kesehatan**. Perpanjangan waktu ini diperlukan mengingat hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa dukungan bagi penanganan Covid-19 perlu diperpanjang karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2022.

Dalam proses penyusunan RPMK tersebut, Sekretariat Kabinet ikut mengawal dan mengikuti proses harmonisasi untuk selanjutnya dilakukan proses persetujuan Presiden. Hasil Persetujuan Presiden atas RPMK dimaksud disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.279/Seskab/Ekon/07/2022, tanggal 25 Juli 2022, hal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai Perubahan atas PMK Nomor 3/PMK.03/2022 dan RPMK mengenai Perubahan atas PMK Nomor 226/PMK.03/2021 sebagaimana terlampir.



Surat Sekretaris Kabinet terkait Persetujuan Presiden terhadap 2 (dua) RPMK mengenai Insentif Perpajakan terdampak COVID-19

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020 berupa perlu dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan mengikuti mekanisme keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui surat Nomor B.78/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 14/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 22 Februari 2022.

5. Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas guna mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang ekspor dan di bidang impor; menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor; memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja; menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kepentingan industri; dan mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.

Dalam implementasi kebijakan Neraca Komoditas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko), dengan pokok pengaturan sebagai pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga, Lembaga *Indonesia National Single Window*, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Sehubungan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Penetapan RPermenko dimaksud (surat Nomor PH.2.1-56/M.EKON/03/2022 tanggal 7 Maret 2022). Dan terhadap permohonan tersebut,

Presiden melalui Sekretaris Kabinet telah memberikan persetujuan guna penetapannya melalui surat Nomor B.154/Seskab/Ekon/04/2022 tanggal 1 April 2022.

6. Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Dalam pada Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dalam rangka HUT ke-76, pada tanggal 16 Agustus 2021, Presiden memberikan arahan untuk menyiapkan berbagai kemudahan untuk menumbuhkan UMKM (IKM), termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Adapun visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar diantaranya Industri Kecil dan Menengah memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar. Untuk itu Sekretariat Kabinet mengawal pelaksanaan peran Industri Kecil Menengah dalam rantai pasok industri manufaktur besar.

Dalam rangka mengawal hal tersebut, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam penyusunan dasar hukum terkait pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, dan memastikan keselarasan substansi dasar hukum tersebut, diantaranya dengan arah kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan persetujuan Presiden guna penetapannya. Beberapa dasar hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, diantaranya:

- a. Permenperin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022; (B.104/Seskab/Ekon/02/2022, 24 Februari 2022);
- b. Permenperin Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan. (B.131/Seskab/Ekon/03/2022, 17 Maret 2022).

7. Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam rangka Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu hal yang menjadi arahan Presiden adalah agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan dan melibatkan semua kementerian/lembaga terkait untuk saling berkoordinasi, sehingga target-target pembangunan IKN dapat tercapai, termasuk mempersiapkan peraturan lembaga terkait pengadaan di Ibu Kota Negara.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di IKN akan mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi). Prinsip utamanya adalah dengan mengutamakan penggunaan PDN dan UMK, termasuk pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal. Sebagai kota dunia untuk semua, pengadaan barang dan jasa

pemerintah di IKN juga akan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan maupun penyusunan naskah rancangan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berupa pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa lainnya dengan kekhususan. Setelah memastikan bahwa rancangan peraturan Kepala tersebut selaras dengan arahan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi bahwa rancangan Peraturan Kepala LKPP tersebut layak mendapatkan persetujuan Presiden sebagai dasar penetapannya oleh Kepala LKPP.

Selanjutnya, persetujuan Presiden tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.222/Ekon/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Kepala LKPP. Atas dasar persetujuan Presiden tersebut, Kepala LKPP menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PerLKPP No. 5 Tahun 2022, yang telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2022.

8. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Hingga Juni 2022, Deputy Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerima 6 (enam) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, permohonan persetujuan tersebut diproses berdasarkan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

A. Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor B-01/M.KUKM/HK.01.00/I/2022 tanggal 5 Januari 2022; dan
 - b. Nomor B-67/M.KUKM/HK.01.00/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor PH.2.1-60/M.EKON/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.
- 3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
 - (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi Melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Covid 2019.
 - b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
 - (1) B.0028/Seskab/Ekon/01/2022 tanggal 17 Januari 2022;
 - (2) B.0123/Seskab/Ekon/03/2022 tanggal 15 Maret 2022; dan
 - (3) B.0261/Seskab/Ekon/06/2022 tanggal 14 Juni 2022.

B. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

- 1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - 1) Nomor HK.02.01/287/III/2022 tanggal 2 Maret 2022;
 - 2) Nomor HK.02.01/291/III/2022 tanggal 2 Maret 2022; dan
 - 3) Nomor HK.02.01/552/IV/2022 tanggal 19 April 2022.
- 2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi

pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN) telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu:
 - (1) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pengintegrasian KLHS dalam Penyusunan RTR;
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa PPAT; dan
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- b. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
 - (1) B.0124/Seskab/Ekon/03/2022 tanggal 15 Maret 2022; dan
 - (2) B.0204/Seskab/Ekon/04/2022 tanggal 28 April 2022.
- c. 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
 - (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; dan
 - (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

9. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi Atas Rencana Kebijakan Kementerian /Lembaga Di Bidang Inovasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2022, Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi salah satunya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Badan. Pemberian rekomendasi permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan tersebut merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait pemberian rekomendasi permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Sekretariat Kabinet telah mengawal dan terlibat aktif dalam penyusunan 38 (tiga puluh delapan) rancangan peraturan Menteri dan Rancangan

Peraturan Badan pada Semester pertama tahun 2022. Terhadap pembahasan 38 Rancangan Peraturan tersebut, sejumlah 28 (dua puluh delapan) rancangan peraturan direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden (terdiri dari 23 (dua puluh tiga) rancangan peraturan telah mendapatkan persetujuan Presiden, 3 (tiga) rancangan peraturan masih dalam proses, serta 2 (dua) rancangan peraturan belum mengajukan persetujuan Presiden) dan 10 (sepuluh) rancangan peraturan tidak perlu diajukan persetujuan Presiden. Rincian Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Badan yang kami kawal proses penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan yang direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
1.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Statuta Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia	4 Januari 2022	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari 2022
2.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Januari 2022	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari 2022
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	14 Februari 2022	B.0096/Seskab/Ekon/02/2022	16 Februari 2022
4.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
5.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
6.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Energi dan Manufaktur			
7.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
8.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
9.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Elektronika dan Informatika	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
10.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
11.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
12.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kesehatan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
13.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022

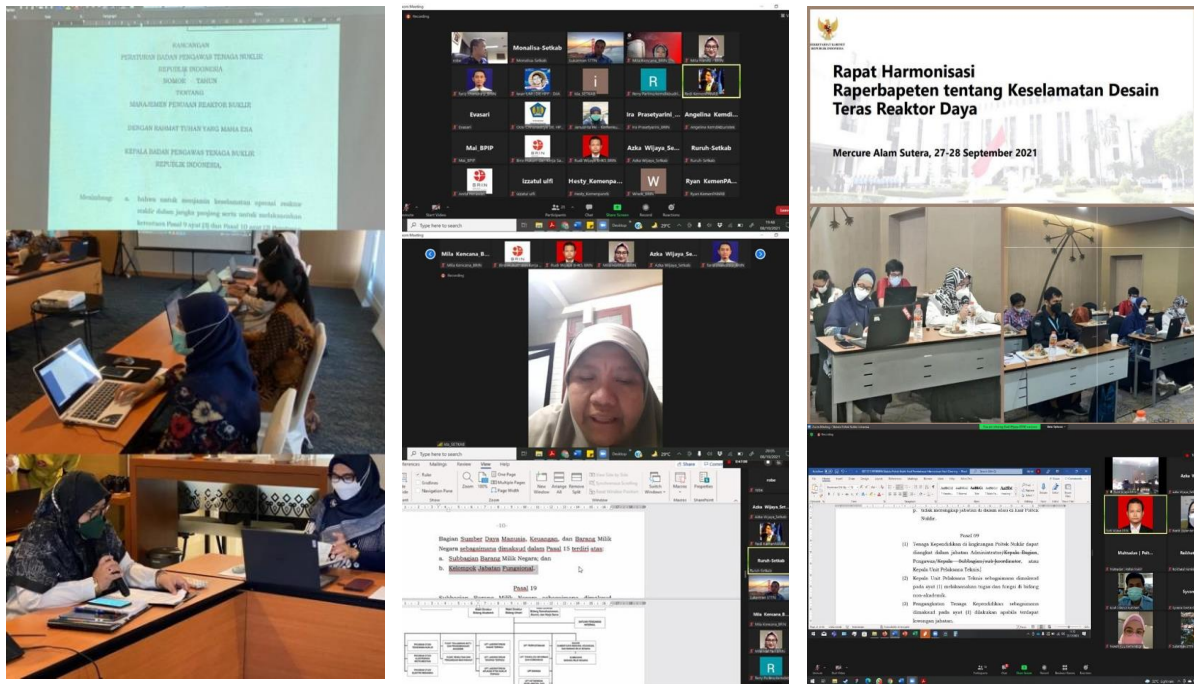
No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
14.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
15.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	22 Februari 2022	B.0108/Seskab/Ekon/03/2022	2 Maret 2022
17.	RPermentan tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	21 April 2022	B.193/Seskab/Ekon/04/2022	26 April 2022
18.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
19.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Klirens Etik Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
20.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Akuisisi Pengetahuan Lokal	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
21.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Mobilitas	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Periset			
22.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
23.	RPermentan tentang Perubahan Kedua atas Permentan No. 43 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	11 Mei 2022	B.225/Seskab/Ekon/05/2022	18 Mei 2022
24.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Laboratorium Pengujian Bungkusan Zat Radioaktif (alt Uji Desain Bungkusan dan Bungkusan Zat Radioaktif)	14 Juni 2022	Masih dalam proses	
25.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Manajemen Penuaan Reaktor Nuklir	27 Juni 2022	Masih dalam proses	
26.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	29 Juni 2022	Masih dalam proses	
27.	RPermentan tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani	Belum pengajuan permohonan persetujuan Presiden		
28.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah	Belum pengajuan permohonan persetujuan Presiden		


Tabel Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan yang tidak direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden

No.	Rancangan Peraturan Menteri/Badan	No.	Rancangan Peraturan Menteri/Badan
1.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Logo Badan Pangan Nasional	6.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
2.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional	7.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset
3.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Naskah Dinas	8.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
4.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional	9.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
5.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	10.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Cara Penggunaan Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional

Lampiran Evidence Pelaksanaan IKK 2



Surat Permohonan Presiden yang Telah Dikeluarkan


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.031/Seskab/Ekon/1/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Statuta Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia dan Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jakarta, 17 Januari 2022
Kepada Yth.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
di
Jakarta


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.068/Seskab/Ekon/03/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022

Jakarta, 7 Maret 2022
Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Jakarta


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.09/Seskab/Ekon/02/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Presiden terhadap RPermentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Jakarta, 16 Februari 2022
Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Tempat


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA


Nomor : B.193/Seskab/Ekon/04/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Jakarta, 26 April 2022
Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Jakarta


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0105/Seskab/Ekon/02/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait Organisasi Riset di Lingkungan BRIN

Jakarta, 24 Februari 2022
Kepada Yth.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
di
Jakarta


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.210/Seskab/Ekon/19/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jakarta, 13 Mei 2022
Kepada Yth.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
di
Jakarta

10. Proses Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.07/2017 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai

Pemerintah akan mulai memberlakukan penyaluran dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Ke Daerah dalam bentuk Non Tunai berupa Surat Berharga Negara (SBN) meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efektif dan efisien, serta mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu dan mengurangi uang kas dan atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPKM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (RPMK). Dalam hal ini, **Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan RPMK dimaksud, dimulai dari rapat pembahasan, hingga rapat harmonisasi.**

Pokok-pokok substansi RPMK tersebut antara lain:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 233/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Penyaluran TKD dilaksanakan sesuai dengan PMK 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai. Adapun dalam RPMK tersebut akan menambahkan pengaturan mengenai konversi penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan teknis pelaksanaannya.
- b. Urgensi dari penetapan RPMK ini juga atas arahan dari Menteri Keuangan pada Rapat ALCO untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH dalam bentuk nontunai dan untuk TA 2022 paling lambat pada bulan Desember.
- c. RPMK ini menambahkan pengaturan mengenai konversi penyaluran jenis DBH yaitu Kurang Bayar DBH dan teknis pelaksanaannya.

Sekretariat Kabinet memberikan pendapat agar kiranya **Presiden dapat menyetujui penetapan RPMK** dengan pertimbangan:

- a. RPMK bersifat **strategis** karena bertujuan sebagai penyempurnaan pengaturan yang dimaksudkan untuk: (a) **meningkatkan** pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien dan efektif; (b) **mendorong** penyerapan **belanja APBD** menjadi lebih **tepat waktu** dan **berkualitas**; dan (c) **mengurangi** simpanan kas Pemerintah Daerah di bank dalam **jumlah tidak wajar**.
- b. Perbaikan pengaturan tersebut diwujudkan dalam bentuk **penambahan jenis Transfer ke Daerah (TKD)** yang **penyalurannya** dapat dikonversi dalam **bentuk nontunai**, yaitu **Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH)**. Penambahan KB DBH tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan untuk **mengoptimalkan pengelolaan kas APBN dan APBD**, serta sebagai tindak lanjut atas kebijakan Menteri Keuangan pada rapat Komite *Assets Liabilities Commite* untuk menyelesaikan penyaluran KB DBH nontunai.

- c. Pengaturan konversi penyaluran KB DBH nontunai telah sejalan dengan tujuannya dengan pokok-pokok antara lain:
- 1) **Pelaksanaan konversi penyaluran KB DBH nontunai dilakukan paling lambat bulan Desember** tahun berkenaan.
 - 2) **Penetapan daerah dan besaran penyaluran KB DBH nontunai** dilakukan dalam hal simpanan pemerintah daerah di bank secara nasional mengalami kenaikan 2 (dua) bulan berturut-turut, dan/atau *outlook* pendapatan negara tahun berkenaan diproyeksikan turun.
 - 3) **Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran KB DBH dalam bentuk nontunai ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja** sebelum bulan **Desember berakhir**.
 - 4) **Jangka waktu Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka konversi KB DBH paling lama 3 (tiga) bulan.** Pelunasan SBN dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan **sebelum** jatuh tempo (*early redemption*) dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan.

RPMK tersebut telah melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi baik dari segi substansi maupun teknis/prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, **RPMK telah ditetapkan sebagai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2022 mengenai Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2022.**

Surat	Sekretaris	Kabinet	Nomor
B.0572/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 23 November 2022			



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0572/Seskab/Ekon/11/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai

Jakarta, 23 November 2022
Kepada Yth.
Menteri Keuangan
di
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-108/MK.7/2022 untuk mendapatkan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai (RPMK), dapat kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya menyetujui penetapan RPMK tersebut sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan penetapan atas RPMK dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan sosialisasi atas penerapannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan pengelolaan dan penyaluran konversi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.


 Sekretaris Kabinet,
Pratiyo Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

11. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak ego sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pada semester II tahun 2022, Deputy Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerima 13 (tiga belas) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, dimana 12 (dua belas) permohonan persetujuan tersebut telah diproses, dan 1 (satu) permohonan tidak diproses persetujuan Presiden, mengingat Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut tidak memenuhi kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memerlukan memerlukan persetujuan Presiden.

A. Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor B-126/M.KUKM/HK.01.00/IX/2022 tanggal 15 September 2022;
 - b. Nomor B-175/M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 23 November 2022;
 - c. Nomor B-178.M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 29 November 2022; dan
 - d. Nomor B-182/M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 30 November 2022.
- 2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
 - (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro;

- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan;
- (4) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- (5) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:

- (1) B.0421/Seskab/Ekon/09/2022 tanggal 16 September 2022;
- (2) B.0584/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 30 November 2022;
- (3) B.0591/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 7 Desember 2022; dan
- (4) B.0618/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.

B. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 4 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:

- a. Nomor HK.02.01/1095/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022;
- b. Nomor HK.02.01/1278/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
- c. Nomor HK.02.01/1657/IX/2022 tanggal 28 September 2022; dan
- d. Nomor HK.02.02/2200/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko Ekon) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat Nomor PH.2.1-275/M.EKON/11/22 tanggal 8 November 2022.

3) Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPerBIG) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat Nomor B-30.16/KA-BIG/HK.01.01/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

4) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. 4 (empat) RPermen ATR/Kepala BPN dan 1 (satu) RPermenko Ekon telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

- 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
- (1) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan;
 - (4) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang; dan
 - (5) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
- b. 1 (satu) RPerBIG tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal tidak termasuk dalam kriteria Pasal 3 Perpres 68 Tahun 2021, sehingga RPerBIG dapat langsung ditetapkan tanpa memerlukan persetujuan Presiden.
- c. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN, RPermenko Ekon dan RPerBIG tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.0314/Seskab/Ekon/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;
 - (2) B.0350/Seskab/Ekon/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 - (3) B.0413/Seskab/Ekon/09/2022 tanggal 12 September 2022;
 - (4) B.0470/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022;
 - (5) B.0558/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 21 November 2022; dan
 - (6) B.0625/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022.

C. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko Ekon) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. PH.2.1-165/M.EKON/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan
 - b. PH.2.1-298/M.EKON/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.
- 2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) RPermenko Ekon telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan

selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; dan
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- b. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN, RPermenko Ekon dan RPerBIG tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) PH.2.1-165/M.EKON/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan
 - (2) PH.2.1-298/M.EKON/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.

12. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Badan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Inovasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2022, Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi salah satunya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Badan. Pemberian rekomendasi permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan tersebut merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait pemberian rekomendasi permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2022 telah mengawal dan terlibat aktif dalam penyusunan 80 (delapan puluh) rancangan peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan pada tahun 2022. Terhadap 81 Rancangan Peraturan tersebut, sejumlah 42 (empat puluh dua) rancangan peraturan direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden, sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan yang direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
1.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Desain Teras Reaktor Daya	31 Desember 2021	B.0008/Seskab/Ekon/1/2022	6 Januari 2022
2.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Januari	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	tentang Statuta Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia	2022		2022
3.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Januari 2022	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari 2022
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	14 Februari 2022	B.0096/Seskab/Ekon/02/2022	16 Februari 2022
5.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
6.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
7.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Energi dan Manufaktur	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
8.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
9.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
10.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Elektronika dan Informatika			
11.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
12.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
13.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kesehatan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
14.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
15.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
16.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	22 Februari 2022	B.0108/Seskab/Ekon/03/2022	2 Maret 2022
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk	21 April 2022	B.193/Seskab/Ekon/04/2022	26 April 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Hortikultura			
19.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
20.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Klirens Etik Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
21.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Akuisisi Pengetahuan Lokal	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
22.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Mobilitas Periset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
23.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
24.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Permentan No. 43 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	11 Mei 2022	B.225/Seskab/Ekon/05/2022	18 Mei 2022
25.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif	14 Juni 2022	B.287/Seskab/Ekon/7/2022	5 Juli 2022
26.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk	29 Juni 2022	B.288/Seskab/Ekon/07/2022	5 Juli 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Bersubsidi Sektor Pertanian			
27.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Manajemen Penuaan Reaktor Nuklir	27 Juni 2022	B.295/Seskab/Ekon/7/2022	11 Juli 2022
28.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif	21 Juli 2022	B.0318/Seskab/Ekon/7/2022	22 Juli 2022
29.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K, Untuk Padi, Jagung, dan Kedelai Pada Lahan Sawah	15 Juli 2022	B.322/Seskab/Ekon/07/2022	26 Juli 2022
30.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Agustus 2022	B.0349/Seskab/Ekon/08/2022	22 Agustus 2022
31.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat (RPerba CBP-KPSH)	15 Agustus 2022	B.370/Seskab/Ekon/08/2022	25 Agustus 2022
32.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Akreditasi Penerbit Ilmiah	24 Agustus 2022	B.393/Seskab/Ekon/9/2022	11 September 2022
33.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Besaran, Persyaratan,	24 Agustus 2022	B.393/Seskab/Ekon/9/2022	11 September

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional			2022
34.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras	12 September 2022	B.0457/Seskab/Ekon/10/2022	4 Oktober 2022
35.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 September 2022	B.463/Seskab/Ekon/10/2022	4 Oktober 2022
36.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	18 Oktober 2022	B.502/Seskab/Ekon/10/2022	24 Oktober 2022
37.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	07 November 2022	B.0562/Seskab/Ekon/11/2022	21 November 2022
38.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai,	28 November 2022	B.0610/Seskab/Ekon/12/2022	12 Desember 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi			
39.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen	14 Desember 2022	B.0632/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022
40.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022
41.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022
42.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022

Salah satu Rancangan Peraturan Menteri yang direkomendasikan mendapat persetujuan Presiden adalah Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (RPermentan Perubahan TPP). RPermentan Perubahan TPP tersebut bertujuan untuk menjadi dasar bagi petugas karantina untuk dapat melakukan tindakan karantina di tempat-tempat yang belum ditetapkan dan penambahan lokasi tempat pemasukan, pengeluaran, dan pengeluaran dan/atau pemasukan antar area.

Pokok-pokok pengaturan RPermentan Perubahan TPP meliputi: (i) pengaturan bahwa tempat pemasukan dan tempat pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan termasuk terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang merupakan bagian dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan; (ii) mengubah ketentuan dalam lampiran Permentan untuk mengakomodir adanya penambahan atau penyesuaian nama tempat pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam 3 (tiga) kali putaran rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Berdasarkan pembahasan dan pengharmonisasian RPermentan Perubahan TPP tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa RPermentan TPP perlu mendapatkan persetujuan Presiden

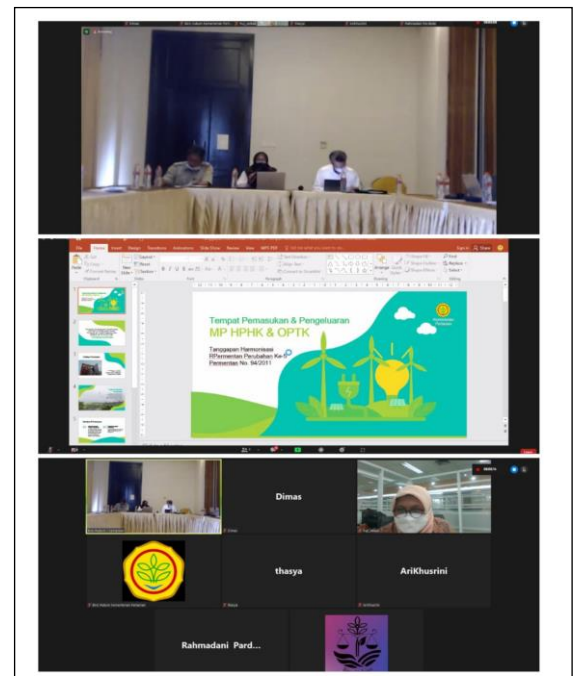
karena substansinya dinilai memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres No. 68/2021). Dalam hal ini, RPermentan TPP dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran dimaksud adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengamanatkan bahwa setiap pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa dari suatu area ke area lain dalam wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Pertanian menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pengajuan permohonan Persetujuan Presiden atas RPermentan Perubahan TPP sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 68/2021, berupa draft RPermentan Perubahan TPP yang telah diharmonisasi, naskah penjelasan urgensi atas RPermentan Perubahan TPP, dan surat keterangan selesai harmonisasi dari Kemenkumham, melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 262/HK.140/M/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden atas RPermentan Perubahan TPP kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B.502/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Selanjutnya, Menteri Pertanian melakukan penetapan RPermentan tersebut menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 (diundangkan tanggal 21 November 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1169).



**Surat Sekretaris Kabinet No.
B.502/Seskab/Ekon/10/2022**



**Rapat Harmonisasi RPermentan TPP tanggal 6
Oktober 2022**

13. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri

Salah satu faktor daya saing industri adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Kualitas menjadi faktor penting karena konsumen mempertimbangkan kualitas dalam membeli suatu produk selain harga. Kualitas ini merupakan keadaan dimana barang atau jasa memenuhi persyaratan tertentu, misalnya persyaratan terkait keamanan atau persyaratan pelanggan. Barang atau jasa yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan mendorong untuk membeli produk tersebut. Sedangkan bagi industri, kualitas memberikan nilai tambah dibanding pesaing. Di Indonesia, kualitas produk industri diatur melalui kegiatan standardisasi industri.

Untuk itu, perlu disusun Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) sebagai dasar hukum pelaksanaan standardisasi industri, serta memenuhi amanat PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri dan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

RPermenperin diterbitkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri dalam negeri yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat diantara produsen dalam negeri, serta upaya meminimalkan masuknya produk impor melalui peningkatan standar produk untuk substitusi impor.

Pokok pengaturan RPermenperin dimaksud, yakni:

- a. Perencanaan Standardisasi Industri dan perumusan standar bidang industri.
- b. Penerapan dan pemberlakuan standar bidang industri.
- c. Penilaian kesesuaian dan penunjukan lembaga penilai kesesuaian.
- d. Pembinaan standardisasi industri kepada lembaga penilai kesesuaian, perusahaan industri, sumber daya manusia di bidang standardisasi industri, dan/atau masyarakat oleh Menteri Perindustrian.
- e. Pengembangan Standardisasi Industri dalam perencanaan, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan Standardisasi Industri, meliputi diantaranya penyesuaian standar internasional dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi nasional.
- f. Pengawasan oleh Petugas Pengawasan Standardisasi Industri.
- g. Mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

RPermenperin tersebut telah dibahas bersama dari segi substansi maupun teknik dan prosedur penyusunan perundang-undangan dalam rapat harmonisasi yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Standardisasi Nasional, dan Sekretariat Kabinet.

Atas hal tersebut, Menteri Perindustrian kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor S/97/M-IND/HK/IX/2022, tanggal 21 September 2022 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden bahwa muatan RPermenperin dimaksud memenuhi kategori bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat yakni pelaku usaha pada umumnya terutama pelaku

usaha di bidang industri dan lembaga penilai kesesuaian, serta Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Nomor B.0458/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 kepada Menteri Perindustrian guna menyampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenperin dimaksud.

14. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

Sehubungan dengan telah ditetapkan dan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu diatur mengenai Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pengaturan tersebut, merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperoleh pembiayaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara (KPBU IKN).

Pengaturan tersebut juga berupaya mendorong implementasi kebijakan Pemerintah dalam penggunaan barang/jasa dalam negeri, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam proyek KPBU IKN. Proyek KPBU IKN dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) skema pengadaan, yakni Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Atas penanggung jawab proyek kerja sama (*Solicited*) dan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*).

Pelaksanaan pengadaan badan usaha dalam KPBU dilakukan melalui tender satu tahap melalui prakualifikasi, penggabungan prakualifikasi dan tender, *swiss challenge*, atau penunjukan langsung. Penambahan kriteria penunjukan langsung untuk proyek prakarsa badan usaha dalam percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pokok pengaturan RPerLKPP dimaksud:

- a. Pengaturan mengenai pelaku pengadaan yang meliputi penanggung jawab proyek kerja sama, panitia KPBU IKN, dan badan usaha atau lembaga/organisasi internasional.
- b. Penyiapan KPBU dapat difasilitasi oleh badan usaha atau lembaga/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan penanggung jawab proyek kerja sama melalui pengadaan badan penyiapan.

- c. Pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU atas penanggung jawab proyek kerja sama (*Solicited*) dan Pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU atas prakarsa badan usaha (*Unsolicited*).
- d. Panel badan penyiapan dan panel badan usaha dilakukan dengan pertimbangan hasil identifikasi kebutuhan, telah tersedia panel yang dapat digunakan oleh penanggung jawab proyek kerja sama, kualifikasi panel sesuai dengan kebutuhan Proyek KPBU IKN, dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik panel.
- e. Penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap proyek prioritas pejabat penanggung jawab proyek kerja sama yang merupakan prakarsa badan usaha dan pelaksanaannya memberikan efek berganda atas percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- f. Jaminan pengadaan, berupa jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan yang sifatnya tanpa syarat (*unconditional*), dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, dan dapat dicairkan di Indonesia.
- g. Pengawasan, pengaduan, dan pertentangan kepentingan, guna memastikan kompetisi berjalan sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.

RPerLKPP tersebut telah dibahas bersama dari segi substansi maupun teknis dan prosedur penyusunan perundang-undangan dalam rapat harmonisasi yang dihadiri antara lain oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kematiraman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Sekretariat Kabinet, serta Otorita Ibu Kota Nusantara, dan dinyatakan selesai harmonisasi pada tanggal 28 November 2022.

Atas hal tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor 33055/KA/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden bahwa muatan RPerLKPP dimaksud memenuhi kategori bersifat strategis terhadap keuangan negara, dan berdampak luas kepada masyarakat selaku pelaku usaha, serta kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Nomor B.0639/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 kepada Kepala LKPP guna menyampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenperin dimaksud.

15. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 36 Tahun 2020). Program Kartu Prakerja pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Program Kartu Prakerja

merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pembekalan kompetensi kerja (*skilling*), peningkatan kompetensi kerja (*reskilling*), dan alih kompetensi (*upskilling*) untuk pekerja di masa depan.

Program Kartu Prakerja yang pada awalnya bermanfaat untuk memperoleh pelatihan dan insentif bagi pencari kerja terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, dengan mengutamakan nilai manfaat untuk pelatihan. Dalam perkembangannya mengalami penyesuaian untuk merespon adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, yaitu berperan sebagai bantuan sosial dengan memanfaatkan insentif pasca pelatihan. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut, Perpres 36 Tahun 2020 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan perubahan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Perpres tersebut antara lain mengubah ketentuan mengenai tujuan Program Kartu Prakerja untuk pengembangan kewirausahaan, selain itu Program Kartu Prakerja juga diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Perubahan yang paling mendasar dari Perpres tersebut adalah bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.

Pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 secara proaktif melakukan perlindungan sosial melalui Program Kartu Prakerja yang didesain khusus menjadi program semi bansos. Program perlindungan sosial berupa *cash plus* yakni memberikan bantuan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia serta bersifat inklusif.

Presiden dalam acara silaturahmi dengan alumni Penerima Kartu Prakerja pada tanggal 17 Juni 2022 menyampaikan bahwa “Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dan agar program Kartu Prakerja dapat terus dievaluasi dan diperbaiki”.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian dan K/L terkait telah melakukan serangkaian rapat pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan Program Kartu Prakerja, sehingga disepakati bahwa Program Kartu Prakerja efektif dilaksanakan dan akan diteruskan pada tahun 2023 dengan skema normal yang lebih difokuskan pada bantuan peningkatan *skill* dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* sebagaimana konsep awal program Kartu Prakerja.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka diperlukan landasan hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2023, setelah masa pandemi Covid-19 melandai. Dengan demikian, Perpres 76 Tahun 2020 yang merupakan landasan hukum untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan skema semi bansos perlu dilakukan perubahan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 113 Tahun 2022), sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema normal.

Dalam rangka untuk mengatur lebih teknis perubahan ketentuan dalam Perpres 113 Tahun 2022 guna meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja setelah melandainya pandemi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Sekretaris Kabinet telah melaporkan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko) dimaksud kepada Presiden, karena sifatnya yang strategis, berdampak luas kepada masyarakat, dan lintas sektor.

Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.531/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 4 November 2022 menyampaikan persetujuan Presiden sebagai dasar penetapan RPermenko tersebut. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, tanggal 4 November 2022.

Surat Sekretaris Kabinet tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Program Kartu Prakerja



IKK 3 (rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti)

1. Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemerintah pada tahun 2020 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi regulasi dengan melakukan penyesuaian terhadap sekurang-kurangnya 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Selanjutnya, penerapan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan persyaratan investasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur mengenai persyaratan dasar, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian sejak awal telah terlibat secara aktif dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Keterlibatan tersebut terlihat pula dalam upaya pengendalian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas implementasi pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, khususnya dalam hal terjadi hambatan dalam implementasi pelayanan perizinan berusaha dimaksud. Implementasi pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan persyaratan investasi dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau lebih dikenal dengan nama Sistem OSS yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021.

Walaupun seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan dan Sistem OSS diluncurkan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya pengendalian atas pelayanan perizinan menjadi hal utama yang dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menikmati manfaat dari perubahan paradigma perizinan berusaha yang berbasis risiko. Salah satu upaya yang terus dilakukan

adalah penyelesaian permasalahan implementasi perizinan berusaha dan persyaratan dasar serta penyederhanaan perizinan berusaha untuk memberikan kemudahan dan kecepatan sebagaimana tujuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2022, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian telah menginisiasi serangkaian kegiatan penyelesaian permasalahan diantaranya mengenai:

- a. persyaratan dasar mencakup persetujuan mengenai lokasi, lingkungan, dan bangunan gedung; dan
- b. pengampu dan lingkup kegiatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan bersama kementerian/lembaga dan hasilnya ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dalam pelayanan perizinan berusaha. Penjelasan terkait hal penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan persyaratan dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan dasar mencakup pemanfaatan ruang, lingkungan, dan bangunan gedung

1) Pemanfaatan Ruang

Simplifikasi terhadap ketentuan perizinan dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (**KKPR**) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUCK. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UUCK, KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 98 ayat (1) PP 21/2021 mengatur bahwa dokumen KKPR diberikan untuk:

1. kegiatan berusaha non-UMK,
2. kegiatan nonberusaha, dan
3. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Sementara itu, dokumen KKPR dapat diberikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Konfirmasi KKPR

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (**RDTR**) (Pasal 1 angka 18 PP 21/2021). Pasal 105, Pasal 121, dan Pasal 137 ayat (3) PP 21/2021 lebih lanjut mengatur bahwa jangka waktu penerbitan Konfirmasi KKPR untuk ketiga kegiatan di atas paling lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Hal ini dimungkinkan sebab pemberian Konfirmasi KKPR dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berdasarkan ketersediaan RDTR yang *embedded* dalam sistem *Online Single Submission (OSS)* (Pasal 179 ayat (2) dan (3) PP 5/2021) sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya jika RDTR suatu Kabupaten/Kota sudah diterbitkan.

2. Persetujuan KKPR

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR (Pasal 1 angka 19 PP 21/2021), yang diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana pemanfaatan ruang tersebut (Pasal 106 ayat (2) PP 21/2021). Jangka waktu penerbitan Persetujuan KKPR untuk ketiga kegiatan di atas paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran (permohonan

Nomor Induk Berusaha/NIB diajukan) atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak (Pasal 180 ayat (3) PP 5/2021, Pasal 112, Pasal 128, dan Pasal 137 ayat (4) PP 21/2021). Dalam hal jangka waktu dimaksud terlampaui dan Persetujuan KKPR tidak diterbitkan, Persetujuan KKPR diterbitkan oleh Lembaga OSS (Pasal 180 ayat (4) PP 5/2021, Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (1) PP 21/2021).

3. **Rekomendasi KKPR**

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 1 angka 20 PP 21/2021). Dengan kata lain, Rekomendasi KKPR hanya diperlukan untuk rencana kegiatan yang bersifat strategis nasional yang belum diatur dalam rencana tata ruang manapun. Jangka waktu penerbitan Rekomendasi KKPR paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak (Pasal 141 ayat (1) PP 21/2021). Dalam hal jangka waktu dimaksud terlampaui dan Rekomendasi KKPR tidak diterbitkan, Menteri (dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dianggap telah memberikan Rekomendasi KKPR (Pasal 141 ayat (2) PP 21/2021).

Sebagai wujud kemudahan bagi pelaku usaha UMK, kegiatan berusaha untuk UMK tidak diberlakukan kewajiban kepemilikan dokumen KKPR. Sebagai gantinya, terhadap kegiatan berusaha untuk UMK dikenakan kewajiban untuk membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal pernyataan mandiri dimaksud terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Implementasi dari persyaratan dasar terkait pemanfaatan ruang mengalami beberapa permasalahan diantaranya penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pelaksanaan pemberian KKPR. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan dimaksud, terakhir melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (**RDTR**) *Online Single Submission* (**OSS**) dan Pelaksanaan Pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (**KKPR**) di Daerah pada tanggal **21 Desember 2022**.

Rapat dimaksud dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (**Kementerian ATR/BPN**), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (**Kemenves/BKPM**), dan Kantor Staf Presiden (**KSP**). Dalam rapat tersebut, disepakati hal sebagai berikut:

a. Penyusunan RDTR OSS

- 1) Kementerian Dalam Negeri agar memantau dan mengevaluasi Pemerintah Daerah sehubungan dengan kewajiban penganggaran penyusunan RDTR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 2) Kementerian ATR/BPN agar mengkaji penambahan pemberian bantuan teknis penyusunan RDTR di lokasi lainnya dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a) Lokasi tersebut merupakan lokasi yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi sehingga menjadi prioritas pelaksanaan investasi; dan/atau
 - b) Lokasi yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk disusun RDTR dan telah dianggarkan dalam APBD.
- b. Pelaksanaan Pemberian KKPR
- 1) Kemenves/BKPM secara terkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri agar melakukan bimbingan teknis secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan sosialisasi kepada masyarakat guna penyelesaian kendala teknis dalam operasionalisasi sistem OSS. Selanjutnya, Kemenves/BKPM agar menempatkan perwakilannya di Daerah guna penyelesaian kendala koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam operasionalisasi sistem OSS.
 - 2) Kementerian ATR/BPN agar mempercepat penyusunan petunjuk teknis pemberian Persetujuan KKPR sebagai tindak lanjut dari PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021, yang antara lain memuat SLA untuk kegiatan pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan permohonan Persetujuan KKPR dan penilaian terhadap permohonan Persetujuan KKPR. Selanjutnya guna efektivitas dalam pelaksanaannya di Daerah, kiranya Kementerian Dalam Negeri dapat menyusun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan petunjuk teknis tersebut.



Rangkaian kegiatan pemantauan evaluasi percepatan penyusunan RDTR OSS, yang diakhiri dengan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penyusunan RDTR OSS dan Pelaksanaan Pemberian KKPR pada tanggal 21 Desember 2022

3) Lingkungan

Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian sejak tahun 2021 terus berupaya untuk memastikan penyelesaian permasalahan persyaratan dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan percepatan integrasi sistem informasi terkait dengan sistem OSS, dengan progres terakhir rangkaian Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya Dengan OSS untuk membahas permasalahan persyaratan dasar secara umum pada tanggal 2 Desember 2022. Berdasarkan kesepakatan rapat tersebut, pada tanggal 14 Desember 2022 kembali diselenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDALNET) dengan OSS untuk memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan lingkungan melalui AMDALNET yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan terintegrasi dengan sistem OSS. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendes/BKPM, KSP, dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia.

Rapat tersebut pada dasarnya menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Format Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Rapat menyepakati perubahan atas nomenklatur atau judul surat keputusan atas pemenuhan persyaratan dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh sistem OSS sebagai “Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Hal tersebut untuk menegaskan perbedaan antara persetujuan atas Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di daerah dengan surat yang dikeluarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, yang bersifat penetapan dan terkait dengan pemenuhan persyaratan dasar dalam perizinan berusaha.
- b. Percepatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Untuk memastikan percepatan dalam proses penilaian Amdal yang disusun oleh pelaku usaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan Penyusunan dan penetapan kerangka acuan.
- c. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Perlu dilakukan sosialisasi ke daerah untuk memastikan pemahaman daerah atas konsepsi dari perubahan format penerbitan persetujuan lingkungan dan memperjelas pelaksanaan kewenangan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup

di tingkat daerah dan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Penapisan Risiko Lingkungan

Penapisan risiko lingkungan dalam proses perizinan berusaha tidak diperlukan, mengingat aspek lingkungan merupakan bagian dari tingkat risiko. Oleh sebab itu, hal-hal yang menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait risiko lingkungan, kiranya disampaikan dalam penentuan tingkat risiko perizinan berusaha.

e. Akses AMDALNET

AMDALNET tetap dapat digunakan untuk pemenuhan persetujuan lingkungan, mengingat terdapat pihak di luar pelaku usaha yang harus menyusun AMDAL, dan sistem OSS belum dapat mengakomodasi perubahan/addendum AMDAL. Pelaku usaha yang melakukan addendum AMDAL harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hasil addendum yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas LHK diberitahukan kepada Kementerian Investasi/BPKM atau DPMPTSP untuk dimuat dalam sistem OSS.



Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya Dengan OSS di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022, sebagai rangkaian penyelesaian permasalahan persyaratan dasar dan integrasi sistem terkait persyaratan dasar dengan sistem OSS.



Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem AMDALNET dengan OSS pada tanggal 14 Desember 2022.

3) Bangunan Gedung

Serangkaian kegiatan rapat koordinasi telah dilakukan oleh Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian dalam upaya menyelesaikan permasalahan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung. Salah satunya adalah rapat koordinasi pada tanggal 8 Februari 2022 yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rapat dimaksudkan untuk membahas penyelesaian permasalahan pelayanan penerbitan PBG serta pelaksanaan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan yang belum berjalan optimal, yang disebabkan banyaknya Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melakukan proses atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau menetapkan Peraturan Daerah terkait retribusi PBG.

Pokok-pokok pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan dalam implementasi PBG adalah:

- a. Kebijakan transisi diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penerbitan PBG oleh daerah, yakni:
 - 1) Penerbitan PBG oleh daerah menggunakan Perda yang ada, yaitu Perda mengenai retribusi IMB. Nomenklatur IMB dalam Perda harus dibaca dan dimaknai sebagai PBG, dan pelaksanaan retribusi untuk PBG menggunakan Perda yang mengatur retribusi IMB.
 - 2) Perda mengenai retribusi PBG harus segera disusun dan wajib diselesaikan paling lambat September 2022, untuk menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan insentif PPN DTP sektor perumahan yang berlaku sampai dengan September 2022.
 - 3) Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Sekretariat Kabinet memberikan fasilitasi percepatan pelaksanaan PBG dan percepatan penyelesaian Perda mengenai retribusi PBG, termasuk penyiapan fasilitasi pendanaan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan transisi tersebut perlu didukung dasar hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa melalui sanksi. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud hendaknya diselesaikan dalam jangka waktu dekat, memperhatikan jangka waktu pemberian pemberian insentif PPN DTP sektor perumahan yang akan berakhir pada September 2022 dan pendaftaran untuk pemanfaatan insentif tersebut dibatasi paling lambat 31 Maret 2022.

Kesepakatan dari rapat tersebut, selanjutnya telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Surat Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama Nomor 973/1030/SJ pada tanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya mencabut ketentuan terkait penyelenggaraan layanan PBG dalam SE Menteri

Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ dan menjabarkan ketentuan terbaru terkait dengan penyusunan Perda terkait Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan layanan PBG bagi Daerah yang belum menetapkan Perda dimaksud.



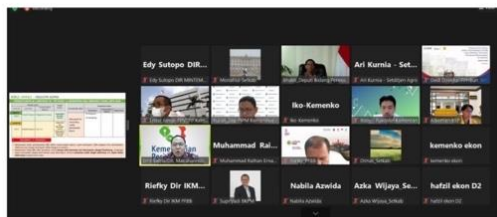
Surat Sekretaris Kabinet
 Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal
 11 Februari 2022 perihal Penyelesaian
 Permasalahan Penerbitan PBG Serta
 Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif
 PPN DTP Sektor Perumahan

Surat Edaran Bersama 4 Menteri
 Nomor 973/1030/SJ tanggal 25 Februari
 2022 perihal Percepatan Pelaksanaan
 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

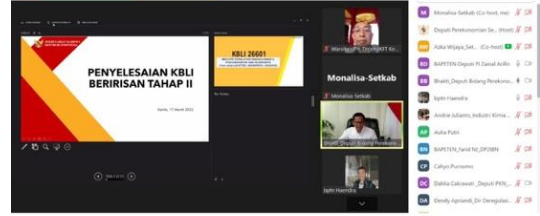
B. Pengampu dan lingkup kegiatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian hingga saat ini terus melaksanakan evaluasi atas perizinan berusaha berbasis risiko bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga pengampu perizinan berusaha dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas perizinan berusaha sektor perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan, kesehatan, pertanian, dan ketenagaukliran.

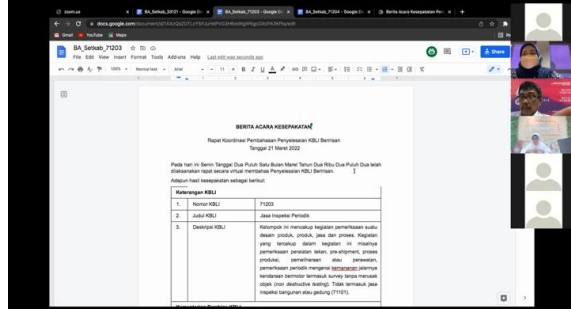
Terdapat beberapa isu terkait simplifikasi perizinan yang diselesaikan melalui evaluasi dimaksud, namun salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dan bersifat urgen untuk diselesaikan adalah penyelesaian perizinan berusaha yang beririsan dan sebelumnya diampu oleh lebih dari satu kementerian/lembaga (KBLI Beririsan), yang diselesaikan melalui rangkaian rapat koordinasi penyelesaian KBLI Beririsan untuk menetapkan kementerian/lembaga pengampu perizinan berusaha.



Rapat Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Pertanian dan Industri, pada tanggal 16 Maret 2022

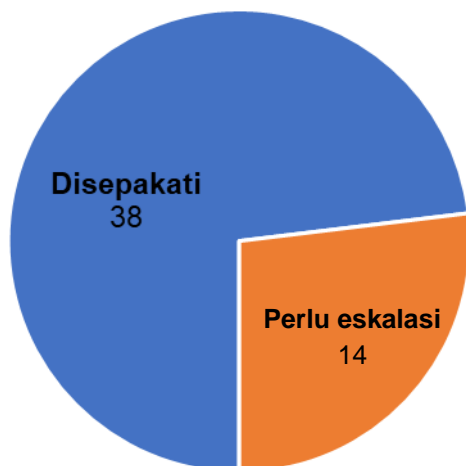


Rapat Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Ketenaganukliran, tanggal 17 Maret 2022



Rapat Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Ketenagakerjaan/Jasa, pada tanggal 21 Maret 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan 52 (lima puluh dua) KBLI Beririsan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan hasil 38 (tiga puluh delapan) di antaranya dapat mencapai kesepakatan dan 14 (empat belas) lainnya perlu dieskalasi guna penyelesaiannya di tingkat Menteri.



Hasil rapat KBLI Beririsan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian tersebut disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal kementerian/lembaga terkait melalui surat Deputi Bidang Perekonomian Nomor:

- B.95/Ekon/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 (Sektor Industri dan Kesehatan);
 - B.106/Ekon/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 (Sektor Industri dan Kesehatan);
 - B.131/Ekon/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 (Sektor Pertanian dan Industri);
 - B.132/Ekon/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 (Sektor Ketenaganukliran);
 - B.146/Ekon/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 (Sektor Ketenagakerjaan atau Jasa);
 - B.158/Ekon/04/2022 tanggal 4 April 2022 (Sektor Industri dan Jasa);
 - B.169/Ekon/04/2022 tanggal 8 April 2022 (Sektor Perdagangan); dan
 - B.192/Ekon/04/2022 tanggal 19 April 2022 (Sektor Perindustrian).
- yang selanjutnya menjadi dasar kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha terkait.

Rekapitulasi Evaluasi KBLI Beririsan

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet

Keterangan:

■ disepakati

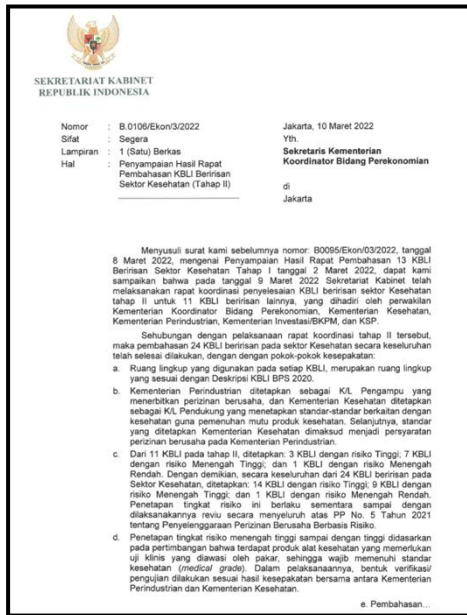
■ perlu eskalasi pembahasan

Rincian:

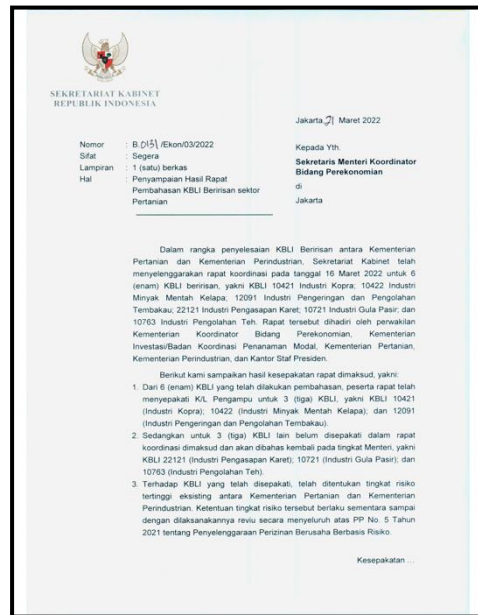
24 Sektor Kesehatan
 4 Sektor Ketenagakerjaan
 3 Sektor Perdagangan
 3 Sektor Pertanian
 2 Sektor Perindustrian
 2 Sektor Ketenaganukliran

Rincian:

11 Sektor Perindustrian
 3 Sektor Pertanian



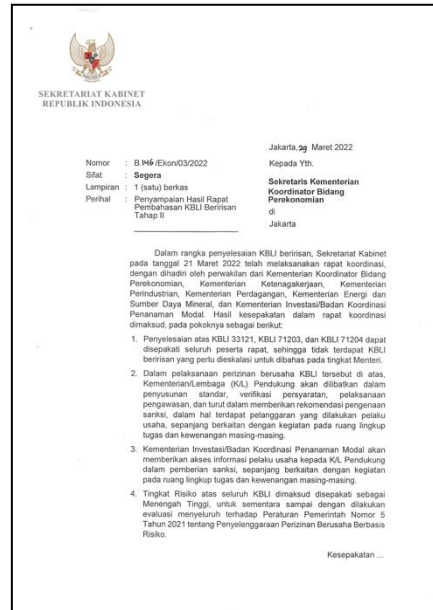
**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.95/Ekon/03/2022
tanggal 10 Maret 2022**



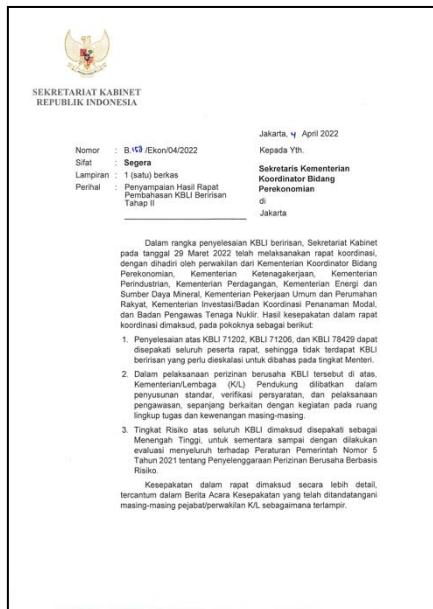
**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.131/Ekon/03/2022
tanggal 21 Maret 2022**



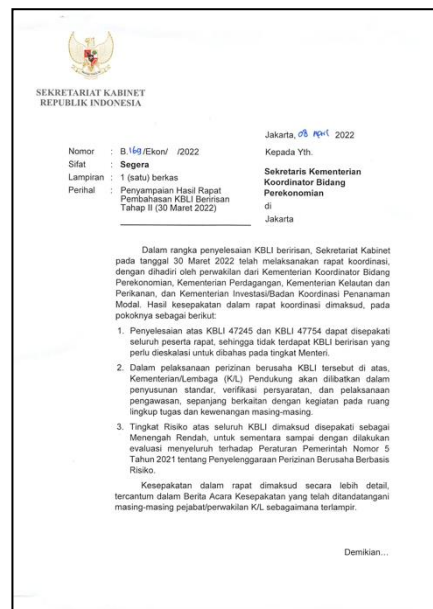
**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.132/Ekon/03/2022
tanggal 21 Maret 2022**



**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.146/Ekon/03/2022
tanggal 29 Maret 2022**



Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.158/Ekon/04/2022
tanggal 4 April 2022



Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.169/Ekon/04/2022
tanggal 8 April 2022

Selain KBLI Beririsan, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan KBLI tertentu untuk diampu oleh kementerian/lembaga terkait. Salah satu upaya penyelesaian perizinan berusaha yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan permasalahan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322. Rapat tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat nomor 2/1597/HK.09.01/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai permohonan untuk mengampu KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknisi 74311, 74322, 74321, dan 74322.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dalam rapat, disepakati hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- KBLI 74311 dan 74312 bukan merupakan kegiatan usaha yang perizinannya diproses melalui sistem OSS karena sifat dari kegiatan usaha kedua KBLI tersebut;
- KBLI 74321 yang sebelumnya hanya meliputi sektor konstruksi yang diampu oleh Kementerian PUPR, disepakati sebagai KBLI multisektor dengan sektor di luar konstruksi diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- KBLI 74322 tetap diproses sebagaimana saat ini telah berjalan di sistem OSS, dengan Kementerian ESDM sebagai pengampunya. Dalam hal Kementerian Ketenagakerjaan akan mengajukan untuk menjadi pengampu sektor di luar ketenagalistrikan, Kementerian Ketenagakerjaan diharuskan untuk menyampaikan kajian terkait hal tersebut;

- d. BNSP tetap dapat melakukan tugas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk KBLI 74321 sektor nonkonstruksi dan segera menyampaikannya kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk segera ditanamkan dalam sistem OSS,

Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui Surat Deputy Bidang Perekonomian Nomor B.716/Ekon/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322.



Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322) tanggal 1 November 2022

Surat Deputy Bidang Perekonomian
 Nomor B.716/Ekon/11/2022
 Tanggal 30 November 2022
 Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322

2. Penyampaian Masukan atas Hasil Rapat Koordinasi Persiapan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat 14 Februari 2022

Pada tanggal 17 Februari 2022, Asdep Ekon-1 memformulasikan surat Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet kepada Deputy Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat dengan nomor B.0065/Ekon/02/2022 tertanggal 17 Februari 2022. Surat tersebut dirancang sebagai Penyampaian Masukan atas Hasil Rapat Koordinasi Persiapan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat pada tanggal 14 Februari 2022. Surat tersebut merupakan penegasan terhadap fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian masalah (*debottlenecking*) atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan, sejalan dengan peranan dari Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet yang memang merupakan anggota dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

Secara substansi, surat tersebut berisi penegasan terhadap arahan Presiden untuk permasalahan inflasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Adapun materi yang dicantumkan dalam surat antara lain ialah: 1) Antisipasi terhadap

ketersediaan dan keterjangkauan harga barang/komoditas terutama pangan (*Volatile Food*) karena adanya transmisi harga impor dan peningkatan biaya ke harga konsumen; dan 2) Pengembangan infrastruktur konektivitas untuk mendukung kelancaran distribusi dalam rangka penurunan disparitas harga antar wilayah.



Gambar Surat Deputy Bidang Perekonomian terkait Penyampaian Masukan atas Hasil Rapat Koordinasi Persiapan *High Level Meeting* Tim Pengendali Inflasi Pusat 14 Februari 2022

3. Tindak Lanjut Penyelesaian 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada Presiden

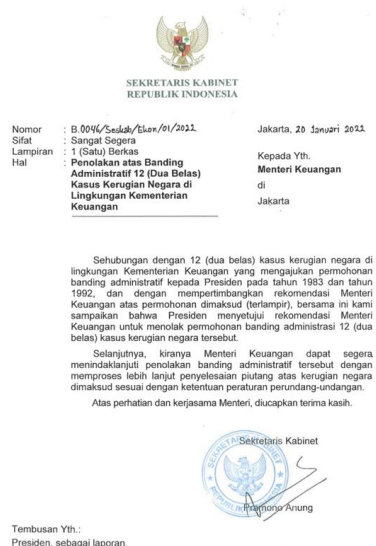
Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara didasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indonasische Comptabiliteitswet/ICW Staatsblad* 1925 Nomor 48) yang mengatur bahwa pegawai negeri bukan bendaharawan yang telah dibebankan untuk mengganti kerugian negara dimungkinkan untuk **mengajukan proses banding administratif kepada Presiden**. Berdasarkan ICW tersebut, terdapat **12 kasus kerugian negara** di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengajukan **banding administrasi kepada Presiden pada tahun 1983 dan tahun 1992**. Mengingat permohonan banding administrasi tersebut sampai dengan sekarang **belum mendapatkan keputusan Presiden**, 12 kasus tersebut masih **tercatat** dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga oleh BPK masih diberikan **status sebagai kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti**.

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk **menolak dengan tegas permohonan banding administrasi 12 kasus** tersebut melalui surat nomor S-600/MK.01/1984 tanggal 21 Juni 1984 (rekomendasi penolakan banding 1 kasus a.n. Sdr. R. Soerijawinata S.H.) dan surat nomor S-739/MK.01/2014 tanggal 5 November 2014 (rekomendasi penolakan banding 11 kasus kerugian negara). Berkaitan dengan permohonan banding tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan rapat koordinasi antar K/L tanggal 19 Maret 2014 dan kegiatan FGD tanggal 17 Juli 2017 dengan mengundang pakar hukum Administrasi Negara

Universitas Indonesia, untuk membahas **rekomendasi penyelesaian** dan **pertimbangan hukum** atas keputusan Presiden atas permohonan banding administrasi tersebut. Dalam FGD tersebut, disepakati bahwa penyelesaian atas permohonan banding administrasi 12 kasus kerugian negara **mengikuti ketentuan ICW Staatsblad 1925 Nomor 48** yang menjadi dasar hukum pengajuan atas permohonan banding administrasi dimaksud, sehingga rapat dapat menyetujui rekomendasi Menteri Keuangan agar kiranya Presiden **menolak** permohonan banding administrasi 12 kasus kerugian negara. Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dimaksud, kami telah menyampaikan **rekomendasi** kepada Presiden untuk **menolak permohonan banding administrasi atas 12 kasus kerugian negara** dimaksud melalui beberapa memorandum (terakhir dengan memorandum nomor: M.753 tanggal 10 Juli 2018).

Memperhatikan hal tersebut guna memberikan **kepastian hukum** dan **ketertiban administrasi keuangan negara** sesuai dengan rekomendasi BPK, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kembali kepada Presiden mengenai rekomendasi penolakan atas permohonan banding administratif dimaksud dan mohon perkenan Presiden untuk kiranya Sekretaris Kabinet dapat menyampaikan persetujuan Presiden untuk menolak permohonan banding dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui Memorandum Nomor M.78 tanggal 20. Januari 2022.

Selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas rekomendasi Menteri Keuangan untuk menolak banding administrasi atas 12 kasus kerugian negara tersebut melalui Surat Sekretaris Kabinet **Nomor B.0046/Seskab/Ekon/01/2022**. Dalam surat dimaksud, Sekretaris Kabinet juga Menteri Keuangan untuk dapat segera menindaklanjuti penolakan banding administratif tersebut dengan memproses lebih lanjut penyelesaian piutang atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Surat Sekretaris Kabinet terkait Penolakan atas Banding Administratif 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, 26 Januari 2022

4. Penyampaian Masukan atas Rencana Diversifikasi Produk *Brown Sugar* (KBLI 10722) PT. Rejoso Manis Indo

Dalam rangka monitoring realisasi investasi di Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM melakukan pemantauan lapangan dengan mengunjungi PT RMI yang berstatus PMA pada tanggal 9 s.d. 10 Maret 2022 dengan mengikutsertakan Sekretariat Kabinet. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam monitoring tersebut adalah hambatan yang dialami oleh PT RMI untuk melakukan perluasan jenis produk PT RMI, dari sebelumnya hanya terbatas pada Gula Kristal Putih/GKP menjadi **diversifikasi pada *brown sugar*** guna memenuhi permintaan dalam negeri yang selama ini dipenuhi melalui impor. Dapat disampaikan, ***brown sugar*** merupakan salah satu produk dalam Industri Gula Merah (KBLI 10722) yang berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, merupakan **bidang usaha yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM**. Dengan adanya ketentuan tersebut, hingga saat ini PT. RMI **belum dapat melakukan diversifikasi** atas produk yang dihasilkan. Menyusuli hal tersebut, PT RMI telah menyampaikan permasalahan diversifikasi produk kepada Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM melalui surat nomor 076/LGL/RMI/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, hal Permasalahan Investasi terkait dengan Pengembangan Diversifikasi Produk untuk dapat segera dicarikan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan investasi pengembangan diversifikasi produk tersebut.

Menindaklanjuti permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet ikut menghadiri rapat pembahasan KBLI Industri Gula Merah (10722) yang dialokasikan untuk Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2022. Sehubungan dengan hasil rapat pembahasan dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan surat kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui surat nomor B.0152/Ekon/03/2022, tanggal 31 Maret 2022, hal Penyampaian Masukan atas Rencana Diversifikasi Produk *Brown Sugar* (KBLI 10722) PT. Rejoso Manis Indo. Berdasarkan koordinasi lebih lanjut atas penyampaian surat tersebut, solusi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi adalah menambahkan ruang lingkup dalam sistem OSS RBA sehingga untuk KBLI 10722 tidak terbatas hanya untuk UMKM, tapi juga dapat dilakukan oleh Usaha Besar sepanjang Usaha Besar tersebut melakukan kemitraan.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0152/Ekon/03/2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Masukan atas Rencana
Diversifikasi Produk *Brown
Sugar* (KBLI 10722) PT. Rejoso
Manis Indo

Jakarta, 31 Maret 2022
Kepada Yth.
Deputy Bidang Pengembangan
Iklim Penanaman Modal
Kementerian Investasi/BKPM
di
Tempat

Menyusul hasil rapat yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 17 Maret 2022 mengenai KBLI Industri Gula Merah (KBLI 10722) yang dialokasikan untuk UMKM, disampaikan bahwa dalam rangka memfasilitasi rencana diversifikasi produk *brown sugar* PT. Rejoso Manis Indo (PT RMI), maka Industri Gula Merah (KBLI 10722) dapat dialokasikan untuk Usaha Besar sebagaimana dalam Lampiran I Sektor Perindustrian PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 49/2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami mendukung usaha untuk memfasilitasi rencana diversifikasi PT RMI sebagai Usaha Besar dan berstatus PMA guna memproduksi *brown sugar* dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini dilakukan melalui mekanisme impor. Namun demikian, kiranya dapat dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Dalam Lampiran II Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 49/2021), dijelaskan bahwa KBLI 10722 merupakan KBLI yang dialokasikan untuk UMKM. Perpres 49/2021 tersebut merupakan dasar hukum mengenai pengalokasian bidang usaha untuk kegiatan penanaman modal. Sedangkan, PP 5/2021 pada pokoknya merupakan aturan sebagai tolak ukur atau penerapan prinsip NSPK dalam perizinan berusaha.

2. a. Berdasarkan BPS 2020, meskipun KBLI 10722 mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang umum dari itu sebagai bahan baku berasal dari tebu maupun tanaman palma (tanah kelapa dan sejenisnya). Sedangkan dalam prosesnya, produksi *brown sugar* PT RMI menggunakan metode penghablakan dengan teknologi modern untuk menghasilkan gula dalam bentuk balok kristal.

b. Mempertahankan hal tersebut, kiranya rencana diversifikasi produk *brown sugar* PT RMI dapat dipertimbangkan kembali untuk dialokasikan ke dalam KBLI Industri Gula Pasir (10721), mengingat:

1) Berbeda KBLI 10721 mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, di situ pun halnya. Berbeda KBLI 10722 tidak melibatkan secara spesifik jenis warna yang dihasilkan atas gula yang diproduksi, namun lebih pada penanaman bentuk kristal atas produk yang dihasilkan dari usaha pembuatan gula.

2). Berdasarkan ...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- 2). Berdasarkan Perpres 49/2021, KBLI 10721 merupakan KBLI dalam Lampiran I Bidang Usaha Prioritas dengan kewajiban kemitraan, sehingga mengakibatkan diversifikasi produk *brown sugar* PT RMI ke dalam KBLI 10721 dengan kewajiban kemitraan, selaras dengan arahan Presiden untuk memberikan perlindungan dan keberlanjutan kepada UMKM. Lebih lanjut, pengalokasian ke dalam KBLI 10721 juga meminimalkan terjadinya potensi pendirian UMKM atas masalahnya pada Usaha Besar ke dalam Industri Gula Merah (KBLI 10722) yang secara ekasing hanya dilakukan oleh pelaku UMKM.
 3. Selanjutnya, Kementerian Investasi/BKPM bersama dengan Kemetrico Bidang Perindustrian dan Kementerian Perindustrian agar secara bersama-sama melakukan review menyeluruh atas ketentuan yang terdapat dalam Perpres 49/2021 dan PP 5/2021 guna konsistensi pengukuran sehingga tidak menimbulkan multibaur dalam aturan pelaksanaan.
- Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputy Bidang Perencanaan
Saltya Bhakti Parkit

- Tembusan Yth:
1. Sekretaris Kabinet, sebagai laporan
 2. Wakil Sekretaris Kabinet,
 3. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perencanaan, dan
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

5. Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Master)

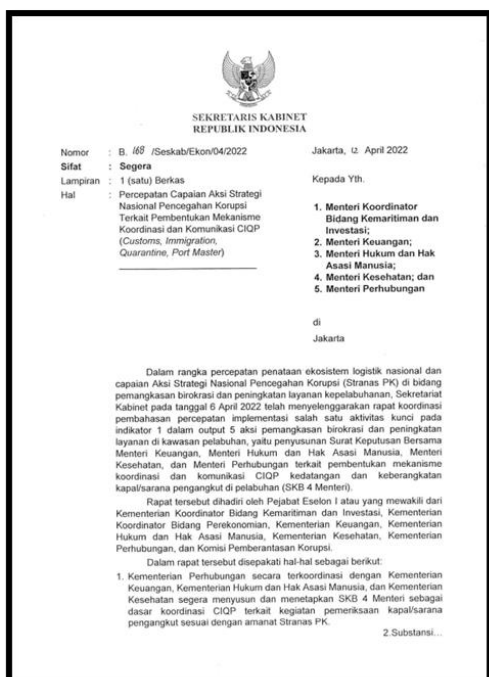
Dalam rangka percepatan penataan ekosistem logistik nasional dan capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bidang pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan kepelabuhanan, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022 menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan percepatan implementasi salah satu aktivitas kunci pada indikator 1 dalam output 5 aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, yaitu penyusunan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan terkait pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut di pelabuhan (SKB 4 Menteri).

Rapat tersebut dihadiri Pejabat Eselon I atau yang mewakili dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada k/1 terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B/168/Seskab/Ekon/04/2022 perihal Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP.

Dalam surat Sekretaris Kabinet tersebut disampaikan kesepakatan dalam rapat, sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kesehatan segera menyusun dan menetapkan SKB 4 Menteri sebagai dasar koordinasi CIQP terkait kegiatan pemeriksaan kapal/sarana pengangkut sesuai dengan amanat Stranas PK.
2. Substansi SKB 4 Menteri antara lain memuat:
 - a. Penetapan koordinator forum CIQP, yaitu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Tugas, fungsi, serta kebutuhan dari masing-masing kementerian dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut;
 - c. Mekanisme dan instrumen komunikasi dan koordinasi antar k/1 dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut;
 - d. Standar kinerja, standar operasional, serta tata kelola monitoring dan evaluasi dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut.
3. Penyusunan SKB 4 Menteri diselesaikan maksimal paling lambat 3 bulan (Juli 2022) dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasca pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi lanjutan dan kegiatan konsinyering penyusunan SKB 4 Menteri. di pelabuhan Indonesia dengan k/1 terkait dan pada 29 Juni 2022 telah dilaksanakan acara penandatanganan PKS tersebut yang bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Surat Sekretaris Kabinet kepada Menko
Bidang Kemaritiman dan Investasi,
Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan
HAM, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Perhubungan

6. Penyelesaian Permasalahan Terkait Implementasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dan *Major Project* Korporasi Petani Dan Nelayan

Dalam Ratas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk fokus menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain, serta memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu K/L agar memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.

Menindaklanjuti arahan dimaksud, Kemenko Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) Korporasi Percontohan Utama nasional yaitu: Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (untuk komoditas padi); PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (untuk komoditas kopi); dan Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (untuk komoditas perikanan tangkap). Hal dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet nomor: M.899 tanggal 28 Oktober 2021 hal Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden terkait Penguatan Peran Koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet beserta K/L terkait (Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pertanian, Kemenkop UKM, Himbara, Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian KKP, Perwakilan BUMN selaku pendamping, dan Pemda setempat) telah melakukan kunjungan kerja ke-3 lokasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

- a. **Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (Komoditas Padi) pada tanggal 21-23 Februari 2022**, teridentifikasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan yaitu: (i) pengadaan pupuk tidak tepat waktu; (ii) Penerapan *transplanter* tidak sesuai kondisi tanah; (iii) APBN Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian untuk pembiayaan RMU dengan kapasitas 3-5 Ton/jam tidak masuk dalam *e-catalog* (hibah dari Kementan 1 paket terdiri dari bangunan dan RMU, (iv) dan belum ada kejelasan penunjukan PIC BUMN secara legal.



Kunjungan Kerja ke PT Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung, 29 Maret-1 April 2022



Kunjungan Kerja ke Koperasi Citra Kinaraya, Kab Demak pada tanggal 21-23 Februari 2022

- b. **PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi) pada tanggal 29 Maret – 01 April 2022**, teridentifikasi beberapa permasalahan yaitu: (i) tidak adanya modal kerja yang mencukupi untuk pembelian bahan baku ke petani/ koperasi untuk masa panen; (ii) kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal; (iii) belum memiliki peralatan untuk proses produksi, keterbatasan alat produksi di koperasi belum memadai untuk produksi skala besar.
- c. **Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap) pada tanggal 20 – 22 April 2022**, teridentifikasi permasalahan: (i) KUD Mino Saroyo hanya memiliki izin ekspor untuk komoditas udang, dan untuk komoditas tuna dilakukan dengan bekerjasama dengan pelaku usaha di Jakarta yang memiliki izin ekspor tuna sehingga ekspor tuna tidak tercatat di PPS Cilacap; (ii) penganggaran Korporasi Nelayan di Cilacap baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 melalui dana alokasi khusus; (iii) dan masih terdapat anggaran KKP tahun 2022 yang diblokir oleh Kemenkeu karena dianggap belum sinkron antara nomenklatur RO KPN dengan kebutuhan anggaran.



Kunjungan Kerja ke Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap, 20-22 April 2022

Ketiga kegiatan tersebut telah dilaporkan dengan Memo Asdep No: M.0288/Ekon-4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Memo Deputi Perekonomian No: M.0242/Ekon/05/2022 tanggal 22 Mei 2022 perihal Laporan Kunjungan ke-3 (tiga) Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan Percontohan Utama. Selain itu, terkait ketiga kegiatan tersebut, telah disampaikan juga rekomendasi penyelesaian permasalahan atas implementasi tindak lanjut arahan Presiden dan Major Project Korporasi Petani dan Nelayan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0234/Seskab/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama.



Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0234/Seskab/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama

7. Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Backlog PT.KAI dengan Kementerian Perhubungan

Pada tahun 2022, PT. KAI (Persero) menolak untuk menandatangani kontrak *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Usulan besaran nilai IMO dari PT. KAI (Persero) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3,4 T setelah dilakukan 5 kali perubahan, namun masih belum disepakati. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 6 T.

DJKA Kementerian Perhubungan menyampaikan kepada PT. KAI (Persero) agar secara bersama-sama **menyepakati harga satuan** yang selanjutnya digunakan sebagai standar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. KAI (Persero), sehingga anggaran IMO tidak melampaui *budget* yang

tersedia dalam DIPA DJKA Kementerian Perhubungan, sesuai dengan aturan dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2012.

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- 1) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah, **ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan biaya** perawatan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri.*
- 2) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi anggaran** dalam APBN dan/atau APBN-P.*
- 3) **Besaran biaya** perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana **dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar membuat kontrak** dengan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah*

Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan berkaitan dengan perbaikan tata kelola penugasan IMO prasarana perkeretaapian kepada PT. KAI (Persero).

Saat ini DJKA Kementerian Perhubungan sedang dalam proses pembuatan daftar harga satuan/harga perkiraan sendiri (HPS) yang didasarkan pada harga pasar, termasuk HPS untuk pekerjaan fisik dalam perawatan dan operasional prasarana. Sedangkan, harga satuan untuk biaya personil, berdasarkan masukan dari DJA Kemenku, sebaiknya dimasukkan ke dalam SBK Kemenku. Selama ini APIP Kementerian Perhubungan menghitung biaya personil menggunakan harga UMR sebagai dasar.

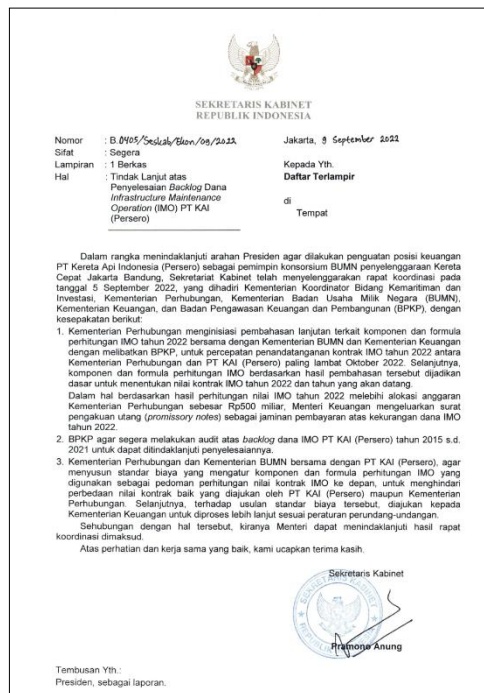
Perawatan prasarana perkeretaapian merupakan jasa konstruksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan kewajiban memiliki Surat Izin Jasa Konstruksi bagi badan usaha yang melakukan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan informasi dari DJKA Kementerian Perhubungan, saat ini PT. KAI (Persero) sebagai penerima penugasan IMO prasarana perkeretaapian, pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan UU Jasa Konstruksi, tidak memiliki NIB yang berkaitan dengan KBLI Konstruksi dan Sertifikat Standar SBU Konstruksi. Sehingga, sebagian besar pekerjaan perawatan prasarana dilaksanakan dengan sub-kontrak dan menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan ganda.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPKP, dan PT. KAI (Persero) dengan

hasil keputusan rapat untuk membentuk kesepakatan yang dapat digunakan dalam penilaian dan penugasan di tahun 2023 dan masa selanjutnya.

Kesepakatan rapat koordinasi tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh Menteri terkait.



Surat Sekretaris Kabinet Nomor
B.0405/Seskab/Ekon/09/2022
tanggal 9 September 2022

8. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan dalam Kawasan Hutan

Dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan PSN bendungan dan irigasi yang ditargetkan selesai tahun 2022, Sekretariat Kabinet pada tanggal 30 September 2022 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Pejabat Eselon I, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Keuangan.

Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Internal Kabinet tanggal 6 September 2022 mengenai Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang intinya agar PSN dengan target penyelesaian tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak di *carry over* ke tahun 2023. Dalam rapat tersebut Sekretariat Kabinet menyampaikan sejumlah hal yaitu:

- a. Dari 9 (sembilan) PSN bendungan dan 1 (satu) PSN irigasi yang ditargetkan selesai tahun 2022,7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Semantok, Provinsi Jawa Timur; Bendungan Ciawi, Provinsi Jawa Barat; Bendungan Sukamahi, Provinsi Jawa Barat; Bendungan Kuwil Kawangkoan, Provinsi Sulawesi Utara; Bendungan Beringin Sila, Provinsi NTB; Bendungan Sadawarna, Provinsi Jawa Barat; dan Bendungan Tamblang, Provinsi Bali, serta 1 (satu) irigasi di Jambo Aye Kanan, Provinsi Aceh, peresmiannya dapat dilakukan pada tahun 2022.


- b. Dua bendungan lainnya, yaitu Bendungan Lolak, Provinsi Sulawesi Utara dan Bendungan Marga Tiga, Provinsi Lampung, dengan permasalahan meliputi:
- 1) Penyelesaian konstruksi Bendungan Lolak masih terkendala permasalahan teknis serta memerlukan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) seluas ±151,35 Ha dari Kementerian LHK, yang meliputi sebagian areal konstruksi dan genangan bendungan, dimana dalam areal dimaksud masih terdapat hak-hak masyarakat.
 - 2) Menteri PUPR telah mengajukan permohonan persetujuan PKH untuk Bendungan Lolak pada tanggal 13 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses di Kementerian LHK.
 - 3) Kementerian LHK telah menerbitkan SK Persetujuan PKH yang diperlukan untuk areal genangan Bendungan Marga Tiga pada tanggal 22 Maret 2022. Namun demikian, penggenangan belum dapat dilakukan pada area tersebut karena masih perlu dilakukan penyelesaian terhadap 685 (enam ratus delapan puluh lima) bidang tanah milik masyarakat yang dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan dilengkapi dengan surat keterangan tanah garapan dari desa.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya permasalahan hak-hak masyarakat di area yang diperlukan untuk proyek Bendungan Lolak dan Marga Tiga, disepakati langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

- a. Persetujuan PKH yang dikeluarkan oleh Menteri LHK pada pokoknya baru sebatas izin prinsip pelepasan kawasan hutan yang masih perlu diikuti pemenuhan komitmen oleh Kementerian PUPR serta penetapan tata batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021), yang untuk selanjutnya menjadi dasar untuk Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.
- b. Untuk percepatan inventarisasi dan identifikasi terhadap areal dalam kawasan hutan yang terdapat masyarakat di dalamnya, Kementerian PUPR untuk segera mengajukan permohonan penetapan Areal Kerja kepada Kementerian LHK, diikuti dengan penyampaian rencana dan kesediaan untuk pemenuhan komitmen sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021.
- c. Pemberian rekomendasi penyelesaian pemenuhan hak-hak masyarakat dan permasalahan sosial pada kawasan hutan daerah konstruksi dan/atau genangan PSN bendungan terkait oleh Tim Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga dan Permasalahan Sosial Pada Areal yang Telah Diterbitkan Keputusan Persetujuan PKH yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dilakukan dengan memperhatikan hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan Satgas A dan Satgas B pada Bendungan Lolak dan Marga Tiga.
- d. Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna menindaklanjuti penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan batas areal PKH.
- e. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) bersama Kementerian PUPR segera mengevaluasi kembali target waktu penyelesaian PSN Bendungan Lolak dan Bendungan Marga Tiga.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0473/Seskab/Ekon/10/2022 kepada Menteri PUPR, Menteri LHK, dan Menteri ATR/BPN untuk dapat ditindaklanjuti.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri
PUPR, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN,


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0473/Seskab/Ekon/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan dalam Kawasan Hutan

Jakarta, 11 Oktober 2022

Kepada Yth.
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

di
Tempat

Dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan PSN bendungan dan irigasi yang ditargetkan selesai tahun 2022, Sekretariat Kabinet pada tanggal 30 September 2022 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Pejabat Eselon I, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Keuangan. Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Internal Kabinet tanggal 6 September 2022 mengenai Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang intinya agar PSN dengan target penyelesaian tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak di *carry over* ke tahun 2023.

Dalam rapat koordinasi tersebut pada intinya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 9 (sembilan) PSN bendungan dan 1 (satu) PSN irigasi ditargetkan selesai dan direncanakan untuk dapat direalisasikan pada tahun 2022 (daftar PSN dimaksud beserta rincian progresnya adalah sebagaimana terlampir).
- Dari 10 (sepuluh) PSN tersebut, terdapat 2 (dua) PSN bendungan yaitu Bendungan Lokak dan Bendungan Marga Tiga, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih intensif, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Penyelesaian konstruksi Bendungan Lokak masih terkendala permasalahan teknis serta memerlukan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) seluas ±151,35 Ha dari Kementerian LHK, yang meliputi sebagian area konstruksi dan genangan bendungan, dimana dalam area dimaksud masih terdapat hak-hak masyarakat. Menteri PUPR telah mengajukan permohonan persetujuan PKH untuk Bendungan Lokak pada tanggal 13 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses di Kementerian LHK.
 - Kementerian LHK telah menerbitkan SK Persetujuan PKH yang diperlukan untuk areal genangan Bendungan Marga Tiga pada tanggal 22 Maret 2022. Namun demikian, penggenangan belum dapat dilakukan pada area tersebut karena masih perlu dilakukan penyelesaian terhadap 685 (enam ratus delapan puluh lima) bidang tanah milik masyarakat yang dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan dilengkapi dengan surat keterangan tanah garapan dari desa.

Sehubungan ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Sehubungan dengan adanya permasalahan hak-hak masyarakat di area yang diperlukan untuk proyek Bendungan Lokak dan Marga Tiga, disepakati langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

- Persetujuan PKH yang dikeluarkan oleh Menteri LHK pada pokoknya baru sebatas izin prinsip pelepasan kawasan hutan yang masih perlu diikuti pemenuhan komitmen oleh Kementerian PUPR serta penetapan tata batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021), sebagai dasar Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.
- Untuk percepatan inventarisasi dan identifikasi terhadap areal dalam kawasan hutan yang terdapat masyarakat di dalamnya, Kementerian PUPR untuk segera mengajukan permohonan penetapan Areal Kerja kepada Kementerian LHK, diikuti dengan penyampaian rencana dan kesediaan untuk pemenuhan komitmen sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021.
- Pemberian rekomendasi penyelesaian pemenuhan hak-hak masyarakat dan permasalahan sosial pada kawasan hutan daerah konstruksi dan/atau genangan PSN bendungan terkait oleh Tim Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga dan Permasalahan Sosial Pada Areal yang Telah Diberikan Keputusan Persetujuan PKH (dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR), dilakukan dengan memperhatikan hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan Satgas A dan Satgas B pada Bendungan Lokak dan Marga Tiga.
- Kementerian PUPR segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna menindaklanjuti rekomendasi serta penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan batas areal PKH.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) bersama Kementerian PUPR segera mengevaluasi kembali target waktu penyelesaian PSN Bendungan Lokak dan Bendungan Marga Tiga.

Guna memastikan penyelesaian PSN bendungan dan irigasi dilaksanakan sesuai rencana dan target waktu sebagaimana arahan Presiden, kiranya Menteri secara terkoordinasi dapat segera menindaklanjuti hasil rapat dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.


Sekretaris Kabinet
Prabowo Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Menteri Keuangan.
5. Jaksa Agung RI.
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

9. Percepatan dan Penyelesaian Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri Tahun 2022

Pengembangan VMP merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan pertama kali pada rapat terbatas tanggal 26 Oktober 2020, intinya agar Indonesia secara mandiri mengembangkan vaksin sendiri. Hal tersebut dilakukan mengingat Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan total penduduk sekitar 270 juta jiwa, apabila Indonesia hanya bergantung pada vaksin yang didatangkan dari luar negeri, kondisi negara akan sangat riskan. Indonesia harus bisa melakukan inovasi, pengembangan, dan produksi vaksin tersebut secara mandiri. Selanjutnya, dalam beberapa kali penyelenggaraan rapat khususnya pada tanggal 10 Januari 2022, Presiden menyampaikan arahan untuk mendorong pengembangan vaksin buatan dalam negeri agar segera diselesaikan dan dapat digunakan pada tahun 2022. Pengembangan VMP tersebut pada prinsipnya juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022.

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk percepatan penyelesaian vaksin buatan dalam negeri agar dapat digunakan pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet

telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke 3 (tiga) lokasi pengembangan vaksin yaitu PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia (Biotis) di Bogor, PT Bio Farma (Persero) di Bandung, dan Universitas Indonesia di Jakarta. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan terkait dalam berbagai kegiatan rapat dan *Focus Group Discussion* untuk mengawal percepatan penyelesaian VMP dan vaksin produksi dalam negeri.

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, vaksin yang sudah dapat digunakan oleh masyarakat saat ini adalah Vaksin InaVac (VMP yang dikembangkan oleh Unair bekerja sama dengan PT Biotis) dan Vaksin IndoVac (vaksin BUMN kerja sama PT Bio Farma dengan Baylor College of Medicine). Kedua vaksin tersebut telah mendapatkan *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM untuk indikasi sebagai vaksin primer dan vaksin *booster* dewasa. Terhadap kedua vaksin yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dari BPOM tersebut, kapasitas produksi vaksin dan rencana pemanfaatannya oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Kapasitas vaksin InaVac untuk indikasi vaksin primer dan *booster* dewasa yang dapat diproduksi Biotis pada tahun 2022 diperhitungkan mencapai 10,5 juta dosis. Sedangkan, kapasitas vaksin IndoVac yang dapat diproduksi PT Bio Farma hingga akhir tahun 2022 diperhitungkan sebanyak 20 juta dosis. Selanjutnya, PT Bio Farma dapat memproduksi vaksin sebanyak 100 juta dosis pada tahun 2023. Dalam hal dibutuhkan, PT Bio Farma dapat menambah produksi mencapai 200 juta dosis/tahun.
2. Kementerian Kesehatan telah memperhitungkan pemanfaatan Vaksin IndoVac dan InaVac sebanyak masing-masing 5 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan penyediaan vaksin COVID-19 sampai bulan Desember 2022. Penyediaan vaksin buatan dalam negeri yang kebutuhannya saat ini banyak diperuntukkan untuk *booster*, telah dialokasikan anggaran pengadaannya sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19.
3. Namun demikian, pengadaan vaksin tersebut saat ini masih menunggu penetapan harga pembelian vaksin yang saat ini masih dalam tahap kajian dengan mengikutsertakan peran BPKP. Selain itu, pemanfaatan vaksin InaVac juga masih menunggu penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan terkait penetapan jenis dan jumlah vaksin. Khusus untuk vaksin IndoVac, Kementerian Kesehatan telah mengadakan kontrak dengan PT Bio Farma dan saat ini sedang menunggu kesiapan distribusi dari BPOM.
4. Sedangkan untuk tahun 2023, Kementerian Kesehatan belum menetapkan kebijakan pengadaan vaksin COVID-19 baik yang ditujukan untuk program vaksinasi dalam negeri maupun rencana donasi vaksin kepada negara lain yang membutuhkan.

Sehubungan hal tersebut di atas, langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri, sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan perlu melakukan langkah percepatan untuk penetapan jumlah, jenis, dan harga vaksin buatan dalam negeri yang akan digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar vaksin tersebut dapat secara optimal digunakan pemanfaatannya sesuai kebutuhan, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2022.

2. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan perlu segera menetapkan kebijakan terkait keberlangsungan program nasional vaksinasi COVID-19 tahun 2023 dengan mempertimbangkan herd immunity masyarakat Indonesia, dan dampak varian baru COVID-19. Dalam hal program vaksinasi masih diperlukan, Kementerian Kesehatan perlu segera menetapkan besaran kebutuhan vaksin untuk dapat dikoordinasikan penyediaannya dari hasil produksi dalam negeri, serta pengajuan usulan anggaran pengadaan vaksin tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan. Dalam hal diperlukan, pengadaan vaksin buatan dalam negeri tahun 2023 tersebut juga telah mengakomodasi rencana donasi vaksin untuk negara lain yang membutuhkan setelah mendapatkan EUL dari WHO.
3. Terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19 yang saat ini masih dilakukan oleh beberapa pengembang lain, pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait perlu secara optimal dan berkelanjutan memberikan dukungan khususnya terhadap penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin tersebut dinilai penting karena menyangkut kemandirian dan ketahanan sediaan vaksin dalam negeri dalam rangka percepatan program vaksinasi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor vaksin COVID-19 dari luar negeri.

Terhadap progres penyelesaian dan usulan langkah kebijakan untuk optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri tersebut, Sekretariat Kabinet telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden secara berjenjang melalui memorandum Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (memo nomor M.761/Ekon-4/11/2022 tanggal 17 November 2022), memorandum Deputy Bidang Perekonomian (memo nomor M.0580/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022), dan memorandum Sekretaris Kabinet (memo nomor M.1189/Seskab/11/2022 tanggal 24 November 2022). Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan rekomendasi langkah kebijakan pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindak lanjuti melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0577/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022.

1. Pemantauan Bersama Pengembangan Vaksin Merah Putih di PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bogor pada Tanggal 18 Januari 2022



2. Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di Universitas Indonesia, Jakarta pada Tanggal 31 Mei 2022



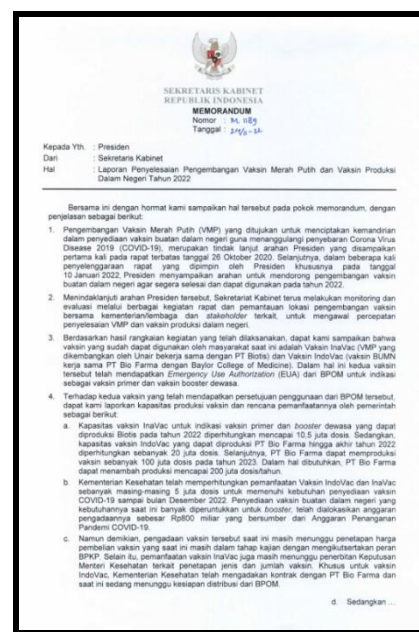
3. Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di PT Bio Farma (Persero), Bandung pada Tanggal 7 Juni 2022



**Surat Sekretaris Kabinet
B.0577/Seskab/Ekon/11/2022
24 November 2022
Optimalisasi Pemanfaatan
Buatan Dalam Negeri**

**Nomor:
tanggal
perihal
Vaksin**

**Memorandum Sekretaris Kabinet
Nomor:
M.1189/Seskab/Ekon/11/2022
tanggal 24 November 2022 perihal
Laporan Penyelesaian
Pengembangan Vaksin Merah Putih
dan Vaksin Produksi Dalam Negeri
Tahun 2022**



10. Pengaturan Ekosistem Digital/*e-Commerce*

Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) kepada Presiden menyampaikan permohonan Rapat Terbatas (Ratas) untuk membahas pengaturan ekosistem digital/*e-commerce*, sebagai tindak lanjut dari arahan kepada Menteri KUKM untuk menyiapkan kerangka regulasi ekosistem ekonomi digital (*e-commerce*) dalam rangka melindungi UMKM, konsumen, dan *e-commerce* lokal. Sehubungan hal tersebut, Menteri KUKM menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I yang membahas rencana perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pada rapat tersebut, Menteri KUKM menyampaikan bahwa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 diperlukan untuk mengatur:

- a. larangan praktik *cross border* melalui pembatasan minimal harga produk yang dapat diimpor langsung;
- b. kebijakan syarat khusus untuk pedagang luar negeri yang beroperasi di Indonesia seperti sertifikasi, perizinan, keterangan produk, dan pemenuhan standar untuk mencegah *predatory pricing*;
- c. pengaturan penetapan komisi yang harus memperhatikan kepentingan UMKM dan tidak memberatkan pedagang pada *platform*; dan
- d. kewajiban lokapasar untuk mencegah dan menangani praktek persaingan usaha tidak sehat.


Menindaklanjuti permohonan Menteri KUKM tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian KUKM, dan Kementerian Investasi/BKPM. Rapat menyepakati beberapa hal yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.378/Seskab/Ekon/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yaitu:

- a. Kementerian Perdagangan segera mempercepat pembahasan secara detail dan penyusunan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 bersama Kementerian/Lembaga terkait mengacu pada usulan substansi yang diajukan oleh Menteri KUKM; dan
- b. terhadap draft Rancangan Peraturan Menteri dilaporkan dan sekaligus diajukan kepada Presiden untuk dimintakan persetujuannya.

Namun demikian, Kementerian Perdagangan belum menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat dimaksud, sehingga Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I guna membahas tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet dimaksud pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan kesepakatan agar Kementerian Perdagangan segera menyelesaikan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022, dan apabila masih terdapat permasalahan agar dapat diajukan pembahasannya pada tingkat Rapat Terbatas (Ratas).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dan hasil kesepakatan rapat yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet, Kementerian Perdagangan telah melakukan serangkaian pembahasan dan penyusunan terhadap perubahan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Surat Sekretaris Kabinet tentang Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/E-Commerce


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.39/Seskab/Ekon/08/2022
Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/E-Commerce

Jakarta, 26 Agustus 2022

Kepada Yth.
Menteri Perdagangan
di
Jakarta

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menteri KUKM) kepada Presiden menyampaikan permohonan Rapat Terbatas (Ratas) untuk membahas pengaturan ekosistem digital/e-commerce melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE (Permendag 50/2020). Revisi Permendag 50/2020 tersebut dinilai sebagai kerangka regulasi ekosistem ekonomi digital/e-commerce dalam rangka melindungi UMKM, konsumen, dan e-commerce lokal (surat terlampir).

Usulan revisi Permendag 50/2020 dimaksud mencakup substansi sebagai berikut:

- larangan praktik *cross-border* (pembatasan minimal harga impor langsung pada platform digital);
- syarat khusus pedagang luar negeri (prasyarat bagi pedagang luar negeri seperti sertifikasi, perizinan terkait, keterangan produk berbahasa Indonesia, dan standar);
- penutupan ritel *online* asing (ritel *online* asing wajib memiliki badan usaha di Indonesia);
- kewajiban penyedia platform (platform digital wajib berperan aktif dalam mencegah praktik usaha tidak sehat);
- agregasi dengan syarat (agregasi produk dalam negeri dan tidak boleh menghilangkan identitas asli produk);
- perlindungan konsumen (platform digital bertanggung jawab atas pedagang penjual barang palsu, barang kualitas buruk, pesanan tidak sesuai);
- perdagangan melalui media sosial (perdagangan melalui media sosial harus diperlakukan sama regulasinya dengan penjualan melalui lokapasar); dan
- dampak pemberlakuan revisi Permendag 50/2020 (revisi berlaku untuk PPMSE eksisting dan diberikan periode waktu untuk penyesuaian).

Menindaklanjuti surat Menteri KUKM tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat antarkementerian pada tanggal 22 Agustus 2022, yang dihadiri oleh pejabat yang mewakili masing-masing dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi/BKPM.

Rapat...


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Rapat pada pokoknya membahas dan menyepakati:

- Kementerian Perdagangan segera mempercepat pembahasan secara detail dan penyusunan revisi Permendag 50/2020 bersama K/L terkait mengacu pada usulan substansi yang diajukan oleh Menteri KUKM.
- Selanjutnya, draft RPermendag dilaporan dan sekaligus diajukan kepada Presiden untuk dimintakan persetujuan guna penetapannya.

Sehubungan dengan itu, kiranya Menteri dapat segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.


Sekretaris Kabinet,
Pramono Anung

Tembusan Yth.:

- Presiden, sebagai laporan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

IKK 4 (Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti)

1. Pengawasan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagaimana diketahui bersama, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tujuan dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, pembinaan dan pendampingan UMKM, serta kebijakan yang berpihak pada UMKM seperti penyediaan alokasi 30% (tiga puluh persen) lahan komersil pada infrastruktur publik untuk UMKM.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM tersebut menjadi salah satu fokus kegiatan monitoring dan evaluasi Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemerintah untuk UMKM berjalan secara optimal. Terdapat 3 (tiga) kebijakan dan program yang menjadi fokus dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian, meliputi alokasi UMKM dalam berkegiatan usaha di lokasi strategis

infrastruktur publik, Sertifikasi Halal untuk UMK, dan Standar Nasional Indonesia Bina UMK (SNI Bina UMK).

A. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang intinya menyatakan bahwa di setiap infrastruktur publik (Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun, Terminal dan Rest Area) wajib mengalokasikan 30% lahan komersil untuk digunakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretariat Kabinet selama tahun 2022 telah melakukan kegiatan pemantauan di beberapa lokasi infrastruktur publik meliputi:

- a. Terminal Bus (Leuwipanjang, Bandung dan Rajabasa, ILmpung)
- b. Stasiun Kereta Api (ST Hall, Bandung, dan Tugu, Yogyakarta)
- b. Bandara (NYIA Kulon Progo)
- c. Pelabuhan (Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas, Semarang dan Merak-Bakauheni)
- d. Rest Area (di Pulau Jawa KM 57A, KM 72A, 97B, KM 88B, KM 456A dan KM 456B, KM 260 B) dan (di pulau Sumatera KM 20 A, KM 49 A, KM 87 A, KM 67 B dan 33 B).

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui secara nyata pelaksanaan PP 7 tahun 2021 khususnya terkait alokasi 30% bagi UMK, biaya sewa bagi UMK paling tinggi 30% dari biaya sewa normal lainnya, dan pembentukan koperasi di setiap infrastruktur publik. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada beberapa lokasi infrastruktur publik yang dikunjungi ditemukan bahwa:

- a. Semua Infrastruktur publik telah mengalokasikan 30% tempat usaha strategisnya bagi UMK.
- b. Bandara NYIA, Terminal Bus Leuwipanjang dan Rajabasa merupakan 3 lokasi Infrastruktur publik yang telah menerapkan sewa tarif UMK mengikuti ketentuan tariff dalam PP 7 tahun 2021.
- c. Rest Area KM 260B Banjaratma merupakan satu-satunya infrastruktur publik yang telah membentuk koperasi bagi UMK

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan kegiatan pemantauan melakukan beberapa penyelesaian masalah seperti, dualisme koperasi di Rest Area KM 260 B Banjaratma, mendorong percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPERA terkait pelaksanaan PP 7 tahun 2021, serta mendorong KPKNL Bandung untuk melaksanakan percepatan perhitungan tarif sewa bagi UMK di lokasi terminal Leuwipanjang.

Untuk itu, Sekretariat Kabinet telah mendorong beberapa lokasi untuk menjadi *piloting project* yang harus didorong pemenuhan ketentuan PP 7 tahun 2021 meliputi Bandara NYIA kulon Progo, Terminal Bus Leuwipanjang, Rest Area KM 260 B, dan Pelabuhan Bakauheni. Dan mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM beserta kementerian terkait lainnya agar dapat mengikuti ketentuan tarif seperti yang dilakukan pada bandara NYIA Kulon Progo dan Terminal bus Leuwipanjang, Bandung. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan hasil kegiatan

monitoring dan evaluasi tersebut kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui surat nomor B.0630/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, agar dapat ditindaklanjuti.



(foto kiri) Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan UKM Nomor B.0630/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022.

(foto kanan) Rangkaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik.

B. Evaluasi Penerbitan Sertifikasi Halal Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Tahun 2022

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP39/2021), khususnya **percepatan pemberian Sertifikasi Halal (SH) bagi UMK secara gratis** sesuai arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet, pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet dengan melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan serangkaian kegiatan yang terdiri dari rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan kunjungan lapangan ke beberapa daerah.

Pokok-pokok hasil evaluasi:

- a. Secara umum pemberian sertifikat halal secara gratis kepada UMK telah berjalan melalui Program Sehat yang digagas Kementerian Agama melalui BPJPH. Sepanjang tahun 2022, program ini diselenggarakan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu: (1) **tahap pertama**, sejak pertengahan tahun 2021 s.d 11 Juli 2022 dengan menyediakan 25.000 kuota; dan (2) **tahap kedua**, sejak 24 Agustus s.d 19 September 2022 dengan menyediakan 324.834 kuota.
- b. Berdasarkan data Kementerian Agama, disampaikan realisasi penerbitan SH:

Tabel Total Penerbitan Sertifikat Halal 2021 s.d 2022

Program Sehat	Target Kuota Penerbitan SH Gratis	Realisasi Kuota Penerbitan SH Gratis	% Capaian Penerbitan
Tahap I (Mar – Juli 2022)	25.000 Sertifikat	20.074 Sertifikat	80,29%
Tahap II (Agust s.d Sept)	324.834	15.462 Sertifikat	-

2022)	Sertifikat		
Perpanjangan Tahap II (Sept s.d Des 2022)		49.940 Sertifikat	-
Total Tahap II		65.402 Sertifikat	20,13%
Total Tahap I dan II	349.834 Sertifikat	85.476 Sertifikat	24,43%

Data Kemenag 03 Jan 2023, diolah

- c. Pada tataran pelaksanaan, beberapa temuan yang menyebabkan belum optimalnya Program Sehati dalam menerbitkan SH gratis kepada UMK, antara lain:
- 1) Pemahaman pelaku UMK yang minim terhadap Program Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*. **Penyebaran informasi** dan sosialisasi yang **tumpang tindih antara jalur reguler dan self declare** menyebabkan pelaku UMK berasumsi pengurusan sertifikat halal mahal, sulit, tidak transparan dan tanpa batas waktu.
 - 2) Program Sehati dalam sistem SiHalal **belum terintegrasi** dengan pengajuan *self declare* perizinan tunggal dalam OSS RBA. **Penginputan data (log-in) pada sistem yang berbeda** dirasakan menyulitkan pelaku UMK yang sebagian besar gagap teknologi dan aplikasi digital.
 - 3) Peran pendamping PPH yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan khususnya saat melakukan **verifikasi lapangan dan berkas** untuk diunggah pada sistem SiHalal menyebabkan **pengembalian berkas** oleh BPJPH sehingga memperpanjang waktu kepengurusan serta penerbitan SH untuk pelaku UMK. Selain itu, **keterbatasan fasilitas dan institusi pemeriksa halal** pada setiap daerah juga memperlambat proses penerbitan sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK.

Sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2022, catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah guna percepatan penerbitan SH gratis:

- a. **Penentuan target per tahun** pelaku UMK penerima SH gratis melalui mekanisme *self declare* agar **dihitung berdasarkan** pada: **(1)** pelaku UMK yang terdaftar dan/atau mengajukan SH pada OSS RBA; **(2)** pelaku UMK yang telah menjalankan usaha di sektor makanan dan minuman secara permanen minimal selama 12 bulan; **(3)** pelaku UMK yang menggunakan bahan baku produksi yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) tersertifikasi halal.
Ketepatan penentuan target dimaksud, diperlukan untuk menghitung besarnya anggaran yang dibutuhkan baik yang berasal dari partisipasi DIPA K/L maupun Pemda, dan untuk memastikan ketepatan sasaran serta capaian realisasinya. Disampaikan, sejak diluncurkan s.d akhir 2022 Program Sehati **hanya terealisasi** sebesar **24,43%** dari target kuota yang ditetapkan.
- b. Penyempurnaan proses bisnis penerbitan SH gratis melalui mekanisme *self declare*:
 - 1) Pengintegrasian OSS RBA dengan SiHalal BPJPH guna **menghindari penginputan data berulang** pada sistem yang berbeda. Dengan pengintegrasian, maka: **(a)** data pelaku UMK yang telah mendapatkan NIB dan mengajukan SH *self declare* melalui OSS RBA **terkirim secara otomatis** ke dalam sistem SiHalal untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh BPJPH; dan **(b)** terdapat **validasi dan keseragaman data** terkait data pengajuan, serta data penerbitan SH gratis pada OSS RBA dan SiHalal.

- 2) Penanaman **positive list bahan baku produksi** dalam OSS RBA **sebagai tapisan awal** pengajuan SH melalui mekanisme *self declare*. Hal ini dikarenakan tidak seluruh pengajuan SH pelaku UMK dalam OSS RBA akan dilakukan melalui mekanisme *self declare*. Pelaku UMK yang mengajukan SH dengan bahan produksi berisiko, tidak termasuk dalam kategori *self declare* yang atas penerbitan sertifikatnya tidak dikenakan biaya sesuai PP 39/2021.
- c. Percepatan **sertifikasi halal RPH** yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Percepatan sertifikasi halal tersebut perlu menjadi **prioritas** mengingat RPH merupakan **hulu utama dalam rantai pasok halal**, khususnya bagi pelaku UMK yang membutuhkan bahan baku berasal dari daging dan turunan daging.
- d. Peningkatan jumlah dan pemahaman PPH sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan yang bersifat kompetensi teknis guna melakukan verifikasi lapangan. Dalam hal ini, Pemerintah dapat **mendorong keikutsertaan mahasiswa** menjadi PPH dengan **menerapkan credit earning system** dalam program Kampus Merdeka.



Monitoring dan Evaluasi melalui kunjungan kerja mengenai percepatan pelaksanaan sertifikasi halal gratis bagi UMK di Provinsi NTB.

C. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro dan Kecil

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK merupakan bagian dari perizinan tunggal, selain Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Jaminan Halal sebagai amanat dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencerminkan implementasi kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan SNI Bina UMK dilakukan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Pada Usaha Mikro Kecil Dalam Rangka Perizinan Tunggal.

Berdasarkan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan kunjungan ke lapangan atas pelaksanaan SNI Bina UMK, dapat terlihat bahwa program SNI Bina UMK sangat bermanfaat bagi UMK yang memiliki permodalan yang kuat, telah mempunyai pasar, dan berencana untuk ekspansi pasar. Selain itu, terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan SNI Bina UMK dimaksud, yakni:

- a. Banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan SNI Bina UMK harus diantisipasi dengan ketersediaan anggaran di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Padahal pemberlakuan SNI Bina UMK diperuntukan bagi usaha dengan tingkat risiko rendah dan sifatnya sukarela.
- b. Perlu upaya yang masif dalam mensosialisasikan program kepada pelaku usaha, terutama kepada pelaku usaha di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar).

- c. Terbatasnya SDM untuk melakukan pendampingan dan pembinaan SNI Bina UMK dan SNI, meskipun BSN dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembinaan melalui *training of trainer*.
- d. Mekanisme untuk memperoleh pembinaan dan pendampingan belum baku.
- c. Mahalnya biaya SNI yang harus ditanggung pelaku usaha.
- d. Kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan bersama mengenai SNI Bina UMK dan SNI yang perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet bersama Badan Standardisasi Nasional telah merumuskan beberapa alternatif rekomendasi atas hal tersebut diatas, diantaranya:

- a. Perlunya kurasi terhadap UMK yang akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan.
- b. Sosialisasi secara masif atas kebijakan SNI Bina UMK dimaksud perlu untuk dilakukan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Perlu adanya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam melakukan pendampingan dan pembinaan dalam program SNI Bina UMK dan SNI, melalui pelatihan (*training of trainer*) yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota, dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk dapat memberdayakan mahasiswa semester akhir untuk melakukan kegiatan dalam bentuk kuliah kerja nyata dengan melakukan pendampingan SNI Bina UMK dan SNI.
- d. Bantuan pendanaan yang diberikan kepada UMK dilakukan berdasarkan standar kualifikasi tertentu, dan diutamakan untuk pelaku usaha yang telah mengikuti pembinaan SNI Bina UMK.



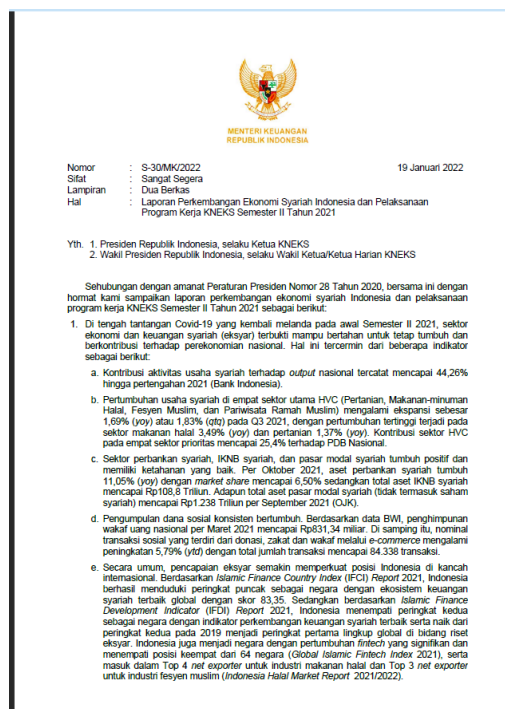
Rapat Koordinasi Evaluasi SNI Bina UMK di Kota Semarang tanggal 14 November 2022, yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet dan dihadiri Kementerian Perindustrian, BSN, dan dinas perindustrian se-Jawa Tengah



Kunjungan Kerja Evaluasi SNI Bina UMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, pada tanggal 30 Agustus 2022

2. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia dan Pelaksanaan Program KNEKS Semester II Tahun 2021 serta Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet terkait Rekomendasi atas Perkembangan Ekonomi Syariah dan Pelaksanaan Program Kerja KNEKS Semester II Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan bahwa Sekretaris KNEKS, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, wajib menyerahkan laporannya secara berkala kepada Presiden selaku Ketua dari KNEKS. Laporan KNEKS ini diterima oleh Sekretariat Kabinet dari Surat Menteri Keuangan kepada Presiden dan Wakil Presiden nomor S-30/MK/2022 perihal Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia dan Pelaksanaan Program Kerja KNEKS Semester II Tahun 2021 pada tanggal 19 Januari 2022.



Surat Menteri Keuangan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Terkait Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia dan Pelaksanaan Program Kerja KNEKS Semester II Tahun 2021

Dalam hal ini, Asdep Ekon-1 mengkaji laporan tersebut dari sisi kebijakan makro. Hal ini khususnya berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang tentunya memiliki dampak serta kontribusi yang cukup luas bagi perekonomian nasional. Asdep Ekon-1 pada kesempatan ini merumuskan hasil pemantauan dan pengendalian atas kebijakan pemerintah dari KNEKS tersebut dengan bentuk Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

Adapun substansi pelaporan yang dibahas diantaranya meliputi data-data makro pertumbuhan ekonomi syariah, seperti data kontribusi ekonomi syariah

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan *Halal Value Chain*. Adapun dari segi perkembangan keuangan syariah, data-data yang dicantumkan dalam memorandum diantaranya terkait pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah seperti reksadana dan saham yang *shariah compliance*. Kemudian dari segi pelaksanaan program kerja KNEKS Semester II Tahun 2021, dalam memorandum mencakupi aspek industri halal, dana sosial syariah, dan program prioritas.

Selanjutnya berdasarkan arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-1 turut memformulasikan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS untuk menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia dan Pelaksanaan Program Kerja KNEKS Semester II Tahun 2021 yang telah disampaikan sebelumnya. Surat nomor B.0070/Seskab/Ekon/02/2022 telah terkirim pada tanggal 4 Februari 2022 yang lalu. Secara materi, surat tersebut bersifat untuk menegaskan arahan Presiden kepada KNEKS (selaku tindakan pengendalian), serta memberikan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh KNEKS. Secara garis besar, langkah-langka yang kiranya dapat diambil oleh KNEKS antara lain berfokus pada penguatan *branding* ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan produk keuangan syariah, dan inklusi keuangan syariah.

Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan terkait KNEKS



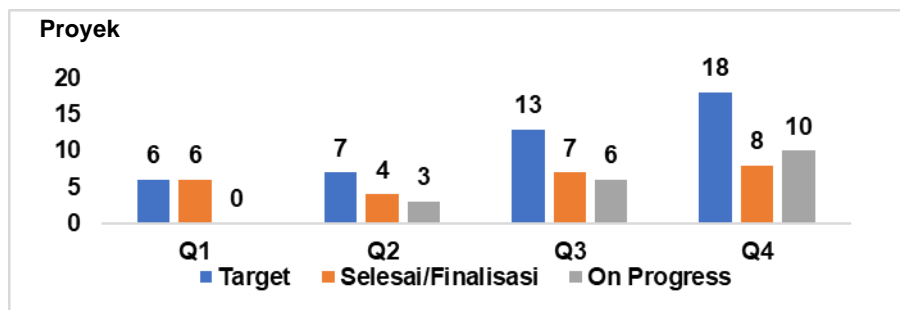
3. Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet, Kementerian BUMN untuk mempercepat reformasi, konsolidasi, serta efisiensi BUMN telah menyusun 88 Proyek Restrukturisasi BUMN sepanjang tahun 2021 s.d 2023, dengan rincian: (a) 44 proyek pada 2021; (b) 26 proyek pada 2022; dan (c) 18 proyek pada 2023.

Program restrukturisasi BUMN tahun 2021 yang terdiri atas **44 proyek difokuskan** pada **peningkatan efektivitas dan efisiensi BUMN** guna meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan melalui konsolidasi dalam bentuk merger dan holding. Sepanjang tahun 2021 telah terbentuk 9 (sembilan) holding/meger diantaranya Holding Bank Syariah, Holding Pertamina, Holding Pariwisata, Holding Industri Pangan, Holding Pertahanan, dan Merger Pelindo.

Dari 44 Proyek yang direncanakan, terdapat **25 Proyek** yang telah memasuki masa finalisasi (proses selesai) dan **19 Proyek** yang masih dalam proses pembahasan PUU sebagai dasar hukum pelaksanaan dan/atau dalam proses penyelesaian aksi operasional korporasi, dengan rincian pada masing-masing triwulan sebagai berikut:

Grafik Target dan Realisasi Proyek Restrukturisasi BUMN Tahun 2021



Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021 tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0037/Seskab/01/2022 serta Menteri BUMN melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-014/Ekon-1/2022 tanggal 10 Januari 2022.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2022
Kepada Yth.

Nomor : B-014/Ekon-1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : -
Tindaklanjut : Arahkan Presiden atau Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021

Mentri BUMN
di
Jakarta

Sebagai salah satu agenda prioritas Presiden, dalam beberapa Rapat Kabinet Presiden menekankan bahwa restrukturisasi BUMN harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi, dan memperluas ruang bursa persaingan untuk membangun nilai perusahaan (value creation). Dengan terciptanya efisiensi dan value creation, maka menjadi pondasi keberhasilan proyek strategis BUMN sebagai Ager of Development dalam perbaikan produktivitas dan daya saing nasional serta penguatan kontribusi fiskal negara.

Berhubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil pendataan yang sama sebelum atau pelaksanaan Program Restrukturisasi BUMN Tahun 2021, kiranya Menteri dapat memperjelas hal-hal berikut:

- Program restrukturisasi BUMN agar terus dilanjutkan pada Tahun 2022 dengan dibuktikan program pada transformasi strategi, pengurangan biaya, serta BUMN guna mencapai target penurunan baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional.
- Pengisian kepala BUMN Karya dalam pemangkuhan proyek infrastruktur dengan tingkat pengembalian IRR rendah, agar diperimbangkan secara optimal, serta hal-hal yang menghambat BUMN dalam memperoleh pengisian, namun juga memperhatikan kondisi keuangan BUMN yang pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup dalam.
- Pengisian utusan PAMN agar dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan proyek kontribusi BUMN di bidang, yaitu dari PAMN kepada negara, dan menjadikan kontribusi dimaksud sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengisian PAMN, sedangkan, baik yang berlatar regulasi maupun lainnya.
- Ditanyakan kepada BUMN pada Tahun 2022 dalam melaksanakan program maupun penyelesaian kegiatan yang bertumpang pada kinerja perusahaan, agar dibuktikan dalam bentuk, antara lain: PAMN, antara lain dalam bentuk pemberian pinjaman guna mendukung kemandirian, langgung jawab, dan meminimalkan moral hazard terhadap BUMN sebagai salah satu.

Memperhatikan hal-hal tersebut, dan untuk mengantarinya, maka perlu ada pelaksanaan arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet, kiranya Menteri BUMN melampirkan secara berkala (trihulanan) perkembangan pelaksanaan restrukturisasi BUMN. Di samping itu, termasuk perkembangan kinerja BUMN yang mendapat pengisian, serta BUMN yang perlu mendapat perhatian khusus.

Gulaan...

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan pembahasan dalam Rapat Kabinet mengenai isu-isu strategis terkait BUMN yang perlu mendapatkan keabsahan Presiden, Menteri BUMN agar mengkoordinasikan terlebih dahulu pembahasan atas materi dimaksud dengan melibatkan Menteri terkait dan Sekretaris Kabinet. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet
M. Pratiwi Karyo

Tembusan Yth.
1. Presiden, sebagai laporan; dan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Surat Sekretaris Kabinet nomor B-014/Ekon-1/2022

4. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2022

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha untuk memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan, kami melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada Presiden setiap triwulan. Adapun PDB Indonesia pada Q1 2022 **tumbuh 5,01%** (yoy) dibandingkan Q1 2021 dan **terkontraksi 0,96%** (qtq) dibandingkan Q4 2021. Terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia Q1 2022, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan sisi **pengeluaran (demand side)**, sumber pertumbuhan ekonomi Q1 2022 **terbesar** berasal dari: **1) konsumsi rumah tangga (RT)**; dan **2) pembentukan modal tetap bruto (investasi)**. Konsumsi RT melanjutkan penguatan menjadi **4,34%**, yoy (Q4 2021: **3,55%**) dan berkontribusi **2,35 ppt** terhadap pertumbuhan. Hal ini ditopang **keyakinan konsumen** yang tetap **optimistis** dan **penjualan ritel** yang terus **membangkitkan** sejalan dengan peningkatan **mobilitas publik (2% di atas level normal)**. Sementara itu, investasi tetap **ekspansif** sebesar **4,09%**, yoy (Q4 2021: **4,49%**) dan memiliki andil **1,33 ppt** terhadap pertumbuhan PDB. Hal ini antara lain terkonfirmasi dari data penjualan **semen** dan kenaikan **impor barang modal** (Q1 2022: **30,68%**, yoy) yang dipicu penguatan **permintaan domestik** dan **global**. Investasi langsung (*direct investment/DI*) sepanjang Q1 2022 juga **meningkat**, baik **Domestic DI (25,1%**, yoy) maupun **Foreign DI (34,1%**, yoy).
- Berdasarkan sisi **lapangan usaha (supply side)**, sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas penduduk **berkontribusi terbesar** pada pertumbuhan PDB, yaitu sektor: **1) industri pengolahan** tumbuh **5,07%**, yoy (Q4 2021: **4,92%**) dan memiliki peran **1,06 ppt** pada total pertumbuhan; **2) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor** tumbuh **5,71%** (Q4 2021: **5,56%**)

dan menyumbang **0,75 ppt** terhadap pertumbuhan; serta **3) transportasi dan perdagangan** tumbuh **15,79%** (Q4 2021: **7,93%**) dan berkontribusi **0,57%** pada pertumbuhan.

- c. Dari sisi fiskal dibutuhkan **stimulus sosial** yang lebih besar untuk **mengompensasi risiko** inflasi akibat kenaikan *administered prices* pasca-Lebaran serta menjaga **daya beli** kelas menengah-bawah dan **keberlanjutan** operasi **UMKM**.
- d. Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga acuan dapat dilakukan secara **gradual** dengan pertimbangan: **1) normalisasi** kebijakan moneter secara prinsip telah **dimulai** melalui **kenaikan Reserve Requirement 150 bps** pada Maret 2022 untuk **menyerap likuiditas** di pasar; dan **2) nilai tukar** Rupiah relatif **stabil** dengan dukungan surplus perdagangan yang besar (**depresiasi** Rupiah $\pm 2\%$, ytd dibandingkan *peers* **4%**).

← Riwayat

RIWAYAT SURAT

Recipient	Delivered Status
Deputi Bidang Perekonomian ✓	05.04.22 08:22:42 by Deputi Bidang Perekonomian

RIWAYAT DISPOSISI

Disposisi - 05.Apr.22 08:23:16

Dari :
Deputi Bidang Perekonomian (Satya Bhakti Parikesit)

Kepada :
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Nota Tindakan :

Catatan :
Ajukan.

Pengajuan Memorandum Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2022

5. Perlindungan Investasi dan Hukum

Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi (FORKAS) Pengusaha kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan Permohonan Perlindungan Investasi dan Hukum karena saat tengah berusaha *survive* dalam kondisi pandemi, namun para anggota merasa tidak ada perlindungan investasi dan hukum atas *sweeping* izin yang dilakukan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan diancam akan dibawa ke ranah pidana dengan mencari kesalahan yang tidak masuk akal (seperti izin sumur dangkal, penggunaan air sungai, sisa pakai bola lampu, saluran kamar mandi, tera timbangan, izin usaha selain NIB, dan lain-lain), (surat Nomor 004/SRE/FORKAS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022). Hal tersebut sangat meresahkan semua bidang usaha (Penanaman Modal Dalam Negeri; Penanaman Modal Asing maupun UMKM) serta menjadi pembicaraan Asosiasi pengusaha Negara sahabat yang berdampak pada keraguan untuk berinvestasi.

Sebelumnya, Presiden dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 28 Agustus 2021 memberikan arahan yang intinya agar Penegak Hukum dan Pengawas, seluruh pihak diharapkan tidak memanfaatkan hukum yang belum sinkron untuk memeras dan menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, maupun masyarakat, karena hal tersebut dapat mengganggu percepatan agenda pembangunan nasional.

Selain itu, dalam kaitannya untuk memonitor implementasi Undang-Undang Cipta, khususnya memastikan kemudahan bagi masyarakat, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melihat bahwa kondisi tersebut justru kontraproduktif dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi dasar bagi Sekretaris Kabinet untuk menyampaikan kembali arahan Presiden dimaksud kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan apabila mengandung kebenaran.

6. Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perlindungan pekerja migran dalam masa pandemi Covid-19 dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2022 menginisiasi rapat yang dihadiri oleh BP2MI agar permasalahan terkait pekerja migran sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaporkan kepada Presiden.

Hasil kesepakatan dalam rapat dimaksud, disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.86/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Kepala BP2MI, yang pada intinya agar Kepala BP2MI melalui Menteri Ketenagakerjaan secara berkala menyampaikan laporan penempatan dan perlindungan PMI termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian kepada Presiden.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BP2MI kepada Presiden melalui surat Nomor B.172/KA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021, yang mencakup antara lain beberapa capaian pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI yakni penyelamatan 679 PMI ilegal dan pemulangan 18.296 CPMI/PMI, serta penyelesaian pengaduan dan kepulangan 2.070 PMI ABK, pemenuhan hak CPMI/PMI sebesar Rp.6.040.332.272, serta penempatan PMI di masa pandemi melalui skema *Government to Government* (G to G) ke Jepang sebanyak 271 PMI dan Korea Selatan sebanyak 173 PMI, dan melalui skema *Private to Private* (P to P) ke Taiwan sebanyak 803 PMI.

Lebih lanjut, Kepala BP2MI menyampaikan permasalahan dan langkah penanganan, yakni kebijakan dan regulasi dengan K/L terkait yang belum selaras, perlu adanya penyelarasan dan percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, masih banyaknya PMI nonprosedural, dan pembebanan biaya penempatan PMI melebihi ketentuan (*overcharging*). Oleh sebab itu,

diperlukan diantaranya sinergitas antar *stakeholders* terkait upaya mengurangi pemberangkatan secara nonprosedural, dan pola penanganan *overcharging* yang terukur.

Terhadap laporan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0349/Seskab/04/2022 tanggal 26 April 2022, antara lain:

- a. Percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 perlu segera dilakukan, khususnya terkait Peraturan Daerah tentang perlindungan PMI yang akan menjadi landasan kepastian dan perlindungan hukum bagi PMI serta sebagai langkah pencegahan dan penanganan penempatan PMI nonprosedural.
- b. Pengaturan pembebasan biaya Penempatan PMI tidak terbatas hanya pada 10 (sepuluh) sektor jabatan rentan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PerBP2MI Nomor 9/2020), mengingat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, mengatur bahwa PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan.
- c. Pemerintah saat ini belum mengatur tentang pembiayaan khusus protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 terhadap PMI selain penempatan di Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan, terkait biaya karantina, asuransi Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan tambahan tes RT-PCR, yang berdampak pada *overcharging*. Untuk itu diperlukan pengaturan yang terukur terhadap pembiayaan yang akan dibebankan kepada PMI.

Terkait dengan rekomendasi yang disampaikan tersebut diatas, saat ini BP2MI sedang menyusun perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 sebagai wujud pelindungan yang lebih besar untuk pekerja migran.

7. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bendungan dalam Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya sektor bendungan dan irigasi, sebagaimana Arahan Presiden untuk dapat diselesaikan maksimal semester I tahun 2024, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi masing-masing pada tanggal 8 Juni 2022 dan 14 Juni 2022 sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu BPKP terhadap 31 (tiga puluh satu) PSN yang ditargetkan selesai tahun 2022.

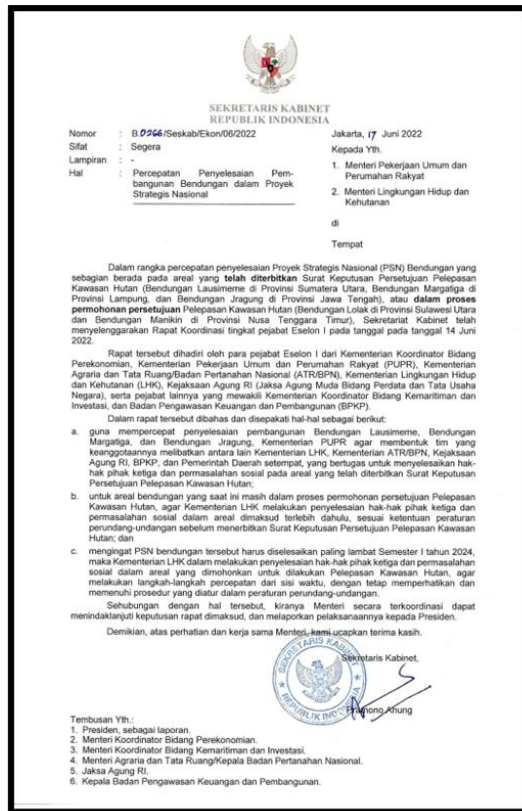
Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kejaksaan Agung RI (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara), serta pejabat lainnya yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dalam rapat tersebut diperoleh informasi terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian PSN sektor bendungan dan irigasi yang pada pokoknya meliputi persoalan yaitu proses penitipan Uang Ganti Rugi di Pengadilan Negeri untuk pengadaan tanah masyarakat yang melalui proses Konsinyasi, pengadaan eks Tanah Kas Desa (TKD), dan proses pengadaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang terkendala, sehubungan dengan terdapatnya masyarakat di area PKH.

Dalam rapat tersebut disepakai beberapa hal, yaitu:

1. guna mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Lausimeme, Bendungan Margatiga, dan Bendungan Jragung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar membentuk tim yang keanggotaannya melibatkan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kejaksaan Agung, BPKP dan Pemerintah Daerah setempat, yang bertugas untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial pada areal yang telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan PKH;
2. sedangkan, untuk areal bendungan yang saat ini masih dalam proses permohonan persetujuan PKH, agar Kementerian LHK melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial dalam areal dimaksud terlebih dahulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan PKH; dan
3. mengingat PSN bendungan tersebut harus diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024, maka Kementerian LHK dalam melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial dalam areal yang dimohonkan untuk dilakukan PKH, agar melakukan langkah-langkah percepatan dari sisi waktu dengan tetap memperhatikan dan memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0266/Seskab/Ekon/06/2022 perihal Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bendungan dalam Proyek Strategis Nasional untuk kemudian ditindaklanjuti oleh k/l terkait.

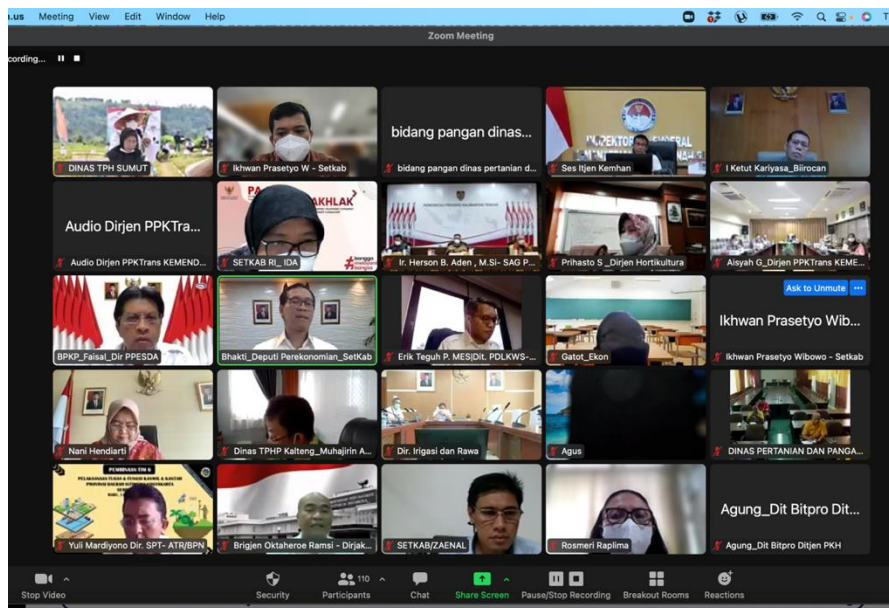


8. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)

Dalam rangka mendorong program Food Estate agar terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Ratas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis Food Estate agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi Food Estate yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. 3 Provinsi lainnya adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 ikut terlibat aktif dalam berbagai forum (rapat koordinasi progress/perkembangan Food Estate, Rapat pembahasan RPerpres Food Estate, FGD serta Workshop Food Estate) yang diselenggarakan oleh K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara serta K/L lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut Arahan Presiden terkait Food Estate.

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I yang dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 27 Januari 2022 dan dihadiri oleh K/L dan Pemda terkait. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi program Food Estate untuk mengetahui progress atau capaian pelaksanaan program Food Estate tahun sebelumnya (2021), hambatan yang dihadapi, serta rencana pengembangan pada tahun 2022 di 5 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Papua. Rapat tersebut menghasilkan beberapa progress dan kendala di lapangan yang meliputi Area of Interest (AoI), pengolahan lahan, sarana dan prasarana, model bisnis, masterplan, regulasi serta permasalahan terkait Lahan Cadangan Logistik Strategis. Hasil Rakor tersebut telah disampaikan kepada Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**surat Seskab nomor B.099/Seskab/Ekon/02/2022 dan B.100/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Evaluasi Program Food Estate Tahun Anggaran 2021**) untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut penyelesaian kendala-kendala dimaksud serta rencana pengembangan dan anggaran Food Estate 2022.



Rakor Tingkat Es. I oleh Sekretariat Kabinet – 27 Januari 2022



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : B.0099/Seskab/Ekon/02/2022
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Program Food
Estate Tahun Anggaran
2021

Kepada Yth.
**1. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;**
2. Menteri Pertahanan
di
Jakarta



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : B.0100/Seskab/Ekon/02/2022
Lampiran :
Hal : Evaluasi Program *Food Estate*
Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.
**1. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian;**
**2. Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi**
di
Jakarta

Surat Seskab nomor B.099 dan B.100/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Evaluasi Program Food Estate Tahun Anggaran 2021

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan (site visit) guna melihat progress/perkembangan program Food Estate sesuai Arahan Presiden. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan Food Estate, mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan Food Estate, serta

mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan Food Estate. Adapun lokasi yang dituju adalah:

1. Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah (22 s.d. 24 Maret 2022);
2. Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung, Jawa Tengah (11 s.d. 14 April 2022); dan
3. Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (18 s.d. 21 April 2022).



Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Kalteng – 22 s.d. 24 Maret 2022



Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Jateng – 11 s.d. 14 April 2022



Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi NTT – 18 s.d. 21 April 2022

Berdasarkan hasil pemantauan ke lapangan (site visit) ke 3 (tiga) lokasi tersebut, serta berdasarkan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Bupati/Wakil Bupati beserta jajaran Dinas pemerintah daerah terkait, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (fact finding) pelaksanaan program Food Estate yaitu:

1. Sarana dan Prasarana serta infrastruktur belum memadai untuk mendukung kawasan Food Estate terutama untuk irigasi, pupuk, alsintan serta akses pembiayaan usaha tani. Selain itu, terdapat beberapa daerah seperti Kalteng dan Sumut yang memiliki keterbatasan SDM/petani;
2. Lokasi Food Estate di Sumut, NTT, Sumsell dan Papua belum memiliki perencanaan berupa Area of Interest (AoI) sebagai identifikasi potensi lahan pengembangan Food Estate;
3. Program Food Estate belum memiliki model bisnis yang jelas dan belum menggunakan pola-pola modern, seperti korporasi petani;
4. Program Food Estate belum memiliki payung hukum tersendiri mengingat RPerpres Food Estate masih belum ditetapkan;
5. Masterplan Food Estate secara nasional dan daerah belum selesai disusun sehingga para pemangku kepentingan tidak memiliki pedoman dalam pengembangan Food Estate; dan
6. Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program Food Estate sehingga terdapat risiko keterlambatan dan ketidakselarasan pelaksanaan program dikarenakan belum ada Grand Design tingkat nasional dan daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi yaitu perlu diselenggarakan Rapat Internal/Rapat Terbatas guna membahas evaluasi pelaksanaan program Food Estate dan juga permasalahan-permasalahan yang ada guna mendapatkan Arahan Presiden. Laporan komprehensif tersebut telah disampaikan kepada Presiden secara berjenjang melalui memorandum Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (**memo nomor: M.0286/Ekon-4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022**), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (**memo nomor: M.0240/Ekon/05/2022 tanggal 20 Mei 2022**), dan memorandum Sekretaris Kabinet (**memo nomor: M.0505/Seskab/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**) perihal **(1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) Tahun 2020-2022; dan (2) Permohonan Agenda Penyelenggaraan Rapat Internal Tentang Evaluasi Program Food Estate.**

Terhadap laporan komprehensif evaluasi program Food Estate dan permohonan agenda penyelenggaraan Rapin tentang Evaluasi Program Food Estate, Presiden telah memimpin penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional di Istana Merdeka pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan bahan Ratas tersebut berupa briefing sheet dan infografis yang telah disampaikan secara berjenjang kepada Presiden melalui memorandum Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (**memo nomor: M.0291/Ekon-4/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (**memo nomor: M.0244/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**), dan memorandum Sekretaris Kabinet (**memo nomor: M.0503/Seskab/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**) perihal **Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional (Senin, 23 Mei 2022, pukul 09.30 WIB).**

9. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion Outlook* Ekonomi Indonesia 2023

Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2023



Dalam rangka memberikan pandangan dan saran rekomendasi kepada Presiden terhadap proyeksi perkembangan dan situasi perekonomian Indonesia tahun 2023, serta evaluasi atas kinerja perekonomian tahun 2022, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilakukannya pembahasan bersama beberapa ahli dan praktisi di bidang perekonomian mengenai prediksi kondisi ekonomi di tahun 2023 mendatang dan strategi yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sekretariat Kabinet kemudian menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) *Outlook* Ekonomi 2023 pada 9-10 November 2022 dengan tema Menavigasi Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi dan diselenggarakan secara *hybrid* (kombinasi daring dan luring). FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Indonesia, APINDO, Danareksa, dan Prospera, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Inti pembahasan dalam FGD tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ekonomi global sepanjang 2022 mengalami serangkaian guncangan di tengah fase awal pemulihan pandemi Covid-19. Tren kenaikan inflasi di negara maju akibat gangguan suplai (akhir 2021), yang kemudian diikuti dengan perang Rusia-Ukraina (awal Februari 2022) semakin meningkatkan laju inflasi akibat disrupsi pasokan pangan dan energi global.
- b) Bank Sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan untuk mengendalikan kenaikan laju inflasi tersebut. kenaikan suku bunga acuan tersebut diperkirakan terus **berlanjut** di 2023 sejalan dengan tekanan inflasi yang masih kuat dan diikuti dengan normalisasi kebijakan moneter.
- c) perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada Q3 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Q2 2022 ((**5,45%**, yoy), dan **sejalan** dengan **proyeksi Sekretariat Kabinet (5,71%**, yoy). Kinerja ini

ditopang oleh solidnya **konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor**, serta efek basis yang rendah (**low-base effect**) dari Q3 2021 akibat gelombang varian delta.

- d) Pertumbuhan ekonomi Q3 2022 salah satunya didorong realisasi **penanaman modal** yang mencapai **Rp307,8 T** (tumbuh **42,1%**, yoy atau **1,9%**, qtq), khususnya penanaman modal asing (PMA) yang mencapai **Rp168,9 T** atau tumbuh **63,6%**.
- e) **Stabilisasi nilai tukar** Rupiah (per 8 November melemah **10,14%**, ytd) telah berdampak pada penurunan cadangan devisa (Oktober 2022: **US\$130,2** miliar **turun** dibanding September).
- f) Tantangan ke depan akan lebih terkait dengan perkembangan **gejolak eksternal**, khususnya akibat ketidakpastian **geopolitik**, dan tekanan untuk **menaikkan suku bunga BI7-DRR** guna mencegah **depresiasi** Rupiah dan **pembalikan arus modal** ke luar negeri.

FGD menghasilkan kesimpulan dan usulan rekomendasi kebijakan dalam menavigasi perekonomian di tengah risiko resesi global:

- a) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 diproyeksikan **di atas 5%** (Proyeksi Sekretariat Kabinet, Q4 2022: 5,2% (*yoy*), dan 2022: 5,3%). Namun, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan **melambat** pada level **5%** atau bahkan **di bawah 5%** apabila *downside risk* terealisasi secara penuh, seperti **penurunan kinerja ekspor** dan tertahannya **investasi** akibat **resesi global** dan **risiko** terganggunya **stabilitas politik keamanan** pada tahun politik, **tekanan inflasi** dari sisi *supply* mulai **mereda** namun indikasi pelemahan permintaan dapat **memperlambat pertumbuhan konsumsi**, dan **belanja pemerintah** yang **terbatas** akibat kebijakan konsolidasi fiskal.
- b) Memperhatikan berbagai risiko tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan untuk **menavigasi** perekonomian di tengah ancaman **resesi global**, antara lain:
 - 1) **Sinergi kebijakan fiskal dan moneter** untuk menjaga stabilitas dan memitigasi risiko potensial, termasuk memitigasi dampak kenaikan BI7-DRR terhadap kenaikan suku bunga pinjaman;
 - 2) **Prioritas anggaran** pada belanja **bantuan sosial** tetap diperlukan untuk menjaga **daya beli**, yang disertai dengan *refocussing* anggaran pada belanja-belanja prioritas yang mendukung **transformasi ekonomi**, seperti **infrastruktur, pengembangan SDM** (pendidikan dan kesehatan), **UMKM**, dan **digitalisasi ekonomi**.
Khusus untuk **infrastruktur**, dengan kemampuan APBN yang terbatas, Pemerintah dapat fokus pada **perbaikan ekosistem** untuk mendorong **keterlibatan swasta** dalam **pembiayaan kreatif** (*blended finance, crowd funding*, dll.) pembangunan infrastruktur.
 - 3) **Kualitas belanja** (APBN dan APBD) agar **ditingkatkan** dalam bentuk **perbaikan pola penyerapan** (tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran), **meningkatkan penetrasi** dan **efektivitas** Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (**P3DN**), dan pengerjaan **proyek** dengan **skema padat karya**.

- 4) Pemberian **insentif** secara **selektif** dengan mengevaluasi **efektivitas insentif** yang sudah berjalan, seperti insentif *super tax deduction* untuk pelatihan serta pendidikan vokasi yang **belum terlalu dimanfaatkan**. Pemberian insentif pada sektor padat karya seperti sektor **perumahan**, dan untuk sektor yang **berpotensi terdampak resesi** seperti industri **Tekstil** dan **Produk Tekstil**, dan **Alas Kaki**, perlu dipertimbangkan.
- 5) Dalam jangka menengah dan panjang, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi ke arah **ekonomi hijau**, dan **ekonomi digital** perlu semakin **diintensifkan**. Hal ini diproyeksikan akan meningkatkan **produktivitas 40%–70%**, menambah **20 juta** lapangan pekerjaan pada **2030**, menciptakan tambahan likuiditas **US\$120 miliar** dalam perekonomian, serta memperkuat **pendalaman keuangan** di Indonesia.

**Focus Group Discussion
Outlook Ekonomi Indonesia 2023**



10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang intinya menyatakan bahwa di setiap infrastruktur publik (Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun, Terminal dan Rest Area) wajib mengalokasikan 30% lahan komersil untuk digunakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretariat Kabinet selama tahun 2022 telah melakukan kegiatan pemantauan di beberapa lokasi infrastruktur publik meliputi

- a. Terminal Bus (Luwipanjang, Bandung dan Rajabasa, lampung)
- b. Stasiun Kereta Api (ST Hall, Bandung, dan Tugu, Jogjakarta)
- c. Bandara (NYIA Kulon Progo)

- d. Pelabuhan (Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas, Semarang dan Merak-Bakauheni)
- e. Rest Area (di pulau Jawa KM 57A, KM 72A, 97B, KM 88B, KM 456A dan KM 456B, KM 260 B) dan (di pulau Sumatera KM 20 A, KM 49 A, KM 87 A, KM 67 B dan 33 B).

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui secara nyata pelaksanaan PP 7 tahun 2021 khususnya terkait alokasi 30% bagi UMK, biaya sewa bagi UMK paling tinggi 30% dari biaya sewa normal lainnya, dan pembentukan koperasi di setiap infrastruktur publik. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada beberapa lokasi infrastruktur public yang dikunjungi ditemukan bahwa:

- a. Semua Infrastruktur public telah mengalokasikan 30% tempat usaha strategisnya bagi UMK.
- b. Bandara NYIA, Terminal Bus leuwipanjang dan Rajabasa merupakan 3 lokasi Infrastruktur public yang telah menerapkan sewa tarif UMK mengikuti ketentuan tariff dalam PP 7 tahun 2021.
- c. Rest Area KM 260B banjaratma merupakan satu-satunya infrastruktur public yang telah membentuk koperasi bagi UMK

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan kegiatan pemantauan melakukan beberapa penyelesaian masalah seperti, dualisme koperasi di Rest Area KM 260 B Banjaratma, mendorong percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPERA terkait pelaksanaan PP 7 tahun 2021, serta mendorong KPKNL Bandung untuk melaksanakan percepatan perhitungan tariff sewa bagi UMK di lokasi terminal Leuwipanjang.

Untuk itu Sekretariat Kabinet telah mendorong beberapa lokasi untuk menjadi piloting projek yang harus didorong pemenuhan ketentuan PP 7 tahun 2021 meliputi, Bandara NYIA kulon Progo, Terminal Bus Leuwipanjang, Rest Area KM 260 B, dan Pelabuhan Bakauheni. Dan mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM beserta kementerian terkait lainnya agar dapat mengikuti ketentuan tariff seperti yang dilakukan pada bandara NYIA Kulon Progo dan Terminal bus Leuwipanjang, Bandung.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Menteri Koperasi dan UKM, agar dapat ditindaklanjuti.

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**



11. Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres Ran Ksb): Program 5

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, Presiden menerbitkan Inpres RAN KSB yang menginstruksikan 14 Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Inpres RAN KSB terbit pada 22 November 2019 dan terdiri atas 5 (lima) komponen dan 28 program. Dari 28 program tersebut, sepanjang tahun 2022 Sekretariat Kabinet terlibat aktif melakukan pengawalan pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB dalam berbagai forum. Pengawalan terhadap pelaksanaan program 5 tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) di 26 daerah sentra sawit perlu dilakukan mengingat program 5 merupakan ujung tombak dari pelaksanaan RAN KSB di daerah (*critical point*) dan sampai dengan pelaksanaan Inpres RAN KSB tahun ke-3 (tiga), progres pelaksanaannya belum optimal.

Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet mendorong adanya kegiatan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB. Kegiatan tersebut meliputi *desk study*, rapat koordinasi pendahuluan, pemantauan lapangan ke: (i) Jambi; (ii) Kalimantan Tengah; dan (iii) Sumatera Barat, rapat koordinasi tindak lanjut, dan penyusunan laporan. *Desk study* dimulai sejak awal Februari 2022 dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengikuti webinar Peluang Pembiayaan RAN-KSB dan mempelajari dokumen Panduan Penyusunan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Pendahuluan dilakukan pada 09 Agustus 2022 dimana Sekretariat Kabinet mengusulkan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama ke-3 (tiga) lokasi terkait pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB. Pemantauan bersama dilakukan pada: (i) 30 Agustus s.d. 01 September 2022 (Jambi); (ii) 21 s.d. 23 September 2022 (Kalimantan Tengah); dan (iii) 28 s.d. 30 September 2022 (Sumatera Barat). Selanjutnya, pada 15 November 2022 diselenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut yang pada intinya menyepakati bahwa pelaksanaan program 5 akan diakselerasi pada tahun 2023.

Kesimpulan umum hasil temuan dan evaluasi bahwa, pelaksanaan Inpres RAN KSB pada program 5 (dengan cakupan 26 provinsi dan 217 kabupaten/kota penghasil sawit) belum optimal, dengan capaian progres per November 2022 yaitu: (i) 14 dokumen RAD KSB: 7 provinsi (26,92%) dan 7 kabupaten/kota (3,22%); dan (ii) 17 TPD: 9 provinsi (34,61%) dan 8 kabupaten/kota (3,69%). Berdasarkan hasil monev ke-3 (tiga) lokasi, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (*fact finding*) pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB, yaitu:

- b) daerah kurang mendapat informasi mengenai kewajiban menyusun RAD dan membentuk TPD;
- c) keterlambatan penerbitan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2021 sebagai panduan penyusunan RAD KSB bagi daerah;
- d) keengganan daerah (*political will*) dalam mematuhi amanat kebijakan nasional perkelapasawitan serta menganggapnya sebagai beban dan tidak menjadi solusi pada permasalahan sawit di daerahnya;
- e) daerah kekurangan sumber daya, terutama pendanaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan amanat Inpres RAN KSB;
- f) daerah tidak memiliki informasi atau akses untuk melakukan kerja sama dengan mitra pembangunan di daerahnya, sehingga peran mitra pembangunan belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan perkelapasawitan dimaksud; dan
- g) peran kesekretariatan RAN KSB pusat dan daerah, dan focal point blm optimal terutama dalam arus alir data dan informasi, serta asistensi maupun konsultasi antarpihak yang relevan dalam pelaksanaan Inpres RAN KSB.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi, yaitu:

1. Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB untuk:

- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan Inpres RAN KSB, termasuk peningkatan fungsi dan kinerja Sekretariat RAN KSB Nasional dan Daerah, serta *focal point* RAN KSB di kementerian/lembaga terkait;
 - b. meningkatkan sosialisasi kebijakan perkelapasawitan nasional, di antaranya, RAN KSB, sertifikasi kelapa sawit/ISPO, dan akselerasi penyampaian laporan pelaksanaan Inpres RAN KSB kepada Presiden.
2. Menteri Dalam Negeri selaku anggota Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB agar,
 - a. mendorong kepala daerah untuk berkomitmen dalam percepatan dan realisasi pelaksanaan kebijakan nasional perkelapasawitan dan menyelaraskan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan terkait di daerah;
 - b. bersama dengan Menteri Pertanian untuk mengidentifikasi mitra pembangunan dan memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah dalam kerangka kerja RAN KSB.

Rekomendasi tersebut disampaikan berjenjang mulai dari memorandum Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (memo nomor: M.0772/Ekon-4/11/2022 tanggal 24 November 2022), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (memorandum nomor: M.604/Ekon/12/2022 tanggal 05 Desember 2022), memorandum Sekretaris Kabinet (memorandum nomor: M.1223/Seskab/12/2022 tanggal 06 Desember 2022), dan Surat Sekretaris Kabinet Nomor 587/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 06 Desember 2022.

Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 587/Seskab/Ekon/12/2022 tertanggal 06 Desember 2022 yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian telah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan optimalisasi pelaksanaan Inpres RAN KSB di 2 (dua) tahun terakhir masa berlaku Inpres tersebut.

Rapat Koordinasi Pendahuluan – 09 Agustus 2022



**Rapat Koordinasi Teknis dengan Sekretariat Tim Pelaksana
Inpres RAN KSB – 18 Agustus 2022**



Monev ke Provinsi Jambi – 30 Agustus s.d. 01 September 2022



Moneyv ke Provinsi Kalimantan Tengah – 21 s.d. 23 September 2022



Moneyv ke Provinsi Sumatera Barat – 28 s.d. 30 September 2022



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut – 15 November 2022



Surat Sekretaris Kabinet Nomor 587 Tahun 2022:

Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB): Program 5



12. Evaluasi dan Monitoring Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)

Mengingat bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri, keberadaan IKM dalam rantai pasok industri menjadi bagian penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus juga memberikan *multiplier effect* dalam memacu daya saing pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden pada Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dalam rangka HUT ke-76 pada tanggal 16 Agustus 2021, guna menyiapkan berbagai kemudahan untuk menumbuhkan UMKM (IKM), termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa *strategic outcomes*, antara lain dengan meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Mengacu pada hal tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, khususnya dalam melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) berupa *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan lapangan, dan rapat koordinasi dengan mitra kerja.

Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian kegiatan tersebut guna memberikan dukungan bagi Presiden dalam memberikan masukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan langkah-langkah IKM untuk masuk dalam rantai pasok industri untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk keberhasilan dan kesinambungan pemberdayaan Sentra IKM, diantaranya yakni:

- a. Penentuan Lokasi Prioritas dengan tematik penguatan destinasi pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM menjadikan Sentra IKM prioritas unggulan lainnya tidak mendapatkan DAK tahun anggaran berikutnya, seperti Sentra IKM Lada yang mendukung program *Spice Up The World*, dan Sentra IKM budidaya porang yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas mengenai pengembangan budidaya tanaman porang tanggal 4 Mei 2021.
- b. Sinergitas antarkementerian dalam penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan pengembangan Sentra IKM tidak berjalan optimal.
- c. Program pemerintah dalam pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM tidak berjalan berkelanjutan, karena perubahan Lokasi Prioritas dilakukan setiap tahun, sehingga tidak adanya jaminan alokasi pendanaan tahun berikutnya untuk pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, padahal pembangunan Sentra IKM tersebut belum selesai atau tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, misal pembangunan Sentra IKM Surakarta.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Perindustrian perlu kembali memastikan perencanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM pada lokasi yang telah ditetapkan dengan dilekatkan pada program penguatan destinasi pariwisata, dapat dipastikan selesai dalam satu tahun anggaran;
- b. Adapun untuk rencana penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata TA 2024 dengan melekatkan pada pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, kiranya dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Keberlanjutan pendanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM;
 - 2) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Lokasi Prioritas Pariwisata serta pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, antara lain melalui penyatuan data potensi daerah yang diusulkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM;
 - 3) Fleksibilitas perencanaan dan penganggaran Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM; dan
 - 4) Jangka waktu penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM dilakukan dengan memberikan kesempatan yang layak kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan masukan, antara lain terkait potensi daerah yang akan ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata.
- c. Perlu dipertimbangkan adanya *crash program* sebagai alternatif penyelesaian pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang berpotensi mengalami ketidakberlanjutan karena tidak teralokasikannya anggaran untuk melanjutkan pembangunan dan/atau revitalisasi pada tahun 2023 (seperti Sentra IKM Furnitur Gilingan Kota Surakarta), karena tidak masuk dalam Lokasi Prioritas Pariwisata. *Crash program* tersebut termasuk alternatif pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM di tahun 2023. Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden agar pembangunan fisik yang telah dilakukan, agar dipastikan selesai dan tidak mangkrak, dan agar pelaksanaannya dipercepat penyelesaiannya paling lambat Semester I Tahun 2024.

Rekomendasi dimaksud tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.494/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Surat Sekretaris Kabinet tentang Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM sebagai Bagian dari Rantai Pasok Global



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.494/Seskab/Ekon/10/2022 Jakarta, 19 Oktober 2022

Sifat : Sangat Segera

Perihal : Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM sebagai Bagian dari Rantai Pasok Global

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 2. Menteri Perindustrian
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional
 4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- di
Jakarta

Dalam rangka monitoring dan evaluasi mengenai pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM sebagai bagian dari rantai pasok global, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 16 September 2022, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang mewakili dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rapat koordinasi dimaksudkan untuk membahas beberapa persoalan atas pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, khususnya potensi ketidakberlanjutan dalam pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang pelaksanaannya dilekatkan dengan Lokasi Prioritas Pariwisata.

Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Prioritas dengan tematik penguatan destinasi pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM menjadikan Sentra IKM prioritas unggulan lainnya tidak mendapatkan DAK tahun anggaran berikutnya, seperti Sentra IKM Lada yang mendukung program *Spice Up The Word*, dan Sentra IKM budidaya porang yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas mengenai pengembangan budidaya tanaman porang tanggal 4 Mei 2021.
2. Sinergitas antarkementerian dalam penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan pengembangan Sentra IKM tidak berjalan optimal.
3. Program pemerintah dalam pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM tidak berjalan berkelanjutan, karena perubahan Lokasi Prioritas dilakukan setiap tahun, sehingga tidak adanya jaminan alokasi pendanaan tahun berikutnya untuk pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, padahal pembangunan Sentra IKM tersebut belum selesai atau tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, misal pembangunan Sentra IKM Surakarta.

Dalam rapat koordinasi dimaksud, diputuskan hal sebagai berikut:

1. Mengingat penetapan Lokasi Prioritas TA 2023 telah dilakukan, kiranya Kementerian Perindustrian perlu kembali memastikan perencanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM pada lokasi yang telah ditetapkan dengan dilekatkan pada program penguatan destinasi pariwisata, dapat dipastikan selesai dalam satu tahun anggaran.

2. Adapun...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Adapun untuk rencana penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata TA 2024 dengan melekatkan pada pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, kiranya dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keberlanjutan pendanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM;
 - b. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Lokasi Prioritas Pariwisata serta pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, antara lain melalui penyatuan data potensi daerah yang diusulkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM;
 - c. fleksibilitas perencanaan dan penganggaran Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM; dan
 - d. jangka waktu penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM dilakukan dengan memberikan kesempatan yang layak kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan masukan, antara lain terkait potensi daerah yang akan ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata.
3. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya *crash program* sebagai alternatif penyelesaian pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang berpotensi mengalami ketidakberlanjutan karena tidak terlaksananya anggaran untuk melanjutkan pembangunan dan/atau revitalisasi pada tahun 2023 (seperti Sentra IKM Furnitur Gilingan Kota Surakarta), karena tidak masuk dalam Lokasi Prioritas Pariwisata. *Crash program* tersebut termasuk alternatif pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM di tahun 2023. Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden agar pembangunan fisik yang telah dilakukan, agar dipastikan selesai dan tidak mangkrak, dan agar pelaksanaannya dipercepat penyelesaiannya paling lambat semester I tahun 2024.
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan tindak lanjut kesepakatan rapat sebagaimana tertuang dalam angka 2 dan angka 3.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri secara terkoordinasi dapat menindaklanjuti hasil rapat tersebut di atas, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Keuangan.

D. Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian

Hasil evaluasi implementasi SAKIP disampaikan dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100 dengan gradasi nilai sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Gradasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat kurang

Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 memperoleh nilai sebesar **87,40** dengan kategori A (**memuaskan**). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rincian Penilaian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	40,00	85,00 %	34,00
2.	Pengukuran Kinerja	40,00	90,00 %	36,00
3.	Pelaporan Kinerja	40,00	87,00 %	17,40
Total Capaian Kinerja		100,00		87,40

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya Kedeputian Bidang Perekonomian telah dapat memenuhi sebagian besar unsur pada komponen/sub

komponen evaluasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Kedeputian Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a) Melakukan monitoring atas capaian target jangka menengah dalam renstra s.d. tahun berjalan.
- b) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.
- c) Dokumen perjanjian kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)

2. Pengukuran Kinerja

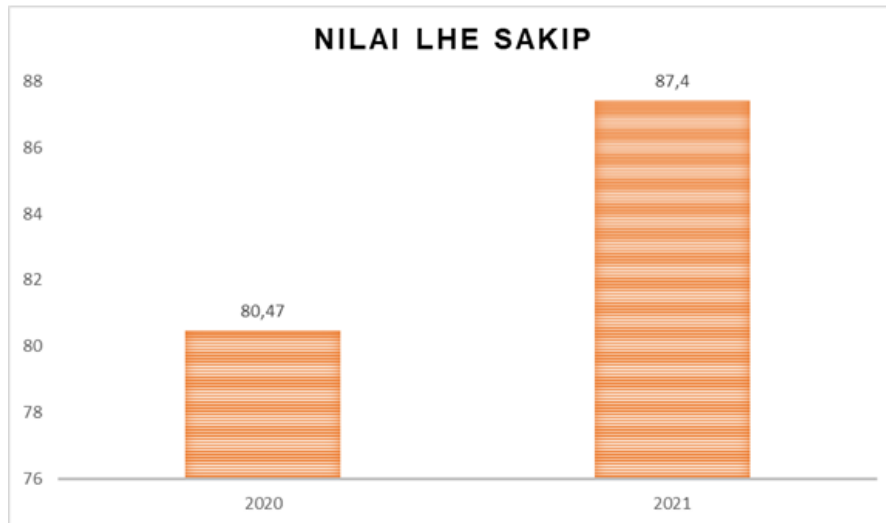
- a) Sudah terdapat SOP pengumpulan data kinerja.
- b) Pengumpulan data kinerja telah dapat diandalkan.
- c) Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya.
- d) Penggunaan aplikasi SIKT telah mencakup monitoring capaian kinerja seluruh pegawai secara berjenjang dan berkala.

3. Pelaporan Kinerja

- a) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja unit kerja.
- b) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja telah dapat diandalkan.

Perbandingan Nilai LHE SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2020-Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3
Perbandingan Nilai LHE SAKIP
Kedepatian Bidang Perekonomian
Tahun 2020-Tahun 2021



Apabila dibandingkan dengan nilai LHE SAKIP pada tahun 2020, nilai LHE SAKIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai pelaporan kinerja.

Nilai tersebut juga **telah mencapai target** yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai PMPRB
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

No	Target pada Perjanjian Kinerja	Nilai PMPRB Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022
1.	80,47	87,4

E. Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reviu Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa setiap unit kerja (tingkat eselon 1) diwajibkan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB tersebut merupakan proses penilaian atas program-program pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Organisasi, Tata Laksana, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik yang kemudian tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB.

Pada PMPRB tahun 2022, nilai pengungkit yang diajukan Kedeputian Bidang Perekonomian yaitu 36,17, dengan adanya perubahan penilaian pada pertanyaan/ Pernyataan berikut:

Tabel 3.5
Perubahan nilai pada LKE PMPRB
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Nilai LKE 2021	Nilai LKE 2022
1.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja	C	A

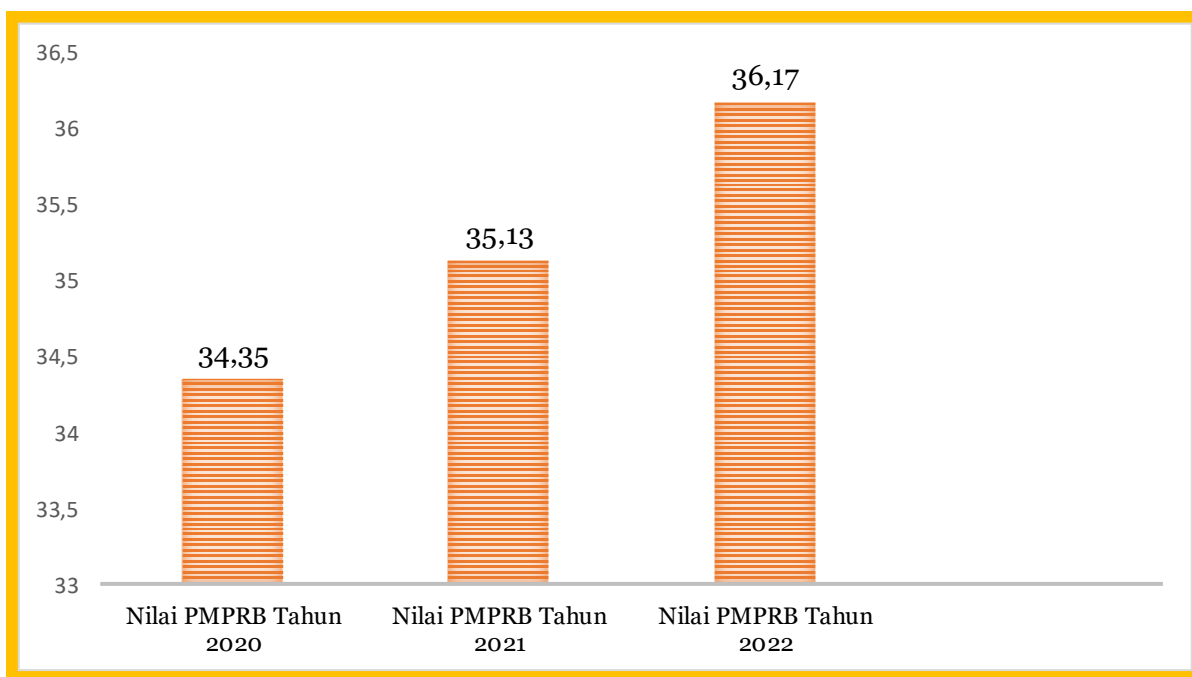
Terhadap nilai PMPRB yang diajukan oleh Kedeputian Bidang Perekonomian tersebut, Inspektorat telah melakukan reviu, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.6
Nilai PMPRB Unit Kerja Tahun 2022
Setelah Reviu Inspektorat

URAIAN		BOBOT	UNIT KERJA					
			POLHUKAM	EKON	PMK	MARVES	DKK	DEPMIN
PENGUNGKIT		36,30	33,97	36,17	34,98	34,93	35,21	35,12
I	PEMENUHAN (20)	14,60	13,62	14,57	14,43	14,25	14,60	14,57
	1 Manajemen Perubahan	2,00	1,76	2,00	1,87	1,93	2,00	2,00
	2 Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	1,84	2,00	2,00
	4 Penataan Tata Laksana	1,00	0,97	0,97	1,00	1,00	1,00	0,97
	5 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1,40	1,40	1,40	1,40	1,37	1,40	1,40
	6 Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	7 Penguatan Pengawasan	2,20	1,92	2,20	2,16	2,12	2,20	2,20
	8 Peningkatan Pelayanan Publik	2,50	2,07	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
II	REFORM (30)	21,70	20,36	21,59	20,55	20,67	20,61	20,55
	1 Manajemen Perubahan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2 Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	4 Penataan Tata Laksana	3,75	3,25	3,75	3,75	3,42	3,75	3,75
	5 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	6 Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,75	3,64	2,87	3,06	2,66	2,87
	7 Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,68
	8 Peningkatan Pelayanan Publik	3,75	2,91	3,75	3,49	3,75	3,75	3,75

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai PMPRB Kedeputian Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Nilai PMPRB Deputi Bidang Perekonomian
Tahun 2020 s.d Tahun 2022



Dari gambar 3.3 tersebut dapat diketahui bahwa Nilai PMPRB Kedeputian Bidang Perekonomian mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen Kedeputian Bidang Perekonomian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada upaya reformasi birokrasi.

Berdasarkan penjabaran tersebut, nilai komponen pengungkit PMPRB Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2022 **telah mencapai target** yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai
Komponen Pengungkit PMPRB
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

No	Target pada Perjanjian Kinerja	Nilai Komponen Pengungkit PMPRB Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022
1.	35,13	36,17

F. Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan terkait pencadangan anggaran (*automatic adjustment*), bahwa pada Tahun 2022 dari pagu awal sebesar Rp. 4.000.000.000, Kedeputian Bidang Perekonomian melakukan pencadangan anggaran sebesar Rp. 1.344.731.000,-, kemudian mengajukan pembukaan pencadangan anggaran sebesar Rp. Rp. 966.054.000,-, dan sisa pencadangan anggaran sebesar Rp. 378.677.000 dialihkan ke BA BUN, sehingga pagu akhir menjadi Rp. 3.621.323.000,-.

Realisasi Deputi Bidang Perekonomian pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.609.641.242,- atau sebesar 99,677% dari pagu Rp. 3.621.323.000,-, atau melebihi target penyerapan anggaran 90%.

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Gambar 3-5 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2022

REALISASI ANGGARAN Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Periode s.d. 30 Desember 2022

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

Pagu Dikurangi Blokir
Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	4.000.000.000	3.621.323.000	3.609.641.242	0	3.609.641.242	99,67	11.681.758
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	4.000.000.000	3.621.323.000	3.609.641.242	0	3.609.641.242	99,67	11.681.758
0401 ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA	900.000.000	633.729.000	628.054.264	0	628.054.264	99,10	5.674.736
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370
0402 ASDEP BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
0403 ASDEP BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
0404 ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.200.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
WA.6400 PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000.000	127.275.000	127.105.935	0	127.105.935	99,86	169.065

G. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Menindaklanjuti memorandum Deputy Bidang Administrasi Nomor: M.0165/Adm/05/2022, tanggal 25 Mei 2022 perihal Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Sekretariat Kabinet TA 2022 sesuai surat Menteri Keuangan nomor: S. 458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, masing-masing Asdep di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian melakukan *automatic adjustment* pada masing-masing POK baik pada program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA), yang terdiri dari Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (6403) dan Kegiatan Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan (6404), serta pada Program Dukungan Manajemen (WA) pada kegiatan Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400), sebesar Rp. 1.344.731.000, dengan besaran masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*)
Deputi Bidang Perekonomian TA 2022

Unit Kerja	Pagu Awal	<i>Automatic Adjustment</i>	Pagu Setelah <i>Automatic Adjustment</i>
Ekon-1	900.000.000,00	326.371.000,00	573.629.000,00
6403	397.284.000,00	129.392.000,00	267.892.000,00
6404	502.716.000,00	196.979.000,00	305.737.000,00
Ekon-2	900.000.000,00	287.382.000,00	612.618.000,00
6403	492.760.000,00	152.140.000,00	340.620.000,00
6404	407.240.000,00	135.242.000,00	271.998.000,00
Ekon-3	900.000.000,00	281.680.000,00	618.320.000,00
6403	520.262.000,00	156.424.000,00	363.838.000,00
6404	379.738.000,00	125.256.000,00	254.482.000,00
Ekon-4	1.300.000.000,00	449.298.000,00	850.702.000,00
6403	403.981.000,00	126.432.000,00	277.549.000,00
6404	696.019.000,00	250.141.000,00	445.878.000,00
6400	200.000.000,00	72.725.000,00	127.275.000,00
TOTAL	4.000.000.000,00	1.344.731.000,00	2.655.269.000,00

Namun demikian, mengingat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian dalam mengawal beberapa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Arahan Presiden, dimana pada saat implementasinya membutuhkan anggaran, Deputi Bidang Perekonomian mengajukan Usulan Pembukaan Pencadangan Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2022 di Lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 966.054.000,- pada masing-masing Asdep sebagai berikut:

Tabel 3.9
Usulan Pembukaan Cadangan Anggaran

Unit Kerja	Pagu Awal	Automatic Adjustment	Usulan Pembukaan Automatic Adjustment	Pagu setelah Pembukaan Automatic Adjustment
Ekon-1	900.000.000,00	326.371.000,00	60.100.000,00	633.729.000,00
6403	397.284.000,00	129.392.000,00	55.000.000,00	322.892.000,00
6404	502.716.000,00	196.979.000,00	5.100.000,00	310.837.000,00
Ekon-2	900.000.000,00	287.382.000,00	287.382.000,00	900.000.000,00
6403	492.760.000,00	152.140.000,00	152.140.000,00	492.760.000,00
6404	407.240.000,00	135.242.000,00	135.242.000,00	407.240.000,00
Ekon-3	900.000.000,00	281.680.000,00	281.680.000,00	900.000.000,00
6403	520.262.000,00	156.424.000,00	156.424.000,00	520.262.000,00
6404	379.738.000,00	125.256.000,00	125.256.000,00	379.738.000,00
Ekon-4	1.300.000.000,00	449.298.000,00	336.892.000,00	1.187.594.000,00
6403	403.981.000,00	126.432.000,00	104.334.000,00	381.883.000,00
6404	696.019.000,00	250.141.000,00	232.558.000,00	678.436.000,00
6400	200.000.000,00	72.725.000,00	-	127.275.000,00
TOTAL	4.000.000.000,00	1.344.731.000,00	966.054.000,00	3.621.323.000,00

Kemudian, menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: M.0911/Adm-1/11/2022, tanggal 25 November 2022 Perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai surat Menteri Keuangan nomor: 958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022, perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sisa anggaran automatic adjustment pada Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 378.677.000,- dialihkan ke BA BUN, sehingga pagu akhir masing-masing Asdep di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022
ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Unit Kerja	Pagu Awal	Automatic Adjustment	Usulan Pembukaan Automatic Adjustment	Sisa Automatic Adjustment	Pagu setelah Pembukaan Automatic Adjustment
Ekon-1	900.000.000,00	326.371.000,00	60.100.000,00	266.271.000,00	633.729.000,00
6403	397.284.000,00	129.392.000,00	55.000.000,00	74.392.000,00	322.892.000,00
6404	502.716.000,00	196.979.000,00	5.100.000,00	191.879.000,00	310.837.000,00
Ekon-2	900.000.000,00	287.382.000,00	287.382.000,00	-	900.000.000,00
6403	492.760.000,00	152.140.000,00	152.140.000,00	-	492.760.000,00
6404	407.240.000,00	135.242.000,00	135.242.000,00	-	407.240.000,00
Ekon-3	900.000.000,00	281.680.000,00	281.680.000,00	-	900.000.000,00
6403	520.262.000,00	156.424.000,00	156.424.000,00	-	520.262.000,00
6404	379.738.000,00	125.256.000,00	125.256.000,00	-	379.738.000,00
Ekon-4	1.300.000.000,00	449.298.000,00	336.892.000,00	112.406.000,00	1.187.594.000,00
6403	403.981.000,00	126.432.000,00	104.334.000,00	22.098.000,00	381.883.000,00
6404	696.019.000,00	250.141.000,00	232.558.000,00	17.583.000,00	678.436.000,00
6400	200.000.000,00	72.725.000,00	-	72.725.000,00	127.275.000,00
TOTAL	4.000.000.000,00	1.344.731.000,00	966.054.000,00	378.677.000,00	3.621.323.000,00

Setelah dilakukan pencadangan anggaran tersebut, Pagu akhir Deputi Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp. 3.621.323.000,00. Pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Asdep:
 - a. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
 - b. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
 - c. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan

- d. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Asdep yang membawahi Bidang Fasilitasi Operasional (Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)

Realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.609.641.242,- atau sebesar 99,677% dari pagu Rp. 3.621.323.000,-. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sepanjang Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh 4 (empat) Asdep, baik untuk kegiatan yang sifatnya *bottom up* ataupun kegiatan yang sifatnya *Top down*. Detail rekapitulasi realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

REALISASI ANGGARAN								
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan								
Periode s.d. 30 Desember 2022								
Kementerian	: SEKRETARIAT KABINET							
Unit Organisasi	: SEKRETARIAT KABINET							
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT KABINET							
DIPA No. Tgl.	: DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021							
Pagu Dikurangi Blokir Berdasarkan Kuitansi Halaman : 1 dari 1								
Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran	
JUMLAH REALISASI								
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	4.000.000.000	3.621.323.000	3.609.641.242	0	3.609.641.242	99,67	11.681.758	
0401 ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA	900.000.000	633.729.000	628.054.264	0	628.054.264	99,10	5.674.736	
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366	
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370	
0402 ASDEP BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190	
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184	
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006	
0403 ASDEP BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258	
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415	
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843	
0404 ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.300.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574	
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977	
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532	
WA.6400 PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000.000	127.275.000	127.105.935	0	127.105.935	99,86	169.065	

Dari data di atas terlihat bahwa penyerapan realisasi anggaran pada masing-masing Asdep sangat baik, selain itu realisasi anggaran juga meningkat 0,057% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2019-2022, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

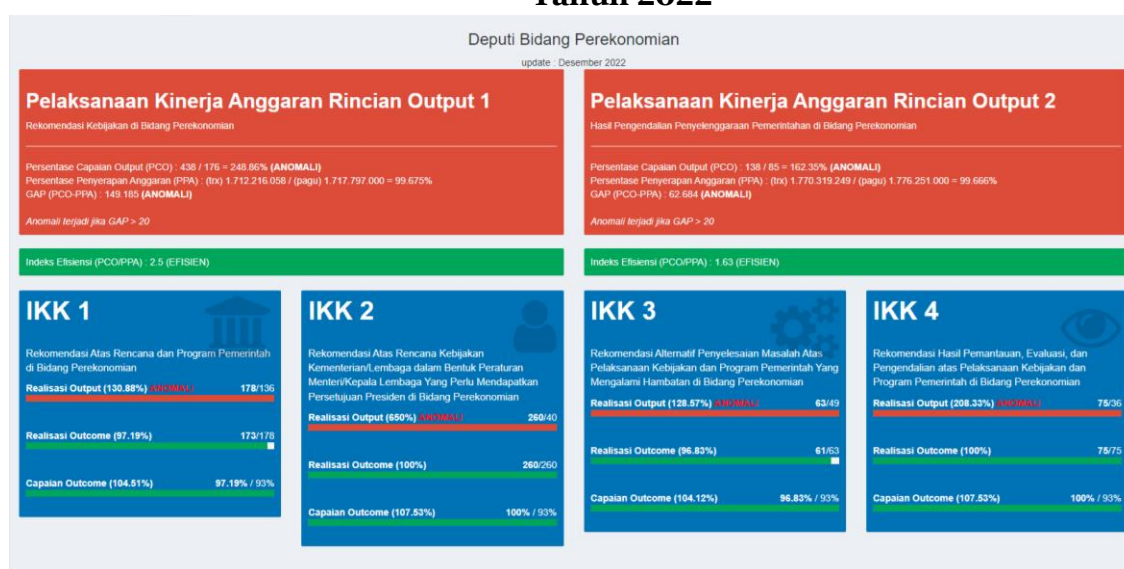
Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Deputy Bidang Perekonomian
Tahun 2019-2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	Rp 5.408.612.000	Rp 5.378.623.176	99,45%
2020	Rp 1.687.418.000	Rp 1.669.022.998	98,91%
2021	Rp. 2.651.569.000,-.	Rp. 2.641.509.204,-	99,62%
2022	Rp 3.621.323.000,-..	3.609.641.242,-	99,67%

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dilaksanakan guna melihat ketercapaian *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan tetap memperhatikan kualitas capaian. Gambaran pelaksanaan anggaran dan ketercapaian *output* dan *outcome* pada masing-masing Asdep di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.6
Dashboard Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian
Tahun 2022



Dari *dashboard* Capaian Output Level Program di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan untuk level program sudah efisien (terlihat dari indeks efisiensi di atas 1). Pada dashboard juga terlihat seluruh indikator capaian mengalami anomali, hal ini disebabkan karena tingginya capaian *output* dibandingkan dengan target *output* yang telah ditetapkan, dimana hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal di luar kendali, antara lain:

1. Peningkatan Volume Rapat Internal maupun Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, sehingga penyiapan bahan untuk Rapin dan Ratas juga meningkat;
 2. Peningkatan penyelesaian Rancangan Permen/Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diajukan oleh K/L;
 3. Beberapa output dihasilkan karena adanya beberapa kegiatan incidental atas arahan pimpinan maupun atas penyelesaian surat masuk.
- Capaian Output Program

Tabel 3.13
Pelaksanaan Anggaran dan Ketercapaian Output & Outcome
Tahun 2022

Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden					
Sasaran Program	Output Program/Indikator Output Program	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	176	438	249%	
	Jumlah rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	136	178	131%	
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	40	260	650%	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	85	138	162%	
	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/kepala Lembaga	49	63	129%	
	Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/kepala Lembaga	36	75	208%	

Dari tabel diatas terlihat bahwa, target output yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan untuk beberapa Indikator melebihi 120%, hal ini dikarenakan:

- a. Terdapat peningkatan permintaan penyampaian bahan briefing sheet (IOP-1);
- b. Dalam Kurun Waktu Tahun 2022, banyak terlibat dalam pembahasan penyelesaian Rpermen/Perka yang sifatnya incidental. Sebagai contoh : pembuatan RPermen terkait

masalah minyak goreng dan juga pembuatan RPermen untuk menunjang integrasi organisasi riset ke dalam BRIN (IOP-2); dan

- c. Meningkatnya rekomendasi hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah seiring dengan tindaklanjut arahan Presiden (IOP-4);

- Capaian Outcome Program

Tabel 3.14
Capaian Outcome Program
Tahun 2022

Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden					
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	93%	97,19%	104,5%	
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	93%	100,0%	107,5%	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/kepala Lembaga	93%	96,9%	104,2%	
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/kepala Lembaga	93%	100,0%	107,5%	

Dari tabel diatas, terlihat bahwa untuk realisasi output program belum sepenuhnya menjadi output Program, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa *output* yang perlu dikaji oleh stakeholder terkait sebelum dilakukan aksi oleh KL. Namun demikian bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 93%, semua capaian Indikator Kinerja dapat tercapai. Terhadap capaian output dan outcome program tersebut diatas, tentunya akan menjadikan bahan evaluasi oleh Kedeputusan Bidang Perekonomian kedepannya .

H. Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA)

SISUKA adalah sebuah sistem yang dikembangkan secara internal di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian sejak akhir Tahun 2019 dan mulai efektif diimplementasikan pada Tahun 2020. Sistem ini dibuat sebagai *tools* untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Perekonomian kepada mitra K/L yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet. Selama Tahun 2022 surat Sekretaris Kabinet yang diproses oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk disampaikan

kepada K/L dan telah diinput pada SISUKA sebanyak 269 surat, yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Sebanyak 3 surat sifatnya hanya penerusan ke K/L sehingga tidak perlu tindak lanjut;
2. Sebanyak 266 surat berisi rekomendasi kepada K/L sehingga memerlukan tindak lanjut. Dari 266 surat yang memerlukan tindak lanjut tersebut, dari hasil monitoring SISUKA dapat dilaporkan progresnya sebagai berikut:
 - a) Sudah selesai dilaksanakan oleh K/L (status hijau) sebanyak 221 surat;
 - b) Sedang ditindaklanjuti/*on process* (status kuning) sebanyak 33 surat; dan
 - c) Belum ditindaklanjuti (status merah) sebanyak 12 surat. Dari hasil *monitoring* surat yang belum ditindaklanjuti ini diantaranya terkait surat persetujuan Rpermen/Perka yang perlu mendapat persetujuan Presiden, beberapa sedang dalam proses penetapan oleh K/L.

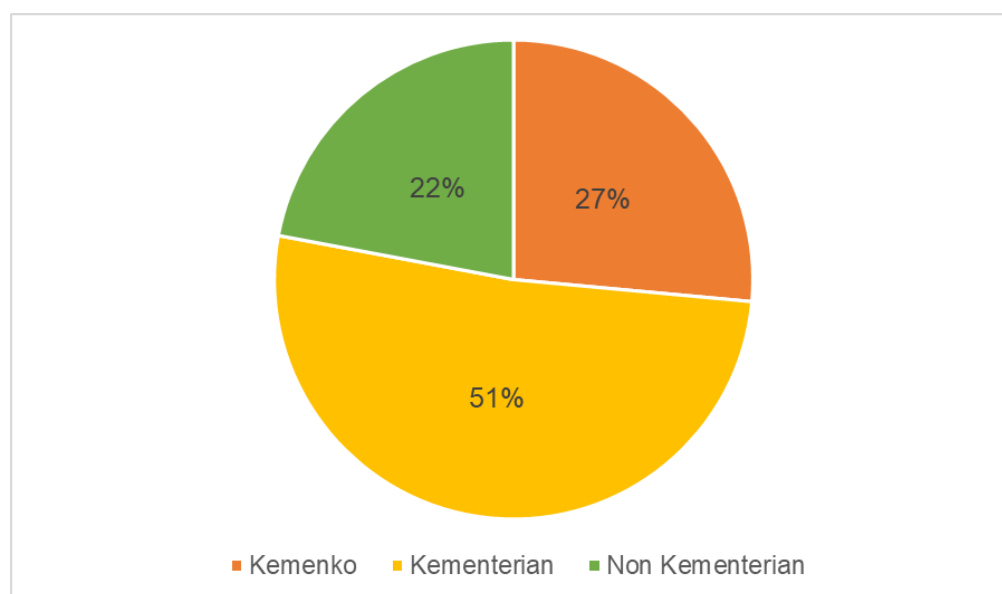
Gambar 3.7
Tindak Lanjut SISUKA Per Asdep Tahun 2022



I. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, Deputi Bidang Perekonomian secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan. Pelaksanaan survei kepuasan tersebut merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan pada tanggal 13-31 Desember 2022 terhadap 57 (lima puluh tujuh) Eselon II pada Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra kerja Deputi Bidang Perekonomian. Dari 57 (lima puluh tujuh) mitra kerja tersebut, terdapat 68 (enam puluh delapan) responden yang mengisi survei.

Gambar 3.8
Perbandingan Kementerian/Lembaga yang Mengisi Kuesioner

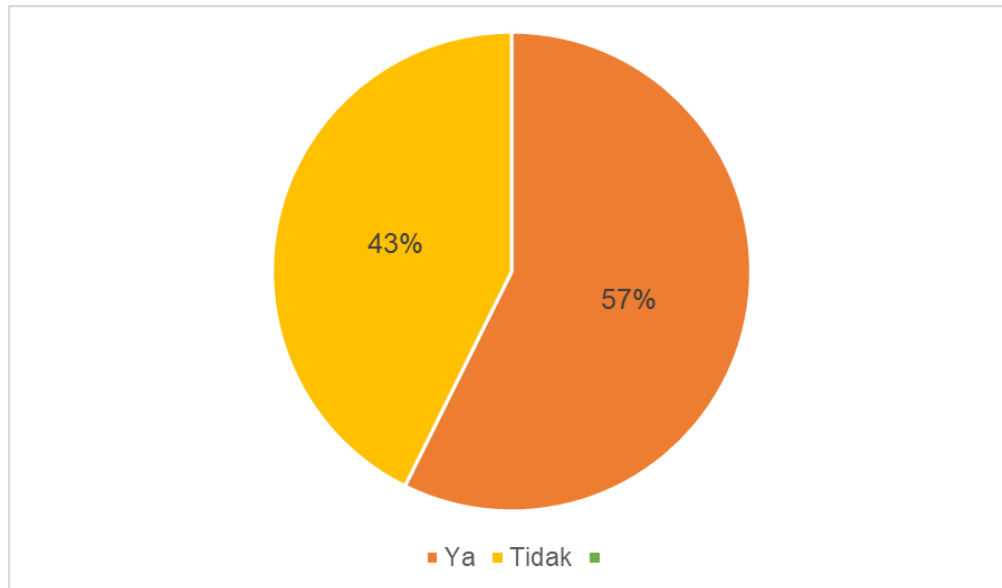


Berdasarkan gambar 3.7 di atas, sebanyak 68 (enam puluh delapan) responden dari Kementerian/Lembaga telah mengisi kuesioner. Sebanyak 35 responden (51%) berasal dari Kementerian, 18 Responden (27%) berasal dari Kementerian Koordinator, dan sisanya sebanyak 15 Responden (22%) berasal dari Non Kementerian.

1. Rekomendasi Kebijakan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di Bidang Perekonomian berdasarkan 68 (enam puluh delapan) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

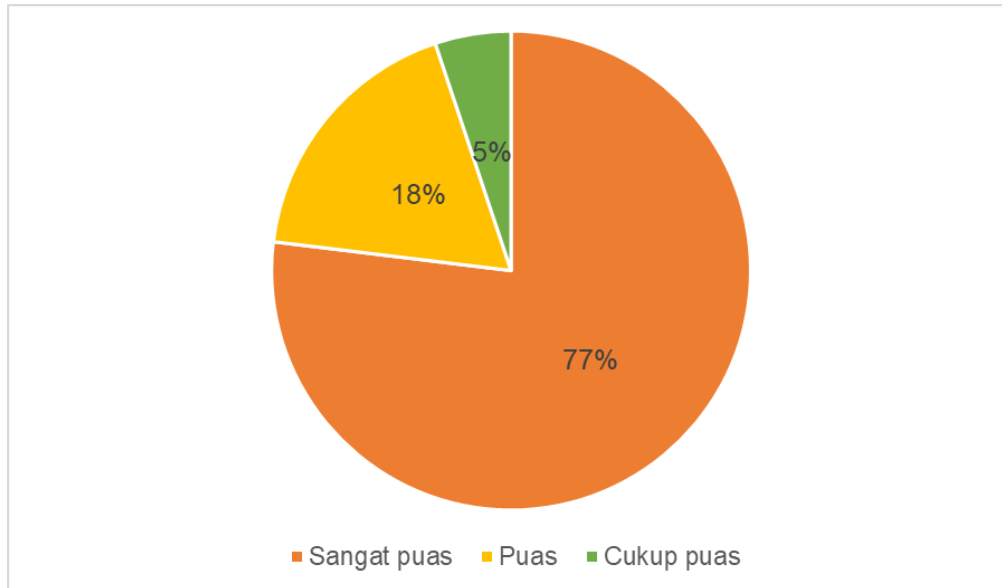
Gambar 3.9
Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir



Berdasarkan gambar 3.8 di atas, terdapat 39 Kementerian/Lembaga (57%) yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, sisanya sebanyak 29 Kementerian/Lembaga (43%) menjawab tidak pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

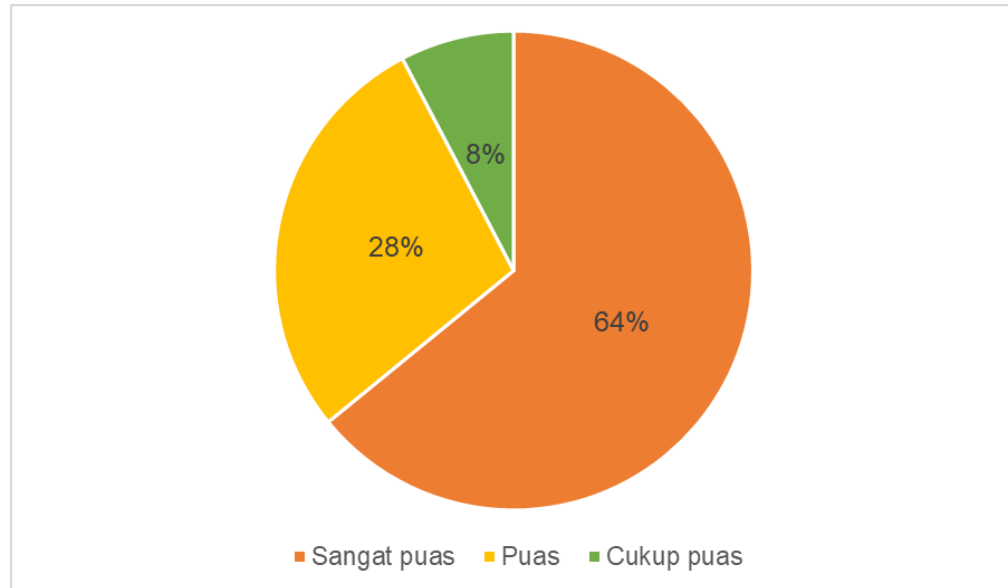
Gambar 3.10
Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.9 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 30 responden (77%), sebanyak 7 responden (18%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

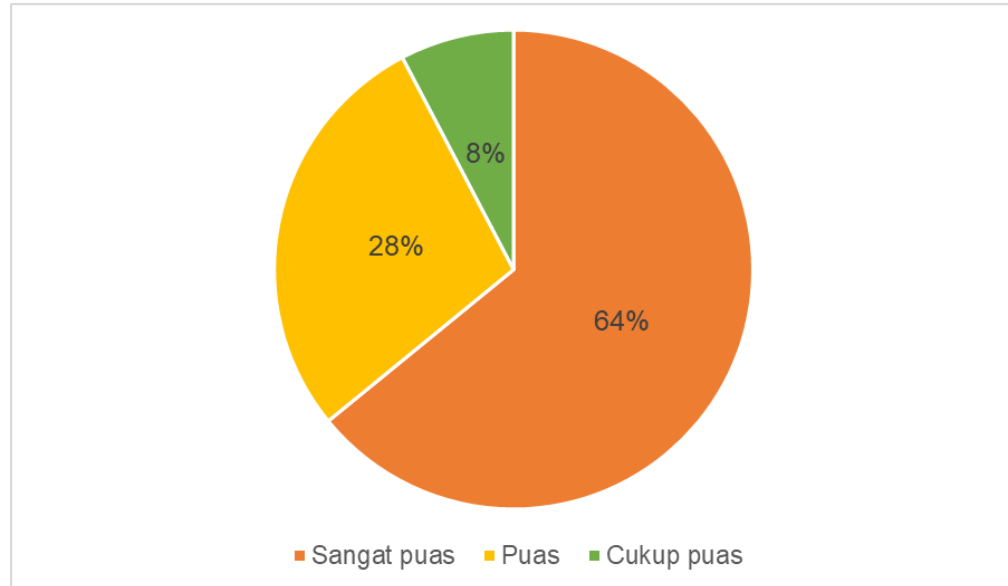
Gambar 3.11
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.10 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 25 responden (64%), sebanyak 11 responden (28%) menyatakan puas, 3 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

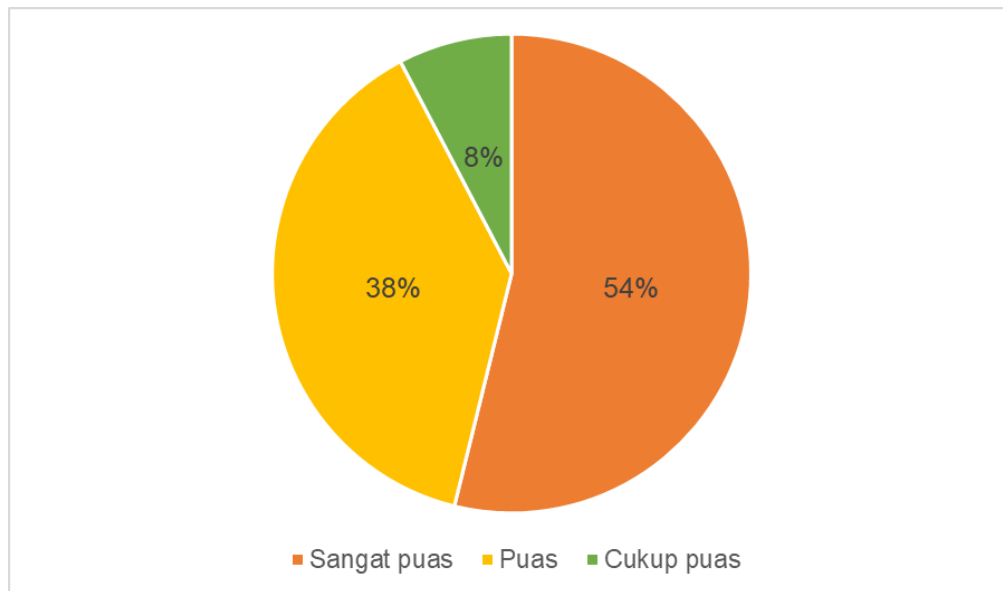
Gambar 3.12
Tingkat kepuasan terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.11 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 25 responden (64%), sebanyak 11 responden (28%) menyatakan puas, 3 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

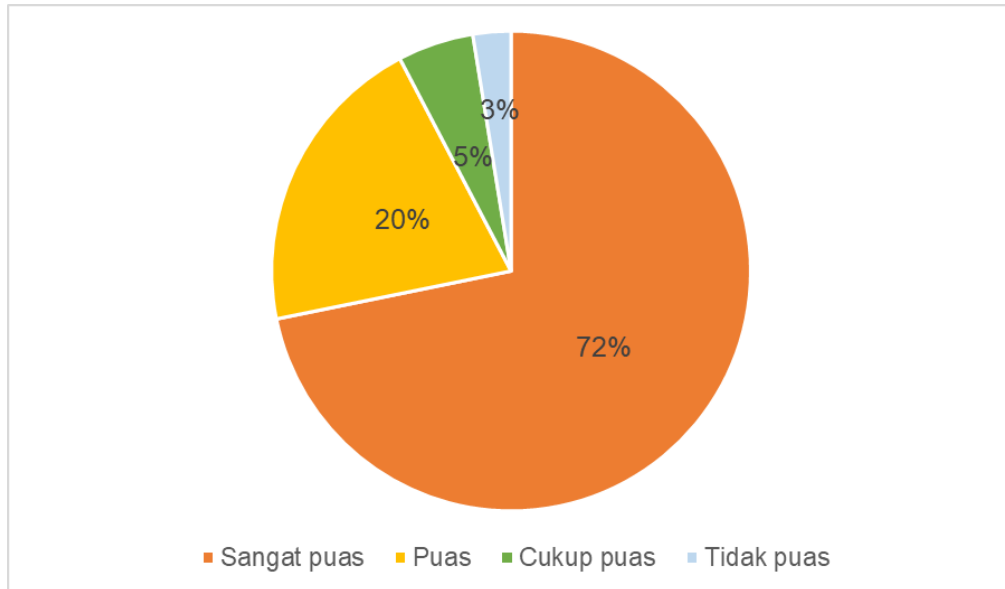
Gambar 3.13
Tingkat kepuasan terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.12 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 21 responden (54%), sebanyak 15 responden (38%) menyatakan puas, 3 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian?

Gambar 3.14
Tingkat kepuasan terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian

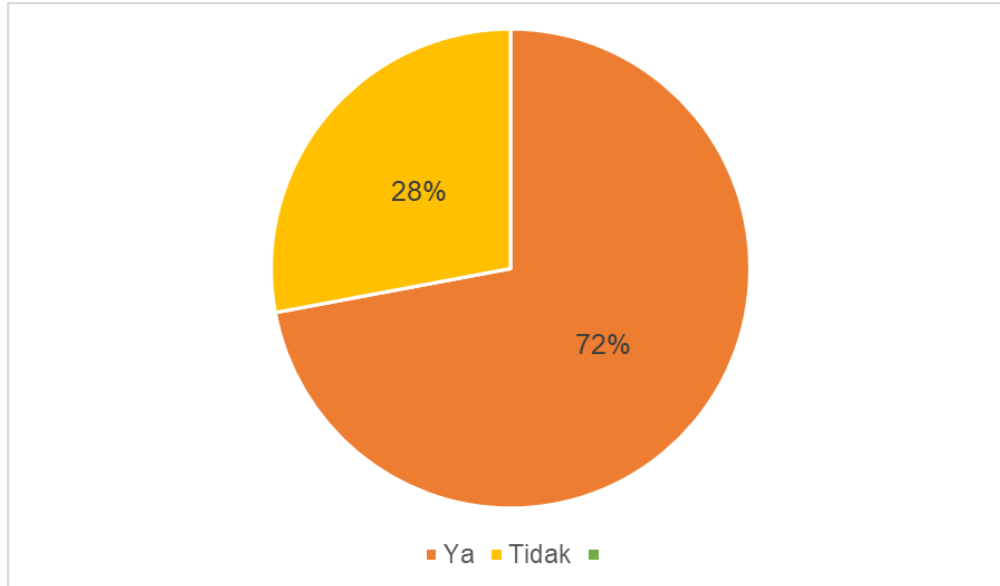


Berdasarkan gambar 3.13 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (72%), sebanyak 8 responden (20%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas, 1 responden (3%) menyatakan kurang puas, dan tidak ada responden yang tidak puas terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian.

2. Penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 68 (enam puluh delapan) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

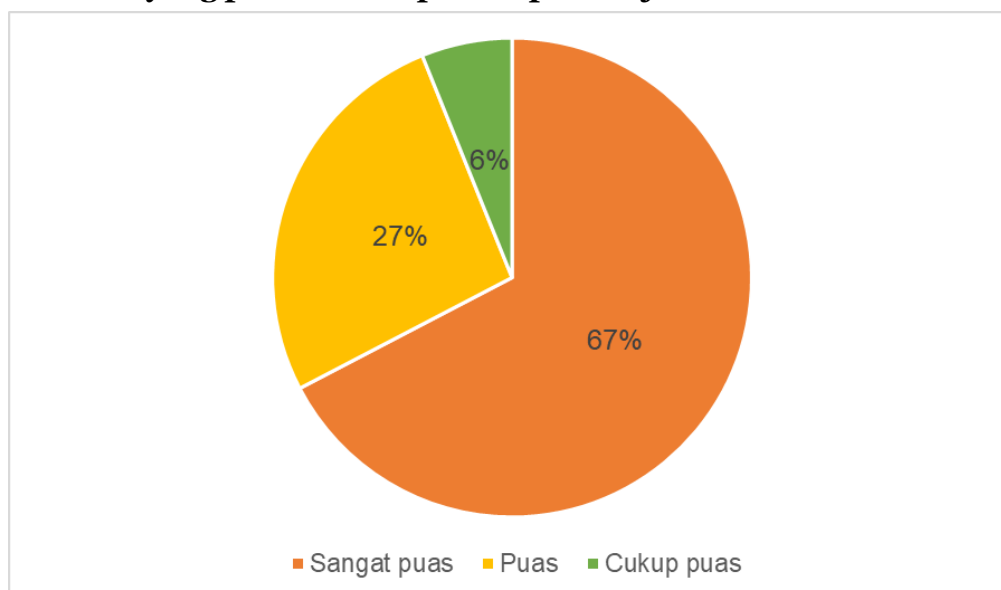
Gambar 3.15
Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir



Berdasarkan gambar 3.14 di atas, terdapat 49 Kementerian/Lembaga (72%) yang pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sisanya sebanyak 19 Kementerian/Lembaga (28%) menjawab tidak pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

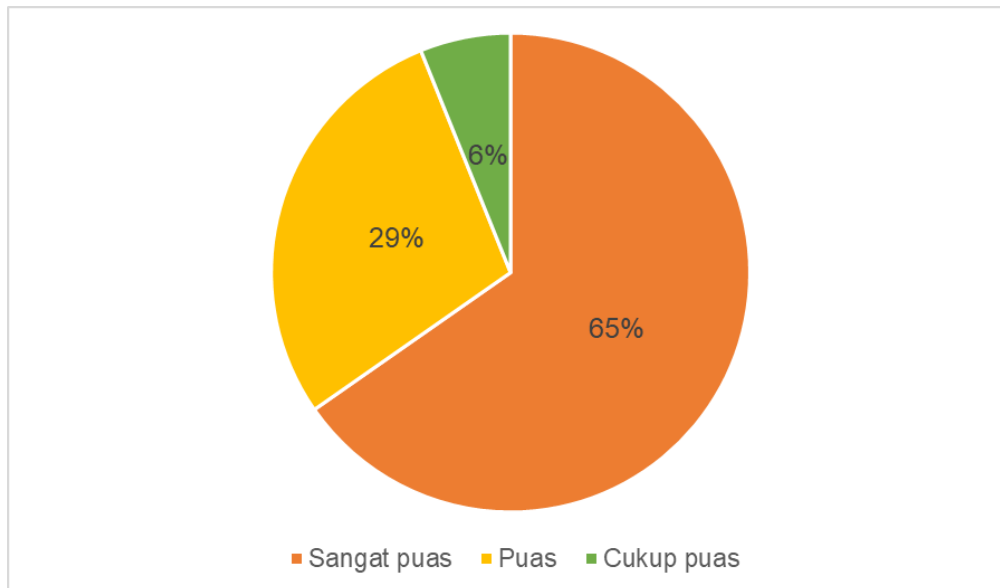
Gambar 3.16
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden



Berdasarkan gambar 3.15 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 33 responden (67%), sebanyak 13 responden (27%) menyatakan puas, 3 responden (6%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

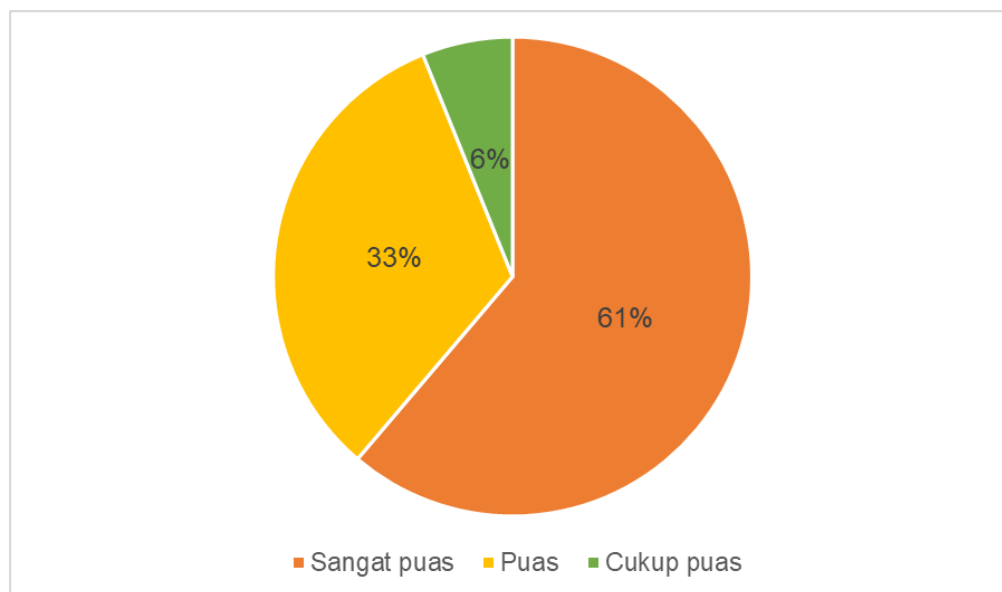
Gambar 3.17
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden



Berdasarkan gambar 3.16 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 32 responden (65%), sebanyak 14 responden (29%) menyatakan puas, 3 responden (6%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga anda?

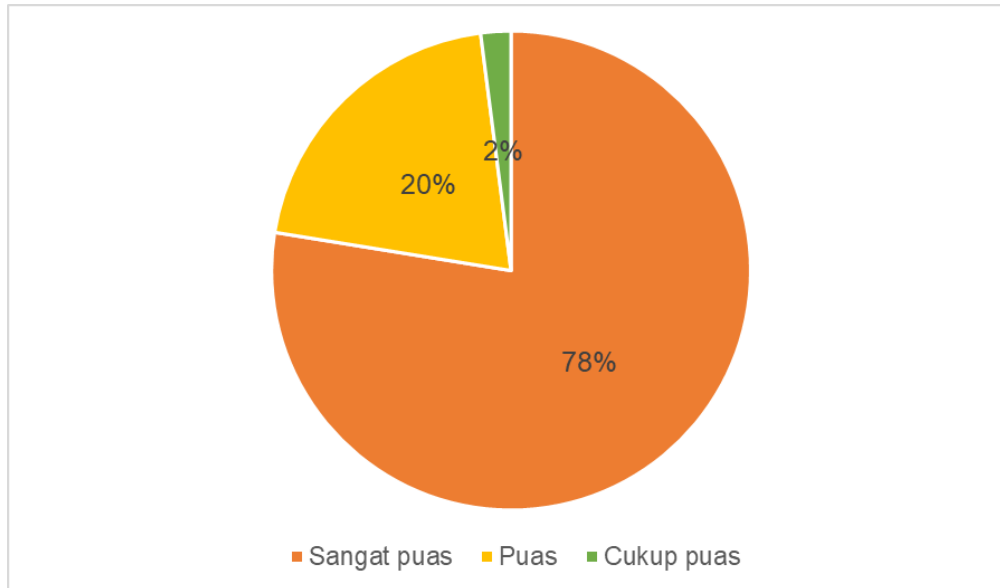
Gambar 3.18
Tingkat kepuasan terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga



Berdasarkan gambar 3.17 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 30 responden (61%), sebanyak 16 responden (33%) menyatakan puas, 3 responden (6%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

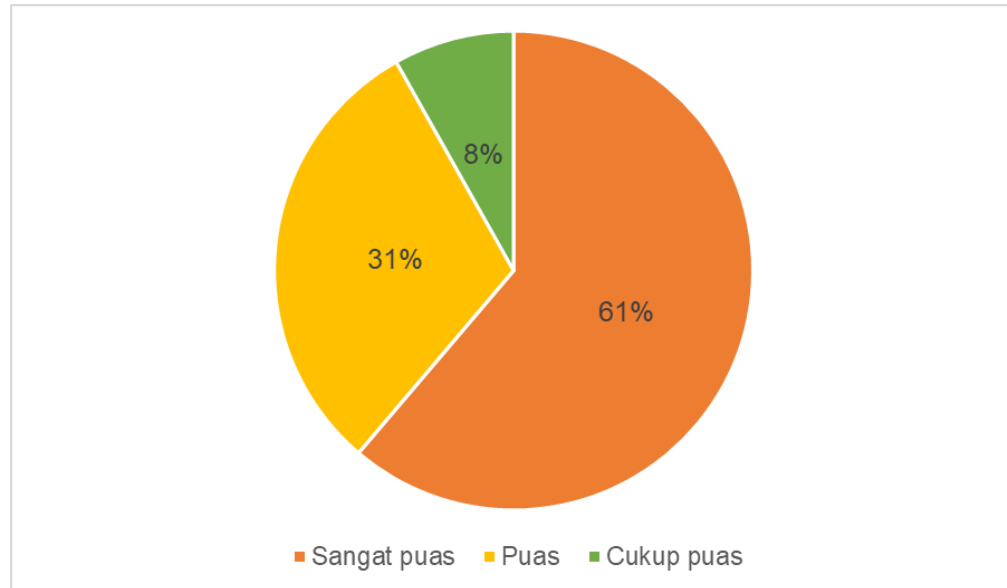
Gambar 3.19
Tingkat kepuasan terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi
terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga
di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden



Berdasarkan gambar 3.18 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 38 responden (78%), sebanyak 10 responden (20%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet?

Gambar 3.20
Tingkat kepuasan terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet

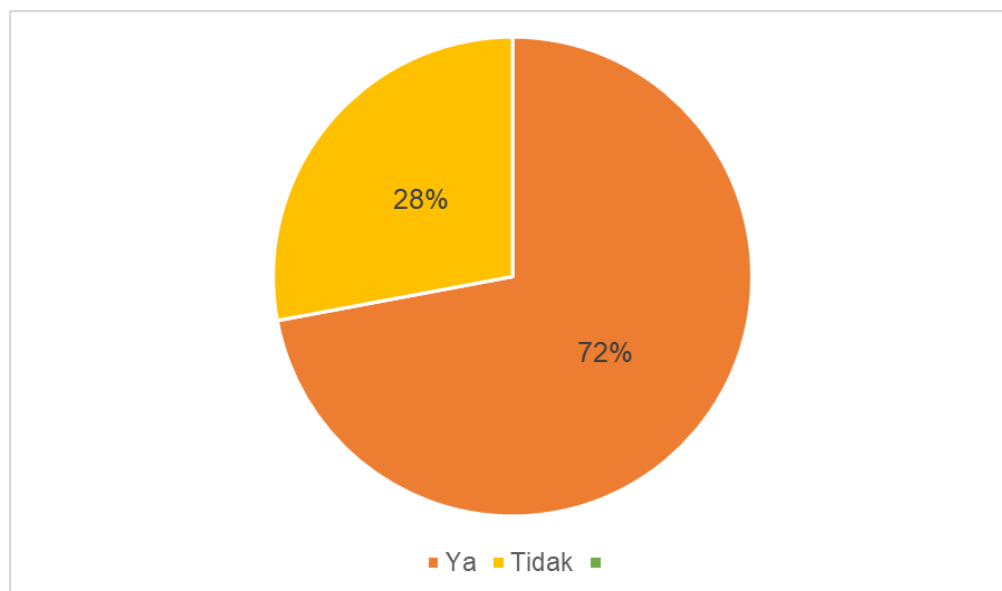


Berdasarkan gambar 3.19 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 30 responden (61%), sebanyak 15 responden (31%) menyatakan puas, 4 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet.

3. Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 68 (enam puluh delapan) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

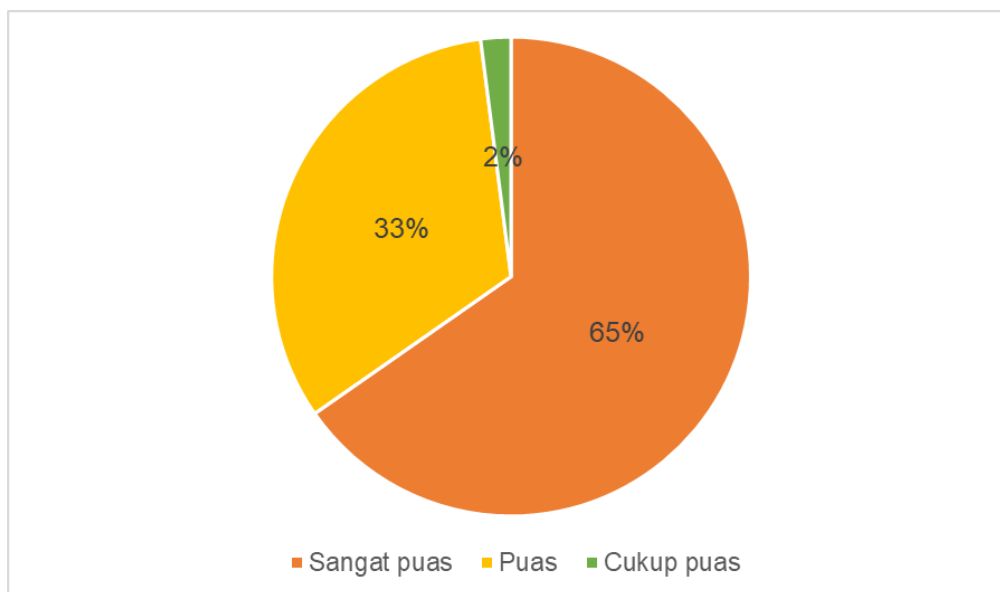
Gambar 3.21
Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.20 di atas, terdapat 49 Kementerian/Lembaga (72%) yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian sisanya sebanyak 19 Kementerian/Lembaga (28%) menjawab tidak pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

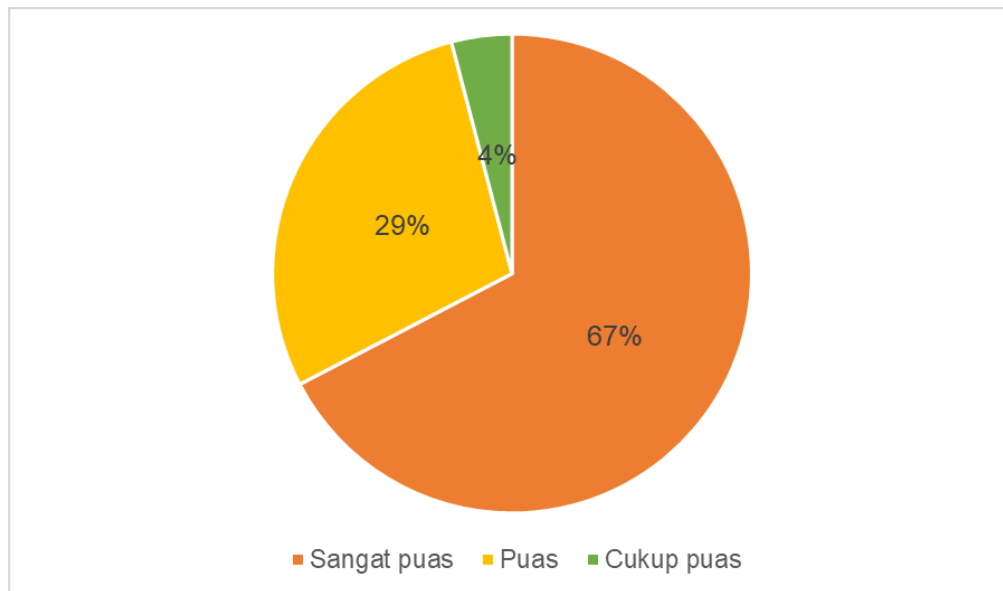
Gambar 3.22
Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.21 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 32 responden (65%), sebanyak 16 responden (32%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

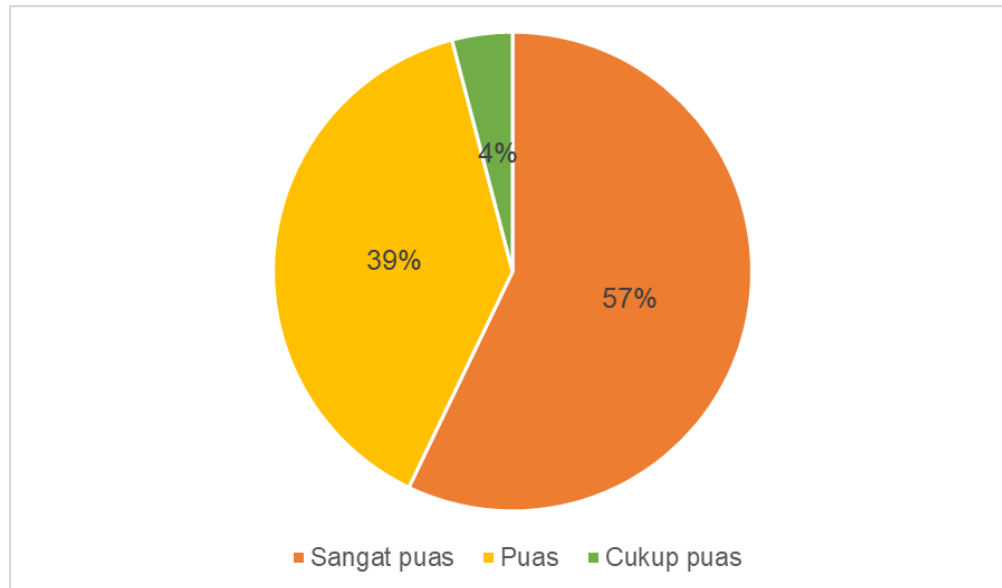
Gambar 3.23
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.22 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 33 responden (67%), sebanyak 14 responden (29%) menyatakan puas, 2 responden (4%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

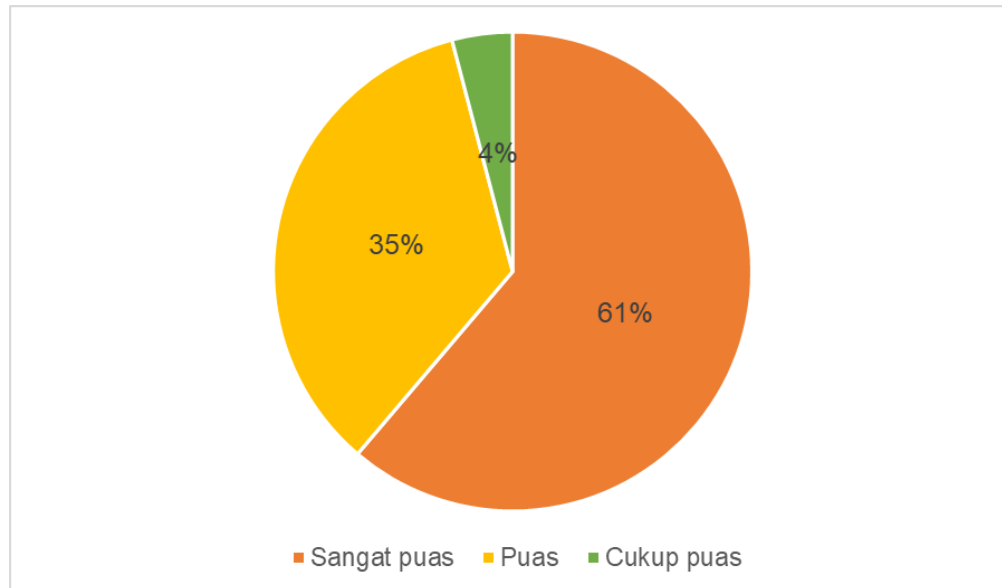
Gambar 3.24
Tingkat kepuasan terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.23 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (57%), sebanyak 19 responden (39%) menyatakan puas, 2 responden (4%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

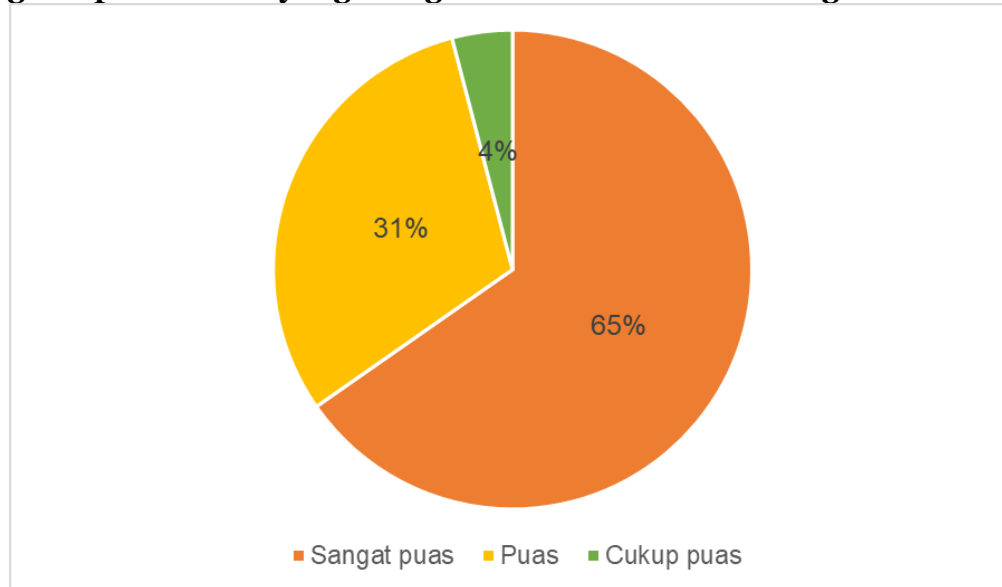
Gambar 3.25
Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.24 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 30 responden (61%), sebanyak 17 responden (35%) menyatakan puas, 2 responden (4%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

Gambar 3.26
Tingkat kepuasan terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian

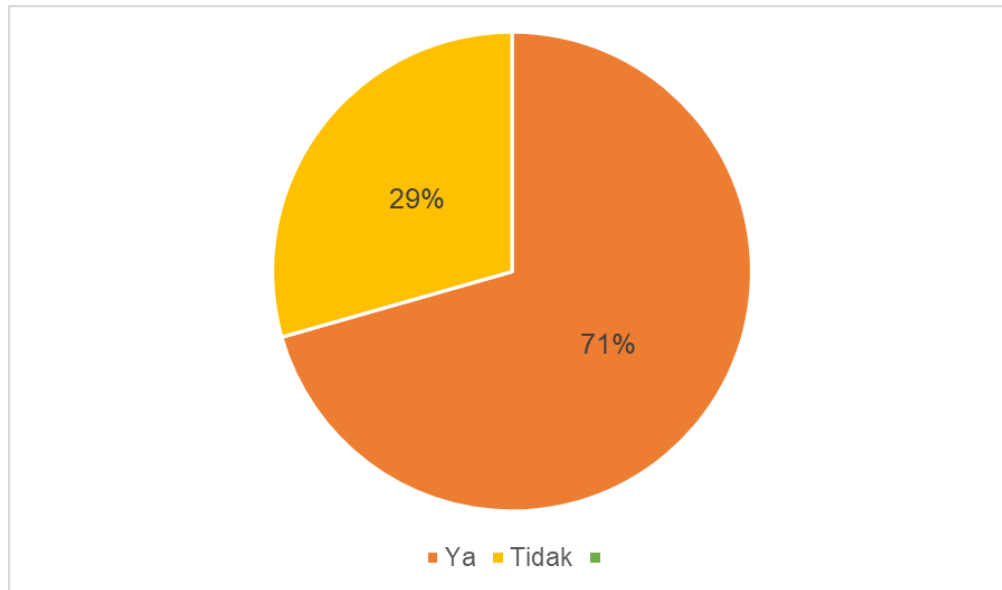


Berdasarkan gambar 3.25 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 32 responden (65%), sebanyak 15 responden (31%) menyatakan puas, 2 responden (4%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 68 (enam puluh delapan) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

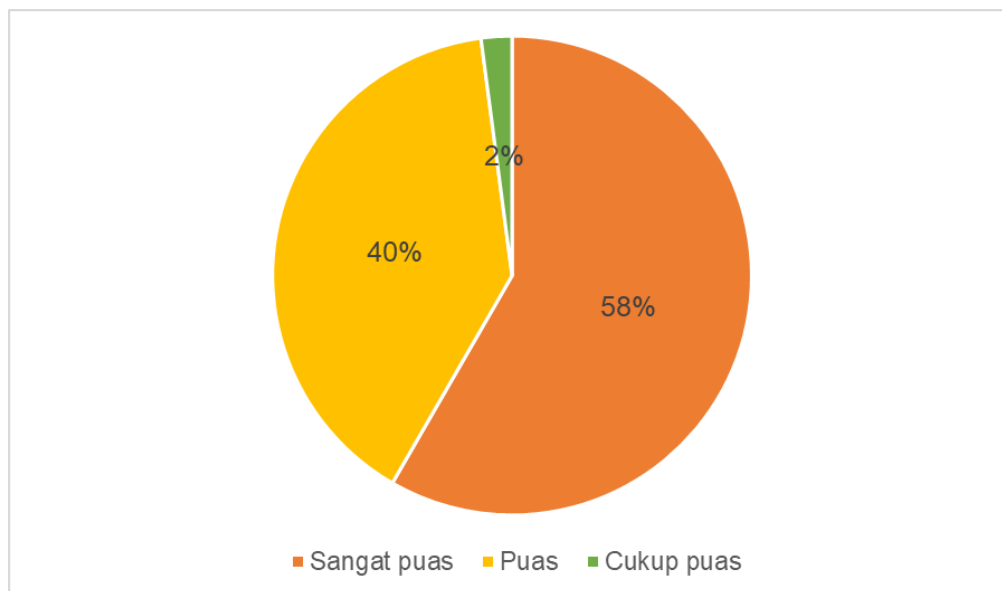
Gambar 3.27
Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.26 di atas, terdapat 48 Kementerian/Lembaga (71%) yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian, sisanya sebanyak 20 Kementerian/ Lembaga (29,5%) menjawab tidak pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

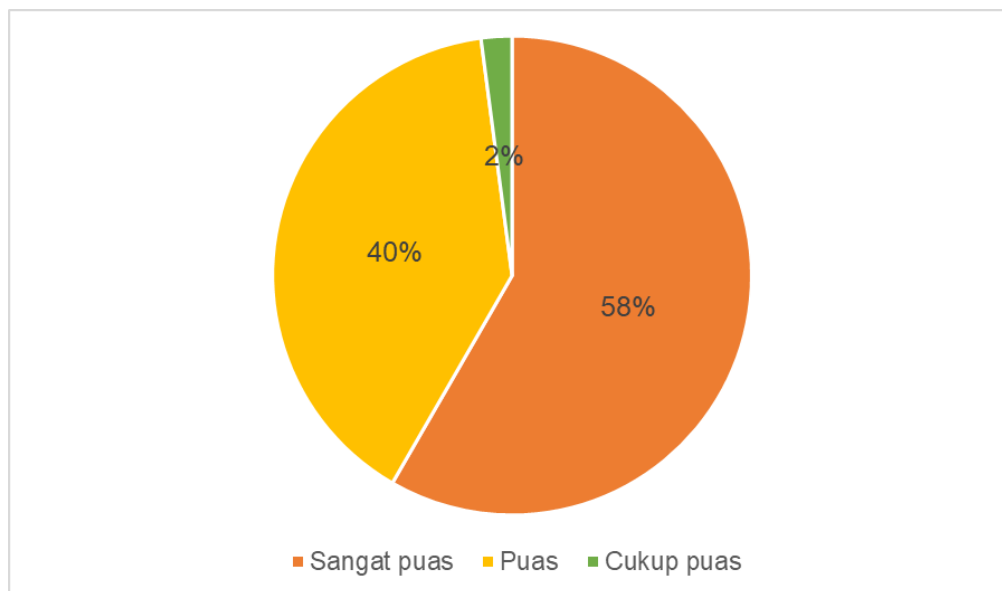
Gambar 3.28
Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.27 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (58%), sebanyak 19 responden (40%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

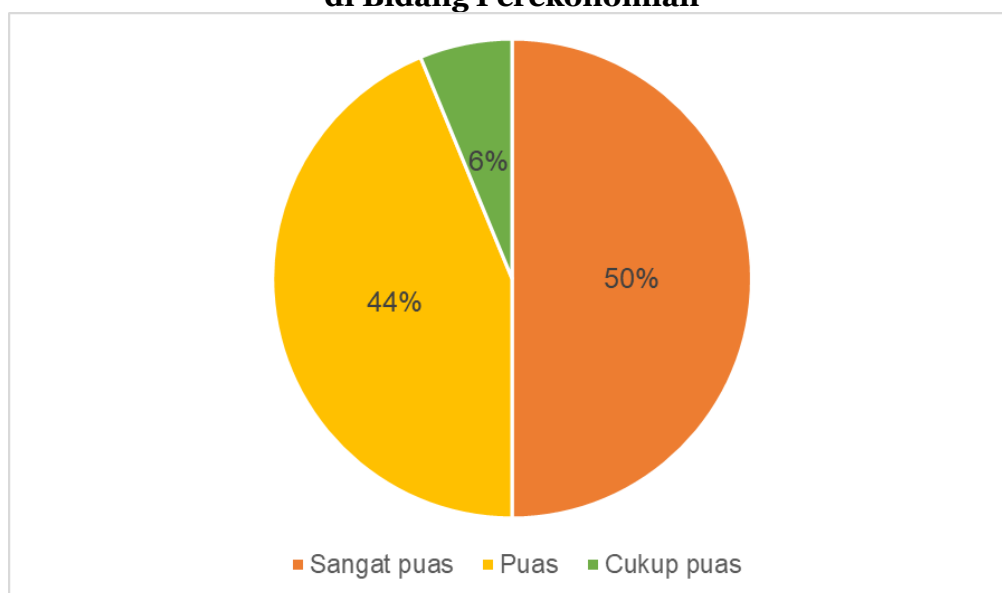
Gambar 3.29
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.28 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (58%), sebanyak 19 responden (40%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

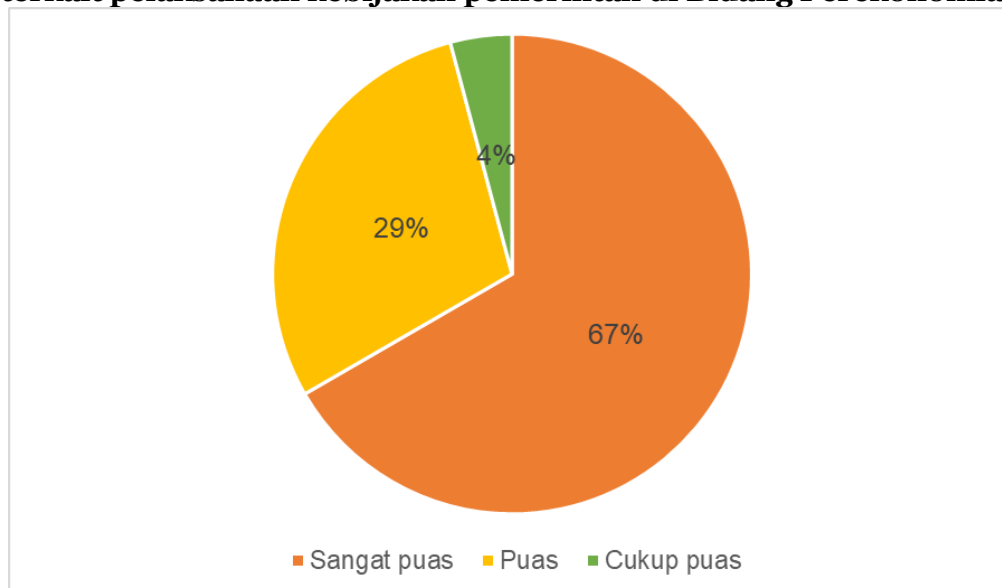
Gambar 3.30
Tingkat kepuasan terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.29 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 24 responden (50%), sebanyak 21 responden (44%) menyatakan puas, 3 responden (6%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- f) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

Gambar 3.31
Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.30 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 32 responden (67%), sebanyak 15 responden (29%) menyatakan puas, 2 responden (4%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

Bab IV

Penutup

- A. Dinamika Capaian Kinerja
- B. Langkah-langkah Strategis

BAB IV

PENUTUP

A. Dinamika Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa **capaian strategis tahun 2022 dapat dikategorikan memuaskan yaitu menghasilkan 576 rekomendasi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2022 dengan target 93 % adalah 106.2%.**

Deputi Bidang Perekonomian juga **mencapai Hasil Penilaian SAKIP 87,40 dari target 80,47** dan tercapainya **Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB yaitu 36,17 dari target 35,13**. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian juga memenuhi target penyerapan anggaran sebesar 90% dengan **penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 99,677%**. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Perekonomian dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop*, dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah terutama terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
4. *Coaching* yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan rencana program kerja tematik tahun 2022.

Meskipun pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022 dapat dikategorikan memuaskan, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Dinamika kebijakan pemerintah yang menyebabkan kadang kala perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan program kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan harus

menunggu proses revisi anggaran.

2. *Automatic Adjustment* (blokir anggaran) menjadi salah satu kendala pelaksanaan tugas dan fungsi tidak maksimal, kemudian dilakukan pembukaan blokir menjelang akhir tahun, sehingga program kegiatan yang menjadi prioritas tertunda pelaksanaannya, di sisi lain program prioritas tersebut harus segera dilaksanakan agar tidak terlewat isu yang sedang berkembang.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi berdasar peta risiko, yang dapat dilihat dari beberapa saran penyempurnaan belum ditindaklanjuti, seperti belum seluruhnya pegawai mendapat dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
4. Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa penugasan yang sifatnya mendesak dan *urgent*.
5. Terhambatnya akses terhadap sumber data yang diperlukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
6. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, seperti alat pengolah data dan terbatasnya akses informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (buku, jurnal, majalah, dan koran).
7. Belum optimalnya dukungan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

B. Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia.
2. Mendorong pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan Deputy Bidang Perekonomian dalam hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan peta risiko, seperti pemenuhan TIK.
3. Mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian untuk mengatur pelaksanaan tugas baik yang sifatnya mendesak dan *urgent* dengan tugas yang direncanakan atau dijadwalkan (memprioritaskan yang bersifat tematik), dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan pelaksanaan tugas.

5. Mendorong pihak-pihak terkait untuk memastikan tersedianya SDM yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas dengan tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet bidang perekonomian.
6. Pembangunan sistem persuratan/agenda yang terintegrasi dari level/unit terendah hingga tertinggi yang dapat mempermudah penghitungan *output* dan *outcome*.
7. Peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas permasalahan kebijakan dan program pemerintah guna peningkatan pelaksanaan manajemen kabinet dengan mengundang Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk duduk bersama membahas isu-isu strategis yang muncul bersama dalam rapat dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden, dan membahas efektivitas (*progress*) tindak lanjut atas arahan presiden berbasis teknologi (SITAP).
8. Meningkatkan *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi diantaranya melalui: (i) peningkatan keterlibatan dalam membahas RPUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK); dan (ii) peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang telah terbangun agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjangkau masukan dari user guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
10. Mengajukan usulan *capacity building* kepada Biro SDM, dalam rangka menjangkau pelaksanaan tugas dan fungsi.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian	A(80,47)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian setelah reviu Inspektorat	35.13
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian	90 Persen

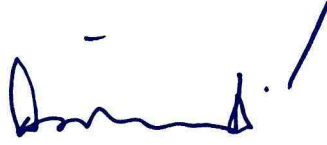
	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	Rp1.814.287.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Rp1.985.713.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet



Dr. Ir. Prambono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
1	M.0001/Ekon/01/2022	03-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Pem Presiden	arsip		M.0012/Seskab/01/2022	04-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	04-Jan-22	Jan-22
2	M.0002/Ekon/01/2022	03-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Briefing Sheet Sekretaris Kabinet p Seskab	arsip				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	04-Jan-22	Jan-22
3	M.0003/Ekon/01/2022	04-Jan-22	Jan-22	Tanggapan atas Surat Keluhan dari PT. Totomas	noted arsip						KTJ_9	KTJ_9	06-Jan-22	Jan-22
4	M.0004/Ekon/01/2022	04-Jan-22	Jan-22	Usulan Komite dan Dewan Pengawas Badan Bank Tanah	monitor tindaklanjutnya						KTJ_9	KTJ_9	06-Jan-22	Jan-22
5	M.0005/Ekon/01/2022	04-Jan-22	Jan-22	Perkembangan Rencana Partisipasi Indonesia pa- Presiden			M.0016/Seskab/01/2022	06-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	06-Jan-22	Jan-22
6	M.0006/Ekon/01/2022	04-Jan-22	Jan-22	Laporan Pertemuan ASEAN Economic Ministers (Presiden			M.0015/Seskab/01/2022	06-Jan-22	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	06-Jan-22	Jan-22
7	B.0009/Ekon/01/2022	05-Jan-22	Jan-22	Persetujuan atas Hasil Rapat Tim Pengarah Progr K/L	-					Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	21-Mar-22	Mar-22
8	M.0007/Ekon/01/2022	05-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0021/Seskab/01/2022	06-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	06-Jan-22	Jan-22
9	M.0009/Ekon/01/2022	05-Jan-22	Jan-22	Perkembangan Persiapan Program Compact-2 Hibah Millenn Noted Arsip							KTJ_9	KTJ_9	06-Jan-22	Jan-22
10	M.0010/Ekon/01/2022	05-Jan-22	Jan-22	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan F Presiden			M.0027/Seskab/01/2022	06-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	06-Jan-22	Jan-22
11	M.0011/Ekon/01/2022	05-Jan-22	Jan-22	Perkembangan Ekonomi Terkini Januari 2022 Presiden			M.0025/Seskab/01/2022	06-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	06-Jan-22	Jan-22
12	M.0012/Ekon/01/2022	07-Jan-22	Jan-22	Permohonan Pembangunan Bendung Gerak Karz K/L	dittd		B.0013/Seskab/Ekon/01/2022	10-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	10-Jan-22	Jan-22
13	M.0013/Ekon/01/2022	07-Jan-22	Jan-22	Laporan Pelaksanaan Perbaikan Indikator Dalam Presiden			M.0034/Seskab/01/2022	10-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	07-Jan-22	Jan-22
14	M.0014/Ekon/01/2022	07-Jan-22	Jan-22	Laporan Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahu Presiden	surat dittd		M.0037/Seskab/01/2022	10-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	10-Jan-22	Jan-22
15	M.0015/Ekon/01/2022	10-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0038/Seskab/01/2022	10-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Jan-22	Jan-22
16	M.0020/Ekon/01/2022	13-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0063/Seskab/01/2022	17-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Jan-22	Jan-22
17	M.0020/Ekon/01/2022	13-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0063/Seskab/01/2022	17-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Jan-22	Jan-22
18	M.0021/Ekon/01/2022	13-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0060/Seskab/01/2022	17-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Jan-22	Jan-22
19	M.0022/Ekon/01/2022	13-Jan-22	Jan-22	Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonc Seskab	noted arsip					Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	17-Jan-22	Jan-22
20	M.0023/Ekon/01/2022	14-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan atas Pengesahan Lapo Presiden			M.0062/Seskab/01/2022	17-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	17-Jan-22	Jan-22
21	M.0024/Ekon/01/2022	14-Jan-22	Jan-22	Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PN K/L	dittd		B.0027/Seskab/Ekon/01/2022	17-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	17-Jan-22	Jan-22
22	M.0025/Ekon/01/2022	14-Jan-22	Jan-22	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Implementi K/L	ttd		B.0033/Seskab/Ekon/01/2022	18-Jan-22	BPKP telah melaksanakan reviu pemenuhan reac	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	31-Jan-22	Jan-22
23	M.0027/Ekon/01/2022	17-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0074/Seskab/01/2022	18-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-Jan-22	Jan-22
24	M.0027/Ekon/01/2022	17-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0074/Seskab/01/2022	18-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-Jan-22	Jan-22
25	B.0030/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Catatan Atas Rancangan Peraturar K/L					Guna menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bid Deputi-KL		IOP_1	ISP_1	28-Feb-22	Feb-22
26	M.0028/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Peng Noted, Arsip							KTJ_9	KTJ_9	19-Jan-22	Jan-22
27	M.0029/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Presiden	ttd		M.0066/Seskab/01/2022	18-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-Jan-22	Jan-22
28	M.0030/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Laporan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Presiden	ttd		M.0075/Seskab/01/2022	19-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	19-Jan-22	Jan-22
29	M.0031/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0067/Seskab/01/2022	18-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	19-Jan-22	Jan-22
30	M.0032/Ekon/01/2022	18-Jan-22	Jan-22	Pengalihan Anggaran Riset Kemenparekraf/Bapa K/L	ttd		B.0041/Seskab/Ekon/01/2022	19-Jan-22	Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	02-Feb-22	Feb-22
31	M.0033/Ekon/01/2022	19-Jan-22	Jan-22	Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruz K/L	ttd		B.0045/Seskab/Ekon/01/2022	20-Jan-22	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	01-Apr-22	Apr-22
32	M.0034/Ekon/01/2022	19-Jan-22	Jan-22	Tindak Lanjut Penyelesaian 12 (Dua Belas) Kasus Presiden	surat dittd		M.0078/Seskab/01/2022	20-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	20-Jan-22	Jan-22
33	M.0036/Ekon/01/2022	20-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet dalam Pe Seskab	noted				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Jan-22	Jan-22
34	M.0037/Ekon/01/2022	20-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Bahan Rapat Intern Mengenai Inse Presiden	arsip		M.0080/Seskab/01/2022	20-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	20-Jan-22	Jan-22
35	M.0038/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan P Presiden	surat dittd		M.0087/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22
36	M.0039/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0086/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22
37	M.0040/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empa' Presiden	surat dittd		M.0085/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22
38	M.0040/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat Presiden	surat dittd		M.0085/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22
39	M.0040/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empa' Presiden	surat dittd		M.0085/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
40	M.0040/Ekon/01/2022	21-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Presiden		surat dittd	M.0085/Seskab/01/2022	21-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jan-22	Jan-22
41	B.0040/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Percepatan Penyelesaian Tumpang Tindih Reguli K/L	-				Kemendagri telah mengadakan rapat (internal) y	Asdep-Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	31-Jan-22	Jan-22
42	M.0042/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kons: Presiden		dittd	M.0092/Seskab/01/2022	26-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Asdep3-Deputi-Seskab-Presid	IOP_1	ISP_1	26-Jan-22	Jan-22
43	M.0043/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden		surat dittd	M.0105/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Jan-22	Jan-22
44	M.0044/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden		surat dittd	M.0104/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Jan-22	Jan-22
45	M.0045/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Laporan Rapat Koordinasi Teknis Pembiayaan Fa Seskab		kawal tindakanlanjutnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	27-Jan-22	Jan-22
46	M.0046/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden		surat dittd	M.0103/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Jan-22	Jan-22
47	M.0047/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Laporan Kinerja Tahun 2021 Satuan Tugas Sosiali Presiden			M.0107/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	27-Jan-22	Jan-22
48	M.0048/Ekon/01/2022	26-Jan-22	Jan-22	Permohonan Penandatanganan Nota Kesepahan K/L		dittd	B.0061/Seskab/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Nota Kesepahaman Telah selesai ditandatangani	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	18-Feb-22	Feb-22
49	M.0049/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern menge Presiden		arsip	M.0100/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Jan-22	Jan-22
50	M.0050/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet pada Aca Seskab		Noted Arsip			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	30-Jan-22	Jan-22
51	M.0051/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Laporan Peluncuran Perundingan Perdagangan a Presiden		surat dittd	M.0101/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Jan-22	Jan-22
52	M.0052/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Presiden		surat dittd	M.0099/Seskab/01/2022	27-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Jan-22	Jan-22
53	M.0053/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancang Presiden			M.0112/Seskab/01/2022	31-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Jan-22	Jan-22
54	M.0054/Ekon/01/2022	27-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Presiden			M.0113/Seskab/01/2022	31-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Jan-22	Jan-22
55	M.0055/Ekon/01/2022	31-Jan-22	Jan-22	Persetujuan Presiden atas Pemberian Insentif Pa Presiden			M.0118/Seskab/01/2022	31-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	31-Jan-22	Jan-22
56	M.0056/Ekon/01/2022	31-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden			M.0117/Seskab/01/2022	31-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Jan-22	Jan-22
57	M.0057/Ekon/01/2022	31-Jan-22	Jan-22	Permohonan Sidang Kabinet mengenai Tema dar Seskab		monitor tindakanlanjutnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	31-Jan-22	Jan-22
58	M.0058/Ekon/01/2022	31-Jan-22	Jan-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan P Presiden			M.0119/Seskab/01/2022	31-Jan-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Jan-22	Jan-22
59	M.0059/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Bahan Briefing Sheet Sekretaris Ka Seskab					Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	02-Feb-22	Feb-22
60	M.0060/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Permohonan Rapat Terbatas Rencana Peraturan Seskab		tindaklanjuti			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	02-Feb-22	Feb-22
61	M.0061/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Laporan Hasil Pertemuan dengan Menteri Ekono Presiden			M.0123/Seskab/02/2022	04-Feb-22	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	04-Feb-22	Feb-22
62	M.0062/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden			M.0124/Seskab/02/2022	04-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	04-Feb-22	Feb-22
63	M.0063/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Realisasi Investasi Januari s.d. Desember 2021 Presiden		surat dittd	M.0127/Seskab/02/2022	04-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	04-Feb-22	Feb-22
64	M.0064/Ekon/02/2022	02-Feb-22	Feb-22	Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indone Presiden		surat dittd	M.0126/Seskab/02/2022	04-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	04-Feb-22	Feb-22
65	M.0065/Ekon/02/2022	04-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden		ttd	M.0140/Seskab/02/2022	07-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	07-Feb-22	Feb-22
66	M.0066/Ekon/02/2022	04-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancang Presiden		ttd	M.0136/Seskab/02/2022	07-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	07-Feb-22	Feb-22
67	M.0067/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kons: Presiden			M.0138/Seskab/02/2022	07-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	07-Feb-22	Feb-22
68	M.0068/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Presiden			M.0143/Seskab/02/2022	07-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	07-Feb-22	Feb-22
69	M.0069/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Ji: Presiden			M.0149/Seskab/02/2022	08-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	08-Feb-22	Feb-22
70	M.0070/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Laporan Transparansi dan Akuntat SeskabR		noted arsip			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	08-Feb-22	Feb-22
71	M.0071/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Febdua Presiden			M.0150/Seskab/02/2022	08-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	08-Feb-22	Feb-22
72	M.0072/Ekon/02/2022	07-Feb-22	Feb-22	Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern BPKP Tahun 20: Presiden			M.0151/Seskab/02/2022	08-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Asdep 1-Deputi-Seskab-Presid	IOP_4	ISP_4	18-Jan-22	Jan-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome	
73	M.0073/Ekon/02/2022	08-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kons: Presiden		arsip	M.0145/Seskab/02/2022	08-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	IOP_1	ISP_1	08-Feb-22	Feb-22	
74	M.0074/Ekon/02/2022	08-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Preside	Presiden	arsip	M.0144/Seskab/02/2022	08-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	08-Feb-22	Feb-22	
75	M.0075/Ekon/02/2022	08-Feb-22	Feb-22	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Pri	Presiden		M.0155/Seskab/02/2022	10-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	10-Feb-22	Feb-22	
76	M.0076/Ekon/02/2022	09-Feb-22	Feb-22	Permohonan Rapat Intern Mengenai Perkemban	Presiden		M.0160/Seskab/02/2022	10-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	10-Feb-22	Feb-22	
77	M.0077/Ekon/02/2022	09-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran	Presiden	surat dittd	M.0152/Seskab/02/2022	10-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Feb-22	Feb-22	
78	M.0078/Ekon/02/2022	10-Feb-22	Feb-22	Laporan Hasil Bilateral Meeting dengan Badan	P	K/L	B.0086/Seskab/Ekon/02/2022	14-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	14-Feb-22	Feb-22	
79	M.0079/Ekon/02/2022	10-Feb-22	Feb-22	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan	F	Presiden	M.0165/Seskab/02/2022	14-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	14-Feb-22	Feb-22	
80	M.0080/Ekon/02/2022	10-Feb-22	Feb-22	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV	20: Presiden		M.0166/Seskab/02/2022	14-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	14-Feb-22	Feb-22	
81	M.0081/Ekon/02/2022	10-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran	Presiden	surat dittd	M.0162/Seskab/02/2022	14-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	14-Feb-22	Feb-22	
82	M.0082/Ekon/02/2022	11-Feb-22	Feb-22	Laporan Rapat Penyelesaian Permasalahan Pelay	K/L		B.0084/Seskab/Ekon/02/2022	11-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	11-Feb-22	Feb-22	
83	M.0083/Ekon/02/2022	14-Feb-22	Feb-22	Laporan Realisasi Sementara Pelaksanaan APBN	Presiden		M.0181/Seskab/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	16-Feb-22	Feb-22	
84	M.0084/Ekon/02/2022	15-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Hasil Rapat Tindak Lanjut Arahan	F	K/L	B.0093/Seskab/Ekon/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	16-Feb-22	Feb-22	
85	M.0085/Ekon/02/2022	15-Feb-22	Feb-22	Upaya Penurunan Harga Daging Kerbau	Presiden		M.0182/Seskab/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	16-Feb-22	Feb-22	
86	M.0086/Ekon/02/2022	16-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Briefing Sheet Sekretaris Kabinet	p	Seskab			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	16-Feb-22	Feb-22	
87	M.0087/Ekon/02/2022	16-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna	te	Presiden	M.0179/Seskab/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	16-Feb-22	Feb-22	
88	M.0088/Ekon/02/2022	16-Feb-22	Feb-22	Laporan Debottlenecking atas Pelaksanaan Progr	Presiden		M.0184/Seskab/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	16-Feb-22	Feb-22	
89	M.0089/Ekon/02/2022	16-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang	Presiden	surat dittd	M.0185/Seskab/02/2022	16-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	16-Feb-22	Feb-22	
90	B.0065/Ekon/02/2022	17-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Masukan atas Hasil Rapat Koordin	K/L	-			TPIP akan menyampaikan poin masukan dalam	F	Asdep-Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	09-May-22	May-22
91	M.0090/Ekon/02/2022	17-Feb-22	Feb-22	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Program	K/L		B.0099/Seskab/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	21-Feb-22	Feb-22	
92	M.0090/Ekon/02/2022	17-Feb-22	Feb-22	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Program	K/L		B.0099/Seskab/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	21-Feb-22	Feb-22	
93	B.0066/Ekon/02/2022	18-Feb-22	Feb-22	TL Rapat Koordinasi Kesiapan Penganggaran Pro	K/L				Guna menindaklanjuti surat tersebut, Kementer	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	04-Apr-22	Apr-22	
94	B.0069/Ekon/02/2022	18-Feb-22	Feb-22	TL Rapat Koordinasi Kesiapan Penganggaran Pro	K/L				Telah disampaikan matriks TL Rapat Koordinasi	n	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	28-Feb-22	Feb-22
95	B.0070/Ekon/02/2022	18-Feb-22	Feb-22	TL Rapat Koordinasi Kesiapan Penganggaran Pro	K/L				Guna menindaklanjuti surat tersebut, Kementer	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	04-Apr-22	Apr-22	
96	B.0071/Ekon/02/2022	18-Feb-22	Feb-22	TL Rapat Koordinasi Kesiapan Penganggaran Pro	K/L				Guna menindaklanjuti surat tersebut, Kemendiki	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	04-Apr-22	Apr-22	
97	B.0072/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Pengembalian Permohonan Persetujuan Preside	K/L	-			telah dibatalkan oleh Kemenkeu	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	21-Feb-22	Feb-22	
98	B.0074/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Permohonan Penetapan Presiden atas Rancanga	K/L	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	21-Feb-22	Feb-22	
99	B.0074/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Permohonan Penetapan Presiden atas Rancanga	K/L	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	21-Feb-22	Feb-22	
100	B.0075/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Masukan terhadap Rancangan Peraturan Preside	K/L	-			Bappenas sedang melakukan penyusunan RPerp	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	07-Apr-22	Apr-22	
101	M.0091/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Ke	Presiden	arsip	M.0191/Seskab/02/2022	21-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Feb-22	Feb-22	
102	M.0092/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan P	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	21-Feb-22	Feb-22	
103	M.0094/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Hasil Kajian Perkembangan Harga	Presiden		M.0199/Seskab/02/2022	21-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Feb-22	Feb-22	
104	M.0095/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet	ke	K/L	B.0101/Seskab/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	21-Feb-22	Feb-22	
105	M.0096/Ekon/02/2022	21-Feb-22	Feb-22	Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun	2	Seskab	B.0102/Seskab/Ekon/02/2022	22-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_4	ISP_4	08-Feb-22	Feb-22	

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
106	M.0099/Ekon/02/2022	22-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermer Presiden			M.0204/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
107	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
108	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
109	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
110	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
111	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
112	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
113	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
114	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
115	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
116	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
117	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
118	M.0100/Ekon/02/2022	23-Feb-22	Feb-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPerba t Presiden			M.0207/Seskab/02/2022	24-Feb-22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Feb-22	Feb-22
119	M.0101/Ekon/03/2022	01-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Agenda Pengawasan Prioritas Tahu Presiden			M.0218/Seskab/03/2022	02-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	02-Mar-22	Mar-22
120	M.0103/Ekon/03/2022	01-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancang Presiden	surat dittd		M.215/Seskab/03/2022	02-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	02-Mar-22	Mar-22
121	M.0104/Ekon/03/2022	01-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	surat dittd		M.0214/Seskab/03/2022	02-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	02-Mar-22	Mar-22
122	M.0105/Ekon/03/2022	01-Mar-22	Mar-22	Permasalahan Surat ljo Surabaya	monitor tindaklanjutnya						KTJ_9	KTJ_9	02-Mar-22	Mar-22
123	B.0088/Ekon/03/2022	02-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Keputt K/L	-				Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi 3 Rancangan Keputusan Presiden	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	14-Apr-22	Apr-22
124	M.0106/Ekon/03/2022	02-Mar-22	Mar-22	Permohonan Penetapan Presiden atas Rancangan Keputusar monitor tindaklanjutnya							KTJ_9	KTJ_9	02-Mar-22	Mar-22
125	M.0108/Ekon/03/2022	02-Mar-22	Mar-22	Laporan Evaluasi Pengembangan Kawasan Ekonc Presiden	ttd		M.0223/Seskab/03/2022	07-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	07-Mar-22	Mar-22
126	M.0109/Ekon/03/2022	02-Mar-22	Mar-22	Usulan Rapat Terbatas Percepatan Pengembang; Presiden			M.0224/Seskab/03/2022	07-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	02-Mar-22	Mar-22
127	M.0110/Ekon/03/2022	07-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden	ttd		M.0234/Seskab/03/2022	07-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	07-Mar-22	Mar-22
128	M.0111/Ekon/03/2022	07-Mar-22	Mar-22	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembaha Presiden			M.0233/Seskab/03/2022	07-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	07-Mar-22	Mar-22
129	M.0112/Ekon/03/2022	07-Mar-22	Mar-22	Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Peningl K/L	ditandatangani		B.0118/Seskab/Ekon/03/2022	08-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	08-Mar-22	Mar-22
130	B.0095/Ekon/03/2022	08-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berir K/L	-				Ditindaklanjuti dengan surat Sesmenko Bidang P	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	08-Mar-22	Mar-22
131	B.0095/Ekon/03/2022	08-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berir K/L	-				Ditindaklanjuti dengan surat Sesmenko Bidang P	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	08-Mar-22	Mar-22
132	M.0114/Ekon/03/2022	09-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tent Presiden			M.0240/Seskab/03/2022	09-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	09-Mar-22	Mar-22
133	M.0115/Ekon/03/2022	09-Mar-22	Mar-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Maret Presiden			M.0241/Seskab/03/2022	09-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	09-Mar-22	Mar-22
134	M.0116/Ekon/03/2022	09-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Data Dukung Progres Pengalihan K Deputi Polhukam					Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Polhukam	KTJ_9	KTJ_9	09-Mar-22	Mar-22
135	B.0106/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Beririsan Sektor	-				Sudah diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta K/L terkait		IOP_3	ISP_3	10-Mar-22	Mar-22
136	M.0117/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai La Presiden			M.0246/Seskab/03/2022	10-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	10-Mar-22	Mar-22
137	M.0118/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Mar-22	Masukan Masyarakat Pemajuan IPTEK dan Inova K/L	ditandatangani		B.0121/Seskab/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) r	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	14-Mar-22	Mar-22
138	M.0119/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: RPerme Presiden	ttd		M.0248/Seskab/03/2022	10-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Mar-22	Mar-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
139	M.0119/Ekon/03/2022	10-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: RPerme Presiden	ttd		M.0248/Seskab/03/2022	10-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Mar-22	Mar-22
140	M.0120/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	ttd		M.0254/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
141	M.0121/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Laporan Pendukung Global Citizen 2022	K/L		B.0125/Seskab/Ekon/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	15-Mar-22	Mar-22
142	M.0122/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	ttd		M.0255/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
143	M.0122/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden	ttd		M.0255/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
144	M.0123/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden	ttd		M.0261/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
145	M.0123/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden	ttd		M.0261/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
146	M.0124/Ekon/03/2022	14-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden	ttd		M.0259/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Mar-22	Mar-22
147	M.0125/Ekon/03/2022	15-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Kebijakan Di: Presiden			M.0260/Seskab/03/2022	15-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	15-Mar-22	Mar-22
148	M.0127/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Bahan Rapat Intern Mengenai Keb Presiden			M.0271/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	18-Mar-22	Mar-22
149	M.0128/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Arahkan Presiden pada Rapat Kabin K/L			B.0133/Seskab/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Telah ditetapkan melalui Permendag 11/2022 da	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	04-Apr-22	Apr-22
150	M.0129/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermer Presiden	ttd		M.0267/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
151	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
152	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
153	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
154	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
155	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
156	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
157	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
158	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
159	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
160	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
161	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
162	M.0130/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua I Presiden	ttd		M.0265/Seskab/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
163	M.0131/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden			M.0131/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
164	M.0131/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancang Presiden			M.0131/Ekon/03/2022	17-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-22	Mar-22
165	M.0132/Ekon/03/2022	18-Mar-22	Mar-22	Permohonan Penyampingan atau Pengecualian c K/L	ttd		B.0137/Seskab/Ekon/03/2022	18-Mar-22	Kemenperin telah melakukan audiensi dengan zc	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	18-Mar-22	Mar-22
166	M.0133/Ekon/03/2022	18-Mar-22	Mar-22	Grand Launching Peresmian Proyek Investasi Ber Presiden			M.0282/Seskab/03/2022	21-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Mar-22	Mar-22
167	B.0131/Ekon/03/2022	21-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berir K/L	-				Ditindaklanjuti dengan surat Kemenko Bidang Pe	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	29-Mar-22	Mar-22
168	B.0132/Ekon/03/2022	21-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berir K/L	-				Ditindaklanjuti dengan surat Kemenko Bidang Pe	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	29-Mar-22	Mar-22
169	M.0134/Ekon/03/2022	21-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Konsep Surat Sekretaris Kabinet m K/L	ttd		B.0138/Seskab/Ekon/03/2022	21-Mar-22	Telah ditindaklanjuti KL dan Kemenkeu dalam pe	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	21-Mar-22	Mar-22
170	M.0135/Ekon/03/2022	22-Mar-22	Mar-22	Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PN Seskab	monitor tindaklanjutnya				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTI_9	KTI_9	22-Mar-22	Mar-22
171	M.0136/Ekon/03/2022	22-Mar-22	Mar-22	Laporan Pengamatan dan Perkembangan Umum Presiden			M.0291/Seskab/03/2022	22-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Mar-22	Mar-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
172	M.0137/Ekon/03/2022	22-Mar-22	Mar-22	Laporan Hasil Pertemuan Menteri Perdagangan I Presiden			M.0294/Seskab/03/2022	23-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	23-Mar-22	Mar-22
173	M.0138/Ekon/03/2022	22-Mar-22	Mar-22	Rencana Pencabutan SKB Dirjen Perhubungan La Seskab		Monitor tindaklanjutnya			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	23-Mar-22	Mar-22
174	M.0139/Ekon/03/2022	23-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermer Presiden		ttd	M.0299/Seskab/03/2022	23-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Mar-22	Mar-22
175	M.0141/Ekon/03/2022	24-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi tei Presiden			M.0301/Seskab/03/2022	24-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	24-Mar-22	Mar-22
176	M.0142/Ekon/03/2022	24-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden		ttd	M.0303/Seskab/03/2022	25-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Mar-22	Mar-22
177	M.0143/Ekon/03/2022	24-Mar-22	Mar-22	Usulan Rapat Kabinet mengenai Perubahan Tarif Presiden			M.0302/Seskab/03/2022	25-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	25-Mar-22	Mar-22
178	M.0144/Ekon/03/2022	28-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Briefing Sheet Sekretaris Kabinet p Seskab		-			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-Mar-22	Mar-22
179	M.0145/Ekon/03/2022	28-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Presiden			M.0310/Seskab/03/2022	28-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	28-Mar-22	Mar-22
180	M.0146/Ekon/03/2022	28-Mar-22	Mar-22	Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pence K/L			B.0145/Seskab/Ekon/03/2022	28-Mar-22	Telah ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves deng	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	25-Apr-22	Apr-22
181	B.0146/Ekon/03/2022	29-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berri Deputi		-			Ditindaklanjuti dengan surat Kemenko Bidang Pe	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	29-Mar-22	Mar-22
182	M.0147/Ekon/03/2022	29-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Pemt Presiden			M.0316/Seskab/03/2022	29-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Mar-22	Mar-22
183	M.0148/Ekon/03/2022	29-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden		ttd	M.0314/Seskab/03/2022	29-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Mar-22	Mar-22
184	M.0149/Ekon/03/2022	29-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0322/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
185	M.0150/Ekon/03/2022	29-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetap Presiden			B.154/Seskab/Ekon/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Mar-22	Mar-22
186	M.0151/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Perlindungan Investasi dan Hukum K/L			B.0152/Seskab/Ekon/04/2022	01-Apr-22	Kementerian Bidang Perekonomian bersama Sel	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	01-Nov-22	Nov-22
187	M.0152/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Pengagendaaan Rapat Terbatas Mengenai Lapora Seskab					Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-Mar-22	Mar-22
188	M.0153/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Konsultasi atas Rancangan Standar Presiden			M.0324/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	30-Mar-22	Mar-22
189	M.0154/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0325/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
190	M.0155/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0323/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
191	M.0155/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0323/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
192	M.0155/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0323/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
193	M.0155/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Ran Presiden			M.0323/Seskab/04/2022	01-Apr-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	01-Apr-22	Apr-22
194	M.0156/Ekon/03/2022	30-Mar-22	Mar-22	Penyampaian Masukan untuk Bahan Rapat Inter Deputi Marinves			M.0320/Seskab/03/2022	31-Mar-22	Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Marinves-seskab-Pres	IOP_1	ISP_1	22/03/30	Mar-22
195	B.0152/Ekon/03/2022	31-Mar-22	Mar-22	Masukan atas Rencana Diversifikasi Produk Brow K/L		-			Saat ini Deputi PIPM sedang merumuskan kebij	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	07-Apr-22	Apr-22
196	B.0158/Ekon/04/2022	22/04/04	Apr-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berurusan Taban II	KL	-			Kemenko Ekon telah melaksanakan rapat TL pada 20 dan 26 April 2022	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/05/09	May-22
197	M.0158/Ekon/04/2022	22/04/04	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal mengenai Lanjutan Pembahasan		ditttd(arsin)	M.0335/Seskab/04/2022	22/04/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/04	Apr-22
198	M.0159/Ekon/04/2022	22/04/04	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	noted arsin	M.0343/Seskab/04/2022	22/04/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/05	Apr-22
199	M.0160/Ekon/04/2022	22/04/04	Apr-22	Laporan Hasil Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dengan Menteri	Presiden		M.0333/Seskab/04/2022	22/04/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/04	Apr-22
200	M.0161/Ekon/04/2022	22/04/04	Apr-22	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Situasi dan Perkembangan	Presiden	arsip	M.0336/Seskab/04/2022	22/04/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/05	Apr-22
201	M.0163/Ekon/04/2022	22/04/05	Apr-22	Permohonan Rapat Intern mengenai Sugar Co. dan Palm Co	Presiden		M.0340/Seskab/04/2022	22/04/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/05	Apr-22
202	M.0164/Ekon/04/2022	22/04/05	Apr-22	Penyampaian Laporan Integrasi Sumber Daya Penelitian Pengembangan Penekaaian dan	Presiden	surat dittd	M.0341/Seskab/04/2022	22/04/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/05	Apr-22
203	M.0165/Ekon/04/2022	22/04/05	Apr-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Tentang Persiapan Menghadani Idulfitri 1443 H (Rabu, 6	Presiden		M.0346/Seskab/04/2022	22/04/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi Marinves-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/22	Apr-22
204	M.0166/Ekon/04/2022	22/04/06	Apr-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Ibu Kota Nusantara (Rencana Pembangunan	Presiden	ditttd	M.0348/Seskab/04/2022	22/04/07	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/07	Apr-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
205	M.0168/Ekon/04/2022	22/04/07	Apr-22	Laporan Rapat Pembahasan Kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT)	Seskab		M.357/Seskab/04/2022	22/04/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_1	ISP_1	22/04/08	Apr-22
206	M.0169/Ekon/04/2022	22/04/07	Apr-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal April 2022	Presiden		M.0358/Seskab/04/2022	22/04/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/07	Apr-22
207	M.0170/Ekon/04/2022	22/04/07	Apr-22	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2021	Presiden		M.0359/Seskab/04/2022	22/04/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/08	Apr-22
208	B.0169/Ekon/04/2022	22/04/08	Apr-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berisikan Tahap II (30 Maret 2022)	KL	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/04/07	Apr-22
209	M.0171/Ekon/04/2022	22/04/08	Apr-22	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdaerajaan	KL	ttd	B.0163/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/04/08	Apr-22
210	M.0172/Ekon/04/2022	22/04/08	Apr-22	Penyampaian Butir Wicara (Briefing Sheet) Pengantar Presiden dan Bahan Panaran Ranat	Presiden		M.0355/Seskab/04/2022	22/04/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/08	Apr-22
211	M.0173/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal	Presiden		M.0362/Seskab/04/2022	22/04/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/11	Apr-22
212	M.0174/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Mengenai Lanjutan Pembahasan Kesianan Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Ranat Internal Mengenai Sugar Co. Dan Palm	Presiden		M.0363/Seskab/04/2022	22/04/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/11	Apr-22
213	M.0175/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0375/Seskab/04/2022	22/04/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/12	Apr-22
214	M.0176/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan	KL	dittd	B.0168/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/04/12	Apr-22
215	M.0177/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Laporan Pertemuan Pertama Joint Economic and Trade Committee (JETCO) Indonesia-Inggris	Presiden	surat dittd	M.0370/Seskab/04/2022	22/04/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/12	Apr-22
216	M.0178/Ekon/04/2022	22/04/11	Apr-22	Diversifikasi Minyak Goreng dan Permohonan Kuniungan Presiden ke Konecrasi Simpane	Presiden		M.0371/Seskab/04/2022	22/04/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/12	Apr-22
217	M.0179/Ekon/04/2022	22/04/12	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Ranat Internal tentang Evaluasi Kebijakan	Presiden	dittd (arsin)	M.0369/Seskab/04/2022	22/04/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/12	Apr-22
218	M.0181/Ekon/04/2022	22/04/13	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0386/Seskab/04/2022	22/04/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/13	Apr-22
219	M.0182/Ekon/04/2022	22/04/13	Apr-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang	Presiden		M.0392/Seskab/04/2022	22/04/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/13	Apr-22
220	M.0183/Ekon/04/2022	22/04/14	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Ranat Terbatas mengenai Rancangan Rencana	Presiden	dittd (Arsin)	M.0389/Seskab/04/2022	22/04/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/18	Apr-22
221	M.0184/Ekon/04/2022	22/04/18	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang	Presiden		M.0405/Seskab/04/2022	22/04/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/18	Apr-22
222	M.0185/Ekon/04/2022	22/04/18	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebliakan	Presiden	surat dittd	M.0404/Seskab/04/2022	22/04/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/18	Apr-22
223	B.0192/Ekon/4/2022	22/04/19	Apr-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berisikan Sektor Perindustrian - sesi 1	KL				Kemenko Ekon telah melaksanakan rapat TL pada 20 dan 26 April 2022	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/05/09	May-22
224	B.0192/Ekon/4/2022	22/04/19	Apr-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Berisikan Sektor Perindustrian - sesi 2	KL				Kemenko Ekon telah melaksanakan rapat TL pada 20 dan 26 April 2022	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/05/09	May-22
225	B.0201/Ekon/04/2022	22/04/19	Apr-22	Hasil Rapat Koordinasi					telah diadakan Audiensi Menteri ATR tgl 22 April 2022 dan Rakor Internal DIKN ro LMAN		IOP_3	ISP_3	22/04/22	Apr-22
226	M.0187/Ekon/04/2022	22/04/19	Apr-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Mengenai Lanjutan Pembahasan tentang Ibu Kota	Presiden		M.0407/Seskab/04/2022	22/04/19	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/19	Apr-22
227	M.0188/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Laporan Kapasitas Keuangan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	Presiden		M.0421/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/21	Apr-22
228	M.0189/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Laporan Pertemuan ASEAN Economic Ministers Retreat ke-28 tanggal 16 Maret 2022 melalui	Presiden		M.0420/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	IOP_4	ISP_4	22/04/18	Apr-22
229	M.0190/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0419/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/21	Apr-22
230	M.0190/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0419/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/21	Apr-22
231	M.0191/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Laporan Triwulan IV Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Presiden		M.0416/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/21	Apr-22
232	M.0192/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Laporan Rapat Koordinasi Mekanisme Penitipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri	KL	dittd	B.0187/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/21	Telah dilaksanakan audiensi Menteri ATR guna menindaklanjuti hasil rapat tersebut pada	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_3	ISP_3	22/04/22	Apr-22
233	M.0193/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0417/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/21	Apr-22
234	M.0193/Ekon/04/2022	22/04/20	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0417/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/21	Apr-22
235	M.0194/Ekon/04/2022	22/04/21	Apr-22	Perkembangan Registrasi Paviliun Indonesia dan Penunjukan Koordinator Pelaksana Expo	Presiden		M.0415/Seskab/04/2022	22/04/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/21	Apr-22
236	M.0195/Ekon/04/2022	22/04/22	Apr-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Mengenai Kebliakan Distribusi dan Haraa Minvak Goreng	Presiden	arsip	M.0423/Seskab/04/2022	22/04/22	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/22	Apr-22
237	M.0196/Ekon/04/2022	22/04/22	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0425/Seskab/04/2022	22/04/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/22	Apr-22

RIINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
238	M.0197/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Perencanaan Penyelesaian Proyek	Presiden		M.0427/Seskab/04/2022	22/04/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/25	Apr-22
239	M.0198/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Kebutuhan di Bidang Ketenzakeriaan Tanggah	Presiden		M.0428/Seskab/04/2022	22/04/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/25	Apr-22
240	M.0199/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Permohonan Memberikan Pengarahan dalam Pembukaan Musrenbangnas 2022	Presiden		M.0435/Seskab/04/2022	22/04/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/25	Apr-22
241	M.0200/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Permohonan Pembiayaan Pembangunan Wisata Perahu Maianahit melalui APBN	KL		B.0195/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_1	ISP_1	22/04/25	Apr-22
242	M.0201/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden		M.0433/Seskab/04/2022	22/04/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/25	Apr-22
243	M.0202/Ekon/04/2022	22/04/25	Apr-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan	Presiden		M.0438/Seskab/04/2022	22/04/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/22	Apr-22
244	M.0203/Ekon/04/2022	22/04/26	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPeremmerin tentang Perubahan Kedua Atas	Presiden		M.0437/Seskab/04/2022	22/04/26	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/26	May-22
245	M.0203/Ekon/04/2022	22/04/26	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPeremmerin tentang Perubahan Kedua Atas	Presiden	surat dittd (Berkas dibawa langsung oleh TU Den Ekon)	M.0437/Seskab/04/2022	22/04/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/26	May-22
246	M.0204/Ekon/04/2022	22/04/26	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenzakeriaan	Presiden	surat dittd (Berkas dibawa langsung oleh TU Den Ekon)	M.0436/Seskab/04/2022	22/04/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/26	May-22
247	M.0205/Ekon/04/2022	22/04/26	May-22	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Presiden		M.0439/Seskab/04/2022	22/04/26	Tidak ada Penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/26	May-22
248	M.0209/Ekon/04/2022	22/04/27	May-22	Penyampaian Bahan Audiensi Presiden dengan Ketua dan Para Anggota Komisi Pengawas	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/04/27	May-22
249	M.0210/Ekon/04/2022	22/04/27	May-22	Laporan Paripurna Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Tahun 2021	Presiden		M.0440/Seskab/04/2022	22/04/27	Tidak Ada Penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/04/27	May-22
250	M.0211/Ekon/04/2022	22/04/27	May-22	Tindaklanjut Arahan Presiden dalam Rapat Internal Mengenai Kebutuhan Distribusi dan	KL	dittd (Berkas dibawa langsung oleh TU Den Ekon)	B.0201/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/27	Telah ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dengan diundangkannya Peraturan Menteri	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/04/27	May-22
251	M.0214/Ekon/04/2022	22/04/28	May-22	Laporan Perkembangan Transformasi Ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/04/28	May-22
252	M.0215/Ekon/04/2022	22/04/28	May-22	Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Internal 3 Januari 2022 tentang	Presiden	surat dittd	M.0449/Seskab/04/2022	22/04/27	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/04/28	May-22
253	M.0217/Ekon/04/2022	22/04/28	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Presiden	surat dittd	M.0448/Seskab/04/2022	22/04/28	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/28	May-22
254	M.0218/Ekon/04/2022	22/04/28	May-22	Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri/Kenala Lembaga	KL	dittd (Berkas dibawa langsung oleh TU Den Ekon)	B.0203/Seskab/Ekon/04/2022	22/04/28	Surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan rapat koordinasi terbatas	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/05/12	May-22
255	M.0219/Ekon/04/2022	22/04/28	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.0450/Seskab/04/2022	22/04/28	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/04/28	May-22
256	M.0220/Ekon/05/2022	22/05/09	May-22	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna mengenai Arahan Presiden	Presiden	arsip	M.0455/Seskab/05/2022	22/05/09	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/09	May-22
257	M.0221/Ekon/05/2022	22/05/09	May-22	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Bulan April TA 2022	Presiden		M.0453/Seskab/05/2022	22/05/09	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/09	May-22
258	M.0222/Ekon/05/2022	22/05/10	May-22	Laporan Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022	Presiden		M.0464/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/13	May-22
259	M.0223/Ekon/05/2022	22/05/10	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Badan Pelindungan	Presiden	surat dittd	M.0467/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
260	M.0224/Ekon/05/2022	22/05/10	May-22	Laporan Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia	KL	dittd	B.0208/Seskab/Ekon/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/05/13	May-22
261	M.0225/Ekon/05/2022	22/05/10	May-22	Laporan Partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai, Persatuan Emirat Arab tanggal 1 Oktober	Presiden		M.0465/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/13	May-22
262	M.0226/Ekon/05/2022	22/05/10	May-22	Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Perencanaan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Presiden		M.0466/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/13	May-22
263	M.0227/Ekon/05/2022	22/05/11	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	surat dittd	M.0461/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
264	M.0227/Ekon/05/2022	22/05/11	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	surat dittd	M.0461/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
265	M.0227/Ekon/05/2022	22/05/11	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	surat dittd	M.0461/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
266	M.0227/Ekon/05/2022	22/05/11	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	surat dittd	M.0461/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
267	M.0227/Ekon/05/2022	22/05/11	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	surat dittd	M.0461/Seskab/05/2022	22/05/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/13	May-22
268	M.0228/Ekon/05/2022	22/05/13	May-22	Penyampaian Pertimbangan Menteri Luar Negeri atas Usulan Penyelenggaraan Kegiatan	Presiden	dittd	M.0472/Seskab/05/2022	22/05/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/17	May-22
269	M.0230/Ekon/05/2022	22/05/17	May-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Belanja Subsidi dalam APBN Tahun 2022	Presiden	arsip	M.0478/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/18	May-22
270	M.0231/Ekon/05/2022	22/05/17	May-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal dengan topik (i) Kelanjutan Evaluasi Kebijakan	Presiden	arsip	M.0477/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/18	May-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
271	M.0232/Ekon/05/2022	22/05/17	May-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Mei 2022	Presiden		M.0480/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/18	May-22
272	M.0233/Ekon/05/2022	22/05/17	May-22	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2022	Presiden		M.0481/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/18	May-22
273	M.0234/Ekon/05/2022	22/05/18	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebhikaksanaan	Presiden	surat dittd	M.0483/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/18	May-22
274	M.0235/Ekon/05/2022	22/05/18	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden	surat dittd	M.0489/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/18	May-22
275	M.0236/Ekon/05/2022	22/05/18	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0490/Seskab/05/2022	22/05/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/18	May-22
276	M.0238/Ekon/05/2022	22/05/19	May-22	Usulan Topik Rapat Terbatas Kabinet terkait Ibu Kota Nusantara	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/05/19	May-22
277	B.0271/Ekon/05/2022	22/05/20	May-22	Penyampaian Rancangan SEB tentang Penjelasan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Kepelabuhanan	KL	-			Direktur Jenderal Perimbangan, Kemenkeu menyampaikan tanggapan atas rancangan SEB kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui surat nomor :s-67/PK/2022	Asdep-Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/08/01	Aug-22
247	M.0239/Ekon/05/2022	22/05/20	May-22	Penyampaian Arahan Presiden Dalam Rapat Internal Mengenai Evaluasi Kebijakan Larangan 1.Eaporan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penediaan Pangan Nasional (Food	KL		B.0228/Seskab/Ekon/05/2022	22/05/20	Telah ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dengan diundangkannya Peraturan Menteri	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/05/23	May-22
279	M.0240/Ekon/05/2022	22/05/20	May-22	Laporan Kunjungan ke-3 (tiga) Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan Percontohan Utama	Presiden		M.0505/Seskab/05/2022	22/05/23	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/05/23	May-22
280	M.0242/Ekon/05/2022	22/05/20	May-22	Laporan Penyelesaian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KL	dittd	B.0234/Seskab/Ekon/05/2022	22/05/23	Telah dilakukan rapat yang dilakukan oleh Menko Perekonomian menindaklanjuti surat	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/08/01	Aug-22
281	M.0243/Ekon/05/2022	22/05/20	May-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program	Presiden	surat dittd	M.0500/Seskab/05/2022	22/05/23	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/23	May-22
282	M.0244/Ekon/05/2022	22/05/23	May-22	Penyampaian Briefing Sheet Arahan Presiden kepada Menteri Kepala Lembaga Kepala	Presiden		M.0513/Seskab/05/2022	22/05/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/24	May-22
283	M.0245/Ekon/05/2022	22/05/24	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: PerBSN tentang Perubahan atas Peraturan	Presiden	surat dittd	M.0518/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
284	M.0246/Ekon/05/2022	22/05/25	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: PerBSN tentang Perubahan Kedua atas	Presiden	surat dittd	M.0518/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
285	M.0246/Ekon/05/2022	22/05/25	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: PerBSN tentang Perubahan atas Peraturan	Presiden	surat dittd	M.0518/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
286	M.0246/Ekon/05/2022	22/05/25	May-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas: PerBSN tentang Perubahan atas Peraturan	Presiden	surat dittd	M.0518/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
287	M.0247/Ekon/05/2022	22/05/30	Jun-22	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Kebhikaksanaan Satu Data	Presiden	dittd	M.0516/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/05/30	Jun-22
288	M.0248/Ekon/05/2022	22/05/30	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0525/Seskab/05/2022	22/05/30	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
289	M.0249/Ekon/05/2022	22/05/30	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala	Presiden	surat dittd	M.0526/Seskab/05/2022	22/05/30	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/05/30	Jun-22
290	M.0250/Ekon/05/2022	22/05/30	Jun-22	Penyampaian Arahan Presiden tentang Penanganan Persoalan Pangan dan Energi	KL	dittd	B.0240/Seskab/Ekon/05/2022	22/05/31	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/05/31	Jun-22
291	M.0252/Ekon/05/2022	22/05/31	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	Surat dittd	M.0543/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/03	Jun-22
292	M.0253/Ekon/06/2022	22/06/02	Jun-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang	Presiden	Arsip	M.0540/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/03	Jun-22
293	M.0254/Ekon/06/2022	22/06/02	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	Surat dittd	M.0539/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/03	Jun-22
294	M.0255/Ekon/06/2022	22/06/02	Jun-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal tentang Evaluasi Skema Subsidi	Presiden	Menjadi rapat migor	M.0541/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/03	Jun-22
295	M.0256/Ekon/06/2022	22/06/02	Jun-22	Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah	Seskab	Noted			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/02	Jun-22
296	M.0257/Ekon/06/2022	22/06/03	Jun-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan	Presiden	Arsip	M.0547/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/03	Jun-22
297	M.0258/Ekon/06/2022	22/06/03	Jun-22	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Pimpinan BPK dalam Penyampaian	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/07	Jun-22
298	M.0259/Ekon/06/2022	22/06/03	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	Surat dittd	M.0546/Seskab/06/2022	22/06/03	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/03	Jun-22
299	M.0261/Ekon/06/2022	22/06/06	Jun-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Juni 2022	Presiden		M.0552/Seskab/06/2022	22/06/07	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/06/07	Jun-22
300	M.0262/Ekon/06/2022	22/06/06	Jun-22	Penyampaian Laporan atas Pengawasan Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA)	Presiden		M.0553/Seskab/06/2022	22/06/07	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/06/06	Jun-22
301	M.0264/Ekon/06/2022	22/06/07	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0558/Seskab/06/2022	22/06/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/08	Jun-22
302	B.0326/Ekon/06/2022	22/06/10	Jun-22	Penerusan Surat Ketua Pengurus KSSM terkait Hasil Rapat dengan PT. SPMN yang Difasilitasi	KL	-				Deputi-KL	IOP_1	Belum Outcome		

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
303	M.0265/Ekon/06/2022	22/06/10	Jun-22	Penyampaian Briefing Sheet Dalam Rangka Mendampingi Presiden Pada Acara HIIT HIPMI	Seskab	Noted			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/10	Jun-22
304	M.0266/Ekon/06/2022	22/06/10	Jun-22	Permohonan Audiensi Presiden Boeing Internasional dengan Sekretaris Kabinet	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/10	Jun-22
305	M.0267/Ekon/06/2022	22/06/10	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0568/Seskab/06/2022	22/06/13	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/13	Jun-22
306	M.0268/Ekon/06/2022	22/06/13	Jun-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Pembiayaan dan Insentif Ibu Kota Nusantara	Presiden		M.0565/Seskab/06/2022	22/06/13	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/13	Jun-22
307	M.0269/Ekon/06/2022	22/06/13	Jun-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan	Presiden	ttd	M.0569/Seskab/06/2022	22/06/13	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/13	Jun-22
308	M.0270/Ekon/06/2022	22/06/13	Jun-22	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal tentang Integrasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Untuk Meningkatkan	Presiden		M-575/Seskab/06/2022	14 Juni 2022		Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/01	Aug-22
247	M.0272/Ekon/06/2022	22/06/14	Jun-22	Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah (Minyak Ke-2 Bulan Juni)	Seskab	Noted Arsip			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/14	Jun-22
310	M.0273/Ekon/06/2022	22/06/14	Jun-22	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Swiss dan Jerman	Seskab	Noted Arsip			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/14	Jun-22
311	M.0274/Ekon/06/2022	22/06/14	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0576/Seskab/06/2022	22/06/14	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/14	Jun-22
312	M.0275/Ekon/06/2022	22/06/14	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang	Presiden	ttd	M.0579/Seskab/06/2022	22/06/14	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/14	Jun-22
313	B.0334/Ekon/06/2022	22/06/15	Jun-22	Penyampaian Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Jenis	KL				Perepres menunggu pemngesahan Presiden, saat ini posisinya di Setneg	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/01	Aug-22
314	M.0277/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Penyampaian Bahan Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan Kepala Badan Pusat Statistik	Seskab	arsip			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/16	Jun-22
315	M.0278/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021	Presiden		M.0590/Seskab/06/2022	22/06/17	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/17	Jun-22
316	M.0279/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Laporan Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat dalam Rangka Pertemuan Khusus Konferensi	Presiden		M.0589/Seskab/06/2022	22/06/17	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/06/17	Jun-22
317	M.0280/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Permohonan Rapat Internal terkait Pembanguan Bandar Antarkasa	Presiden		M.0588/Seskab/06/2022	22/06/17	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/17	Jun-22
318	M.0281/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Penyelesaian Permasalahan dalam Penetapan Keputusan Menteri Agraria dan Tata	KL	dittd	B.0265/Seskab/Ekon/06/2022	22/06/17	elah diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Iuknis-HK.02/VI/2022 Tahun 2022 tentang	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/11/01	Nov-22
319	M.0282/Ekon/06/2022	22/06/16	Jun-22	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Penoneerasian dan Penvelesaian Provek	KL	dittd	B.0266/Seskab/Ekon/06/2022	22/06/17	Sudah diselenggarakan rapat antara Kementerian PUJPR dengan Kementerian LHK	Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/06/30	Jul-22
320	M.0283/Ekon/06/2022	22/06/20	Jun-22	Penyampaian Briefing Sheet Sidang Kabinet Pariourna tentang Antisipasi Krisis Pangan dan	Presiden	arsip	M.0598/Seskab/06/2022	22/06/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/20	Jun-22
321	M.0284/Ekon/06/2022	22/06/21	Jun-22	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2022 pada Bidang							KTJ_9	KTJ_9	22/06/21	Jun-22
322	M.0285/Ekon/06/2022	22/06/21	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden		M.0601/Seskab/06/2022	22/06/21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/21	Jun-22
323	M.0286/Ekon/06/2022	22/06/22	Jun-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal tentang Penyakit Mulut dan Kuku Kamis 23	Presiden		M.0606/Seskab/06/2022	22/06/23	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/06/23	Jun-22
324	M.0287/Ekon/06/2022	22/06/22	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Badan Pelindungan	Presiden		M.0603/Seskab/06/2022	22/06/23	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/23	Jun-22
325	B.0362/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Bandar Udara dan Kereta dalam	KL				Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/06/30	Jul-22
326	B.0363/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Larangan Irigasi dalam Provek	KL				Telah diselenggarakan rapat koordinasi oleh Sekretaris Kabinet terkait nelenasan kawasan	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/06/30	Jul-22
327	B.0364/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan dalam Provek Strateis Nasional	KL				Kementerian Koordinator bidang Perekonomian telah menveleenggarakan rapat koordinasi dan	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/06/30	Jul-22
328	M.0288/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Pimpinan BPK Dalam Penyampaian		noted					KTJ_9	KTJ_9	22/06/24	Jun-22
329	M.0291/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Permohonan Audiensi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia kepada Sekretaris	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/06/23	Jun-22
330	M.0292/Ekon/06/2022	22/06/23	Jun-22	Penyampaian Konsep Surat Sekretaris Kabinet perihal Tindak Lanjut araban Presiden Terkait	KL		B.0276/Seskab/Ekon/06/2022	22/06/24	Menteri Pertanian telah menerbitkan SK no. 500/1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang	Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/06/30	Jul-22
331	M.0293/Ekon/06/2022	22/06/24	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden		M.0619/Seskab/06/2022	22/06/24	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/24	Jun-22
332	M.0294/Ekon/06/2022	22/06/24	Jun-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.0618/Seskab/06/2022	22/06/24	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/06/24	Jun-22
	B.0375/Ekon/06/2022	22/06/30	Jul-22	Penyampaian Keputusan Rapat Perizinan Berusaha Badan Usaha Bandar Udara Hang	KL				Sudah ditindakanluti oleh Kementerian Investasi/BKPM terkait perubahan aliran sistem	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/07/05	Jul-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
	M.0297/Ekon/06/2022	22/06/30	Jul-22	Penerusan Surat Permohonan Audiensi Nexus3 Foundation							KTJ_9	KTJ_9	22/07/01	Jul-22
	M.0299/Ekon/07/2022	22/07/04	Jul-22	Laporan Triwulan I Tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Seskab	Noted - Arsip				Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/05	Jul-22
	M.0300/Ekon/07/2022	22/07/04	Jul-22	Permohonan Gubernur Kalimantan Utara terkait Percepatan Pembangunan Major Project	KL	ttd	B.0284/Seskab/Ekon/07/2022	22/07/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/07/05	Jul-22
	M.0301/Ekon/07/2022	22/07/05	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Kerja	Presiden	ttd	M.0631/Seskab/07/2022	22/07/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/05	Jul-22
	M.0302/Ekon/07/2022	22/07/05	Jul-22	Permohonan Rapat Internal Usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kantor Presiden	Deputi				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	KTJ_9	KTJ_9	22/07/04	Jul-22
	M.0303/Ekon/07/2022	22/07/05	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Deputi	ttd	M.0632/Seskab/07/2022	22/07/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/05	Jul-22
	M.0304/Ekon/07/2022	22/07/05	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi	Deputi				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi Marinives	KTJ_9	KTJ_9	22/07/05	Jul-22
	M.0305/Ekon/07/2022	22/07/05	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0639/Seskab/07/2022	22/07/06	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/06	Jul-22
	B.0383/Ekon/07/2022	22/07/06	Jul-22	Permohonan Audiensi Panitia Munas Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia	KL	-			telah dilaksanakan audiensi antara perbarindo dan	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	01-Sep-22	Sep-22
	M.0306/Ekon/07/2022	22/07/06	Jul-22	Laporan Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2022 Triwulan I	Presiden		M.0644/Seskab/07/2022	22/07/07	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/07/07	Jul-22
	M.0308/Ekon/07/2022	22/07/07	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0649/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/07	Jul-22
	M.0308/Ekon/07/2022	22/07/07	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0649/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/07	Jul-22
	M.0311/Ekon/07/2022	22/07/08	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Kerja	Presiden	surat dittd	M.0647/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
	M.0312/Ekon/07/2022	22/07/08	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0650/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
	M.0313/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan	Presiden	dittd (Arsin)	M.0652/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/11	Jul-22
	M.0314/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Penataan Laban Sekitar Bandara Kota Medan	Presiden	dittd (Arsin)	M.0653/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/11	Jul-22
	M.0315/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Juli 2022	Presiden		M.0660/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/07/11	Jul-22
	M.0316/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0661/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
	M.0316/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0661/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
	M.0316/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0661/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
	M.0316/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0661/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
355	M.0316/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0661/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/11	Jul-22
356	M.0317/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pedoman	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/11	Jul-22
357	M.0318/Ekon/07/2022	22/07/11	Jul-22	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Presiden		M.0659/Seskab/07/2022	22/07/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/07/11	Jul-22
358	B.0396/Ekon/07/2022	22/07/12	Jul-22	Percepatan Implementasi Rencana Aksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosis-	KL	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/07/12	Jul-22
359	M.0319/Ekon/07/2022	22/07/12	Jul-22	Laporan Menteri Koperasi dan UKM tentang Progress Pilot Project Pengembangan Minvack	Presiden		M.0662/Seskab/07/2022	22/07/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/07/12	Jul-22
360	M.0321/Ekon/07/2022	22/07/12	Jul-22	Usulan Rapat Internal Terkait Revisi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan	Presiden		M.0663/Seskab/07/2022	22/07/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/12	Jul-22
361	M.0322/Ekon/07/2022	22/07/12	Jul-22	Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet untuk Penyampaian Arahan Presiden mengenai	KL	dittd(Berkas langsung ke Deputi Perekonomian)	B.0304/Seskab/Ekon/07/2022	22/07/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/07/12	Jul-22
362	B.0184/Ekon/04/2022	22/06/26	Jul-22	Hasil Rapat Koordinasi	KL				BPKP telah melakukan reviu terhadap 31 PSN dan hasil reviu telah disampaikan melalui surat	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/08/01	Aug-22
363	M.0323/Ekon/07/2022	22/07/13	Jul-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Produk Turunan Kelapa	Presiden	dittd(Arsin)	M.0665/Seskab/07/2022	22/07/13	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/13	Jul-22
364	M.0324/Ekon/07/2022	22/07/13	Jul-22	Laporan Hasil Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Internal Penguatan	Seskab	monitor tindaklanjutnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/14	Jul-22
365	M.0325/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Delegasi World Bank	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/14	Jul-22
366	M.0326/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet pada Acara Peresmian Transformasi Sarinah	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/14	Jul-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
367	M.0327/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Kawasan Sains Teknologi pada	Presiden		M.0671/Seskab/07/2022	22/07/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/14	Jul-22
368	M.0328/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Tanggapan atas Rancangan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Presiden	surat dittd	M.0673/Seskab/07/2022	22/07/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/07/14	Jul-22
369	M.0330/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional Target Selesai 2022 dan Proyek	Presiden		M.0574/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/15	Jul-22
370	M.0332/Ekon/07/2022	22/07/14	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0676/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/15	Jul-22
371	M.0334/Ekon/07/2022	22/07/15	Jul-22	Permohonan Peninjauan Export Duty untuk Soan Noodle	KL	ditttd	B.0310/Seskab/Ekon/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/07/15	Jul-22
372	M.0335/Ekon/07/2022	22/07/15	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0679/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/15	Jul-22
373	M.0335/Ekon/07/2022	22/07/15	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0679/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/15	Jul-22
374	M.0335/Ekon/07/2022	22/07/15	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0679/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/15	Jul-22
375	M.0335/Ekon/07/2022	22/07/15	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0679/Seskab/07/2022	22/07/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/15	Jul-22
376	M.0336/Ekon/07/2022	22/07/18	Jul-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Tentang Kebijakan di Bidang Pangan dan Energi	Presiden	arsip	M.0683/Seskab/07/2022	22/07/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/18	Jul-22
377	M.0337/Ekon/07/2022	22/07/18	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Presiden	surat dittd	M.0687/Seskab/07/2022	22/07/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/18	Jul-22
378	M.0339/Ekon/07/2022	22/07/19	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0691/Seskab/07/2022	22/07/20	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/20	Jul-22
379	M.0340/Ekon/07/2022	22/07/20	Jul-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Tentang Perbaikan Tatahan Kebijakan Gula	Presiden	arsip	M.0696/Seskab/07/2022	22/07/20	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/20	Jul-22
380	M.0341/Ekon/07/2022	22/07/20	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0698/Seskab/07/2022	22/07/20	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/20	Jul-22
381	M.0342/Ekon/07/2022	22/07/20	Jul-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Masterplan Ibu Kota Nusantara	Presiden	arsip	M.0697/Seskab/07/2022	22/07/20	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/20	Jul-22
382	M.0343/Ekon/07/2022	22/07/20	Jul-22	Laporan Ketiga Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi	Presiden		M.0700/Seskab/07/2022	22/07/20	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/07/20	Jul-22
383	M.0344/Ekon/07/2022	22/07/22	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden	surat dittd	M.0702/Seskab/07/2022	22/07/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/25	Jul-22
384	M.0345/Ekon/07/2022	22/07/25	Jul-22	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas mengenai Papu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Deputi	ditttd (arsin)	M.0706/Seskab/07/2022	22/07/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/25	Jul-22
385	M.0346/Ekon/07/2022	22/07/25	Jul-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden		M.0715/Seskab/07/2022	22/07/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/07/26	Aug-22
386	M.0348/Ekon/07/2022	22/07/25	Jul-22	Laporan Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022	Presiden		M.0720/Seskab/07/2022	22/07/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/07/26	Aug-22
387	M.0349/Ekon/07/2022	22/07/25	Jul-22	Usulan Menteri Pertanian Terhadap Rencana Peningkatan Kelembagaan Karantina	Presiden		M.0719/Seskab/07/2022	22/07/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_1	ISP_1	22/07/26	Aug-22
388	M.0350/Ekon/07/2022	22/07/25	Jul-22	Laporan Hasil Pendalaman terhadap Lokasi Prioritas Reforma Agraria dengan Tinologi	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/07/25	Jul-22
389	M.0351/Ekon/07/2022	26-Jul-22	Aug-22	Permohonan Membuka dan Memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Bakornas) Pengendalian	Presiden		M.0724/Seskab/07/2022	22/07/27	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/27	Aug-22
390	M.0352/Ekon/07/2022	26-Jul-22	Aug-22	Laporan Kunjungan Kerja ke Korea Selatan Tanggal 7-11 Juni 2022	Presiden		M.0725/Seskab/07/2022	22/07/27	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/07/27	Aug-22
391	M.0354/Ekon/07/2022	29-Jul-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat dittd	M.0728/Seskab/08/2022	22/08/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/01	Aug-22
392	M.0355/Ekon/08/2022	1-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Peningkatan Produksi dan Ekspor Jagung (Senin)	Presiden	surat dittd(arsin)	M.0729/Seskab/08/2022	22/08/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/01	Aug-22
393	M.0356/Ekon/08/2022	1-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan	Presiden	surat dittd	M.0730/Seskab/08/2022	22/08/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/01	Aug-22
394	M.0357/Ekon/08/2022	1-Aug-22	Aug-22	Laporan Kajian Best Practices dan Lesson Learned Transformasi Ekonomi		noted/teruskan kajiannya					KTJ_9	KTJ_9	22/08/01	Aug-22
395	M.0358/Ekon/08/2022	1-Aug-22	Aug-22	Hasil Kajian dan Focus Group Discussion Peningkatan Partisipasi Konektivitas dalam	KL	ditttd	B.0333/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/01	Aug-22
396	M.0359/Ekon/08/2022	2-Aug-22	Aug-22	Laporan The 10th Ministerial Meeting (MM) of The Council of Palm Oil Producing Countries	Presiden		M.0739/Seskab/08/2022	22/08/02	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/08/02	Aug-22
397	B.0480/Ekon/08/2022	3-Aug-22	Aug-22	Penyelesaian 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan	KL	-			Telah diselenggarakannya rapat harmonisasi Rancangan 6 (enam) Peraturan Perhubungan	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/31	Sep-22
398	M.0361/Ekon/08/2022	3-Aug-22	Aug-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Agustus 2022	Presiden		M.0745/Seskab/08/2022	22/08/03	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/08/03	Aug-22
399	M.0362/Ekon/08/2022	3-Aug-22	Aug-22	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juli 2022	Presiden		M.0744/Seskab/08/2022	22/08/03	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/08/03	Aug-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
400	B.0489/Ekon/08/2022	4-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Catatan terhadap Usulan Audiensi Delegasi Kratom Amerika Serikat	KL	-			Catatan terkait tanaman kratom dalam surat telah dievaluasi sebagai bahan pertimbangan	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/08/25	Aug-22
401	M.0363/Ekon/08/2022	4-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Peninjauan Produksi Sorum dan Kebiasaan	Presiden	arsip	M.0748/Seskab/08/2022	22/08/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/04	Aug-22
402	M.0364/Ekon/08/2022	4-Aug-22	Aug-22	Permohonan Penyelesaian Permasalahan PT Dani Tasha Lestari	KL	dittd	B.0338/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/08/05	Aug-22
403	M.0366/Ekon/08/2022	5-Aug-22	Aug-22	Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan Bagi Penebangan Lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN)	Presiden		M.0751/Seskab/08/2022	22/08/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/08/08	Aug-22
404	M.0367/Ekon/08/2022	8-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna mengenai Nota Keuangan dan Rancangan	Presiden	arsip	M.0752/Seskab/08/2022	22/08/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/08	Aug-22
405	M.0368/Ekon/08/2022	8-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0754/Seskab/08/2022	22/08/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/08	Aug-22
406	M.0369/Ekon/08/2022	8-Aug-22	Aug-22	Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola	KL	dittd	B.0340/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/08	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/08	Aug-22
407	M.0370/Ekon/08/2022	8-Aug-22	Aug-22	Laporan Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68		Waseskab			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Waseskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/08	Aug-22
408	M.0371/Ekon/08/2022	9-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	dittd	M.0763/Seskab/08/2022	22/08/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/11	Aug-22
409	M.0372/Ekon/08/2022	9-Aug-22	Aug-22	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	KL	ttd	B.0346/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/10	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/10	Aug-22
410	M.0374/Ekon/08/2022	10-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Presiden	dittd	M.0767/Seskab/08/2022	22/08/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/11	Aug-22
411	M.0375/Ekon/08/2022	10-Aug-22	Aug-22	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2022	Presiden		M.0766/Seskab/08/2022	22/08/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/08/11	Aug-22
412	M.0376/Ekon/08/2022	11-Aug-22	Aug-22	Permohonan Percepatan dan Perluasan Ekspor CPO dan Turunannya sebagai Unava	Presiden		M.0769/Seskab/08/2022	22/08/11	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/11	Aug-22
413	M.0377/Ekon/08/2022	11-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang	Presiden		M.0771/Seskab/08/2022	22/08/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/12	Aug-22
414	M.0378/Ekon/08/2022	12-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0772/Seskab/08/2022	22/08/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/12	Aug-22
415	M.0379/Ekon/08/2022	15-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Briefing Sheet Penyerahan Penerimaan dari International Rice Research		Seskab			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/15	Aug-22
416	M.0380/Ekon/08/2022	15-Aug-22	Aug-22	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kenala Bannenas ke Amerika Serikat	Presiden		M.0776/Seskab/08/2022	22/08/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/15	Aug-22
417	M.0382/Ekon/08/2022	15-Aug-22	Aug-22	Laporan Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri	Presiden		M.0775/Seskab/08/2022	22/08/15	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/08/15	Aug-22
418	M.0383/Ekon/08/2022	16-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	dittd	M.0783/Seskab/08/2022	22/08/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/18	Aug-22
419	M.0384/Ekon/08/2022	18-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Butir Wicara Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun	Presiden	dittd	M.0785/Seskab/08/2022	22/08/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/18	Aug-22
420	M.0385/Ekon/08/2022	18-Aug-22	Aug-22	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakeriaan Ke Swiss dan Austria	Presiden		M.0784/Seskab/08/2022	22/08/18	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/08/18	Aug-22
421	M.0386/Ekon/08/2022	19-Aug-22	Aug-22	Laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kenala Otorita Ibu Kota		Seskab			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/19	Aug-22
422	M.0387/Ekon/08/2022	19-Aug-22	Aug-22	Permohonan Arahan Presiden dalam Pelepasan 500 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program		Seskab			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/19	Aug-22
423	M.0388/Ekon/08/2022	19-Aug-22	Aug-22	Permohonan Sertipikat Tanah a.n. Hanafiah Thaihv	KL	dittd	B.0363/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/22	Aug-22
424	M.0389/Ekon/08/2022	22-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0793/Seskab/08/2022	22/08/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/22	Aug-22
425	M.0390/Ekon/08/2022	23-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Otorita	Presiden	dittdarsip	M.0798/Seskab/08/2022	22/08/23	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/23	Aug-22
426	M.0391/Ekon/08/2022	23-Aug-22	Aug-22	Briefing Sheet Rapat Internal mengenai Perencanaan Penyelesaian Proyek Kereta Api	Presiden		M.0813/Seskab/08/2022	22/08/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/24	Aug-22
427	M.0392/Ekon/08/2022	24-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Tindak Lanjut Kunjungan Jenang Korea dan Renuhlik	Presiden		M.0812/Seskab/08/2022	22/08/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi Marves-Seskab Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/24	Aug-22
428	M.0393/Ekon/08/2022	24-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.0815/Seskab/08/2022	22/08/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/24	Aug-22
429	M.0395/Ekon/08/2022	25-Aug-22	Aug-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Perencanaan Program Transformasi	Presiden	dittdarsip	M.0819/Seskab/08/2022	22/08/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/25	Aug-22
430	M.0396/Ekon/08/2022	25-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Presiden		M.0823/Seskab/08/2022	22/08/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/25	Aug-22
431	M.0397/Ekon/08/2022	25-Aug-22	Aug-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.0829/Seskab/08/2022	22/08/25	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/25	Aug-22
432	M.0399/Ekon/08/2022	26-Aug-22	Sep-22	Penyampaian Rekomendasi Pembentukan dan Penetapan KEK Sanur serta Permohonan Izin	Seskab	monitor tindaklanjutnya			monitor tindaklanjutnya	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/26	Sep-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
433	M.0400/Ekon/08/2022	26-Aug-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.0834/Seskab/08/2022	22/08/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/26	Sep-22
434	M.0401/Ekon/08/2022	26-Aug-22	Sep-22	Permohonan Menteri Perdagangan Untuk Alokasi Anggaran Dan Pelaksanaan	KL	ditrd	B.0379/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/26	Sep-22
435	M.0402/Ekon/08/2022	26-Aug-22	Sep-22	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/F-	KL	ditrd	B.0378/Seskab/Ekon/08/2022	22/08/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/08/25	Aug-22
436	M.0403/Ekon/08/2022	29-Aug-22	Sep-22	Penyampaian Briefing Sheet Sekretaris Kabinet pada Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	Seskab	Noted			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/08/29	Sep-22
437	M.0404/Ekon/08/2022	29-Aug-22	Sep-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Antisipasi Dampak Rencana Penyesuaian Harga	Presiden		M.0836/Seskab/08/2022	22/09/29	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/08/29	Sep-22
438	M.0406/Ekon/08/2022	29-Aug-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Penvisunan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	ttd	M.0841/Seskab/08/2022	22/08/29	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/29	Sep-22
439	M.0407/Ekon/08/2022	29-Aug-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri RIJMN tentang	Presiden	ttd	M.0842/Seskab/08/2022	22/08/29	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/08/29	Sep-22
440	M.0408/Ekon/08/2022	30-Aug-22	Sep-22	Laporan Kunjungan Kerja ke Jepang tanggal 25-27 Juli 2022	Presiden		M.0871/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/06	Sep-22
441	M.0409/Ekon/08/2022	31-Aug-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi	Presiden	ttd	M.0852/Seskab/09/2022	22/09/05	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/05	Sep-22
442	M.0410/Ekon/08/2022	31-Aug-22	Sep-22	Laporan Dewan Ketahanan Nasional terkait Kajian Akselerasi Penerapan Ekonomi Syariah	Presiden	surat ditrd	M.0872/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/06	Sep-22
443	M.0411/Ekon/09/2022	1-Sep-22	Sep-22	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Pembukaan RIJMN Start-up Dav 2022	Presiden		M.0853/Seskab/09/2022	22/09/05	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/05	Sep-22
444	M.0412/Ekon/09/2022	1-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden	ttd	M.0851/Seskab/09/2022	22/09/05	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/05	Sep-22
445	M.0413/Ekon/09/2022	2-Sep-22	Sep-22	Laporan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan Tentang Pedoman	KL		B.0388/Seskab/Ekon/09/2022	22/09/02	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22/09/02	Sep-22
446	M.0415/Ekon/09/2022	5-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.0862/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/06	Sep-22
447	M.0416/Ekon/09/2022	5-Sep-22	Sep-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal September 2022	Presiden		M.0861/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/09/06	Sep-22
448	M.0417/Ekon/09/2022	5-Sep-22	Sep-22	Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang	Presiden		M.0875/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/05	Sep-22
449	M.0418/Ekon/09/2022	6-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Butir Wicara (Briefing Sheet) Rapat Internal mengenai Evaluasi Provek	Presiden	arsip	M.0868/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/06	Sep-22
450	M.0419/Ekon/09/2022	6-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Butir Wicara (Briefing Sheet) Rapat Internal mengenai Perkembangan Tindak	Presiden	arsip	M.0867/Seskab/09/2022	22/09/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/06	Sep-22
451	M.0420/Ekon/09/2022	7-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0880/Seskab/09/2022	22/09/08	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/08	Sep-22
452	M.0421/Ekon/09/2022	7-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat ditrd	M.0899/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
453	B.0550/Ekon/09/2022	8-Sep-22	Sep-22	Masukan Sekretariat Kabinet Terhadap Usulan Penemuurnaan Rancangan Peraturan Presiden	KL	-			Telah ditanggapi oleh Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/10/11	Oct-22
454	M.0422/Ekon/09/2022	9-Sep-22	Sep-22	Laporan Tindak Lanjut atas Penyelesaian Backlog Dana Infrastructure Maintenance	KL	ditrd	B.0405/Seskab/Ekon/09/2022	22/09/09	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/09/09	Sep-22
455	M.0423/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Butir Wicara Presiden pada Pertemuan Pengendalian Inflasi di Daerah	Presiden		M.0887/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/12	Sep-22
456	M.0424/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat ditrd	M.0894/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
457	M.0426/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi	KL	ditrd	B.0413/Seskab/Ekon/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
458	M.0427/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.0896/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
459	M.0428/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Standardisasi	Presiden	surat ditrd	M.0893/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
460	M.0429/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik	Presiden	surat ditrd	M.0892/Seskab/09/2022	22/09/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/12	Sep-22
461	M.0430/Ekon/09/2022	12-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Masukan atas Penyusunan Bahan Rapat Internal mengenai Perkembangan	Presiden		M.0885/Seskab/09/2022	22/09/09	Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Polkam-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/09	Sep-22
462	M.0431/Ekon/09/2022	13-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.0902/Seskab/09/2022	22/09/13	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/13	Sep-22
463	M.0433/Ekon/09/2022	13-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Bahan Kunjungan Presiden Terkait Perkembangan PSN di Provinsi Maluku	Presiden	ditrd	M.0907/Seskab/09/2022	22/09/13	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/13	Sep-22
464	M.0434/Ekon/09/2022	15-Sep-22	Sep-22	Laporan Triwulan II Tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Seskab	Noted			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/09/15	Sep-22
465	M.0435/Ekon/09/2022	15-Sep-22	Sep-22	Permohonan Agenda Penyelenggaraan Rapat Internal Tentang Transformasi Kebijakan Subsidi	Presiden		M.0912/Seskab/09/2022	22/09/16	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/09/16	Sep-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
466	M.0436/Ekon/09/2022	15-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Konekasi dan	Presiden	ttd	M.0914/Seskab/09/2022	22/09/16	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/16	Sep-22
467	M.0438/Ekon/09/2022	16-Sep-22	Sep-22	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Food Estate	Presiden		M.0924/Seskab/09/2022	22/09/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/09/19	Sep-22
468	M.0439/Ekon/09/2022	16-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/09/16	Sep-22
469	M.0440/Ekon/09/2022	19-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas	Presiden	arsip	M.0927/Seskab/09/2022	22/09/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/19	Sep-22
470	M.0441/Ekon/09/2022	19-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Cahai	Presiden		M.0928/Seskab/09/2022	22/09/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/19	Sep-22
471	M.0442/Ekon/09/2022	19-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK1)	KL	surat dittd	B.0426/Seskab/Ekon/09/2022	22/09/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_2	ISP_2	22/09/19	Sep-22
472	M.0443/Ekon/09/2022	19-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0935/Seskab/09/2022	22/09/21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/21	Sep-22
473	M.0445/Ekon/09/2022	21-Sep-22	Sep-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Program Penyelamatan PT Asuransi Jiwaswara	Presiden	arsip	M.0932/Seskab/09/2022	22/09/21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/21	Sep-22
474	B.0583/Ekon/09/2022	22-Sep-22	Sep-22	Penerusan Surat Usulan Pencabutan Hak Guna Usaha PT Rantau Sinar Karsa di atas Tanah	KL					Deputi-KL	IOP_3	Belum Outcome		
475	M.0448/Ekon/09/2022	23-Sep-22	Sep-22	Laporan Pelaksanaan Misi Dagang ke India pada tanggal 21-22 Agustus 2022	Presiden		M.0951/Seskab/09/2022	22/10/02	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/26	Oct-22
476	M.0449/Ekon/09/2022	23-Sep-22	Sep-22	Permohonan Video Taping Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-77 PT KAI	Presiden		M.0946/Seskab/09/2022	22/09/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	IOP_1	ISP_1	22/09/26	Oct-22
477	M.0451/Ekon/09/2022	23-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0950/Seskab/09/2022	22/09/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/26	Oct-22
478	M.0452/Ekon/09/2022	23-Sep-22	Sep-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Presiden		M.0949/Seskab/09/2022	22/09/26	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/26	Oct-22
479	M.0456/Ekon/09/2022	27-Sep-22	Oct-22	Laporan Pertemuan the 12th Ministerial Meeting of Singapore-Indonesia Six Bilateral	Presiden		M.0959/Seskab/09/2022	22/09/29	Tidak ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/29	Oct-22
480	M.0461/Ekon/09/2022	28-Sep-22	Oct-22	Penyampaian Butir Wicara Presiden pada Bertemu Presiden (Kamis, 29 September)	Presiden	arsip	M.0952/Seskab/09/2022	22/09/29	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/09/28	Oct-22
481	M.0473/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Rekomendasi Besar Insentif Dewan Penawas dan Direksi RPIS	KL	ttd	B.461/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/04		Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	Belum Outcome		
482	M.0475/Ekon/10/2022	3-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Presidensi G20 Indonesia: Sherna Track dan	Presiden		M.0974/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/04	Oct-22
483	M.0478/Ekon/10/2022	4-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Rapat Internal Mengenai Konsep Badan Usaha Milik Otorita Ibu Kota Nusantara	Presiden		M.0978/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/04	Oct-22
484	M.0479/Ekon/10/2022	4-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal tentang Perkembangan Pelaksanaan Program	Seskab		M.0977/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_1	ISP_1	22/10/04	Oct-22
485	M.0487/Ekon/10/2022	11-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Arahan Presiden Selasa, 11 Oktober	Presiden		M.1019/Seskab/10/2022	22/10/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/12	Oct-22
486	M.0488/Ekon/10/2022	11-Oct-22	Oct-22	Laporan Kunjungan Kerja ke Phuket, Thailand	Presiden		M.1017/Seskab/10/2022	22/10/12	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/12	Oct-22
487	M.0490/Ekon/10/2022	12-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kebijakan Karantina Terpusat (Rabu, 12 Oktober)	Presiden	arsip	M.1030/Seskab/10/2022	22/10/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/14	Oct-22
488	M.0498/Ekon/10/2022	13-Oct-22	Oct-22	Permohonan Perpanjangan Program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kerdelai di	Presiden		M.1025/Seskab/10/2022	22/10/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/14	Oct-22
489	B.0620/Ekon/10/2022	14-Oct-22	Oct-22	Tanggapan atas Opsi Tindak Lanjut Program Asistensi Teknis Peningkatan Kualitas Regulasi	KL	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/10/14	Oct-22
490	M.0509/Ekon/10/2022	19-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Tindak Lanjut Pembahasan Undang-Undang	Presiden	arsip	M.1047/Seskab/10/2022	22/10/19	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/19	Oct-22
491	B.0634/Ekon/10/2022	20-Oct-22	Oct-22	Persetujuan Prinsip atas Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	KL	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/10/20	Oct-22
492	M.0514/Ekon/10/2022	21-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Rancangan Undang-Undang Pengembangan	Presiden	arsip	M.1057/Seskab/10/2022	22/10/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/21	Oct-22
493	M.0458/Ekon/09/2022	27-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0958/Seskab/09/2022	22/09/29	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/09/29	Oct-22
494	M.0465/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Presiden	ttd	M.0983/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
495	M.0466/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	ttd	M.0984/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
496	M.0467/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	ttd	M.0988/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
497	M.0470/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0989/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
498	M.0471/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden	ttd	M.0992/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
499	M.0472/Ekon/09/2022	30-Sep-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Presiden	ttd	M.0991/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
500	M.0477/Ekon/10/2022	3-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 1 RPPM tentang Peta Kanasitas Fiskal Daerah	Presiden	surat dittd	M.0979/Seskab/10/2022	22/10/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/04	Oct-22
501	M.0482/Ekon/10/2022	5-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.0996/Seskab/10/2022	22/10/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/05	Oct-22
502	M.0485/Ekon/10/2022	7-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Presiden	ttd	M.1005/Seskab/10/2022	22/10/07	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/07	Oct-22
503	M.0500/Ekon/10/2022	13-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.1028/Seskab/10/2022	22/10/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/14	Oct-22
504	M.0502/Ekon/10/2022	17-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1038/Seskab/10/2022	22/10/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/17	Oct-22
505	M.0503/Ekon/10/2022	17-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1037/Seskab/10/2022	22/10/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/17	Oct-22
506	M.0505/Ekon/10/2022	17-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebhijakan	Presiden	surat dittd	M.1036/Seskab/10/2022	22/10/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/17	Oct-22
507	M.0510/Ekon/10/2022	20-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.1055/Seskab/10/2022	22/10/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/21	Oct-22
508	M.0511/Ekon/10/2022	20-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1054/Seskab/10/2022	22/10/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/21	Oct-22
509	M.0512/Ekon/10/2022	20-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1053/Seskab/10/2022	22/10/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/21	Oct-22
510	M.0515/Ekon/10/2022	21-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden	surat dittd	M.1059/Seskab/10/2022	22/10/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/24	Oct-22
511	M.0517/Ekon/10/2022	24-Oct-22	Oct-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.1074/Seskab/10/2022	22/10/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/26	Nov-22
512	M.0486/Ekon/10/2022	10-Oct-22	Oct-22	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian dan Penonerasian Proyek	KL	ttd	B.0473/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/11	Telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR melalui penyelenggaraan rapat terkait	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/10/11	Oct-22
513	M.0504/Ekon/10/2022	17-Oct-22	Oct-22	Tanggapan terhadap Permohonan Penundaan Pelarangan Kratom oleh Gubernur Provinsi	Presiden	ttd	M.1034/Seskab/10/2022	22/10/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/10/17	Oct-22
514	M.0507/Ekon/10/2022	18-Oct-22	Oct-22	Laporan Monitoring dan Evaluasi mengenai Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM	KL	dittd	B.0494/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/19	Akan dilaksanakan trilateral meeting oleh kementerian	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22/10/19	Oct-22
515	M.0516/Ekon/10/2022	21-Oct-22	Oct-22	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pangan Lokal	Presiden	ttd	M.1064/Seskab/10/2022	22/10/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/10/24	Oct-22
516	M.0464/Ekon/09/2022	29-Sep-22	Oct-22	Permohonan Agenda Rapat Internal Terkait Rancangan Regulasi Food Estate	Presiden	ttd	M.0969/Seskab/09/2022	22/09/29	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/09/29	Oct-22
517	M.0480/Ekon/10/2022	4-Oct-22	Oct-22	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ranat	KL	ttd	B.0465/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/05	Kemenko telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 1 November 2022	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/10/05	Oct-22
518	M.0481/Ekon/10/2022	4-Oct-22	Oct-22	Relaksasi Bunga KUR Taxi Alsintan dan Pupuk Non Subsidi	KL	ttd	B.0464/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/05	surat tersebut sedang dalam proses kajian oleh Kemenko Perekonomian	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/10/05	Oct-22
519	M.0483/Ekon/10/2022	6-Oct-22	Oct-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Oktober 2022	Presiden	ttd	M.0999/Seskab/10/2022	22/10/06	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/10/06	Oct-22
520	M.0484/Ekon/10/2022	6-Oct-22	Oct-22	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi September 2022	Presiden	ttd	M.1000/Seskab/10/2022	22/10/06	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/10/06	Oct-22
521	M.0494/Ekon/10/2022	12-Oct-22	Oct-22	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Presiden	ttd	M.1029/Seskab/10/2022	22/10/14	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/10/14	Oct-22
522	M.0506/Ekon/10/2022	17-Oct-22	Oct-22	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Ranat Dewan Gubernur Bank Indonesia 21-22	Presiden	ttd	M.1033/Seskab/10/2022	22/10/17	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/10/17	Oct-22
523	B.0637/Ekon/10/2022	21-Oct-22	Oct-22	Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2020 di Pelabuhan Belawan	KL	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	IOP_4	ISP_4	22/10/24	Oct-22
524	M.0453/Ekon/09/2022	26-Sep-22	Oct-22	Penyampaian Briefing Sheet Dalam Rangka Mendampingi Presiden Pada Acara Peresmian	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/09/26	Oct-22
525	M.0454/Ekon/09/2022	26-Sep-22	Oct-22	Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Seskab	monitor tindaklanjtnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/09/29	Oct-22
526	M.0459/Ekon/09/2022	27-Sep-22	Oct-22	Penerusan Surat dari Beberapa Elemen/Kelompok Masyarakat di Bidang	Deputi PMK				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	22/09/27	Oct-22
527	M.0476/Ekon/10/2022	3-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Butir Wicara pada Peresmian Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakvatan	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/10/14	Oct-22
528	M.0489/Ekon/10/2022	11-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Permohonan Informasi a.n. Sdri. Ikhlan Praiawan Fadli terkait Status Peraturan	Deputi Administra				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi Administrasi	KTJ_9	KTJ_9	22/10/11	Oct-22
529	M.0501/Ekon/10/2022	14-Oct-22	Oct-22	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus kepada Investor	Seskab	monitor tindaklanjtnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/10/14	Oct-22
530	M.0508/Ekon/10/2022	19-Oct-22	Oct-22	Penyampaian Briefing Sheet Peresmian Pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/10/19	Oct-22
531	M.0518/Ekon/10/2022	26-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Presiden	surat dittd	M.1073/Seskab/10/2022	22/10/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/26	Nov-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
532	M.0519/Ekon/10/2022	26-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1072/Seskab/10/2022	22/10/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/26	Nov-22
533	M.0520/Ekon/10/2022	26-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1071/Seskab/10/2022	22/10/26	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/26	Nov-22
534	M.0521/Ekon/10/2022	26-Oct-22	Nov-22	Penerusan Surat Permohonan Audiensi Dengan Presiden Oleh Komisi Pengawas Persaingan							KTJ_9	KTJ_9	22/10/26	Nov-22
535	M.0522/Ekon/10/2022	28-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1085/Seskab/10/2022	22/10/31	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/31	Nov-22
536	M.0525/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal tentang Kehilangan Subsidi, Distribusi, dan Harga	Presiden	arsip	M.1089/Seskab/10/2022	22/10/31	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/10/31	Nov-22
537	M.0526/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Laporan Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2022	Presiden		M.1090/Seskab/10/2022	22/10/31	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/10/31	Nov-22
538	M.0528/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Pajak Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Wilayah Batam	KL	dittd	B.0519/Seskab/Ekon/10/2022	22/10/31		Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	Belum Outcome		
539	M.0529/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1098/Seskab/10/2022	22/10/31	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/10/31	Nov-22
540	M.0530/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Presiden	surat dittd	M.1099/Seskab/11/2022	22/11/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/01	Nov-22
541	M.0533/Ekon/10/2022	31-Oct-22	Nov-22	Tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Internal Kabinet tentang Konsen Badan Usaha	KL	dittd	B.0520/Seskab/Ekon/11/2022	22/11/01		Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_1	Belum Outcome		
542	M.0534/Ekon/11/2022	1-Nov-22	Nov-22	Penerusan Surat Permohonan Menteri Keuangan kepada Presiden RI untuk	Deputi PMK				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	22/11/01	Nov-22
543	M.0535/Ekon/11/2022	1-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Briefing Sheet Dalam Rangka Mendampingi Presiden Pada Acara Menerima	Seskab	noted(arsip)			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/01	Nov-22
544	M.0537/Ekon/11/2022	1-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Masukan atas Penyusunan Bahan Rapat Internal mengenai Penataan Acara dan	Deputi Polhukam				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Deputi Polhukam	KTJ_9	KTJ_9	22/11/01	Nov-22
545	M.0539/Ekon/11/2022	1-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1101/Seskab/11/2022	22/11/01	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/01	Nov-22
546	M.0540/Ekon/11/2022	2-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Bonulasi Ideal di Ibu Kota Nusantara	Presiden	arsip	M.1104/Seskab/11/2022	22/11/02	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/02	Nov-22
547	M.0541/Ekon/11/2022	2-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1123/Seskab/11/2022	22/11/07	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/07	Nov-22
548	M.0543/Ekon/11/2022	2-Nov-22	Nov-22	Briefing Sheet Rapat Internal tentang Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023	Presiden	arsip	M.1110/Seskab/11/2022	22/11/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/04	Nov-22
549	M.0544/Ekon/11/2022	3-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal tentang Perkembangan Pelaksanaan Program	Presiden	arsip	M.1109/Seskab/11/2022	22/11/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/04	Nov-22
550	M.0545/Ekon/11/2022	3-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator	Presiden	surat ditrd	M.1114/Seskab/11/2022	22/11/04	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/04	Nov-22
551	M.0546/Ekon/11/2022	4-Nov-22	Nov-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal November 2022	Presiden		M.1124/Seskab/11/2022	22/11/07	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/11/07	Nov-22
552	M.0547/Ekon/11/2022	4-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat ditrd	M.1120/Seskab/11/2022	22/11/05	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/05	Nov-22
553	M.0548/Ekon/11/2022	7-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden	surat ditrd	M.1131/Seskab/11/2022	22/11/07	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/07	Nov-22
554	M.0549/Ekon/11/2022	8-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.1142/Seskab/11/2022	22/11/09	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/09	Nov-22
555	M.0550/Ekon/11/2022	8-Nov-22	Nov-22	Permohonan Audiensi Vice President Compact Operation Millennium Challenge Corporation	Seskab	Noted Waktunya tidak			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/08	Nov-22
556	M.0551/Ekon/11/2022	9-Nov-22	Nov-22	Laporan Rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AFM) ke-54 di Kamboja	Presiden	ttd	M.1135/Seskab/11/2022	22/11/09	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/09	Nov-22
557	M.0552/Ekon/11/2022	9-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.1134/Seskab/11/2022	22/11/09	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/09	Nov-22
558	M.0553/Ekon/11/2022	10-Nov-22	Nov-22	Masukan Menteri Perhubungan atas Rancangan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri	Seskab	tindaklanjuti			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/10	Nov-22
559	M.0554/Ekon/11/2022	10-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Buku Laporan Tahunan 2021 Program Kartu Prakerja	Seskab	Monitor tindaklanjuti			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/10	Nov-22
560	M.0555/Ekon/11/2022	10-Nov-22	Nov-22	Laporan Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat	Presiden		M.1146/Seskab/11/2022	22/11/10	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/10	Nov-22
561	M.0556/Ekon/11/2022	10-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Bahan Sambutan Wakil Sekretaris Kabinet tentang Ibu Kota Nusantara dalam	Waseskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Waseskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/10	Nov-22
562	M.0559/Ekon/11/2022	14-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian	Presiden	surat ditrd	M.1167/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
563	M.0560/Ekon/11/2022	15-Nov-22	Nov-22	Laporan Pertemuan Tingkat Menteri Perencanaan Investasi dan Industri G20	Presiden		M.1171/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/21	Nov-22
564	M.0561/Ekon/11/2022	15-Nov-22	Nov-22	Laporan Kunjungan ke Amerika Serikat dan Qatar Tanggal 5-10 Oktober 2022	Presiden		M.1172/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/21	Nov-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
565	M.0562/Ekon/11/2022	15-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdaerajaan	Presiden	surat dittd	M.1166/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
566	M.0563/Ekon/11/2022	16-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden	ttd	M.1156/Seskab/11/2022	22/11/16	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/16	Nov-22
567	M.0564/Ekon/11/2022	16-Nov-22	Nov-22	Penyampaian Laporan Menghadiri the 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price	Seskab	tindaklanjuti			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/11/22	Nov-22
568	M.0565/Ekon/11/2022	16-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator	Presiden	surat dittd	M.1162/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
569	M.0566/Ekon/11/2022	17-Nov-22	Nov-22	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2022	Presiden		M.1169/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/11/17	Nov-22
570	M.0567/Ekon/11/2022	17-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.1160/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
571	M.0568/Ekon/11/2022	17-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden	surat dittd	M.1159/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
572	M.0569/Ekon/11/2022	17-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1161/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
573	M.0571/Ekon/11/2022	18-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden	dittd	M.1163/Seskab/11/2022	22/11/21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/21	Nov-22
574	M.0574/Ekon/11/2022	21-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1175/Seskab/11/2022	22/11/22	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/22	Nov-22
575	M.0576/Ekon/11/2022	23-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.1184/Seskab/11/2022	22/11/23	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/23	Nov-22
576	M.0577/Ekon/11/2022	24-Nov-22	Nov-22	Permohonan Bantuan Pendanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Lembaran	KL	dittd	B.0576/Seskab/Ekon/11/2022	22/11/24		Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	Belum Outcome		
577	M.0578/Ekon/11/2022	24-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden	surat dittd	M.1193/Seskab/11/2022	22/11/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/24	Nov-22
578	M.0579/Ekon/11/2022	24-Nov-22	Nov-22	Permohonan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang	Presiden	surat dittd	M.1192/Seskab/11/2022	22/11/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/24	Nov-22
579	M.0580/Ekon/11/2022	24-Nov-22	Nov-22	Laporan Penyelesaian Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri	Presiden	surat dittd	M.1189/Seskab/11/2022	22/11/24	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/11/24	Nov-22
580	M.0582/Ekon/11/2022	24-Nov-22	Nov-22	Permohonan Audiensi Chief Executive Officer (CEO) Vale SA	Presiden		M.1191/Seskab/11/2022	22/11/24		Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/24	Nov-22
581	M.0583/Ekon/11/2022	28-Nov-22	Dec-22	Penyampaian Masukan atas Penyusunan Bahan Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan	Presiden		M.1200/Seskab/11/2022	22/11/28	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/28	Dec-22
582	M.0584/Ekon/11/2022	28-Nov-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Pembiayaan, Investasi, dan	Presiden		M.1195/Seskab/11/2022	22/11/28	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/28	Dec-22
583	M.0585/Ekon/11/2022	28-Nov-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1198/Seskab/11/2022	22/11/28	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/28	Dec-22
584	M.0587/Ekon/11/2022	29-Nov-22	Dec-22	Laporan Menghadiri UNFCCC COP27 (COP27/CMP17/CMA4_SBSTA57_SBI57)	Deputi Marves				Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Marves	KTJ_9	KTJ_9	22/11/29	Dec-22
585	M.0589/Ekon/11/2022	29-Nov-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Konektivitas dan	Presiden		M.1210/Seskab/11/2022	22/11/29	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/29	Dec-22
586	B.0716/Ekon/11/2022	30-Nov-22	Dec-22	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311_74312_74321_dan 74322	KL					Deputi-KL	IOP_1	Belum Outcome		
587	M.0590/Ekon/11/2022	30-Nov-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Pengelolaan Kelapa Sawit (Rabu, 30 November	Presiden		M.1206/Seskab/11/2022	22/11/30	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/30	Dec-22
588	M.0592/Ekon/11/2022	30-Nov-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1204/Seskab/11/2022	22/11/30	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/11/30	Dec-22
589	M.0594/Ekon/12/2022	1-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Butir Wicara Sekretaris Kabinet untuk Mendampingi Presiden	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/12/01	Dec-22
590	M.0595/Ekon/12/2022	1-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Butir Wicara Sekretaris Kabinet untuk Mendampingi Presiden	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/12/01	Dec-22
591	M.0596/Ekon/12/2022	1-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	KTJ_9	KTJ_9	22/12/01	Dec-22
592	M.0598/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Outlook Ekonomi 2023	Presiden		M.1213/Seskab/12/2022	22/12/05	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/12/05	Dec-22
593	M.0599/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Laporan Hasil Reviu atas Optimalisasi Program Padat Karya Triwulan III Tahun 2022	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/12/05	Dec-22
594	M.0600/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Laporan Hasil Tindak Lanjut Rapat Internal terkait Proyek Strategis Nasional	Presiden		M.1221/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/12/06	Dec-22
595	M.0601/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Perkembangan Kebijakan Upah Minimum Tahun 2023 (UJM 2023) dan Industri Padat Karya	Presiden		M.1224/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/11/30	Dec-22
596	M.0602/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Laporan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan III Tahun 2022	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22/12/05	Dec-22
597	M.0603/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Arahan Presiden mengenai Kebijakan Cukai Hasil Tembakau	Presiden		M.1222/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/06	Dec-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
598	M.0604/Ekon/12/2022	5-Dec-22	Dec-22	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022	Presiden	surat dittd	M.1223/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/12/06	Dec-22
599	B.0726/Ekon/12/2022	6-Dec-22	Dec-22	Hasil Rapat Pembahasan Upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	KL				Kemenko Bidang Perekonomian akan melaksanakan Program Desmigratif sebahai	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	22/12/06	Dec-22
600	M.0605/Ekon/12/2022	6-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Masukan Briefing Sheet Sidang Kabinet Paripurna Selasa, 6 Desember 2022	Presiden		M.1226/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/06	Dec-22
601	M.0606/Ekon/12/2022	6-Dec-22	Dec-22	Laporan Komprehensif Pelaksanaan Kegiatan Tematik Tahun Anggaran 2022 terkait "Kajian	Presiden		M.1225/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/12/06	Dec-22
602	M.0607/Ekon/12/2022	6-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Konektivitas dan	Presiden	ttd	M.1231/Seskab/12/2022	22/12/06	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/06	Dec-22
603	B.0000/Ekon/12/2022	7-Dec-22	Dec-22	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus	Deputi	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	KTJ_9	KTJ_9	22/12/07	Dec-22
604	M.0609/Ekon/12/2022	7-Dec-22	Dec-22	Perkembangan Ekonomi Terkini s.d. Awal Desember 2022	Presiden		M.1233/Seskab/12/2022	22/12/07	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/12/07	Dec-22
605	M.0611/Ekon/12/2022	7-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1236/Seskab/12/2022	22/12/08	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/08	Dec-22
606	M.0612/Ekon/12/2022	7-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Presiden		M.1237/Seskab/12/2022	22/12/08	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/08	Dec-22
607	M.0614/Ekon/12/2022	8-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1234/Seskab/12/2022	22/12/08	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/08	Dec-22
608	M.0615/Ekon/12/2022	8-Dec-22	Dec-22	Laporan Pelaksanaan Transisi Satu Tahun Badan Riset dan Inovasi Nasional	Presiden		M.1238/Seskab/12/2022	22/12/08	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22/12/08	Dec-22
609	M.0617/Ekon/12/2022	8-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1239/Seskab/12/2022	22/12/08	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/08	Dec-22
610	M.0618/Ekon/12/2022	9-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1249/Seskab/12/2022	22/12/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/09	Dec-22
611	M.0620/Ekon/12/2022	9-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1245/Seskab/12/2022	22/12/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/12	Dec-22
612	M.0621/Ekon/12/2022	9-Dec-22	Dec-22	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakeriaan ke Filipina	Presiden		M.1244/Seskab/12/2022	22/12/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/12/12	Dec-22
613	M.0622/Ekon/12/2022	12-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Presiden		M.1251/Seskab/12/2022	22/12/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/12	Dec-22
614	M.0623/Ekon/12/2022	12-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1248/Seskab/12/2022	22/12/12	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/12	Dec-22
615	M.0625/Ekon/12/2022	13-Dec-22	Dec-22	Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan	Presiden		M.1254/Seskab/12/2022	22/12/15	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/14	Dec-22
616	M.0626/Ekon/12/2022	15-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1258/Seskab/12/2022	22/12/16	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/16	Dec-22
617	M.0627/Ekon/12/2022	15-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Konektivitas dan	Presiden		M.1257/Seskab/12/2022	22/12/16	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/15	Dec-22
618	B.0000/Ekon/12/2022	16-Dec-22	Dec-22	Undangan Rapat Pra Rapat Terbatas tentang Perkembangan Proses Restrukturisasi PT PLN	Deputi	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	KTJ_9	KTJ_9	22/12/07	Dec-22
619	M.0629/Ekon/12/2022	16-Dec-22	Dec-22	Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke RRT	Presiden		M.1272/Seskab/12/2022	22/12/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/19	Dec-22
620	M.0630/Ekon/12/2022	16-Dec-22	Dec-22	Permohonan Rapat Terbatas Dalam Rangka Restrukturisasi PT PLN (Persero)	Presiden		M.1271/Seskab/12/2022	22/12/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/19	Dec-22
621	M.0631/Ekon/12/2022	16-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1267/Seskab/12/2022	22/12/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/19	Dec-22
622	M.0632/Ekon/12/2022	19-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Investasi di Ibu Kota Nusantara	Presiden		M.1266/Seskab/12/2022	22/12/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/19	Dec-22
623	M.0633/Ekon/12/2022	19-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Presiden		M.1274/Seskab/12/2022	22/12/19	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/19	Dec-22
624	B.0000/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Perubahan Jadwal Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan	Deputi	-			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi	KTJ_9	KTJ_9	22/12/07	Dec-22
625	M.0636/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Presiden		M.1279/Seskab/12/2022	22/12/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/20	Dec-22
626	M.0638/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Laporan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Presiden		M.1278/Seskab/12/2022	22/12/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22/12/20	Dec-22
627	M.0639/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	KL	dittd	B-0630/Seskab/Ekon/12/2022	22/12/20	Telah diadakan rapat TL pada tanggal tanggal 29 Desember 2022 untuk menindaklanjuti arahan	Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	22/12/29	Dec-22
628	M.0640/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1283/Seskab/12/2022	22/12/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/20	Dec-22
629	M.0641/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakeriaan	Presiden		M.1286/Seskab/12/2022	22/12/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/20	Dec-22
630	M.0642/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Presiden		B.0632/Seskab/Ekon/12/2022	22/12/20	Kepala Bapanas sedang dalam proses penetapan RPerba tersebut	Deputi-Seskab-KL	IOP_2	ISP_2	22/12/20	Dec-22

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Bulan Output	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Bulan Outcome
631	M.0643/Ekon/12/2022	20-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Tiga Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional	Presiden		M.1284/Seskab/12/2022	22/12/20	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/20	Dec-22
632	B.0761/Ekon/12/2022	23-Dec-22	Dec-22	Percepatan Implementasi Rencana Aksi Inpres No. 5 Tahun 2020	KL				Sedang ditindaklanjuti oleh Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/12/30	Dec-22
633	M.0647/Ekon/12/2022	23-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1302/Seskab/12/2022	22/12/27	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
634	M.0648/Ekon/12/2022	23-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.1300/Seskab/12/2022	22/12/27	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/23	Dec-22
635	M.0649/Ekon/12/2022	23-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebhikinan	Presiden	ttd	M.1301/Seskab/12/2022	22/12/27	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/27	Dec-22
636	B.0770/Ekon/12/2022	26-Dec-22	Dec-22	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah	KL				Sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian ATR	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	22/12/31	Dec-22
637	M.0651/Ekon/12/2022	26-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Masukan Rapat Internal Kebhikinan Golden Visa dan Penanganan Tenaga	Presiden		M.1295/Seskab/12/2022	22/12/26	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/26	Dec-22
638	M.0652/Ekon/12/2022	26-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Bahan Rapat Internal Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Presiden		M.1296/Seskab/12/2022	23/12/26	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22/12/26	Dec-22
639	M.0653/Ekon/12/2022	26-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1317/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
640	M.0654/Ekon/12/2022	27-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan	Presiden		M.1312/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
641	M.0654/Ekon/12/2022	27-Dec-22	Dec-22	Penyampaian Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan	Presiden		M.1312/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
642	M.0655/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan	Presiden		M.1318/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
643	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
644	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
645	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
646	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
647	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
648	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
649	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
650	M.0656/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri	Presiden		M.1308/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
651	M.0657/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Presiden		M.1310/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
652	M.0658/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden		M.1307/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
653	M.0658/Ekon/12/2022	28-Dec-22	Dec-22	Permohonan Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Presiden		M.1307/Seskab/12/2022	22/12/30	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22/12/30	Dec-22
654	B.0772/Ekon/12/2022	29-Dec-22	Dec-22	Evaluasi Atas Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional	KL				Memindaklanjuti surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	22/12/30	Dec-22

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2022

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 7

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		4.000.000.000	3.621.323.000	3.609.641.242	0	3.609.641.242	99,67	11.681.758
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	4.000.000.000	3.621.323.000	3.609.641.242	0	3.609.641.242	99,67	11.681.758
0401	ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA	900.000.000	633.729.000	628.054.264	0	628.054.264	99,10	5.674.736
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366
ABA	KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366
ABA.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366
225	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	397.284.000	322.892.000	319.348.634	0	319.348.634	98,90	3.543.366
225.AA	Pengumpulan Data	107.280.000	29.090.000	29.063.369	0	29.063.369	99,90	26.631
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	19.790.000	19.763.369	0	19.763.369	99,86	26.631
-001	-	0	19.790.000	19.763.369	0	19.763.369	99,86	26.631
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	21.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,00	0
-001	-	21.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	86.280.000	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	100,00	0
-001	-	86.280.000	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	100,00	0
225.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	233.050.000	36.844.000	36.843.964	0	36.843.964	99,99	36
522141-RM	BELANJA SEWA	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	87.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	87.900.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	83.840.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	83.840.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	46.142.000	36.844.000	36.843.964	0	36.843.964	99,99	36
-001	-	46.142.000	36.844.000	36.843.964	0	36.843.964	99,99	36
225.AC	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	21.554.000	45.684.000	45.683.327	0	45.683.327	99,99	673
521211-RM	BELANJA BAHAN	21.554.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	21.554.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	100,00	0
-001	-	0	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	27.084.000	27.083.327	0	27.083.327	99,99	673
-001	-	0	27.084.000	27.083.327	0	27.083.327	99,99	673
225.AD	Biaya Paket Data dan Komunikasi	35.400.000	17.700.000	17.700.000	0	17.700.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL -	35.400.000	17.700.000	17.700.000	0	17.700.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	PENANGANAN PANDEMI COVID-19							
-001	-	35.400.000	17.700.000	17.700.000	0	17.700.000	100,00	0
225.AE	Kajian terkait Pertumbuhan Ekonomi	0	193.574.000	190.057.974	0	190.057.974	98,18	3.516.026
521211-RM	BELANJA BAHAN	0	20.700.000	20.135.000	0	20.135.000	97,27	565.000
-001	-	0	20.700.000	20.135.000	0	20.135.000	97,27	565.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	23.120.000	23.090.720	0	23.090.720	99,87	29.280
-001	-	0	23.120.000	23.090.720	0	23.090.720	99,87	29.280
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	12.800.000	12.750.000	0	12.750.000	99,60	50.000
-001	-	0	12.800.000	12.750.000	0	12.750.000	99,60	50.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	136.954.000	134.082.254	0	134.082.254	97,90	2.871.746
-001	-	0	136.954.000	134.082.254	0	134.082.254	97,90	2.871.746
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370
ABA	KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370
ABA.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370
229	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	502.716.000	310.837.000	308.705.630	0	308.705.630	99,31	2.131.370
229.AA	Pengumpulan Data	172.282.000	264.973.000	264.232.422	0	264.232.422	99,72	740.578
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	29.700.000	612.000	610.666	0	610.666	99,78	1.334
-001	-	29.700.000	612.000	610.666	0	610.666	99,78	1.334
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	133.582.000	264.361.000	263.621.756	0	263.621.756	99,72	739.244
-001	-	133.582.000	264.361.000	263.621.756	0	263.621.756	99,72	739.244
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
229.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	183.134.000	29.064.000	27.673.208	0	27.673.208	95,21	1.390.792
522141-RM	BELANJA SEWA	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522191-RM	BELANJA JASA LAINNYA	0	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	100,00	0
-001	-	0	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	32.215.000	9.300.000	7.910.000	0	7.910.000	85,05	1.390.000
-001	-	32.215.000	9.300.000	7.910.000	0	7.910.000	85,05	1.390.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	138.919.000	8.664.000	8.663.208	0	8.663.208	99,99	792
-001	-	138.919.000	8.664.000	8.663.208	0	8.663.208	99,99	792
229.AC	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	147.300.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	20.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	20.900.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	126.400.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	100,00	0
-001	-	126.400.000	16.800.000	16.800.000	0	16.800.000	100,00	0
0402	ASDEP BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UMKM	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
ABK.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
226	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan,	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan								
226.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi	158.100.000	91.247.000	91.197.002	0	91.197.002	99,94	49.998
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.200.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	100,00	0
-001	-	78.200.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	79.900.000	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	100,00	0
-001	-	79.900.000	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	100,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	64.097.000	64.047.002	0	64.047.002	99,92	49.998
-001	-	0	64.097.000	64.047.002	0	64.047.002	99,92	49.998
226.AB	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	259.360.000	279.787.000	279.566.414	0	279.566.414	99,92	220.586
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	9.900.000	799.000	799.000	0	799.000	100,00	0
-001	-	9.900.000	799.000	799.000	0	799.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	249.460.000	278.988.000	278.767.414	0	278.767.414	99,92	220.586
-001	-	249.460.000	278.988.000	278.767.414	0	278.767.414	99,92	220.586
226.AC	Biaya paket data dan komunikasi	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
-001	-	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
226.AD	Pengumpulan Data	42.300.000	106.026.000	105.050.400	0	105.050.400	99,07	975.600
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	20.700.000	22.200.000	21.270.000	0	21.270.000	95,81	930.000
-001	-	20.700.000	22.200.000	21.270.000	0	21.270.000	95,81	930.000
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	49.573.000	49.549.000	0	49.549.000	99,95	24.000
-001	-	21.600.000	49.573.000	49.549.000	0	49.549.000	99,95	24.000
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	0	34.253.000	34.231.400	0	34.231.400	99,93	21.600
-001	-	0	34.253.000	34.231.400	0	34.231.400	99,93	21.600
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UMKM	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
ABK.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
230	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
230.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
-001	-	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
230.AB	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	106.300.000	194.373.000	191.335.619	0	191.335.619	98,43	3.037.381
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	106.300.000	141.000.000	141.000.000	0	141.000.000	100,00	0
-001	-	106.300.000	141.000.000	141.000.000	0	141.000.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	53.373.000	50.335.619	0	50.335.619	94,30	3.037.381
-001	-	0	53.373.000	50.335.619	0	50.335.619	94,30	3.037.381
230.AC	Pengumpulan Data	222.040.000	191.875.000	191.756.375	0	191.756.375	99,93	118.625
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	24.750.000	396.000	396.000	0	396.000	100,00	0
-001	-	24.750.000	396.000	396.000	0	396.000	100,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	175.690.000	171.079.000	171.070.375	0	171.070.375	99,99	8.625
-001	-	175.690.000	171.079.000	171.070.375	0	171.070.375	99,99	8.625

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	20.400.000	20.290.000	0	20.290.000	99,46	110.000
-001	-	21.600.000	20.400.000	20.290.000	0	20.290.000	99,46	110.000
0403	ASDEP BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
ABP	KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
ABP.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
227	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
227.AA	Pengumpulan Data	34.200.000	111.950.000	111.950.000	0	111.950.000	100,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	20.700.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	100,00	0
-001	-	20.700.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	13.500.000	91.400.000	91.400.000	0	91.400.000	100,00	0
-001	-	13.500.000	91.400.000	91.400.000	0	91.400.000	100,00	0
227.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	119.200.000	125.179.000	124.940.695	0	124.940.695	99,80	238.305
521211-RM	BELANJA BAHAN	22.500.000	53.479.000	53.240.695	0	53.240.695	99,55	238.305
-001	-	22.500.000	53.479.000	53.240.695	0	53.240.695	99,55	238.305
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	96.700.000	71.700.000	71.700.000	0	71.700.000	100,00	0
-001	-	96.700.000	71.700.000	71.700.000	0	71.700.000	100,00	0
227.AC	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	336.262.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
522141-RM	BELANJA SEWA	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	7.920.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	7.920.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	304.342.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
-001	-	304.342.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
227.AD	Biaya paket data dan komunikasi	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
-001	-	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
ABP	KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
ABP.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
231	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
231.AA	Pengumpulan Data	260.038.000	372.073.000	372.026.157	0	372.026.157	99,98	46.843
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	16.830.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	16.830.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	209.458.000	338.513.000	338.466.157	0	338.466.157	99,98	46.843
-001	-	209.458.000	338.513.000	338.466.157	0	338.466.157	99,98	46.843
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	33.750.000	33.560.000	33.560.000	0	33.560.000	100,00	0
-001	-	33.750.000	33.560.000	33.560.000	0	33.560.000	100,00	0
231.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
-001	-	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0
231.AC	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0
-001	-	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0
0404	ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.300.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
ABR	KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
ABR.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
228	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
228.AA	Pengumpulan Data	70.760.000	118.202.000	118.066.479	0	118.066.479	99,88	135.521
521211-RM	BELANJA BAHAN	9.200.000	12.675.000	12.540.000	0	12.540.000	98,93	135.000
-001	-	9.200.000	12.675.000	12.540.000	0	12.540.000	98,93	135.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	97.127.000	97.126.479	0	97.126.479	99,99	521
-001	-	0	97.127.000	97.126.479	0	97.126.479	99,99	521
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	8.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	8.400.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	100,00	0
-001	-	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	53.160.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	53.160.000	0	0	0	0	0,00	0
228.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	96.021.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	8.910.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	8.910.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	87.111.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
-001	-	87.111.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
228.AC	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	200.000.000	222.361.000	222.073.544	0	222.073.544	99,87	287.456
522141-RM	BELANJA SEWA	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,00	0
-001	-	0	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	10.098.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	10.098.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	46.918.000	45.508.000	45.507.943	0	45.507.943	99,99	57
-001	-	46.918.000	45.508.000	45.507.943	0	45.507.943	99,99	57
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	51.987.000	52.394.000	52.376.000	0	52.376.000	99,96	18.000
-001	-	51.987.000	52.394.000	52.376.000	0	52.376.000	99,96	18.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	78.997.000	118.859.000	118.589.601	0	118.589.601	99,77	269.399
-001	-	78.997.000	118.859.000	118.589.601	0	118.589.601	99,77	269.399
228.AD	Biaya Paket Data dan Komunikasi	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0
-001	-	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
ABR	KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
ABR.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
232	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
232.AA	Pengumpulan Data	284.789.000	380.806.000	380.709.984	0	380.709.984	99,97	96.016
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	25.740.000	3.277.000	3.200.000	0	3.200.000	97,65	77.000
-001	-	25.740.000	3.277.000	3.200.000	0	3.200.000	97,65	77.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	250.799.000	374.739.000	374.719.984	0	374.719.984	99,99	19.016
-001	-	250.799.000	374.739.000	374.719.984	0	374.719.984	99,99	19.016
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	8.250.000	2.790.000	2.790.000	0	2.790.000	100,00	0
-001	-	8.250.000	2.790.000	2.790.000	0	2.790.000	100,00	0
232.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi	122.800.000	30.260.000	30.260.000	0	30.260.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	112.000.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	100,00	0
-001	-	112.000.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	10.800.000	8.960.000	8.960.000	0	8.960.000	100,00	0
-001	-	10.800.000	8.960.000	8.960.000	0	8.960.000	100,00	0
232.AC	Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	288.430.000	267.370.000	267.360.484	0	267.360.484	99,99	9.516
522141-RM	BELANJA SEWA	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	76.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	76.900.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	181.530.000	38.859.000	38.858.364	0	38.858.364	99,99	636
-001	-	181.530.000	38.859.000	38.858.364	0	38.858.364	99,99	636
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	0	228.511.000	228.502.120	0	228.502.120	99,99	8.880
-001	-	0	228.511.000	228.502.120	0	228.502.120	99,99	8.880
WA.6400	PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000.000	127.275.000	127.105.935	0	127.105.935	99,86	169.065
EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
EBA.962	Layanan Umum	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
968	Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
968.AA	Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian	17.900.000	11.065.000	11.044.479	0	11.044.479	99,81	20.521
521211-RM	BELANJA BAHAN	13.100.000	1.780.000	1.760.000	0	1.760.000	98,87	20.000
-001	-	13.100.000	1.780.000	1.760.000	0	1.760.000	98,87	20.000
522141-RM	BELANJA SEWA	4.800.000	2.065.000	2.064.479	0	2.064.479	99,97	521
-001	-	4.800.000	2.065.000	2.064.479	0	2.064.479	99,97	521
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	7.220.000	7.220.000	0	7.220.000	100,00	0
-001	-	0	7.220.000	7.220.000	0	7.220.000	100,00	0
968.AB	Biaya paket data dan komunikasi	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL -	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	PENANGANAN PANDEMI COVID-19							
	-001 -	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0
EBD	LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL	164.100.000	107.210.000	107.061.456	0	107.061.456	99,86	148.544
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
962	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
962.AA	Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
521211-RM	BELANJA BAHAN	12.300.000	13.254.000	13.216.000	0	13.216.000	99,71	38.000
-001	-	12.300.000	13.254.000	13.216.000	0	13.216.000	99,71	38.000
522191-RM	BELANJA JASA LAINNYA	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	71.008.000	45.108.000	45.101.912	0	45.101.912	99,98	6.088
-001	-	71.008.000	45.108.000	45.101.912	0	45.101.912	99,98	6.088
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
975	Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
975.AA	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
521211-RM	BELANJA BAHAN	11.900.000	10.000.000	9.980.000	0	9.980.000	99,80	20.000
-001	-	11.900.000	10.000.000	9.980.000	0	9.980.000	99,80	20.000
522191-RM	BELANJA JASA LAINNYA	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	2.970.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	2.970.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	9.210.000	9.209.820	0	9.209.820	99,99	180
-001	-	0	9.210.000	9.209.820	0	9.209.820	99,99	180
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	2.852.000	2.850.000	0	2.850.000	99,92	2.000
-001	-	0	2.852.000	2.850.000	0	2.850.000	99,92	2.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	56.154.000	26.786.000	26.703.724	0	26.703.724	99,69	82.276
-001	-	56.154.000	26.786.000	26.703.724	0	26.703.724	99,69	82.276

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√